



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2017**





GUBERNUR SUMATERA BARAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 660 / 42/SP/TL/DLH-2018

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN PRAYITNO**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Adapun isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dimaksud adalah :

1. Pencemaran Air
2. Pengelolaan Sampah
3. Alih Fungsi Lahan
4. Pengelolaan Pertambangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2 April 2018





GUBERNUR SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR



“Alam Takambang Jadi Guru”, pepatah Minangkabau ini, sesungguhnya mengajarkan tentang kearifan dan pentingnya mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Peristiwa alam seperti banjir yang terus menerus melanda suatu daerah merupakan isyarat bahwa keseimbangan alam daerah tersebut sudah terganggu. Menyadari geomorfologi wilayah Sumatera Barat lebih dari 30 (tiga puluh) persen bergunung dan berbukit, berada pada patahan semangka serta pertemuan lempeng Euroasia dan Indo-Australia, maka dalam menetapkan kebijakan dan program, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengelola sumberdaya alamnya dari pada sekedar mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi merusak lingkungan hidup. Berbagai instrumen penataan lingkungan hidup sudah ditetapkan. Terakhir dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) maka penataan lingkungan hidup di Sumatera Barat tidak hanya dilakukan di wilayah daratan tetapi juga di wilayah laut.

Untuk menjamin bahwa jalannya pembangunan sudah berada pada koridor yang benar, maka evaluasi secara berkala perlu dilakukan. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan salah satu instrumen evaluasi, sekaligus sumber data yang disajikan secara menyeluruh, sesuai dengan pedoman dan surat yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 118/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018. Akhir kata saya menghimbau kiranya data dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai komponen masyarakat, organisasi perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta dunia pendidikan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Padang, 2 April 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Profil Sumatera Barat	I-2
	1.2.1. Kondisi Umum	I-2
	1.2.2. Kondisi Ekologis dan Potensi Sumber Daya Alam	I-5
1.3.	Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas	I-8
	1.3.1. Perumusan Isu Prioritas	I-8
	1.3.2. Proses Penyusunan Dokumen	I-9
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-10
1.5.	Ruang Lingkup Penelitian	I-11

BAB II ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1.	Kriteria Isu Prioritas Sumatera Barat	II-1
2.2.	Mekanisme Penjaringan Isu Prioritas	II-2
	2.2.1. Tahap Penjaringan Isu Prioritas Melalui Konsultasi Publik	II-2
	2.2.2. Tahapan Penetapan Isu Prioritas oleh Gubernur Sumatera Barat	II-7
2.3.	Analisis dan Gambaran Isu Prioritas	II-7

BAB III ANALISIS TEKANAN, STATUS DAN UPAYA

PENGELOLAAN (PSR) TERHADAP ISU LINGKUNGAN

3.1.	Tata Guna Lahan	III-3
	3.1.1. Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lahan (<i>Pressure</i>)	III-2

3.1.2.	Kondisi Lahan dan Statusnya (<i>State</i>)	III-2
3.1.2.1.	Kawasan Lindung Menurut RTRW dan Tutupan Lahan	III-2
3.1.2.2.	Penggunaan Lahan Utama	III-5
3.1.2.3.	Kawasan Hutan, Fungsi dan Statusnya	III-5
3.1.2.4.	Kerusakan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan	III-6
3.1.2.5.	Indeks Tutupan Hutan	III-10
3.1.2.6.	Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	III-11
3.1.2.7.	Perubahan Penggunaan Lahan	III-16
3.1.2.8.	Pemanfaatan Lahan	III-18
3.1.2.9.	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Bahan Galian	III-19
3.1.3.	Upaya Pengelolaan Isu Lahan (<i>Response</i>)	III-19
3.1.3.1.	Penghijauan	III-19
3.1.3.2.	Reboisasi	III-20
3.1.3.3.	Penataan Izin Pertambangan	III-21
3.1.3.4.	Penetapan Perda Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	III-22
3.1.3.5.	Pelaksanaan Rencana	III-25
3.1.3.6.	Transplantasi Terumbu Karang	III-26
3.1.3.7.	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Konservasi Laut	III-26
3.1.3.8.	Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	III-28
3.2.	Kualitas Air	III-29
3.2.1.	Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Kualitas Air (<i>Pressure</i>)	III-29
3.2.2.	Kondisi Kualitas Air dan Statusnya (<i>State</i>)	III-35
3.2.2.1.	Kualitas Air Sungai	III-35
3.2.2.2.	Kondisi Air Danau	III-39
3.2.2.3.	Kualitas Air Sumur	III-44



3.2.2.4.	Kualitas Air Laut	III-45
3.2.2.5.	Curah Hujan	III-46
3.2.2.6.	Sumber Air Minum	III-47
3.2.3.	Upaya Pengelolaan Isu Pencemaran Air (<i>Response</i>)	III-48
3.2.3.1.	Response Kualitas Air Sungai	III-48
3.2.3.2.	Response Kualitas Air Danau	III-51
3.2.3.3.	Response Kualitas Air Laut	III-51
3.3.	Kualitas Udara	III-52
3.3.1.	Tekanan Terhadap Kualitas Udara (<i>Pressure</i>)	III-52
3.3.2.	Kondisi Udara dan Statusnya (<i>State</i>)	III-52
3.3.2.1.	Kualitas Udara	III-52
3.3.2.2.	Kualitas Air Hujan	III-55
3.3.2.3.	Suhu	III-55
3.3.3.	Upaya Pengelolaan Kualitas Udara (<i>Response</i>)	III-56
3.4.	Resiko Bencana	III-56
3.4.1.	Tekanan Terhadap Resiko Kebencanaan (<i>Pressure</i>)	III-57
3.4.1.1.	Banjir	III-57
3.4.1.2.	Bencana Kekeringan	III-58
3.4.1.3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	III-58
3.4.1.4.	Gempa Bumi dan Longsor	III-58
3.4.2.	Kondisi Kebencanaan dan Statusnya (<i>State</i>)	III-59
3.4.2.1.	Bencana Banjir, Korban dan Kerugian	III-59
3.4.2.2.	Bencana Kekeringan, Korban dan Kerugian	III-63
3.4.2.3.	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Korban dan Kerugian	III-64
3.4.2.4.	Bencanan Gempa dan Tanah Longsor, Korban dan Kerugian	III-65
3.4.3.	Upaya Pengelolaan Kebencanaan (<i>Response</i>)	III-68
3.5.	Perkotaan	III-71
3.5.1.	Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lingkungan Perkotaan	III-72
3.5.2.	Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Statusnya	III-73

3.5.2.1.	Luas Wilayah dan Kondisi Kependudukan	III-73
3.5.2.2.	Timbulan Sampah	III-76
3.5.3.	Upaya Pengelolaan Terhadap Isu Perkotaan (<i>Response</i>)	III-81
3.5.3.1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan	III-83
3.5.3.2.	Program Inisiasi Masyarakat	III-85
3.6.	Upaya Yang Dilakukan (Response) Untuk Meminimalisasi Isu Prioritas Lingkungan	III-86
3.6.1.	Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-86
3.6.2.	Pengawasan Izin Lingkungan	III-87

BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1.	Inovasi Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air	IV-1
4.1.1.	Pemanfaatan Sumber Daya Air Embung/Telaga Multi Sektor	IV-1
4.1.2.	Program Percontohan Pengelolaan Sungai Secara Terpadu	IV-2
4.1.3.	Pengendalian Pencemaran Air Danau Maninjau dengan program “Save Maninjau”	IV-8
4.1.4.	Perbaikan Sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPERDA)	IV-9
4.2.	Inovasi Pengelolaan Sampah melalui Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB)	IV-10
4.3.	Inovasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan	IV-16
4.3.1.	Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Lahan dan Daya Tampung Lahan Pertanian	IV-16
4.3.2.	Integrasi Tata Ruang Untuk Pengurangan Bencana	IV-16
4.3.3.	Pelayanan Informasi Spasial Kawasan Hutan Berbasis Web-GIS	IV-16
4.3.4.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	IV-16



4.4.	Inovasi Pengendalian Kerusakan Akibat Pertambangan	IV-17
4.4.1.	Program Pemulihan Akses Terbuka	IV-17
4.4.2.	Penertiban Terpadu	IV-18
4.5.	Inovasi Kebencanaan	IV-18
4.6.	Inovasi Daerah Kelembagaan, Penganggaran, Peningkatan SDM	IV-27

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	
BAB II	ISU PRIORITAS	
Tabel 2.1.	Hasil Skoring Isu Prioritas Lingkungan	II-6
BAB III	ANALISIS TEKANAN, STATUS dan UPAYA PENGELOLAAN (PSR) terhadap ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
Tabel 3.1.	Peruntukan Lahan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW	III-6
Tabel 3.2.	Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat	III-9
Tabel 3.3.	Luas dan Kepadatan Tutupan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat	III-13
Tabel 3.4.	Capaian Akses Sanitasi Layak per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	III-31
Tabel 3.5.	Beban Pencemaran Air 38 Objek PROPER Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2017	III-33
Tabel 3.6.	Perbandingan Antar Waktu Indeks Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat	III-35
Tabel 3.7.	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Provinsi Sumatera Barat	III-47
Tabel 3.8.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat	III-80
Tabel 3.9	Penghargaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Tahun 2017	III-84
Tabel 3.10	Dokumen Izin Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	III-87
Tabel 3.10	Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-88



BAB IV INOVASI DAERAH

Tabel 4.1.	Pemenang Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) Tahun 2014–2017	IV-12
------------	---	-------

BAB V PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	
Gambar 1.1.	Peta Wilayah Administrasi Sumatera Barat	I-7
BAB II	ISU PRIORITAS	
Gambar 2.1.	Narasumber/Fasilitator Menyampaikan Pemaparan	II-3
Gambar 2.2.	Fasilitator Menyampaikan Materi Saat Brainstorming Direktur PSLH UNP dan Ketua PSLH Indonesia Memberikan Tanggapan Saat Brainstorming	II-4
Gambar 2.3.	LSM Bumi Andalas Madani dan LSM Yayasan Citra Mandiri Mentawai Memberikan Tanggapan saat <i>Brainstorming</i>	II-4
Gambar 2.4.	Proses Metaplan pada saat Konsultasi Publik	II-5
Gambar 2.5.	Peserta sedang Mengisi Tabel Penilaian Isu Prioritas Lingkungan	II-6
Gambar 2.6.	Pakar/Pengamat Lingkungan OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perwakilan Asosiasi Dunia Usaha Memberi Tanggap terhadap Penetapan Jumlah Isu Prioritas Lingkungan	II-7
BAB III	ANALISIS TEKANAN, STATUS dan UPAYA PENGELOLAAN (PSR) terhadap ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
Gambar 3.1.	Pola Ruang Wilayah Darat Provinsi Sumatera Barat 2009 - 2029	III-3
Gambar 3.2.	Peta Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Barat	III-4
Gambar 3.3.	Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama di Provinsi Sumatera Barat 2017	III-5
Gambar 3.4.	Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di	III-7



	Provinsi Sumatera Barat	
Gambar 3.5.	Distribusi dan Luas Lahan Kritis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	III-8
Gambar 3.6.	Indeks Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 s/d 2017	III-11
Gambar 3.7.	Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat	III-14
Gambar 3.8.	Perbandingan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat	III-14
Gambar 3.9.	Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat	III-15
Gambar 3.10.	Luas Tutupan dan Kondisi terumbu Karang Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat	III-16
Gambar 3.11.	Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	III-17
Gambar 3.12.	Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat	III-18
Gambar 3.13.	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Provinsi Sumatera Barat	III-19
Gambar 3.14.	Target dan Realisasi Penghijauan di Kabupaten / Kota se – Sumatera Barat Tahun 2017	III-20
Gambar 3.15.	Target dan Realisasi Reboisasi di Kabupaten / Kota se – Sumatera Barat Tahun 2017	III-21
Gambar 3.16.	Luas HPHN / IUPKm Kabupaten / Kota di Sumatera Barat sampai tahun 2017	III-24
Gambar 3.17.	Penanaman Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2017	III-25
Gambar 3.18.	Trend Perkembangan Saranan Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat 2015 – 2017	III-34
Gambar 3.19.	Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Provinsi Tahun 2014 - 2017	III-36
Gambar 3.20.	Perbandingan antar waktu IKA Provinsi Sumatera Barat dan Perbandingan dengan IKA Nasional	III-38

Gambar 3.21.	Perbandingan Antar Waktu dan Antar Lokasi Parameter Amoniak Di Perairan Danau Maninjau	III-40
Gambar 3.22.	Perbandingan Antar Waktu Dan Antar Lokasi Parameter Sulfida Di Perairan Danau Maninjau	III-41
Gambar 3.23.	Perbandingan Antar Waktu Dan Antar Lokasi Parameter Total Coliform Di Perairan Danau Maninjau	III-41
Gambar 3.24.	Perbandingan antar waktu dan antar lokasi Parameter Amoniak di Perairan Danau Singkarak	III-42
Gambar 3.25.	Perbandingan antar waktu dan antar lokasi Parameter Sulfida di Perairan danau Singkarak	III-43
Gambar 3.26.	Perbandingan antar waktu dan antar lokasi Parameter Total Coliform di Perairan Danau Singkarak	III-43
Gambar 3.27.	Penertiban PETI Oleh Tim Penegak Perda di Kabupaten Sijunjung	III-50
Gambar 3.28.	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Kualitas Udara Rata – rata Provinsi Sumatera Barat	III-53
Gambar 3.29.	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten / Kota Sumatera Barat 4 (empat) Tahun Terakhir	III-54
Gambar 3.30.	Perbandingan dengan Indeks Kualitas Udara Nasional	III-55
Gambar 3.31.	Total Daerah Terendam Kabupaten / Kota Tahun 2017	III-61
Gambar 3.32.	Rumah Penduduk Yang Terkena Dampak Banjir Bandang	III-62
Gambar 3.33.	Perbandingan Luas Areal Terendam Banjir	III-63
Gambar 3.34.	Diagram Tingkat Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat	III-66
Gambar 3.35.	Perbandingan Kawasan Rawan Letusan Gunung Api	III-67
Gambar 3.36.	Peta Kawasan Rawan Gempa Sumatera Barat	III-67
Gambar 3.37.	Luas dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	III-74
Gambar 3.38.	Trend Peningkatan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat	III-75



Gambar 3.39.	Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	III-76
Gambar 3.40.	Perkiraan Jumlah Timbulan Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	III-77
Gambar 3.41.	Persentase Timbulan Sampah Menurut Sumber	III-78
Gambar 3.42.	Perkiraan Timbulan Sampah yang masuk ke TPA	III-79
Gambar 3.43.	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	III-80
Gambar 3.44.	Aktivitas Pada Saat Transaksi di Bank Sampah	III-81
Gambar 3.45.	Penyerahan Buku Tabungan Emas Kepada Nasabah	III-83
Gambar 3.46.	Penghargaan nasional yang diraih Provinsi Sumatera Barat	III-85
Gambar 3.47.	Jumlah Sampah Terolah Harian	III-86
Gambar 3.48	Pengawasan Izin Lingkungan	III-90

BAB IV INOVASI DAERAH

Gambar 4.1.	Sungai Batang Agam Segmen Kota Payakumbuh	IV-3
Gambar 4.2.	Peta Aliran Sungai Batang Agam	IV-3
Gambar 4.3.	Grafik Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Batang Agam Menurut Periode Waktu (Tahun 2011–2017)	IV-4
Gambar 4.4.	Gotong Royong Bersama yang Diikuti oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Bukittinggi, OPD Provinsi, OPD Kota dan Masyarakat Sekitar Sungai Batang Agam Segmen Kota Bukittinggi	IV-5
Gambar 4.5.	Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi, Penataan dan Pemulihan Sempadan Sungai Batang Agam	IV-5
Gambar 4.6.	Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Sumatera Barat dengan Bupati Agam, Walikota Bukittinggi, Bupati Lima Puluh Kota dan Walikota Payakumbuh	IV-6
Gambar 4.7.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	IV-7

	Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh	
Gambar 4.8.	a) Kondisi Permukiman di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya; b) Permukiman Masyarakat dengan Tempat Sampah Terpilah; c) Penyerahan Penghargaan Kecamatan Bersih dan Hijau Tahun 2017; d) Penyerahan Penghargaan Kelurahan Bersih dan Hijau Tahun 2017	IV-13
Gambar 4.9.	a) Pemanfaatan Solar Biodigester di Permukiman Masyarakat; b) Kondisi Lingkungan di Kelurahan ATTS Bukittinggi; c) Bank Sampah Induk Mutiara Indah; d) Buku Tabungan Emas dari Sampah Kerjasama dengan Pegadaian	IV-15
Gambar 4.10.	Skema Jaringan Komunikasi Radio dengan Menggunakan Repeater dan Repeater Link	IV-23
Gambar 4.11.	Pemandangan ke Lokasi CCTV Pengamatan Air Batang Kuranji, Kompleks Perguruan Adzkie, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Padang, Koordinat: $00^{\circ} 55,257'$ LS dan $100^{\circ} 23.623'$ BT	IV-24
Gambar 4.12.	Seismogram dan Insintimeter	IV-25
Gambar 4.13.	Pemandangan dari Lokasi CCTV Pantai, Lantai Enaqm Hotel Pangeran Beach, Padang (Koordinat Posisi $00^{\circ} 55,434'$ LS dan $100^{\circ} 21,003'$ BT), Jalan Ir. H. Juanda 79, Padang Utara, Padang	IV-26
Gambar 4.14.	Kamera CCTV Pemantauan Gunung Marapi, Jorong Cangkiang, Nagari BatuTaba, Kecamatan Empat Angkat Candung, di Rumah Masyarakat Atas Nama Indarmawan, Koordinat Lokasi $0,314275$ LS dan	IV-27



100,4184. Kamera yang Dipasang di Lokasi Bertipe Network (IP) Camera, Panasonic BB-HCM581CE, 42x Zoom (21× Optical & 2× Digital) Kamera Menghadap ke Tenggara

- Gambar 4.15. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 IV-29
- Gambar 4.16. Perbandingan APBD Provinsi Sumatera Barat dengan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan Tahun 2017 IV-30
- Gambar 4.17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 Sebagai Juara III Kategori Organisasi Perangkat Daerah IV-31

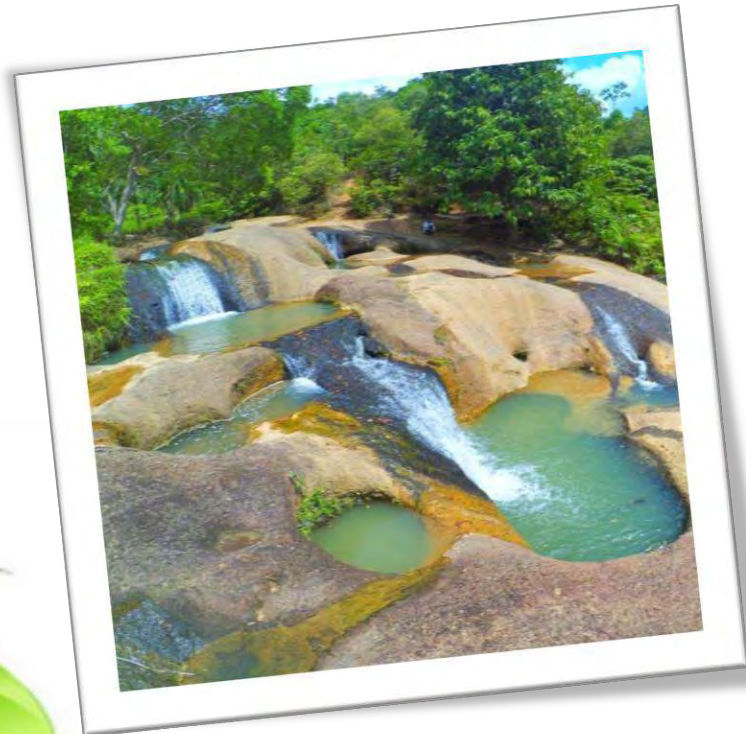
BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran I	Lampiran Tabel Data
Lampiran II	Kelengkapan

BAB I

PENDAHULUAN



*Air Terjun Talian Puti
Kabupaten Padang Pariaman
Sumatera Barat*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan modal dasar dalam pembangunan. Pemanfaatannya perlu dilakukan secara arif untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun pembangunan sudah diupayakan oleh Pemerintah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, berbagai persoalan lingkungan dirasakan masih belum tuntas teratasi. Hal ini menunjukkan terdapat “sesuatu” yang kurang tepat atau kurang harmonis dalam implementasinya sehingga banjir, longsor dan pencemaran air serta udara kerap terjadi di beberapa daerah.

Berbagai pendekatan terus digali oleh pakar lingkungan untuk mencari akar masalah dan solusinya. Salah satu instrumen penataan yang dianggap sangat mendasar adalah pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Daerah. Dengan instrumen ini maka dapat diketahui

sejauhmana kapasitas lingkungan hidup yang ada saat ini masih mampu mendukung kehidupan yang layak sekaligus melakukan “self purification”. Untuk itu pengkajian DDDTLH Daerah yang diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 telah melakukan pengkaji DDDTLH. Hasil kajian ini sudah dimanfaatkan, baik dalam penyusunan kebijakan/Rencana/Program maupun dalam memutuskan kelayakan lingkungan tingkat proyek /kegiatan (AMDAL). Pada Tahun 2017, terdapat 5 (lima) kabupaten dan kota yang memproses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesemuanya dilakukan melalui mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan

mempertimbangkan kajian DDDTLH daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Sumatera Barat, juga sudah mempertimbangkan DDDTLH wilayah daratannya sehingga didapat korelasi antara tekanan daerah hulu dengan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil.

Peningkatan penataan dan kualitas perencanaan yang lebih baik, harus diiringi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen lingkungan hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun tidak hanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang terbuka dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga dalam rangka melengkapi fungsi pengawasan dan evaluasi. Informasi yang disajikan merupakan hasil analisis dari data dan isu lingkungan hidup dengan korelasi yang mudah

dipahami antara Tekanan (*Pressure*) Status (*State*) dan Upaya (*Respons*) atau S-P-R. Informasi ini diharapkan kedepannya lebih dioptimalkan sebagai *feedback* dalam pengambilan kebijakan pembangunan Sumatera Barat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

1.2. Profil Sumatera Barat

1.2.1. Kondisi Umum

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang terletak di pesisir barat bagian tengah dengan luas wilayah sekitar 42.229,73 km² (setara dengan 2,21% luas wilayah Republik Indonesia). Secara astronomis, provinsi yang beribukota di Padang terletak antara 0°54' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan dan antara 98°36'–101°53' Bujur Timur, serta dilalui oleh garis khatulistiwa. Sementara secara posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung di sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau, di sebelah barat dan selatan dengan Samudera Hindia dan disebelah timur dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu (seperti gambar 1.1).

Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur pemerintahan yang

dimulai dari Gubernur hingga desa. Terdapat perbedaan nomenklatur desa di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu penyebutan desa dengan nagari. Nagari merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai akhir Tahun 2017, Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota (12 kabupaten dan 7 kota), 179 kecamatan, 802 nagari, 230 kelurahan dan 126 desa. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6.010 km² atau sekitar 14,21% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan luas wilayah terkecil dimiliki Kota Padang Panjang, yakni 23 km² atau sekitar 0,05% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Penduduk Sumatera Barat pada akhir Tahun 2017 berjumlah 5.321.489 jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya, telah terjadi penambahan penduduk sekitar 61.961 jiwa

atau 1,16 persen. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Sumatera Barat Tahun 2017 rata-rata 125 jiwa per km². Kota Bukittinggi menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 5.023 jiwa per km², sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu hanya sekitar 14 orang per km².

Perairan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Provinsi Sumatera Barat memiliki luas 186.500 km² dengan panjang garis pantai 1.973,25 km dan memiliki 185 gugusan pulau dengan jumlah pulau terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebanyak 98 pulau, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai pulau paling sedikit yakni hanya 1 (satu) pulau. Tujuh kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota pesisir mempunyai wilayah daratan seluas 20.023,48 km² atau sekitar 47,34% dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk klasifikasi lereng, wilayah Provinsi Sumatera Barat hampir separuhnya (sekitar 44%) didominasi oleh lahan agak curam

sampai dengan curam. Sekitar 10% diketahui merupakan wilayah dengan kemiringan sangat curam. Topografi wilayah di Sumatera Barat cukup bervariasi mulai dari dataran rendah (topografi datar) berupa pantai sampai dataran tinggi (topografi bergelombang), yang terdiri dari perbukitan sampai pegunungan (jajaran pegunungan Bukit Barisan), perairan darat yang terdiri dari sungai besar dan kecil serta kawasan laut mulai laut dangkal sampai laut dalam.

Ketinggian permukaan wilayah daratan (di atas permukaan laut) beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat juga bervariasi. Sejumlah kabupaten/kota memiliki ibukota yang berada di dataran tinggi, seperti Kabupaten Solok (1.006 mdpl), Kota Bukittinggi (927 mdpl), dan Padang Panjang (780 mdpl), sementara beberapa kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Pariaman sebagian wilayahnya berada di dataran rendah (2–5 mdpl).

Secara umum, Sumatera Barat memiliki iklim tropis basah dengan suhu udara selama tahun 2017 berkisar antara 21,40–27,70°C. Adanya variasi suhu di beberapa wilayah di Sumatera Barat terkadang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya wilayah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu pada daerah pantai (dari stasiun Stasiun Maritim Teluk Bayur) misalnya, dapat mencapai 27,70°C, sementara suhu di daerah pegunungan (Stasiun GAW Bukit Kototabang, Palupuh) hanya mencapai 21,40°C.

Kelembaban udara rata-rata di Sumatera Barat berkisar antara 78,6 – 86,4%, sementara untuk tekanan udara rata-rata berkisar antara 974,6 – 976,0 mb dengan kecepatan angin berkisar 2,2 – 3,0 knot. Pada tahun 2017, curah hujan tertinggi di Sumatera Barat tercatat terjadi di bulan November, yakni mencapai 954 mm (hasil pengukuran Stasiun Maritim Teluk Bayur), sedangkan curah hujan paling sedikit terjadi di bulan Oktober, yakni 21 mm (hasil pengukuran Stasiun Balitbu Aripun Sumani).

1.2.2. Kondisi Ekologis dan Kekhasan Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun ada beberapa kekhasan dari provinsi ini menyebabkan agak berbeda dengan provinsi lain. Diantaranya kekhasan itu adalah Sumatera Barat memiliki sumber daya air yang sangat banyak dan merupakan hulu sungai dari provinsi. Kekhasan lain adalah kawasan hutannya dengan kelimpahan keanekaragaman hayati yang tinggi dan tidak hanya terpantau dari ekosistem hutan tetapi ekosistem pesisir dan laut. Disamping itu geomorfologi yang khas berada pada patahan semangka dan pertemuan 2 (dua) lempeng dunia menyebabkan Provinsi Sumatera Barat khas sebagai daerah yang rawan terhadap bencana alam tektonik.

Terkait sumber daya air, potensi beberapa sungai besar yang berhulu di wilayah Sumatera Barat, seperti Sungai Siak, Sungai Inderagiri (dinamai Batang Kuantan di bagian hulunya), Sungai Kampar, dan Sungai Batanghari. Jika ditotalkan, maka sungai yang

mengalir di wilayah Sumatera Barat berjumlah 7.871 sungai, sedangkan sungai yang cukup besar berjumlah 606, dimana 27 diantaranya merupakan sungai lintas provinsi dan 84 sungai merupakan sungai lintas kabupaten/kota.

Selain keberadaan sungai sebagai salah satu sumber daya air, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki setidaknya 238 danau/embung dan telaga. Beberapa danau yang besar dan terkenal diantaranya adalah Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar seluas 130,11 km², merupakan danau terbesar di Sumatera Barat dan terbesar kedua di Sumatera, Danau Maninjau di Kabupaten Agam seluas 99,5 km², Danau Diatas seluas 31,5 km², dan Danau Dibawah seluas 14,0 km², yang keduanya terletak di Kabupaten Solok. Selain itu terdapat Danau Talang di Kabupaten Solok dan Danau Buatan Koto Panjang di Perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

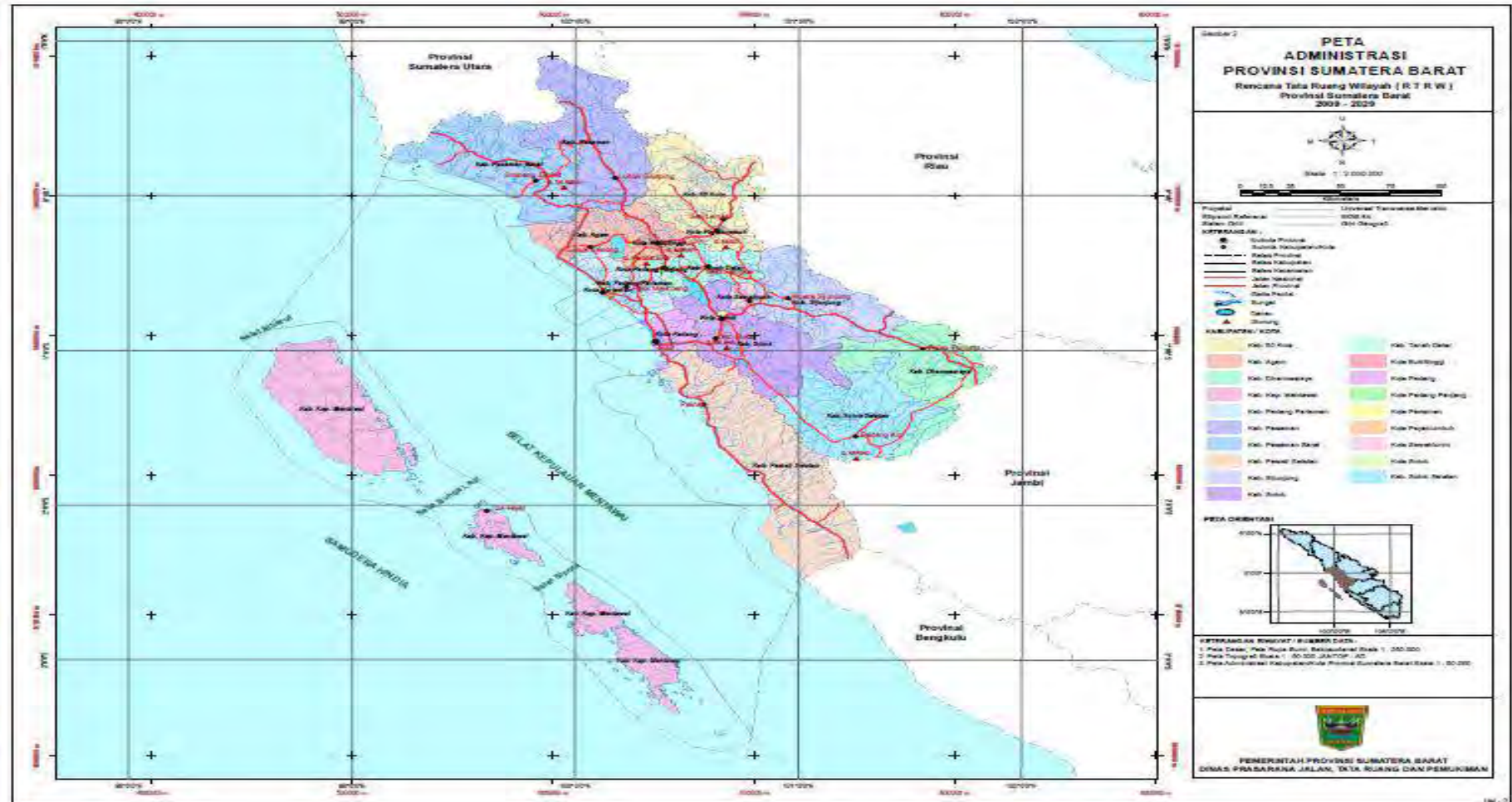
Potensi sumber daya alam yang cukup besar terindikasi pula dari keberadaan hutan. Kawasan hutan di Sumatera Barat secara

umum terbagi atas kawasan lindung (hutan lindung dan hutan konservasi/suaka alam/taman nasional) seluas 1.561.445,65 Ha dan hutan produksi (terbatas, tetap, dan/atau dapat dikonversi) seluas 781.447,57 Ha. Luasan kawasan hutan tersebut tentunya menyimpan keanekaragaman hayati yang berlimpah, meliputi berbagai jenis flora dan fauna dengan jenis yang dilindungi 38 jenis.

Kondisi tanah di wilayah Sumatera Barat cukup bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh bentuk wilayah, batuan induk, dan iklim. Umumnya, tanah di sebagian besar wilayah ini tergolong subur karena merupakan tanah pegunungan (terbentuk di sekitar gunung berapi yang masih aktif) sehingga mengandung mineral yang tinggi. Terdapat 29 gunung yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Beberapa yang cukup terkenal dan memiliki ketinggian di atas 2.400 mdpl yaitu Gunung Talamau (2.913 mdpl) berada di Kabupaten Pasaman, Gunung Marapi (2.891 mdpl) di Kabupaten Agam, Gunung Singgalang (2.877 mdpl) di Kabupaten Agam, Gunung Talang (2.572 mdpl) di Kabupaten Solok,

dan Gunung Tandikat (2.438 mdpl) di Kabupaten Padang Pariaman. Terdapat pula Gunung Kerinci di perbatasan wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera (3.805 mdpl).

Tanah di wilayah ini memang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, namun di sisi lain strukturnya tidak stabil (pada beberapa wilayah kabupaten/kota) sehingga mudah mengalami pergerakan dan longsor. Selain itu, Sumatera Barat juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana gempa dan tsunami. Posisi wilayah Sumatera Barat yang berada di dua jalur gempa bumi (patahan Semangka dan pertemuan dua lempeng benua besar, yakni Euroasia dan Indo-Australia) memberikan kontribusi besar terhadap tingkat kerawanan kedua bencana alam tersebut.



Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat

1.3. Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas

1.3.1. Perumusan Isu Prioritas

Proses perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dilakukan melalui rangkaian kegiatan, meliputi:

1. Melakukan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait Provinsi Sumatera Barat, instansi lingkungan hidup se-Sumatera Barat, pakar dan pengamat lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), serta asosiasi industri dalam rangka konsultasi publik untuk penjarangan isu.
2. Pertemuan di tingkat internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjarang masukan didasari dari hasil pemantauan terhadap media lingkungan, pengawasan dan pembinaan ke sumber pencemar, serta pembinaan ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dilakukan pada tahun 2017.

3. Penetapan isu prioritas melalui Surat Pernyataan Gubernur.

Metode dan tahapan yang dilakukan dalam merumuskan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 pada saat konsultasi publik (penjarangan isu) adalah:

1. *Brainstorming* untuk menjarang isu lingkungan hidup dari peserta konsultasi publik. Pada saat *brainstorming* ini juga dikemukakan isu yang tergambar dari pertemuan internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta beberapa masukan dari OPD Provinsi;
2. Proses *metaplan* untuk merucutkan isu menjadi isu utama; dan
3. Mekanisme skoring terhadap isu utama dari kriteria penetapan isu prioritas, sehingga didapatkan urutan isu prioritas.

Konsultasi publik dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan dipandu oleh seorang fasilitator yang didampingi oleh seorang tenaga teknis yang bertugas menghitung skor isu prioritas.

1.3.2. Proses Penyusunan

Dokumen

Penyusunan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660 -270 - 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Keanggotaan Tim meliputi personil internal Dinas Lingkungan Hidup, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, LSM dan para pakar/akademisi. Selain itu *key person* DIKPLHD kab/kota sebagai anggota tim DIKPLHD Provinsi.

Penyusunan DIKPLH dimulai dari pengumpulan data, penulisan hingga perumusan kebijakan dilakukan secara terstruktur dan terjadwal. Secara ringkas proses penyusunan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan awal

- Penyamaan Presepsi dan bimbingan teknis bagi anggota Tim

- Pembagian tugas dan tanggung jawab. Anggota Tim terbagi antara Tim Data, Tim Penulis dan Tim Editor.

2. Pengumpulan data dan pengolahan data

Pengumpulan data dan pengolahan data melalui tahapan :

- Data dikumpulkan dari stakeholder baik instansi vertikal di daerah, OPD provinsi maupun kabupaten/kota serta hasil kajian dan penelitian
- Kompilasi data sesuai Pedoman penyusunan DIKPLHD oleh Tim Internal Dinas Lingkungan Hidup
- Pengolahan Data dan Penambahan Data Tambahan diserahkan kepada anggota Tim Penulis dibantu Tim Data
- Analisis data dilakukan terhadap isu dengan metode P-S-R

3. Penyusunan dan penulisan substansi *draft* DIKPLHD.

Draf disusun oleh masing-masing anggota Tim, namun finalisasi dilakukan melalui kegiatan *konsinyering* (penggarapan secara intensif) meliputi Kepala Seksi

dan staf serta tim ahli yang ditugasi untuk menulis

4. Perumusan Kebijakan dan Program Inovasi

Program Pembangunan bidang lingkungan hidup ini tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, melainkan juga dilaksanakan oleh OPD lainnya. Terdapat 7 (tujuh) OPD yang berkaitan langsung dalam melaksanakan Agenda Ke-10 dari Pembangunan Daerah yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Kebencanaan. OPD tersebut meliputi Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman, Perumahan Rakyat dan Pertanahan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu dalam merumusan kebijakan lingkungan hidup dilakukan secara ‘duduk’ untuk mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi dalam mengatasi isu lingkungan hidup

daerah. Disamping itu, Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sumatera Barat mewajibkan setiap OPD untuk mengidentifikasi dan menyusun program inovasi termasuk bidang lingkungan hidup.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 bermaksud memberikan gambaran potret pengelolaan lingkungan hidup Sumatera Barat. Adapun tujuan dari penyusunannya adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan akan keterbukaan informasi publik terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat
2. Sebagai upaya pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Sumatera Barat.
3. Mendorong partisipasi aktif *stakeholder* dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 mengacu kepada petunjuk teknis dari penyusunan DIKPLHD yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun terdapat batasan dan penekanan yang ditetapkan lebih lanjut dalam ruang lingkup penulisan DIKPLHD Sumatera Barat agar informasi dapat disajikan secara singkat, padat namun substansial. Berikut ini ruang lingkup penulisan dimaksud :

1. Lingkup Lokasi

Data disajikan dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat namun dalam analisis dilakukan penekanan terhadap kab/kota yang menunjukkan kualitas lingkungan hidup terbaik atau terburuk.

2. Lingkup Waktu

Data yang disajikan semaksimal mungkin adalah data 2017. Namun dalam analisis dilakukan untuk data 3 (tiga) tahun terakhir agar kecendrungan perubahan kualitas lingkungan dapat tergambarkan.

3. Lingkup Parameter

Parameter yang disajikan dalam tabel data adalah parameter lengkap, namun dalam penulisan penekanan dilakukan pada parameter kunci dan parameter yang menunjukkan perubahan yang signifikan.

4. Lingkup Analisis

Analisis dilakukan dengan metode P-S-R tetapi pada komponen air ditambahkan dengan menganalisis *driving force* karena banyak faktor penyebab meningkatnya tekanan pencemaran sehingga perlu dikaji faktor pendorong utamanya.

5. Lingkup Bab

Subtansi Bab sesuai dengan petunjuk penyusunan DIKPLHD yaitu : Bab I. Pendahuluan, Bab II. Isu Prioritas, Bab III. Analisis Tekanan, Status dan Upaya Pengelolaan Terhadap Isu Prioritas, Bab IV. Inovasi Daerah dan Bab V. Penutup. Pada Bab Inovasi terdapat bahasan khusus inovasi terkait langsung dengan isu prioritas.

BAB II

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH





BAB II

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Terdapat 2 (dua) metode yang bisa digunakan untuk menetapkan isu prioritas yaitu pertama, isu ditetapkan berdasarkan pembacaan dari data kuantitatif yang tersedia. Kedua, isu ditetapkan berdasarkan konsultasi publik. Kedua-duanya mempunyai titik lemah. Metode pertama bisa saja isu prioritas tidak terangkat karena datanya tidak tersedia tetapi nyata dirasakan masyarakat. Sebaliknya metode kedua mempunyai titik lemah bahwa bisa saja isu prioritas yang diangkat adalah isu sesaat, muncul pada saat konsultasi publik karena adanya satu kasus yang sedang hangat diangkat media massa pada lokasi tertentu dan setelah dilakukan evaluasi dari data yang ada, menunjukkan bahwa kualitas lingkungannya masih baik.

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 mengombinasikan kedua metode tersebut yaitu konsultasi publik dan pembacaan data. Berikut ini

mekanisme penetapan isu prioritas dan gambaran isu prioritas itu sendiri

2.1. Kriteria Isu Prioritas Sumatera Barat

Kriteria isu perlu disepakati oleh peserta konsultasi publik agar biasanya tidak terlalu jauh. Berikut ini kriteria suatu isu dapat dianggap sebagai isu prioritas Provinsi Sumatera Barat, meliputi :

1. Isu bersifat lokal.

Isu nasional tetap menjadi referensi dalam penetapan isu prioritas daerah. Terdapat 2 (dua) isu nasional untuk Pulau Sumatera yaitu Isu Ketersediaan Pangan dan Pencemaran Air (RPPLH Nasional, 2016). Dalam kaitannya dengan isu lokal, maka isu nasional dicermati dalam konteks kondisi dan kekhasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sumberdaya air yang besar dan merupakan hulu beberapa sungai lintas



2. Isu ditemui di sebagian besar kabupaten/kota. Ditetapkan minimal 50 % daerah kabupaten /kota mengalami permasalahan lingkungan yang serupa.
3. Isu dapat saja berlaku pada daerah tertentu tetapi dampaknya dirasakan oleh beberapa daerah lainnya.
4. Adanya kecenderungan bahwa “isu” dampaknya semakin buruk.
5. Mendapat perhatian publik secara luas dan perlu penanganan segera.

2.2. Mekanisme Penjaringan Isu Prioritas

Proses dan mekanisme penetapan isu prioritas menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Tahap Penjaringan Isu Prioritas Melalui Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di Wilayah Sumatera Barat. Peserta pertemuan berasal dari OPD terkait Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Bappeda, BPBD, Dinas

Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota se Sumatera Barat, pakar/ pengamat lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Hidup (UNAND, UNP, Univ. Bung Hatta dan Univ. Muhammadiyah), Lembaga Sosial Masyarakat (WALHI, QBAR, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Andalas Bumi Lestari dan WARSI) dan Asosiasi Industri (Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/ GAPKI, Gabungan Asosiasi Pengusaha Karet Indonesia/ GAPKINDO serta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia/PERHAPI). Disamping itu, dari Kabupaten/Kota dihadiri oleh instansi lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Fasilitator yang ditunjuk dalam konsultasi publik ini adalah Dr. Ardinis Arba'in yang merupakan pakar/ahli lingkungan yang berasal dari Universitas Andalas. Sedangkan

tenaga teknis yang mendampingi adalah Veronika Sriwulantari, ST, MSi (PSLH UNAND).

Tahapan proses penjaringan isu prioritas yang dilaksanakan selama konsultasi publik berlangsung adalah

1. Pemaparan oleh fasilitator

Pemaparan yang disampaikan oleh fasilitator bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta konsultasi publik terkait dengan kondisi lingkungan di Sumatera Barat pada tahun 2017.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

Gambar 2.1. Narasumber/Fasilitator Menyampaikan Pemaparan

2. *Brainstorming* untuk menjaring isu lingkungan hidup dari peserta konsultasi publik.

Peserta dari penjaringan isu menyampaikan pandangan terkait dengan kondisi lingkungan di Provinsi Sumatera Barat baik kualitas air, kualitas udara, alih

fungsi lahan, pengelolaan pertambangan, pengelolaan wilayah pesisir, persampahan.

Fasilitator memberikan umpan dan pandangan kepada peserta dengan menggambarkan kondisi Sumatera Barat berasal dari data DIKPLHD tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

Gambar 2.2. Fasilitator Menyampaikan Materi Saat *Brainstorming* Direktur PSLH UNP/Ketua PSLH Indonesia Memberikan Tanggapan Saat *Brainstorming*



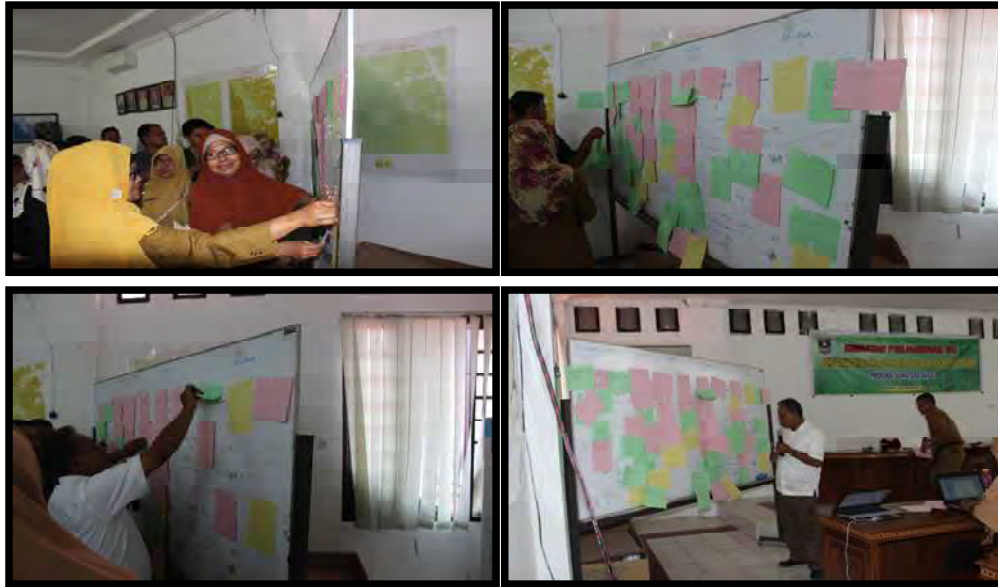
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

Gambar 2.3. LSM Bumi Andalas Madani dan LSM Yayasan Citra Mandiri Mentawai Memberikan Tanggapan Saat *Brainstorming*

3. Proses *Metaplan*

Pada proses ini peserta diminta untuk menuliskan 1 (satu) isu lingkungan hidup di kartu berwarna warni (kartu *metaplan*). Kartu tersebut lalu dikumpulkan dan ditempelkan di *white board*. Setelah itu, isu lingkungan dikelompokkan sesuai dengan kriterianya. Berdasarkan hasil

pengelompokan tersebut, diperoleh 8 (delapan) isu utama, yaitu pencemaran air, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan, pengelolaan pertambangan, pengelolaan hutan, kebencanaan, pengelolaan wilayah pesisir dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

Gambar 2.4. Proses *Metaplan* Pada Saat Konsultasi Publik

4. Mekanisme skoring

Skoring dilakukan terhadap (delapan) isu utama hasil dari proses *metaplan*. Tujuan dari proses skoring ini adalah untuk memperoleh urutan isu prioritas. Terdapat 3 (tiga) kriteria yang digunakan dalam penetapan urutan isu prioritas, yaitu :

- 1) kerusakan sumber daya alam dan kerusakan keanekaragaman hayati.
- 2) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup.

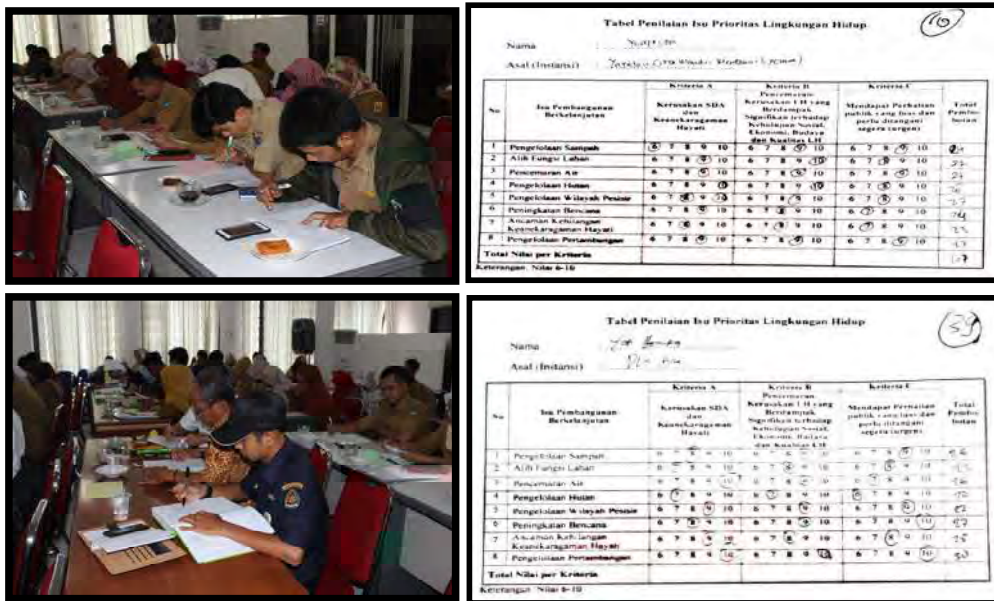
- 3) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Berdasarkan hasil skoring yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi tertinggi dari urutan isu prioritas lingkungan hidup di Sumatera Barat adalah isu pencemaran air, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan, pengelolaan pertambangan, pengelolaan hutan, kebencanaan, pengelolaan wilayah pesisir dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati secara jelas dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1. berikut

Tabel 2.1. Hasil Skoring Isu Prioritas Lingkungan

Peringkat	Isu Prioritas	Total Skoring
1	Pencemaran Air	1051
2	Pengelolaan Sampah	1033
3	Alih Fungsi Lahan	1028
4	Pengelolaan Pertambangan	1028
5	Pengelolaan Hutan	990
6	Kebencanaan	989
7	Pengelolaan Wilayah Pesisir	959
8	Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati	958

Sumber : Hasil proses konsultasi publik dalam penjaringan isu prioritas yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 20 Maret 2018



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

Gambar 2.5. Peserta Sedang Mengisi Tabel Penilaian Isu Prioritas Lingkungan

5. *Penetapan jumlah isu prioritas.*
 Jumlah isu prioritas ditentukan melalui pelaksanaan diskusi dengan fasilitator dan internal Dinas Lingkungan Hidup. Dari diskusi disepakati bahwa jumlah

isu prioritas lingkungan hidup di Sumatera Barat adalah 4 (empat) isu, yaitu **Pencemaran Air, Pengelolaan Sampah, Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Pertambangan.**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2018

Gambar 2.6.
Pakar/Pengamat Lingkungan, OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Perwakilan Asosiasi Dunia Usaha Memberi Tanggapan Terhadap Penetapan Jumlah Isu Prioritas Lingkungan

2.2.2. Tahapan Penetapan Isu Prioritas oleh Gubernur Sumatera Barat

Tahap akhir dari penetapan isu lingkungan hidup adalah penandatanganan 4 (empat) Isu Prioritas Lingkungan Hidup Sumatera Barat melalui Surat Pernyataan oleh Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/42/SP/TL/DLH/2018 tanggal 2 April 2018 yang menyatakan :

1. bahwa isu prioritas telah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat dan melalui pendekatan partisipatif .

2. Pemberkasan administrasi terkait dengan konsultasi publik seperti undangan, absensi, notulen, dll sebagaimana termuat dalam lampiran.

2.3. Analisis dan Gambaran Isu Prioritas

Peserta konsultasi publik memiliki alasan yang kuat dalam menetapkan isu prioritas. Berikut ini alasan dari pemilihan isu dan gambaran isu prioritas dari analisis status dan tekanannya:

1. Pencemaran Air

Isu ini diangkat karena penurunan kualitas air sungai yang tadinya hanya diperkotaan sekarang

sudah dirasakan di perdesaan. Beberapa danau juga mengalami penurunan kualitas airnya, disamping beberapa permasalahan danau belum tuntas ditangani seperti danau maninjau dan danau singkarak. Tekanan terbesar berasal dari limbah domestik baik limbah cair maupun limbah padat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di 70,6% titik sampling telah melebihi baku mutu. Disamping itu hasil analisis laboratorium juga menunjukkan bahwa parameter sulfida, COD, BOD, TSS, fosfat, dan Nitrit juga sudah menunjukkan kondisi yang melebihi baku mutu di beberapa sungai yang daerah tangkapan airnya merupakan areal pertanian ataupun perkebunan yang cukup luas dan pemakaian pupuk anorganik di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 169.636,9 ton/tahun yang terdiri atas 63.759,9 ton urea, 12.212,0 ton ZA, 31.383,0 ton SP 36, dan 62.282,0 ton NPK.

Secara keseluruhan indeks pencemaran air Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 75,69, kondisi ini lebih baik dari pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,40 dan tahun

2015 sebesar 66,83. Jika dibandingkan dengan IKA di tingkat nasional, kualitas air Provinsi Sumatera Barat juga lebih tinggi dimana IKA nasional Tahun 2017 adalah sebesar 53,2

2. Pengelolaan Persampahan

Isu persampahan diangkat dengan dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun dan dirasakan oleh hampir seluruh kabupaten/kota. Peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pula pada tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan memiliki kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tinggi pula sehingga akan berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 2.452.213 kg/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman adalah sampah rumah



tangga yaitu sampah organik. Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi yakni masing-masing sebesar 494.426 kg/hari dan 183.000 kg/hari.

3. Alih fungsi lahan

Pertumbuhan penduduk memberikan tekanan terhadap perubahan lahan produktif, daerah rawa menjadi perumahan sehingga berdampak pada kemampuan lahan menyerap air. Munculnya isu alih fungsi lahan lebih disebabkan bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian

Lahan pertambangan merupakan bentuk alih fungsi lahan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011 dengan luas penambahan sebesar 45.487,2 Ha, kondisi ini naik 13.762% dari sebelumnya hanya seluas 289,98 Ha. Penggunaan lahan lainnya yang ikut meningkat adalah untuk industri dengan penambahan 14.682 Ha atau naik sebesar 2.981% dari kondisi sebelumnya seluas 492,5 Ha. Penggunaan lahan lainnya yang juga mengalami penambahan adalah lahan perkebunan dengan total

penambahan seluas 605.416 Ha atau meningkat 141% dari kondisi sebelumnya seluas 426.935,93 Ha. Selain terjadi penambahan ada juga lahan yang mengalami pengurangan yang sangat signifikan yaitu lahan sawah sebesar 183.185 Ha atau sebesar 43% yang sebelumnya 423.035,86 Ha serta lahan perikanan terjadi penurunan sebesar 3.091 Ha atau sebesar 47% dari luas sebelumnya 6.542,24 Ha

4. Pengelolaan Pertambangan

Beberapa kasus penerbitan izin usaha pertambangan akhir-akhir diangkat di media massa dan menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat. Walaupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat selektif dalam penerbitan izin pertambangan namun kondisi masyarakat yang sangat kritis menyebabkan penerbitan izin seringkali diiringi dengan aksi massa penolakan. Sebagai gambaran penerbitan izin logam dan batubara hanya merupakan perpanjangan izin sebanyak 3 (tiga) izin, selebihnya izin yang diterbitkan untuk usaha pertambangan bantuan yang diperlukan untuk kebutuhan pembangunan.

Permasalahan pertambangan justru ditemui pada lokasi lahan



akses terbuka di lahan masyarakat yang berada luar kawasan hutan dan di luar lahan yang memiliki izin pertambangan, dimana permasalahan ini terkait dengan kewajiban pemulihan yang tidak dilakukan, terdapat 217 titik areal bekas

tambang yang ditinggalkan tanpa pengelolaan.

Pengelolaan pertambangan memberikan tekanan kepada isu pencemaran air dan alih fungsi lahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

BAB III

ANALISIS *PRESSURE STATE RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



BAB III

ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Isu lingkungan yang muncul pada saat brainstorming biasanya muncul dari berbagai masalah yang dirasakan dan berkembang dimasyarakat. Isu-isu lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi.

Dimensi lintas ruang/wilayah adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Isu yang berkembang saat ini hampir sama dengan isu pada Tahun 2016 kecuali kebencanaan tidak lagi menjadi isu yang penting bagi masyarakat, hal ini dimungkinkan tidak begitu banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, isu lain yang muncul menggantikan isu kebencanaan adalah isu alih fungsi lahan. Munculnya isu alih fungsi lahan lebih disebabkan bertambah luasnya

lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian.

Isu yang masih sama dengan tahun sebelumnya isu persampahan, pertambangan, pencemaran air. Artinya permasalahan ini dirasakan masyarakat belum secara tuntas teratasi walaupun secara urutan berubah.

Pembahasan suatu isu dimungkinkan akan memberi tekanan pada isu lainnya, karena bisa saja salah satu isu akan menimbulkan dampak pada isu-isu lainnya.

3.1. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan dilakukan untuk mengarahkan penggunaan lahan dengan kebijakan dan program ketataruangan yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup sehingga pemafaatan ruang dapat dilakukan secara berkelanjutan

dari tiap bagian lahan yang disediakan selain itu juga tata guna lahan merupakan upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu. Pengaturan terkait tata guna lahan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penetapan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), serta penetapan status dan fungsi kawasan hutan. Pembahasan pada sub bab tata guna lahan difokuskan isu prioritas dan tekanan terhadap tata guna lahan (*pressure*), kondisi dan statusnya (*state*) dan upaya yang telah dilakukan (*response*) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Tabel 1 s/d Tabel 14 dan Tabel Tambahannya.

3.1.1. Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lahan (*Pressure*)

Pengelolaan pertambangan dan alih fungsi lahan merupakan isu prioritas terkait tata guna lahan di Provinsi Sumatera Barat disamping isu-isu terkait tata guna lahan lainnya seperti kerusakan wilayah

pesisir, dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada lahan akses terbuka yaitu lahan masyarakat di luar kawasan hutan dan di luar lahan yang memiliki izin pertambangan, terdapat 217 titik areal bekas tambang yang ditinggalkan tanpa pengelolaan. Selain isu pengelolaan pertambangan, isu terkait tata guna lahan lainnya di Provinsi Sumatera Barat adalah perubahan tata guna lahan untuk perkebunan. Pada daerah perkotaan perubahan tataguna lahan terjadi akibat dari tekanan penduduk yang merubah lahan produktif, daerah rawa menjadi perumahan sehingga berdampak pada kemampuan lahan menyerap air.

Disisi lain perubahan tata guna lahan pertanian menjadi non pertanian akan mengancam ketahanan pangan nasional.

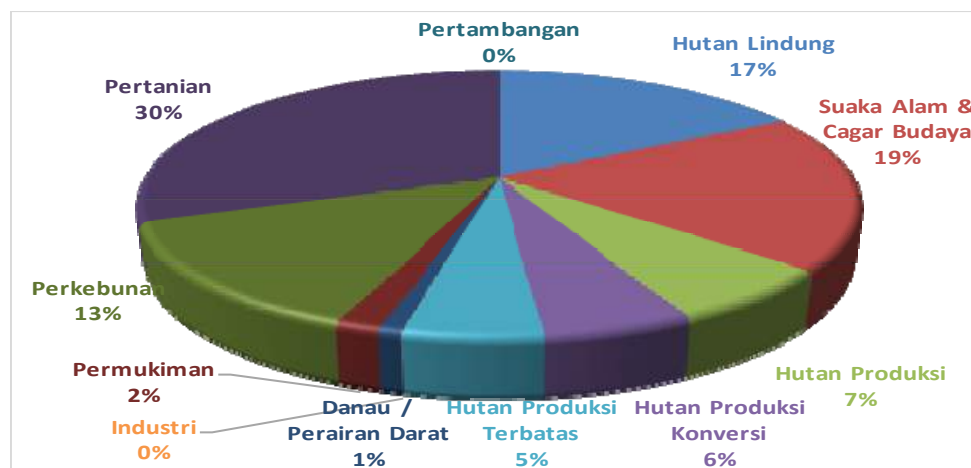
3.1.2. Kondisi Lahan dan Statusnya (State)

3.1.2.1. Kawasan Lindung Menurut RTRW dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertam-

banan, kawasan perikanan, kelautan, dan kawasan hutan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, luas Provinsi Sumatera Barat adalah 4.229.730,00 Ha dengan peruntukan berupa kawasan lindung seluas 1.516.593,00 Ha (35,86%) dan kawasan budidaya 2.713.137,00 Ha (64,14%). Kawasan lindung terdiri dari Hutan Lindung dan Suaka Alam dan Cagar Budaya, sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Industri, Danau/Perairan Darat, Permukiman, Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan seperti pada Gambar 3.1.



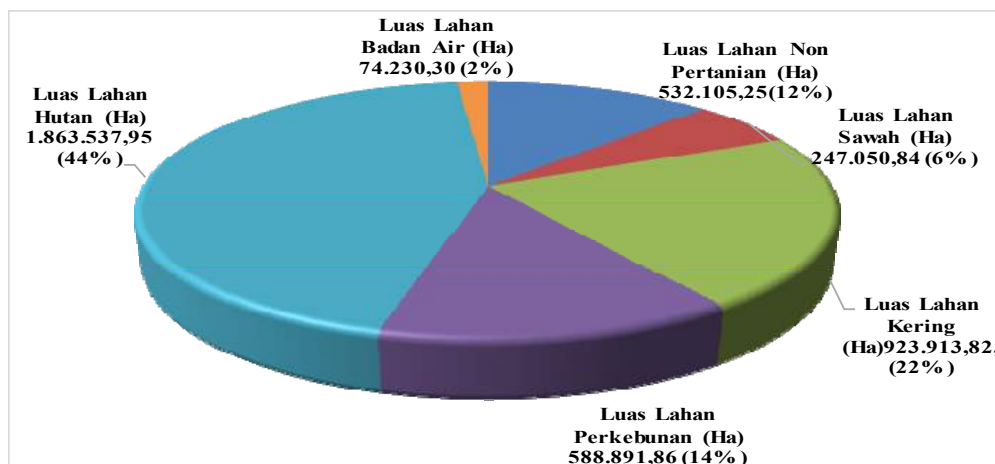
Sumber : Olahan Tabel 1.B DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.1. Pola Ruang Wilayah Darat Provinsi Sumatera Barat 2009 – 2029

3.1.2.2. Penggunaan Lahan Utama

Penggunaan lahan terluas di Sumatera Barat adalah hutan seluas 1.863.537,95 Ha, hutan terluas berada di kepulauan Mentawai yaitu 463.094,26 Ha. Sedangkan penggunaan lahan terluas kedua adalah lahan kering seluas 923.913,81 Ha, terluas di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 150.368,04 Ha. Penggunaan lahan selanjutnya adalah perkebunan yaitu 588.891,85 Ha.

Kabupaten yang memiliki lahan perkebunan terluas adalah Kabupaten Pasaman Barat seluas 588.891,85 Ha, lahan non pertanian seluas 532.105,25 Ha terluas di Kabupaten Pasaman Barat seluas 97.919,47 Ha, lahan sawah seluas 247.050,83 Ha terluas berada di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 381.26,10 Ha dan sisanya adalah badan air seluas 74.230,29 Ha, seperti terlihat pada Gambar 3.3.



Sumber : Diolah dari Tabel 2 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.3. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

3.1.2.3. Kawasan Hutan, Fungsi dan Statusnya

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konversi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Berdasarkan klasifikasi peruntukan ruang yang telah ditetapkan

kan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat, peruntukan lahan yang paling luas adalah untuk kawasan hutan yaitu 2.268.005 Ha (53,62%) yang terdiri dari hutan lindung seluas 719.989 Ha (17,02%), Suaka Alam dan Cagar Budaya seluas 796.604 Ha (18,83%), Hutan produksi seluas 287.563 Ha (6,8%), Hutan Produksi

terbatas seluas 224.726 Ha (5,31%), Hutan Produksi konversi seluas 239.123 Ha (5,65%). Peruntukan kedua yang terluas adalah pertanian yaitu seluas 1.278.088 Ha (30,22%) disusul perkebunan seluas 576.012 Ha (13,62%), secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Peruntukan Lahan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW

No.	Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	719.989	17,02
2	Suaka Alam & Cagar Budaya	796.604	18,83
3	Hutan Produksi	287.563	6,8
4	Hutan Produksi Konversi	239.123	5,65
5	Hutan Produksi Terbatas	224.726	5,31
6	Industri	432	0,01
7	Danau / Perairan darat	36.499	0,86
8	Permukiman	70.327	1,66
9	Perkebunan	576.012	13,62
10	Pertanian	1.278.088	30,22
11	Pertambangan	367	0,01
	Total	4.229.730	100

Sumber: Olahan Tabel 1.B DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

3.1.2.4. Kerusakan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan

1. Lahan Kritis

Terjadinya lahan kritis disebabkan karena penggunaan /pemanfaatan lahan yang tidak sesuai kaidah-kaidah konservasi dan melampaui batas kemampuan daya dukungnya. Lahan kritis dijadikan sebagai salah satu indikator adanya

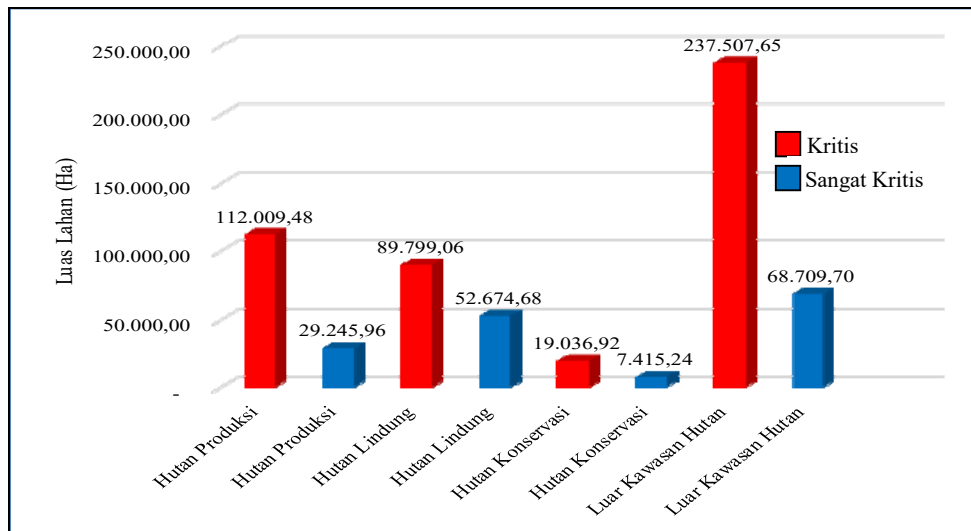
degradasi lingkungan sebagai akibat dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana. Dampak lahan kritis sesungguhnya tidak hanya pemunduran sifat-sifat tanah, namun juga mengakibatkan penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penetapan kriteria suatu lahan dikatakan kritis merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Nomor : P.4/V-Set/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 (Tabel 4) Lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat seluas 616.398,68 Ha yang dikategorikan kritis seluas 458.353,11 Ha dan sangat kritis seluas 158.045,57 Ha

yang terdistribusi pada kawasan hutan dengan kategori kritis seluas 220.845,46 Ha, dan kategori sangat kritis seluas 89.335,87 Ha. Untuk di luar kawasan hutan seluas dengan kategori kritis seluas 237.507,65 Ha dan kategori sangat kritis seluas 68.709,70 Ha, seperti pada Gambar 3.4

Kondisi ini menunjukkan bahwa 16,64% dari total kawasan hutan sudah dalam kondisi kritis, hal tersebut lebih disebabkan oleh pola penggunaan lahan, pota tanam dan jenis tanah.



Sumber : Olahan Tabel 4, DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat 2017

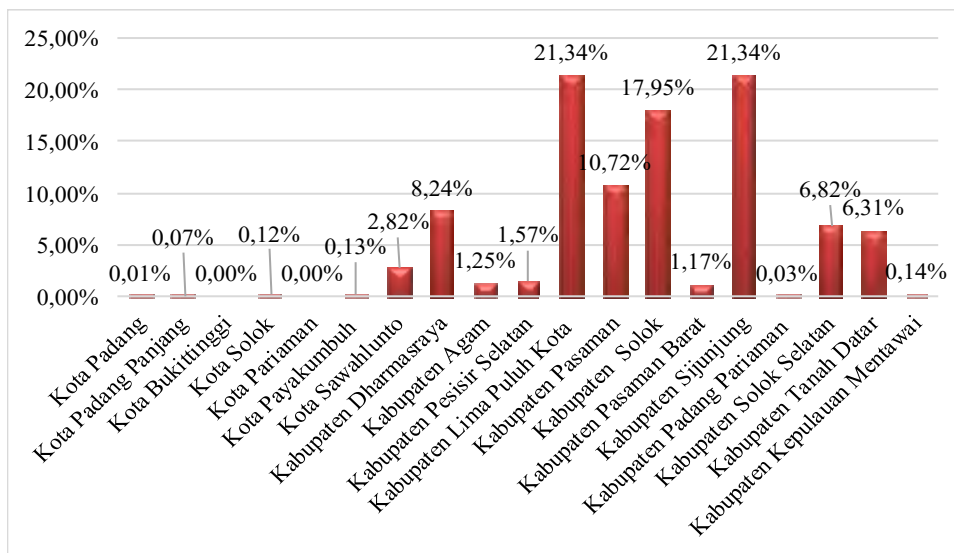
Gambar 3.4. Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

Sebaran lokasi lahan kritis sebesar 21,34%, Kabupaten tersebut sebagian besar terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 17,95%, Kabupaten Pasaman

10,72%, Kabupaten Dharmasraya 8,24%, Kabupaten Solok Selatan 6,82% dan Kabupaten Tanah Datar 6,31%. Untuk lebih jelasnya distribusi lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Sebaran lokasi lahan kritis ini juga sangat erat kaitannya dengan keberadaan aktivitas-aktivitas dari antropogenik seperti kegiatan pertambangan. Hal ini terlihat dari

kondisi daerah yang memiliki banyak aktivitas pertambangan cenderung untuk juga memiliki lahan kritis yang cukup luas seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, serta Kabupaten Dharmasraya. Sebagai contoh di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki lahan kritis paling luas sebesar 137.470,96 Ha (21,34%).



Sumber : Olahan Tabel 4A DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.5. Distribusi dan Luas Lahan Kritis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

2. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Berdasarkan data Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota Tahun 2017, lahan kering di Provinsi

Sumatera Barat sebagian besar masih dalam kondisi baik dan masih memenuhi baku mutu ambang kritis erosi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan

Tanah Untuk Produksi Biomassa. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota yaitu: Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Namun yang patut menjadi perhatian khusus adalah terkait kondisi kerusakan lahan kering akibat erosi air di Kota Padang Panjang sudah melebihi baku mutu, dimana untuk ketebalan tanah <20cm sebesar 1,5 mm/10 tahun, 20cm - <50 cm sebesar 4,2 mm/10 tahun dan 50 - <100 cm sebesar 9,1 mm/10 tahun, hal ini ditengarai sebagai akibat kondisi jenis tanah, pola tanam, dan pola penggunaan lahan. Bentuk penutupan lahan seperti tanaman hortikultura yang rata-rata

mempunyai umur dan perakaran yang pendek, tutupan lahan yang kecil menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya erosi oleh air.

3. Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Kerusakan tanah di lahan kering juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000, Data pengamatan lapangan yang dilakukan oleh 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan ada 6 (enam) dari 10 (sepuluh) parameter yang sudah melebihi ambang kritisnya yang lokasinya tersebar pada beberapa kabupaten/kota. Parameter yang sudah melebihi ambang kritis pada beberapa kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat

No	Parameter	Ambang Kritis	Pengamatan	Kabupaten/Kota
1	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	3,8 %	Kota Padang
			13,19 %	Kabupaten Pesisir Selatan
2	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	86,41%	Kabupaten Agam
3	Porositas Total	< 30 %; > 70 %	78,1 %	Kabupaten Pesisir Selatan
4	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	19,19 cm/jam	Kabupaten Pesisir Selatan
			0,37 cm/jam	Kota Padang
5	Redoks	< 200 mV	32,5 mV	Kota Padang
			16,87 mV	Kota Bukittinggi
			33,45 mV	Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,3 x 10 ⁵	Kota Pariaman

Sumber : Olahan Tabel 6, DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

4. Kerusakan Lahan di Lahan Basah

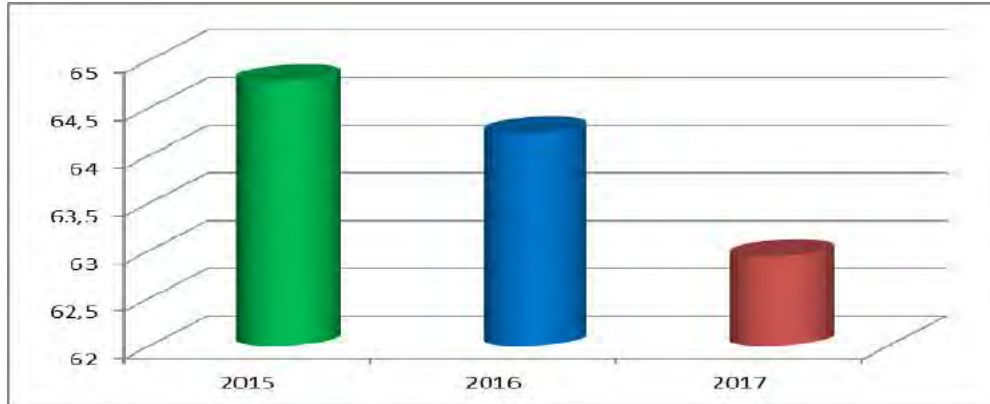
Wilayah yang termasuk lahan basah (kawasan bergambut) di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter menyebar di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam bagian barat di daerah Tikus dan Masang, serta di Kabupaten Pesisir Selatan di daerah Lunang dan Silaut. Hampir semua kawasan bergambut ini sudah menjadi kebun kelapa sawit, hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keberadaan gambut.

Merujuk kepada hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kondisi lahan basah yang bervariasi. Untuk lahan gambut di Kabupaten Agam terlihat masih memiliki kualitas yang cukup baik dimana ketinggian muka air tanahnya tetap terjaga dengan angka 12 cm, dan besaran subsidensi gambut di atas pasir kuarsa juga masih relatif kecil dengan nilai 1,8 cm/Tahun. Sedangkan untuk lahan gambut di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kondisi gambut yang sudah terekspose ke permukaan

dengan subsidensi gambut di atas pasir kuarsa yang sangat besar dengan nilai 37 cm/Tahun, dan kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah dan kedalam air tanah dangkal masih melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000.

3.1.2.5. Indeks Tutupan Hutan

Indeks tutupan hutan di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan kualitas indeks hal ini disebabkan perubahan tutupan hutan sekunder dan primer menjadi semak belukar, areal pertanian, perkebunan dan areal terbuka. Perubahan tutupan hutan ini terjadi di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun indeks tutupan hutan tahun 2017 bernilai 62,94 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 64,23 pada Tahun 2016, 64,78 pada Tahun 2015 secara rinci penurunan indeks tutupan hutan dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.6.



Sumber : Olahan Tabel 2B DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.6. Indeks Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 s/d 2017

3.1.2.6. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumatera Barat mempunyai luas wilayah daratan $\pm 42.297,30$ km², sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota pesisir mempunyai luas wilayah daratan 20.023,48 km² atau sekitar 47,34 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi ini mempunyai panjang garis pantai $\pm 2.312,71$ km dengan luas perairan laut $\pm 37.355,46$ km² (yang diukur dari garis pantai pasang tertinggi sampai 12 mil ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan), dan memiliki pulau sebanyak 185 buah pulau.

Luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat adalah 13.750,43 km² atau sekitar 32,51 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir terluas adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 6.011,35 km², kemudian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 4.860,22 km², Kabupaten Pasaman Barat yaitu 1.807,77 km², Kabupaten Padang Pariaman yaitu 420,46 km², Kota Padang 389,05 km², dan Kabupaten Agam 205,73 km². Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah pesisir terkecil adalah Kota Pariaman yaitu 55,85 km².

Perairan laut Provinsi Sumatera Barat pada umumnya

dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan jalur pelayaran transportasi laut. Sedangkan yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya laut, kawasan konservasi dan kawasan wisata bahari hanya sebahagian kecil saja. Untuk kawasan konservasi perairan laut, Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah seluas 381.090,95 ha, dan sudah memiliki SK Pencadangan dari Bupati/Walikota. Kawasan konservasi Perairan Nasional yang berupa Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan sekitarnya dengan luasan 39.900,00 Ha juga telah ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Adapun kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk luas dan kerapatan mangrove, luas dan kerusakan padang lamun, dan luas tutupan dan kondisi terumbu karang adalah sebagai berikut:

1. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017, luas kawasan mangrove di Provinsi Sumatera Barat adalah 33.827,69 Ha yang tersebar di 7 kabupaten/kota yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan mangrove yang terluas berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 24.619,43 Ha, dan yang terkecil berada di Kota Pariaman yaitu 22 Ha.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 210 Tahun 2004 jika tutupan lahan mangrove < 50% termasuk kriteria rusak, kondisi ini terlihat pada Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tutupan mangrove <50%, sedangkan tutupan di atas \geq 50% - < 75% termasuk kriteria baik sedang terdapat di Kota Padang dan Pasaman Barat.

Jika dilihat berdasarkan kerapatan pohon per hektarnya maka yang termasuk kriteria rusak dengan kerapatan < 1000 batang/ha yaitu Kota Padang dan Kabupaten Agam,

yang termasuk kriteria baik sedang dengan kerapatan ≥ 1000 - < 1500 batang/ha yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan serta yang

termasuk kriteria baik sangat padat dengan kerapatan ≥ 1500 batang/ha yaitu Kabupaten Pasaman Barat seperti pada Tabel 3.3

Tabel 3.3. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatan (Pohon/Ha)
1.	Kota Padang	1.050,50	52,00	25
2.	Kota Pariaman	22,00	18,40	1.035
3.	Kabupaten Agam	39,50	30,00	600
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.911,26	31,34	1.110
5.	Kabupaten Pasaman Barat	6.046,50	68,12	2.010
6.	Kabupaten Padang Pariaman	138,50	-	-
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	24.619,43	-	-
	Total	33.827,69		

Keterangan : (-) Tidak ada data

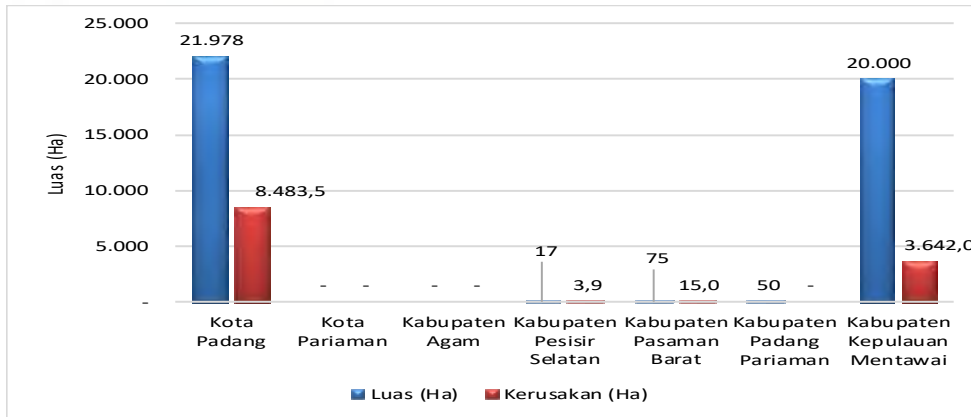
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota, 2017

Kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh karena tekanan kepentingan sosial ekonomi yang cukup besar seperti untuk pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan, pengembangan tambak-tambak, dan lain sebagainya.

2. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Luas padang lamun pada 5 (lima) kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir

Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 42.120 Ha. Padang Lamun yang terluas terdapat di Kota Padang yaitu 21.978 Ha, dan kondisinya mengalami kerusakan seluas 8.483,51 Ha (38,6%). Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 20.000 Ha yang juga mengalami kerusakan seluas 3.642 Ha (18,21%). Untuk lebih jelasnya kondisi padang lamun di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.7.

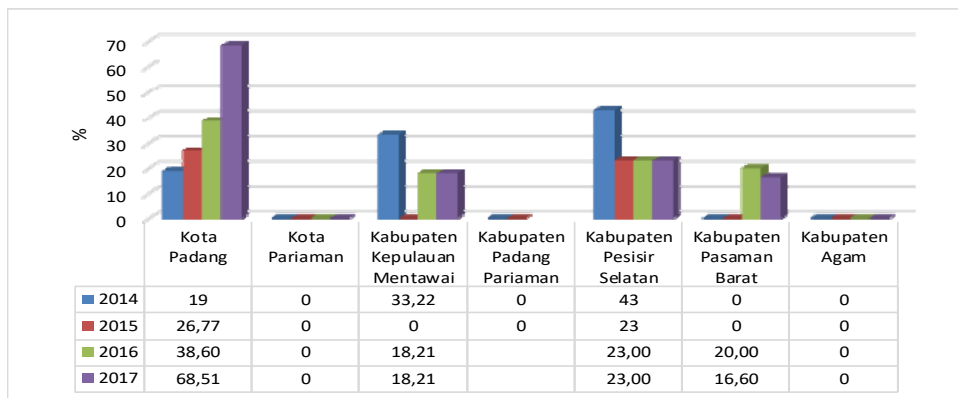


Sumber : Olahan Tabel 9 , DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.7. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat

Analisa perbandingan antar waktu kerusakan padang lamun Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 terjadi kenaikan dan penurunan, seperti terlihat Kota Padang terjadi kenaikan kerusakan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada Gambar 3.7. Kerusakan yang terjadi pada padang lamun dapat

disebabkan oleh perubahan fungsi pantai untuk pelabuhan atau dermaga, pencemaran air (oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian), penangkapan ikan yang merusak serta pengerukan lumpur, lalu lintas perahu yang padat, dan lain-lain



Keterangan : (0) Tidak ada data,

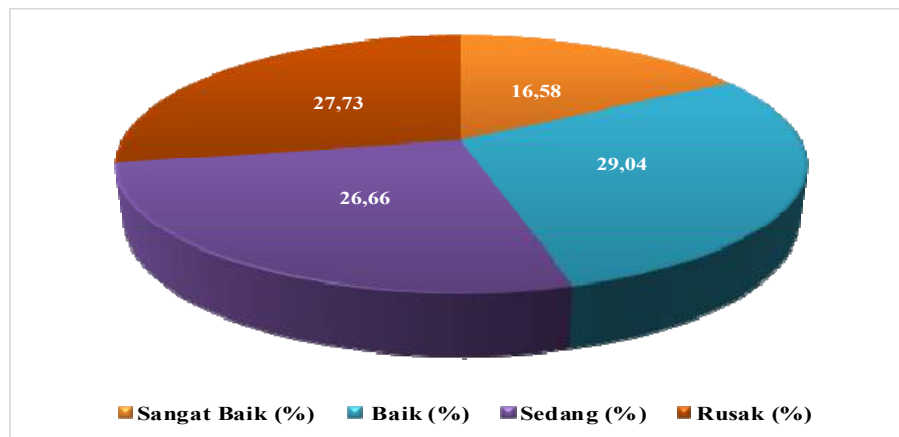
Sumber : Olahan tabel 9A, DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.8. Perbandingan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat

3. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan terumbu karang seluas 21.486,99 Ha, dimana 81,85% nya berada di Kepulauan Mentawai. Khusus untuk tutupan terumbu karang di Kepulauan Mentawai belum tersedia data terkait

kondisinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat sebesar 27,73% kondisi rusak, 16,58% kondisi sangat baik yang mana hal ini dimungkinkan adanya peningkatan kegiatan pada wilayah pesisir menjadi kawasan budidaya, seperti terlihat pada Gambar 3.9.

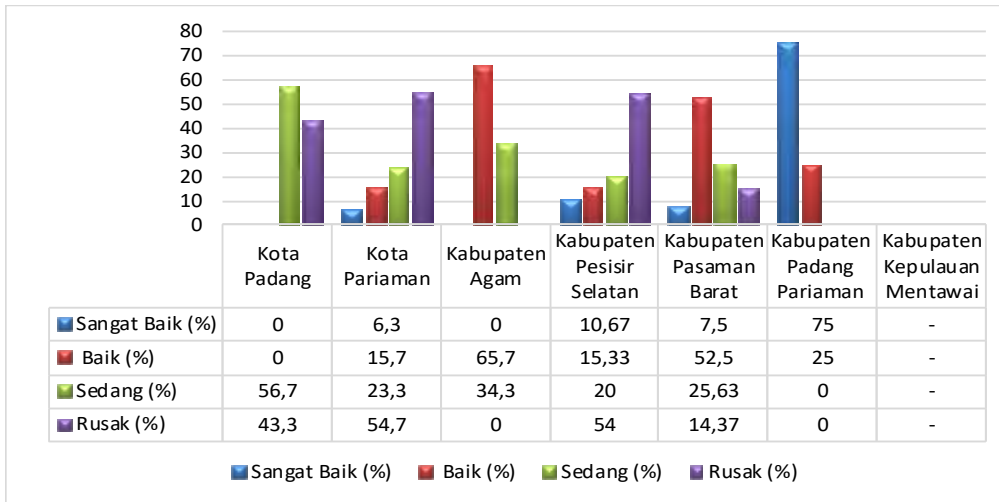


Sumber : Olahan Tabel 10, DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.9. Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat

Kondisi terumbu karang untuk Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kondisi terumbu karang yang sudah cukup mengkhawatirkan karena sebagian besar dalam kondisi sedang

sampai dengan rusak, sedangkan kondisi terumbu karang yang masih sangat baik dengan persentase cukup besar berada di Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tergambar pada Gambar 3.10.



Sumber : Olahan Tabel 10 DIKPLH Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.10. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

3.1.2.7. Perubahan Penggunaan Lahan

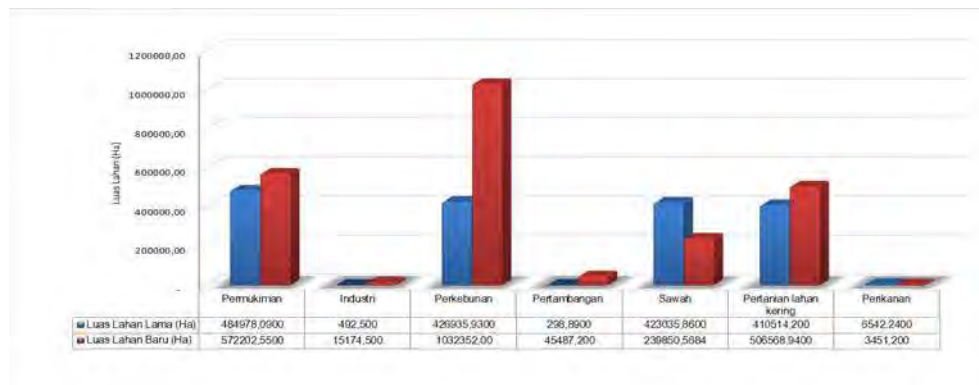
Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan menjadi faktor pendorong dalam terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu juga terdapat faktor eksternal berupa kebutuhan industri dan ekspor beberapa komoditas perkebunan seperti minyak kelapa sawit ikut mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Disamping itu juga ada tuntutan pembangunan infrastruktur juga berperan dalam mendorong

munculnya kegiatan-kegiatan pertambangan batuan seperti andesit yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan data pada Tabel 11 diperoleh informasi bahwa alih fungsi lahan menjadi lahan pertambangan merupakan bentuk alih fungsi lahan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011 dengan luas penambahan sebesar 45.487,2 Ha, kondisi ini naik 13.762% dari sebelumnya hanya seluas 289,98 Ha. Penggunaan lahan lainnya yang ikut meningkat adalah untuk industri dengan penambahan

14.682 Ha atau naik sebesar 2.981% dari kondisi sebelumnya seluas 492,5 Ha. Penggunaan lahan lainnya yang juga mengalami penambahan adalah lahan perkebunan dengan total penambahan seluas 605.416 Ha atau meningkat 141% dari kondisi sebelumnya seluas 426935,93 Ha. Lahan yang menjadi sumber perubahan fungsi berumber dari lahan pertanian dan semak belukar. Selain terjadi penambahan ada juga lahan yang mengalami pengurangan

yang sangat signifikan yaitu lahan sawah sebesar 183.185 Ha atau sebesar 43% yang sebelumnya 423.035,86 Ha serta lahan perikanan terjadi penurunan sebesar 3.091 Ha atau sebesar 47% dari luas sebelumnya 6.542,24 Ha. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena akan berimplikasi terhadap produksi beras yang merupakan komoditas utama dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat, seperti terlihat pada Gambar 3.11.



Sumber : Olahan tabel 11 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

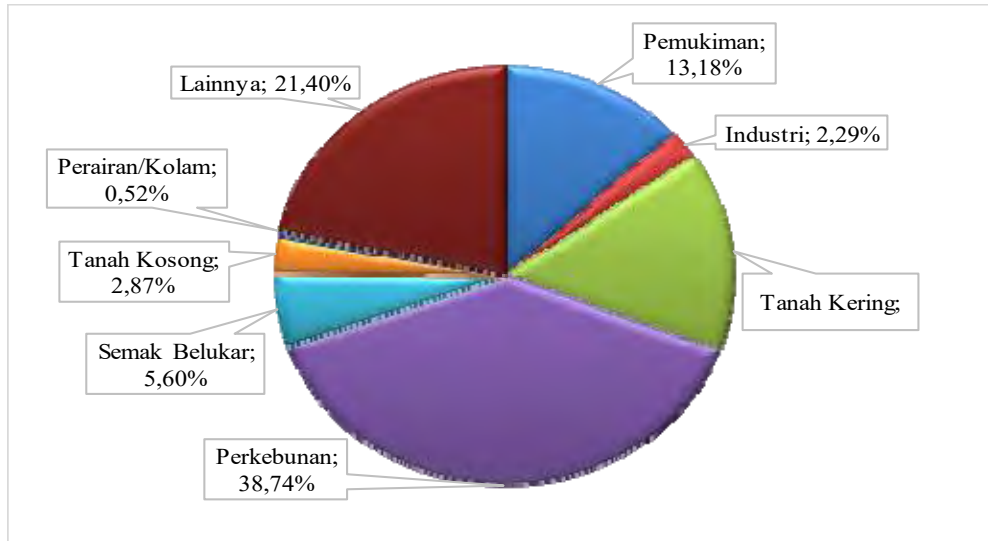
Gambar 3.11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Barat

Meningkatnya kebutuhan perumahan, adanya cadangan mineral/batuan, perubahan jenis tanaman, perubahan pola tanam menjadi faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lainnya. Alih fungsi lahan terluas

dari lahan pertanian yaitu menjadi lahan perkebunan seluas 256.359 Ha (38,74%), selanjutnya menjadi lahan tanah kering seluas 101.901 Ha (15,40%), menjadi lahan permukiman baru seluas 87.224,55 Ha(13,18%) seperti terlihat dari

Gambar 3.12. Sektor perkebunan menjadi faktor terbesar dalam merubah lahan pertanian, hal ini dimungkinkan rendahnya harga

komoditi pertanian dan tingginya harga komoditi perkebunan dan juga tidak terlepas dengan masuknya investor perkebunan.



Sumber : Olahan Tabel 11.A DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.12. Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat

3.1.2.8. Pemanfaatan Lahan

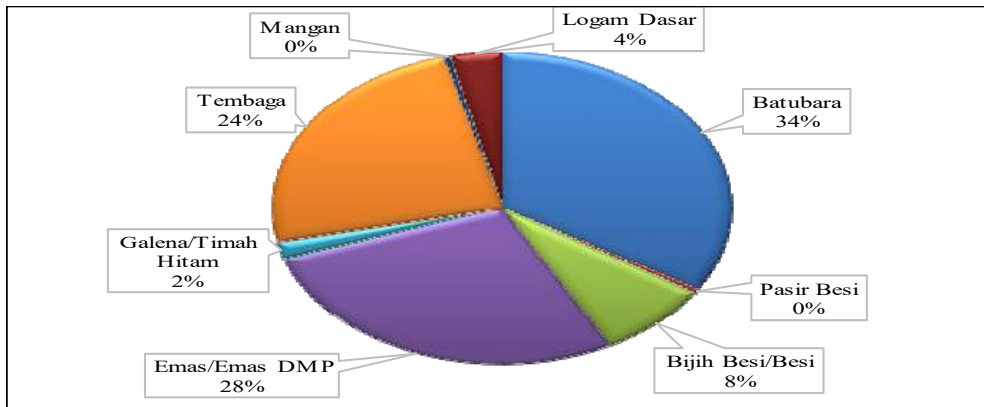
Pemanfaatan lahan di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas beberapa peruntukan utama antara lain pertambangan, perkebunan, pertanian, dan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan di Provinsi Sumatera Barat dengan total luasnya 45.487,20 Ha (78 IUP) tetapi yang masih aktif IUPnya seluas 41.431,48 Ha (72 IUP) dan yang sudah berhenti IUPnya seluas 4.055,72 Ha (6 IUP).

Sedangkan untuk lahan perkebunan seluas 989.917 Ha yang terdiri perkebunan rakyat dengan luas 708.491 Ha atau 78,82%, dan perkebunan besar seluas 222.988 Ha (21,18%). Terkait pemanfaatan lahan pertanian, sebagian besar merupakan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat berupa tanah ulayat dengan luas 230.665 Ha dan pemanfaatan lahan hutan seluas 234.795 Ha.

3.1.2.9. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Bahan Galian

Berdasarkan hasil olah data Tabel 13 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017 diperoleh kondisi luas areal lahan pertambangan menurut bahan galian di Provinsi Sumatera Barat, dimana jenis bahan galian yang memiliki luas izin usaha pertambangan yang paling luas adalah batu bara seluas

15.369,04 Ha (33,8%), kemudian emas seluas 12.572,40 (27,6%), tembaga 11.110 Ha (24,4%), bijih besi seluas 3.626,67 Ha (8%) dan yang paling kecil yaitu mangan dengan luas 174 Ha (0,4%). Sedangkan luas izin usaha pertambangan mineral dan batuan lainnya seperti batu kapur, batu silika, batu *clay*, batu gamping, dan lain-lain memiliki total luasan yang tidak terlalu luas.



Sumber : Olahan Tabel 13, DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

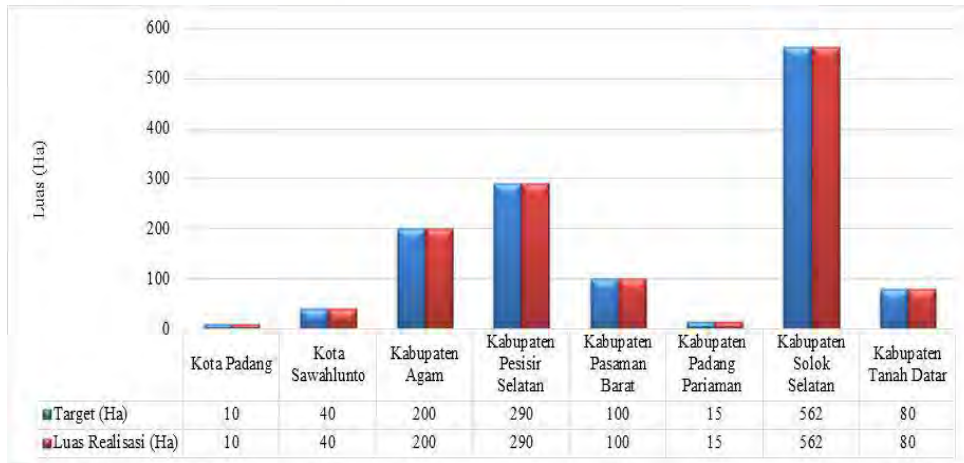
Gambar 3.13. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Provinsi Sumatera Barat

3.1.3. Upaya Pengelolaan Isu Lahan (*Response*)

3.1.3.1. Penghijauan

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merespon isu tata guna lahan salah satunya adalah berupa kegiatan penghijauan. Beberapa kabupaten/

kota sudah melaksanakan kegiatan penghijauan pada 8 kabupaten/kota dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam sejumlah 951.700 batang. Adapun target dan realisasi penghijauan di kabupaten/kota Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.14.



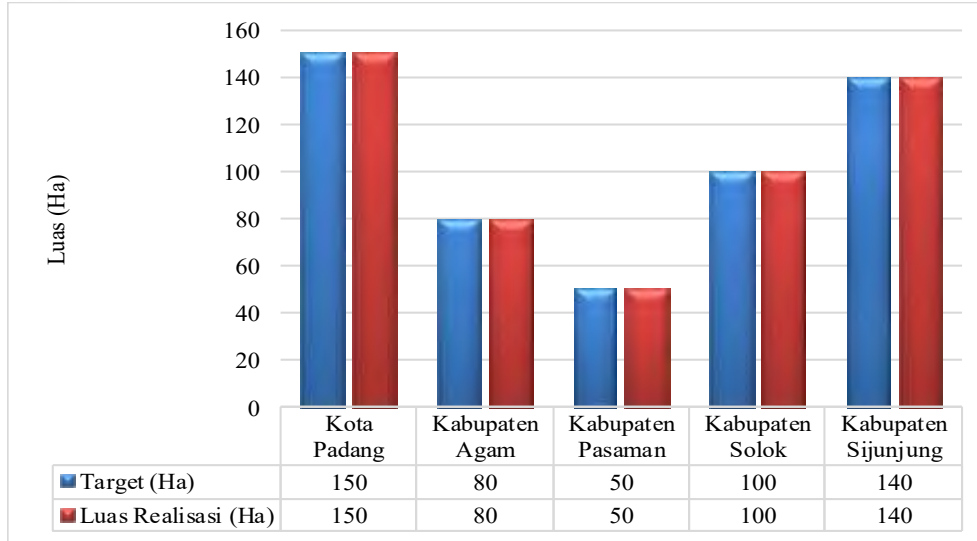
Sumber: Olahan Tabel 14 Data Dokumen IKPLHD Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.14. Target dan Realisasi Penghijauan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2017

Penghijauan yang dilakukan oleh 8 (delapan) kabupaten/kota dengan luas total area yang berhasil ditanam seluas 1.297 Ha dimana realisasi tercapai sesuai target yang direncanakan. Penanaman pohon tersebut diharapkan mampu menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat sekaligus juga berperan dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dengan pemilihan tanaman berupa tanaman MPTS (*Multy Purpose Tree Species*) sekaligus juga berperan dalam menyerap karbon dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

3.1.3.2. Reboisasi

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penyelamatan kawasan hutan sekaligus dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Barat, beberapa kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan reboisasi dengan jumlah pohon yang berhasil ditanam sebanyak 281.500 batang yang dilaksanakan pada 5 (lima) kabupaten/kota yang mana luas realisasi sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 520 Ha, dan dengan luasan pada masing-masing kabupaten/kota sebagai mana Gambar 3.15.



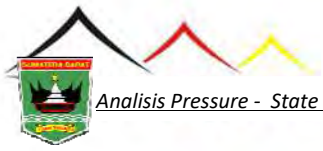
Sumber: Olahan Tabel 14 Data Dokumen IKPLHD Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.15. Target dan Realisasi Reboisasi di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2017

3.1.3.3. Penataan Perizinan Pertambangan

Beberapa kasus penerbitan izin usaha pertambangan akhir-akhir diangkat di media massa dan menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait isu pertambangan adalah dengan melakukan penataan terhadap izin tambang melalui evaluasi dan verifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencabut 21 dari 26 izin usaha pertambangan (IUP) *non clean and clear* (CnC). Penerapan CnC mulai diberlakukan pemerintah sejak Mei 2012. Dalam

Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral menyatakan rekomendasi dan sertifikat CnC baru bisa didapat jika perusahaan memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan lima izin tambang yang awalnya non-CnC, dinyatakan CnC oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akhir Oktober 2017. Lima izin CnC itu adalah, Dharma Power Bersama, Mranto Mas Pratama, Thomas Jaya Trecimplant, Triple Eight Energy dan Wirapatriot Sakti.



3.1.3.4. Penetapan Perda Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan

Penetapan Peraturan Daerah Nomor Perda 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Peraturan daerah ini diperlukan dengan pertimbangan untuk mewujudkan kelestarian hutan dan mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam memelihara hutan dengan mengutamakan kearifan lokal dan hukum adat, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan.

Melalui Perda No 11 Tahun 2015 tersebut sebagai bentuk pelibatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan yang diasilitasi oleh Pemerintah Sumatera Barat dalam pengelolaan hutan berbasis nagari (PHBN), sampai dengan Tahun 2017 sudah terdapat 82.004 Ha kawasan hutan yang sudah diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat berupa HPHN (Hak Pengelolaan Hutan Nagari)/

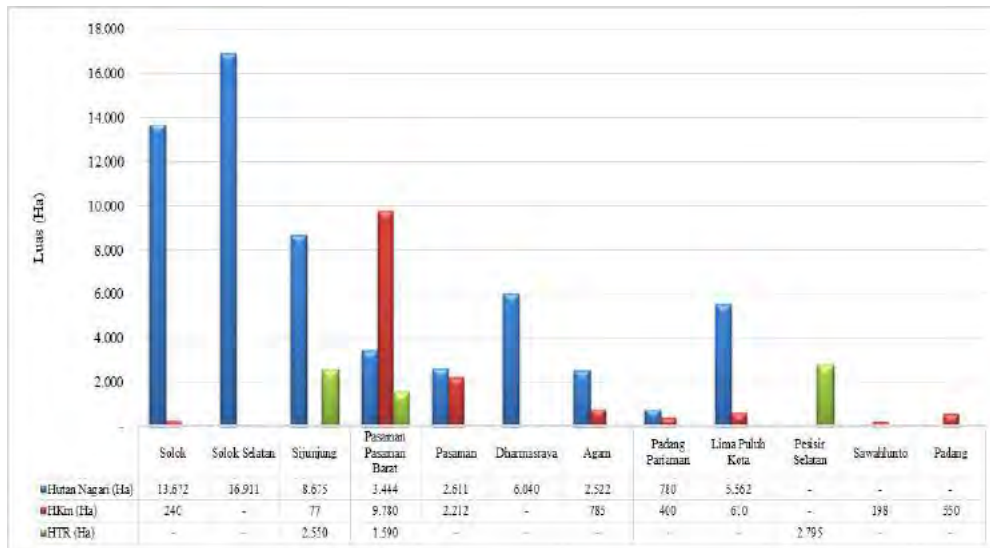
IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) yang terbagi atas Hutan Nagari seluas 60.217 Ha, Hutan Kemasyarakatan seluas 14.852 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat seluas 6.935 Ha. HPHN/IUPKKm tersebar pada kabupaten/kota seperti terdapat pada Gambar 3.16. Saat ini juga sudah diproses seluas 173.875 Ha usulan kawasan hutan untuk diberikan HPHN/IUPHKm kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Usulan ini tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam upaya percepatan dan perluasan pengelolaan hutan melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) antara lain:

1. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial berfungsi sebagai pusat layanan informasi perhutanan sosial, forum koordinasi dengan pihak terkait, fasilitasi dan pendampingan proses usulan dan perizinan.

2. Menyusun *Road Map* (Rencana Kerja) Pengembangan Perhutanan Sosial dengan Target 500.000 Ha.
Penyusunan *roadmap* diharapkan sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan Perhutanan Sosial, merupakan rencana indikatif spasial pengembangan Perhutanan Sosial, penetapan target 500.000 Ha (30% dari luas hutan lindung dan hutan produksi Sumatera Barat) dan strategi program/kegiatan pendukung.
3. Melakukan Kerjasama Multi Pihak Dalam Pengembangan Perhutanan Sosial
Dinas Kehutanan selaku pengelola kawasan hutan Sumatera Barat dalam upaya pengembangan Perhutanan Sosial telah membangun kesepahaman dengan banyak pihak yang telah dilakukan antara lain:
 - a. MoU Pemerintah Provinsi dengan 13 kabupaten/kota se-Sumatera Barat Implementasi REDD dengan Pengembangan Perhutanan Sosial.
 - b. MoU Pemerintah Provinsi dengan Dunia Usaha dalam Pengembangan Model Nagari PS (PT. Semen Padang).
 - c. MoU Dinas Kehutanan dengan LSM dalam pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UNDP, KKI Warsi, Kemitraan, Q-bar, Kehati, Pundi Sumatera, CO2BV, WWF, dan lain-lain).
 - d. MoU Dinas Kehutanan dengan Perguruan Tinggi untuk KKN Tematik Pengembangan PS (UNAND, UMSB).
 - e. MoU dengan UNDP dan LPPM Unand untuk Fasilitasi Kegiatan *Livelihood* PHBM.
 - f. MoU Dinas Kehutanan dengan OPD pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan/perikanan, dan Bakorluh untuk Basis kegiatan Pembangunan dalam Areal Kerja PS.
 - g. MoU Dinas Kehutanan dengan Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pari-

- wisata, Dinas Perindustriaian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan kapasitas pengelola dalam pengembangan *agroforestry*, ekowisata, *silvofishery*, *silvopasteura* dan pengembangan usaha PHBM.
- h. MoU Dinas Kehutanan dengan Badan PSDM dan Penyuluhan KLHK RI untuk optimalisasi Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi usulan PHBM.
 - i. MoU Dinas Kehutanan dengan BPSKL Medan, KPHL/P dan KLHK terkait Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui Skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.
 - j. MoU Dinas Kehutanan dengan Pemda Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Kep. Mentawai terkait Fasilitasi Hutan Adat.
 - k. MoU Dinas Kehutanan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pembiayaan kegiatan implementasi Perhutanan Sosial melalui dana desa.



Sumber : Olahan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

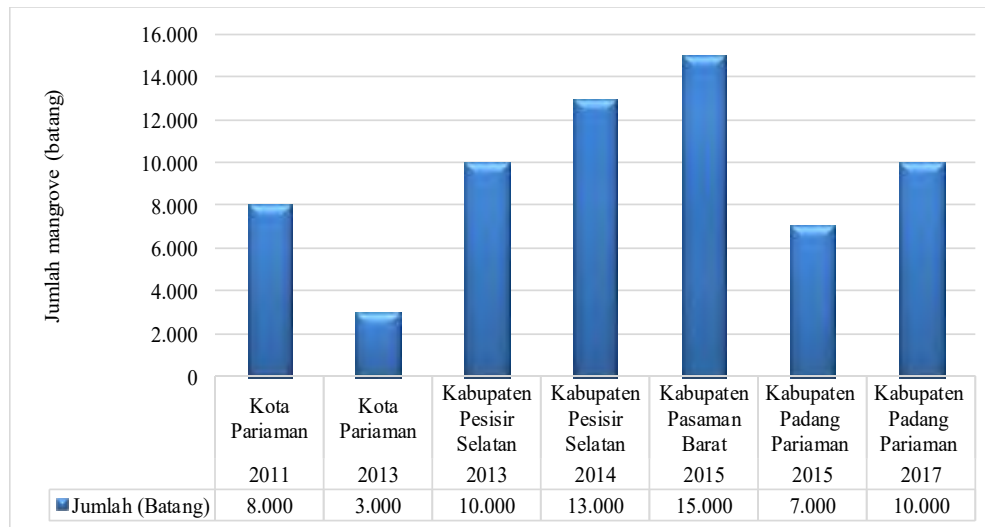
Gambar 3.16 Luas HPHN/IUPKm Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Sampai Tahun 2017

3.1.3.5. Konservasi Mangrove

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir dalam melestarikan ekosistem mangrove adalah dengan menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang berlokasi di Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat, Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai;

Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang.

Selain dengan penetapan kawasan mangrove Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan kegiatan penanaman mangrove sejak tahun 2011 sampai 2017 yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota dengan total mangrove yang sudah di tanam sebanyak 64.000 batang seperti tertuang pada Gambar 3.16.



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.17 Penanaman Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2017

3.1.3.6. **Transplantasi Terumbu Karang**

Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang sangat penting. Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makanan, daerah asuhan dari berbagai biota laut dan sebagai sumber plasma nutfah serta merupakan sumber berbagai makanan dan bahan baku substansi bioaktif yang berguna dalam bidang farmasi dan kedokteran. Terumbu karang juga mempunyai nilai estetika sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari. Disamping itu secara fisik, terumbu karang melindungi pantai dari degradasi dan abrasi. Oleh karena itu perlu adanya konservasi dan pengelolaan untuk menjaga dan memelihara ekosistem terumbu karang tersebut dan habitat yang berasosiasi di sekitarnya agar berada dalam kondisi yang baik. Pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkesinambungan sangat penting, artinya ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat

mendukung kehidupan nelayan di wilayah pesisir.

Transplantasi terumbu karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak. Atau untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Tujuan dilakukannya transplantasi terumbu karang antara lain : pemulihan terumbu karang yang sudah rusak, perluasan terumbu karang, pengelolaan perikanan.

Transplantasi terumbu karang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai 2017 pada 5 kabupaten/kota. Pada tahun 2017 transplantasi terumbu karang dilakukan di Pulau Pigago Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 2.000 bibit dan Pulau Kerabak Ketek Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1.900 bibit.

3.1.3.7. **Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Konservasi Laut**

Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan

pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan KKP secara efektif dapat melindungi keanekaragaman hayati yang serta merta akan mendukung kegiatan di bidang pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Muara KKP adalah peningkatan manfaat sumber daya perairan untuk masyarakat sekarang dan menjamin ketersediaan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang.

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat 8 Kawasan Konservasi, dimana 1 kawasan merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (TWP Pih) dan 7 lainnya merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah yaitu :

- 1) TWP Selat Bunga Laut Kab. Mentawai seluas 129.566 Ha (Kepmen- KP No. 22 Tahun 2018)
- 2) Peta Suaka Alam Perairan Kabupaten Pesisir Selatan seluas 174.899,30 Ha (SK Gub Sumbar No. 523.6-150-2017)
- 3) Peta Taman Pulau Kecil Kota Padang seluas 2.274,96 Ha (SK

- Gub Sumbar No. 523.6-150-2017)
- 4) Peta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Pariaman seluas 11.525,89 Ha (SK Gub Sumbar No. 523.6-150-2017)
- 5) Peta Suaka Alam Perairan Batang Gasan Padang Pariaman seluas 684 Ha (SK Gub Sumbar No. 523.6-150-2017)
- 6) Peta Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Pasaman Barat seluas 6.795,80 Ha (SK Gub Sumbar No. 523.6-150-2017)
- 7) Peta Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Agam seluas 12.000 Ha (SK Gub Sumbar No. 523.6-150-2017)

Pada Tahun 2017 telah disusun zoning regulation yang baru ditetapkan perdanya pada tanggal 26 Februari 2018 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Barat meliputi :

1. Kawasan Pemanfaatan Umum yang meliputi :
 - a. Zona Pariwisata
 - b. Zona Pelabuhan
 - c. Zona Perikanan Budidaya
 - d. Zona Perikanan Tangkap
2. Kawasan Konservasi

Secara keruangan melalui penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan kawasan konservasi laut daerah terhadap beberapa kawasan padang lamun, antara lain kawasan konservasi laut daerah Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang, kawasan pengawasan keanekaragaman hayati biota laut di Pulau Sikuai, kawasan konservasi laut daerah Pulau Ujung Agam, daerah perlindungan laut Tiku Agam, kawasan perlindungan laut daerah berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Pulau Batu Bakudung), dan perbatasan dengan Provinsi Bengkulu (Pulau Baringin) dengan total luas 71.296,5 Ha.

Kawasan konservasi perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem

yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah tersebut secara berkelanjutan. Tujuan pengelolannya melindungi sejauh mungkin flora dan fauna laut (marin) endemik dan mengeluarkan atau mencegah masuknya spesies-spesies asing (exotic). Bila memungkinkan, sebagian dari zona konservasi digunakan untuk menimba ilmu pengetahuan. Disamping itu ditetapkan juga wilayah konservasi dengan situs budaya atau tempat kapal tenggelam.

3.1.3.8. Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati

Sampai dengan Tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki 8 unit taman kehati dengan total luas 68 hektar yang terdiri atas Taman Kehati Universitas Andalas seluas 15 Ha di Kota Padang, Taman Kehati Puti Saloati seluas 3 Ha di Kota Solok, Taman Kehati Sikapak seluas 5 Ha di Kota Pariaman, Taman Kehati Kandih seluas 5 Ha di Kota Sawahlunto, Taman Kehati Koto Malintang seluas 10 Ha di Kabupaten Agam, Taman Kehati

seluas 10 Ha di Kabupaten Padang Pariaman, Taman Kehati Lubuk Sikaping seluas 10 Ha di Kabupaten Pasaman, dan Taman Kehati Padang Mangateh seluas 10 Ha di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2. Kualitas Air

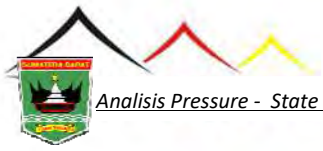
Berdasarkan hasil FGD penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat, pencemaran air merupakan isu yang dianggap paling prioritas dibandingkan dengan isu-isu strategis lainnya (Total Scoring 1051). Untuk menggali lebih jauh terhadap akar permasalahan pengelolaan kualitas air di Provinsi Sumatera Barat, akan dilakukan analisis dengan metode *Driver Pressure State Response* (D-P-S-R), dimana isu-isu terkait akan dilihat faktor pendorong yang menyebabkan adanya tekanan-tekanan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kualitas air. Permasalahan pengelolaan kualitas air ini terutama pada sungai dan danau akan sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, oleh

karena itu dalam pembahasan isu pencemaran air juga akan dilakukan analisis terkait korelasi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas air.

3.2.1. Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Kualitas Air (Pressure)

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber air yang diantaranya berupa sungai dan danau, dimana terdapat 606 sungai, baik sungai besar maupun kecil, dengan rincian: 27 sungai lintas provinsi, 81 sungai lintas kabupaten/kota dan 498 sungai parsial kabupaten/kota. Sedangkan untuk danau terdapat 5 unit danau, dimana yang terbesar adalah Danau Singkarak, diikuti Danau Maninjau, Danau Diatas, Danau Dibawah, dan yang paling kecil adalah Danau Talang. Selain sumber air sungai dan danau tersebut juga terdapat sumber air lainnya berupa air tanah, mata air, dan air laut.

Terkait sumber air tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemantauan kualitas air terhadap 2 sungai lintas provinsi yaitu Sungai



Batanghari, dan Sungai Batang Kuantan, 9 sungai lintas kabupaten/kota yang dianggap strategis yaitu: Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Ombilin, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, dan Sungai Batang Masang Gadang. Sedangkan untuk danau juga telah dilakukan pemantauan terhadap 4 Danau yaitu Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, dan Danau Dibawah, 2 dari danau tersebut termasuk 15 danau prioritas nasional yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Sedangkan terkait air laut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan pemantauan rutin di 26 titik pada 6 kabupaten/kota pesisir Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, semua

sungai yang dipantau menghadapi tekanan dari limbah domestik baik limbah cair maupun limbah padat. Hal ini ditunjukkan dengan konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di 70,6% titik sampling telah melebihi baku mutu. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang belum semuanya memiliki akses sanitasi layak, sehingga limbah tinja masih ada yang dibuang langsung ke badan air. Sampai dengan tahun 2017, akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat untuk air limbah domestik baru mencapai 44,19 % yang artinya porsi buang air besar sembarangan ataupun rumah tangga yang membuang limbah domestiknya langsung ke badan air masih sangat tinggi. Tingginya parameter coliform pada air sungai mengindikasikan masih rendahnya sanitasi lingkungan di Provinsi Sumatera Barat.

Terkait pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat, tingkat pelayanan di semua kabupaten/kota baru mencapai 34,54%. Sampah sebagian besar tidak dikelola, sehingga rentan dibuang ke sungai oleh masyarakat. Adapun rincian



kondisi capaian akses sanitasi layak untuk air limbah dan sampah domestik per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana Tabel di bawah ini.

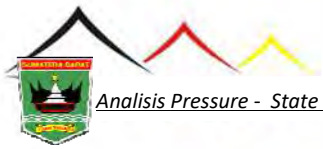
Tabel.3.4. Capaian Akses Sanitasi Layak per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	% Pelayanan limbah	% Pelayanan Sampah
1	Kota Padang	59,63	75,00
2	Kota Padang Panjang	63,14	80,49
3	Kota Bukittinggi	80,06	100,00
4	Kota Payakumbuh	64,84	85,00
5	Kota Pariaman	66,69	26,00
6	Kota Sawahlunto	61,35	25,00
7	Kota Solok	78,02	70,00
8	Kabupaten Pesisir Selatan	40,21	40,53
9	Kabupaten Padang Pariaman	30,20	5,73
10	Kabupaten Agam	40,58	44,00
11	Kabupaten Pasaman Barat	32,66	15,00
12	Kabupaten Pasaman	20,48	10,21
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	30,00	28,42
14	Kabupaten Tanah Datar	30,38	15,00
15	Kabupaten Solok	32,01	16,72
16	Kabupaten Solok Selatan	15,94	3,20
17	Kabupaten Sijunjung	32,35	6,00
18	Kabupaten Dharmasraya	38,87	10,00
19	Kabupaten Kep. Mentawai	22,13	-
Provinsi		44,19	34,54

Sumber: Satker Randal Kementerian PUPERA Provinsi Sumatera Barat, 2017

Selain sumber pencemar domestik, sumber pencemar dari limbah pertanian juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas air. Berdasarkan analisis laboratorium parameter sulfida, COD, BOD, TSS, fosfat, dan Nitrit juga sudah menunjukkan

kondisi yang melebihi baku mutu di beberapa sungai yang daerah tangkapan airnya merupakan areal pertanian ataupun perkebunan yang cukup luas. Sungai yang telah melebihi baku mutu terhadap parameter tersebut di beberapa titik pantau adalah Sungai Batang



Masang Gadang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Ombilin, dan Sungai Batang Pangian. Kondisi beban pencemaran sumber pertanian yang cukup tinggi ini didorong oleh pemakaian pupuk dan pestisida yang residunya sampai ke badan air. Adapun pemakaian pupuk anorganik di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 169.636,9 ton/tahun yang terdiri atas 63.759,9 ton urea, 12.212,0 ton ZA, 31.383,0 ton SP 36, dan 62.282,0 ton NPK (Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2017).

Selain akibat penggunaan pupuk dan pestisida pada aktivitas pertanian, juga terdapat aktivitas pembukaan lahan pada DAS yang menyebabkan terbukanya top soil yang berpotensi mempertinggi laju erosi. Akibat terjadinya erosi tersebut akan dapat meningkatkan kandungan TSS, BOD, dan COD pada air sungai.

Selain sumber pencemaran air sungai dari aktivitas domestik dan pertanian, beberapa sungai di Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan tekanan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin

terutama di Sungai Batanghari (Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya), Sungai Batang Kuantan (Kabupaten Sijunjung), dan Sungai Batang Ombilin (Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Sijunjung). Keberadaan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) ini menyebabkan tingginya parameter TSS di sungai-sungai tersebut, dan terdapat 3 titik pantau di Sungai Batanghari dan 2 titik pantau di Sungai Batang Ombilin yang memiliki parameter raksa (Hg) sudah melebihi baku mutu. Kondisi ini didorong oleh banyaknya masyarakat disekitar Sungai Batanghari, Sungai Batang Kuantan, dan Sungai Batang Ombilin yang menggantungkan mata pencahariannya pada penambangan emas aluvial. Selain itu, belum optimalnya penegakan hukum terkait aktivitas PETI tersebut, sehingga memperlambat penyelesaian permasalahan tambang emas tanpa izin ini.

Sumber pencemaran lainnya yang juga menyumbang beban pencemaran ke sungai adalah aktivitas industri baik skala rumah

tangga, kecil, maupun besar. Untuk industri dengan skala besar umumnya sudah memiliki unit pengolahan limbah dan memiliki arahan pengelolaan yang jelas dan tertuang dalam dokumen/izin lingkungannya (AMDAL atau UKL/UPL) seperti industri sawit dan

karet yang menjadi objek penilaian PROPER di Provinsi Sumatera Barat. Gambaran beban pencemaran air dari 38 usaha/kegiatan yang menjadi objek PROPER di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai mana Tabel berikut:

Tabel. 3.5. Beban Pencemaran Air 38 Objek PROPER Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2017

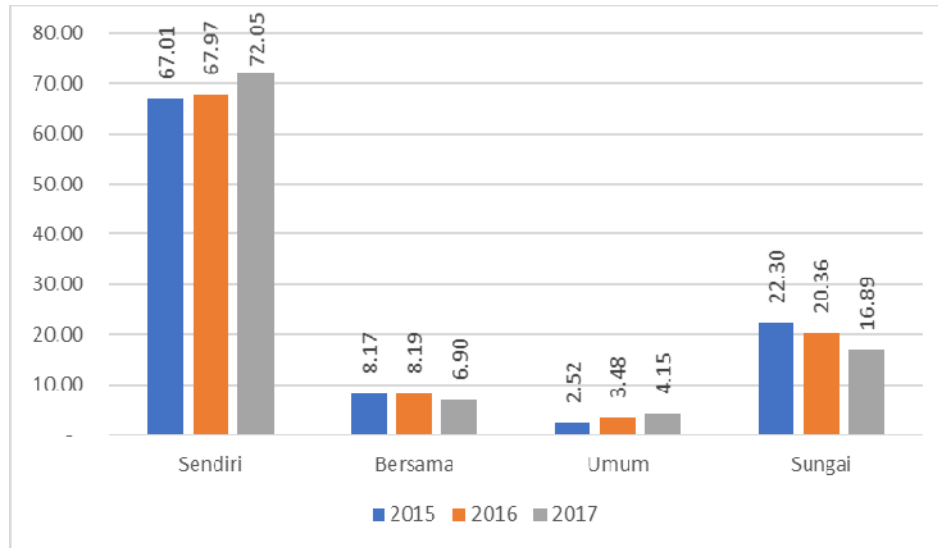
No	Parameter	Beban Pencemaran (ton/tahun)
1	BOD5	1.009,86
2	COD	2.804,51
3	TSS	87,77
4	Minyak & Lemak	23,14
5	N-Total (sebagai N)	11,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Beban pencemar industri objek PROPER tahun 2016-2017 ini mengalami penurunan sebesar 10,29 % jika dibandingkan dengan beban pencemaran periode penilaian tahun 2015-2016.

Sedangkan untuk industri skala kecil seperti pabrik tahu dan tempe praktis belum ada pengelolaan limbah yang efektif, dan hampir semuanya melakukan buangan langsung ke badan air. Sehingga dengan demikian beban yang harus diterima oleh sungai dari aktivitas ini menjadi cukup besar.

Berdasarkan data pada Tabel 23 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa sebesar 83 % penduduk Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki fasilitas buang air besar yang terdiri atas 72% sendiri, 7% fasilitas bersama seperti MCK komunal, 4 % menggunakan fasilitas umum seperti MCK di mesjid. Sedangkan masyarakat yang buang air besar sembarangan di sungai masih cukup besar, yaitu 17%. Adapun trend perkembangan sarana buang air besar masyarakat ini setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Olahan data Tabel 23 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.18 Trend Perkembangan Sarana Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat 2015-2017

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki sarana tempat buang air besar sendiri terus mengalami peningkatan dari 67,01% pada tahun 2015 menjadi 72,05% pada tahun 2017, sejalan dengan penurunan persentase masyarakat yang buang air besar sembarangan termasuk dari 22,3% pada tahun 2015 menjadi 6,89% pada tahun 2017.

Limbah padat dan cair yang akan dibahas sesuai dengan Tabel 27 dokumen IKPLHD adalah berdasarkan sumber yang terdiri atas sumber bergerak berupa aktivitas

transportasi di terminal dan pelabuhan, dan sumber tetap berupa lokasi industri dan sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit). Timbulan sampah sumber bergerak berupa terminal dan dermaga yang terdata baru sebesar 7,56 m³/hari, sedangkan untuk aktivitas industri dan sarana pelayanan kesehatan sebesar 3.424,47 m³/hari. Untuk timbulan limbah cair sumber bergerak sebesar 6 m³/hari, sedangkan sumber tidak bergerak sebesar 21.203,12 m³/hari.



3.2.2. Kondisi Kualitas Air dan Statusnya (State)

3.2.2.1. Kualitas Air Sungai

Gambaran kondisi kualitas air di Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui hasil perhitungan status mutu Metode Indeks Pencemaran, mengacu kepada Kep. Men.LH No. 115 Tahun 2003

tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air (dengan tujuh parameter kunci: TSS, BOD-5, COD, DO, Total Phosphat, Fecal Coli dan Total Coliform).

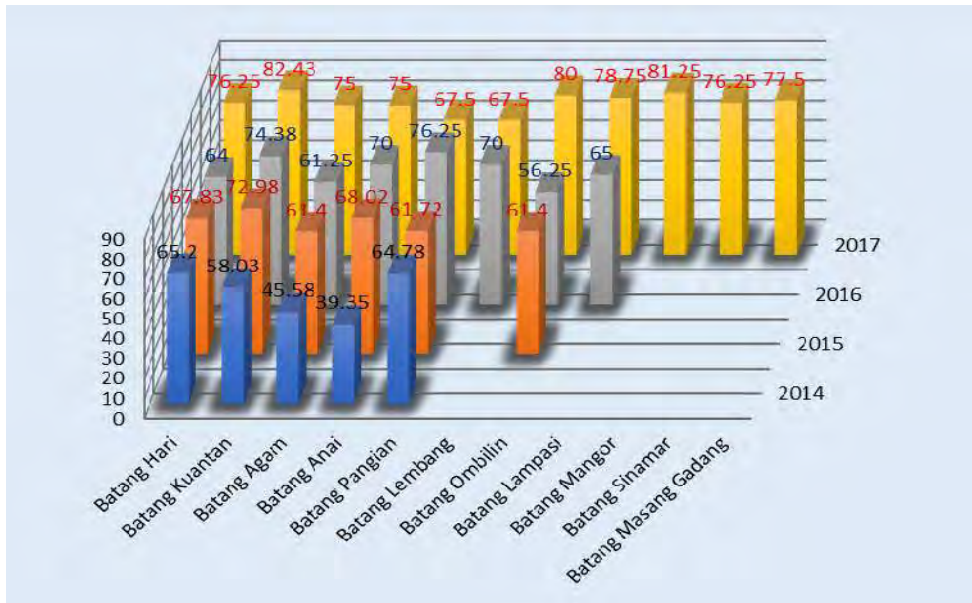
Hasil Perhitungan Status Mutu Air untuk sungai lintas Provinsi dan sungai lintas Kabupaten/Kota berdasarkan perbandingan antar waktu:

Tabel. 3.6. Perbandingan Antar Waktu Indeks Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat

SUNGAI	TAHUN	NILAI IKA	KATEGORI
Sungai Batang Hari	2014	65.20	Kurang
	2015	67.83	Cukup
	2016	64.00	Kurang
	2017	76,25	Baik
Sungai Batang Kuantan	2014	58.03	Kurang
	2015	72.98	Cukup
	2016	74.38	Baik
	2017	82,43	Sangat Baik
Sungai Batang Agam	2014	45.58	Waspada
	2015	61.40	Kurang
	2016	61.25	Kurang
	2017	75	Baik
Sungai Batang Anai	2014	39.35	Waspada
	2015	68.02	Cukup
	2016	70.00	Cukup
	2017	75	Baik
Sungai Batang Pangian	2014	64.78	Kurang
	2015	61.72	Kurang
	2016	76.25	Baik
	2017	67,5	Cukup
Sungai Batang Lembang	2014		
	2015		
	2016	70.00	Cukup
	2017	67,5	Cukup
Sungai Batang Ombilin	2014		
	2015	61.40	Kurang
	2016	56.25	Sangat Kurang
	2017	80	Baik
Sungai Batang Lampasi	2014		
	2015		

SUNGAI	TAHUN	NILAI IKA	KATEGORI
	2016	65.00	Kurang
	2017	78,75	Baik
Sungai Batang Mangor	2014		
	2015		
	2016		
	2017	81,25	Baik
Sungai Batang Sinamar	2014		
	2015		
	2016		
	2017	76,25	Baik
Sungai Batang Masang Gadang	2014		
	2015		
	2016		
	2017	77,5	Baik

Sumber: Olahan Tabel-17 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

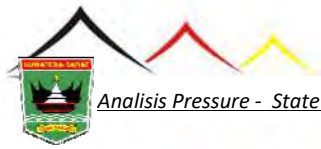


Sumber: Olahan Tabel-17 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.19. Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Provinsi Tahun 2014-2017

Dari Gambar 3.19 di atas, dapat dilihat bahwa Sungai yang memiliki kualitas air yang paling baik adalah Sungai Batang Kuantan (IKA=82,43), Sungai Batang Masang Gadang (IKA = 81,25), dan Sungai

Batang Ombilin (IKA=80). Sedangkan sungai yang memiliki kualitas air yang paling buruk adalah Sungai Batang Pangian (IKA=67,5) dan Sungai Batang Lembang (IKA=67,5).



Terdapat 6 sungai yang indeks kualitas airnya mengalami peningkatan, yaitu sungai Batanghari, Sungai Batang Kuantan, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Ombilin, dan Sungai Batang Lampasi, sedangkan 2 sungai mengalami penurunan kualitas air yaitu Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Lembang. Selain itu, terdapat 3 buah sungai yang baru mulai dipantau tahun 2017, yaitu Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, dan Sungai Batang Masang Gadang yang kualitas airnya masih tergolong baik, karena sungai-sungai tersebut kegiatan yang berpotensi menyumbang beban pencemarannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sungai-sungai yang telah dipantau sebelumnya.

Terkait 2 sungai yang kualitas airnya mengalami penurunan yaitu Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Lembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sungai Batang Pangian

Sungai Batang Pangian menerima beban pencemaran yang cukup besar dari aktivitas penambangan pasir dan batuan

di badan air dan sempadannya, selain itu daerah tangkapan air Sungai Batang Pangian juga merupakan daerah pertanian yang cukup intensif, hal ini ditunjukkan dari hasil uji laboratorium parameter sulfida telah melebihi baku mutu dari hulu sampai hilir. Sungai Batang Pangian juga merupakan badan air penerima dari beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang ditunjukkan dengan adanya parameter COD yang telah melebihi baku mutu di 3 (tiga) titik yang lokasinya dekat dengan pabrik kelapa sawit tersebut. Selain aktivitas-aktivitas tersebut juga terdapat kontribusi beban pencemaran dari limbah cair dan sampah domestik.

b) Sungai Batang Lembang

Sungai Batang Lembang yang hulunya berada di Danau Dibawah merupakan daerah pertanian yang sangat intensif, dimana pemakaian pupuk anorganik dan pestisida di daerah ini cukup tinggi.

Aktivitas pada wilayah hulu adalah berupa pertanian hortikultura yang sangat intensif, dan pada daerah rentang dan hilir merupakan daerah pertanian lahan basah yang cukup luas di Kabupaten Solok dan Kota Solok yang merupakan kabupaten/kota penghasil beras yang cukup besar di Provinsi Sumatera Barat. Selain sumber pertanian juga teridentifikasi pengelolaan sampah dan limbah cair domestik masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Batang Lembang belum optimal, dan dilapangan masih terlihat di hampir semua jembatan merupakan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, dan permukiman

di sekitar sungai juga belum memiliki sarana pengolahan limbah cair domestik yang memadai.

Secara keseluruhan indeks pencemaran air Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 75,69, kondisi ini lebih baik dari pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,40 dan tahun 2015 sebesar 66,83. Jika dibandingkan dengan IKA di tingkat nasional, kualitas air Provinsi Sumatera Barat juga lebih tinggi dimana IKA nasional Tahun 2017 adalah sebesar 53,2. Secara lengkap perbandingan antar waktu IKA Provinsi Sumatera Barat dan perbandingan dengan IKA Nasional adalah sebagaimana grafik di bawah ini.



Sumber: Olahan Tabel-17 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Grafik. 3.20. Perbandingan antar waktu IKA Provinsi Sumatera Barat dan Perbandingan dengan IKA Nasional

3.2.2.2. Kualitas Air Danau

Selain sungai, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki perairan lentik berupa 25 unit danau/waduk/situ/embung yang tersebar di 9 (Sembilan) kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Ke-25 perairan lentik tersebut terdiri atas:

- 5 (lima) buah danau,
- 4 (empat) buah situ danau,
- 6 (enam) buah waduk, dan
- 10 (sepuluh) buah embung.

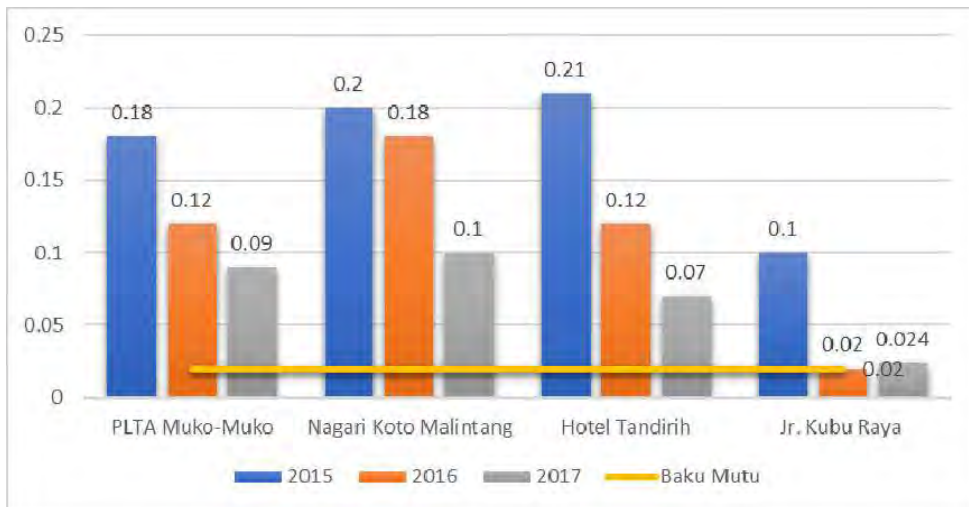
Ukuran danau di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, dengan kategori luas yang berbeda. Danau Singkarak merupakan danau yang paling luas di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 107.8 Km², Danau Maninjau dengan luas 97.9 Km², Danau Diatas dengan luas 12.3 Km², Danau Dibawah dengan luas 11.2 Km², dan yang paling kecil adalah Danau Talang dengan luas 0,0009 Km².

Dari hasil pemantauan kualitas danau yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kualitas air Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diateh dan Danau Dibawah menunjukkan beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu yang masing-masing danau berbeda parameternya sesuai dengan aktivitas yang mempengaruhinya, baik pada badan air maupun daerah tangkapan airnya.

Untuk Danau Maninjau terdapat beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat yaitu parameter: BOD₅, COD, Amoniak, Sulfida, dan Total Coliform. Berdasarkan parameter kualitas air yang telah terlampaui baku mutunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab pencemaran Danau Maninjau ini diperkirakan sebagai dampak dari aktifitas budidaya perikanan keramba jaring apung di perairan Danau Maninjau yang sudah melampaui kapasitas daya dukungnya. Selain

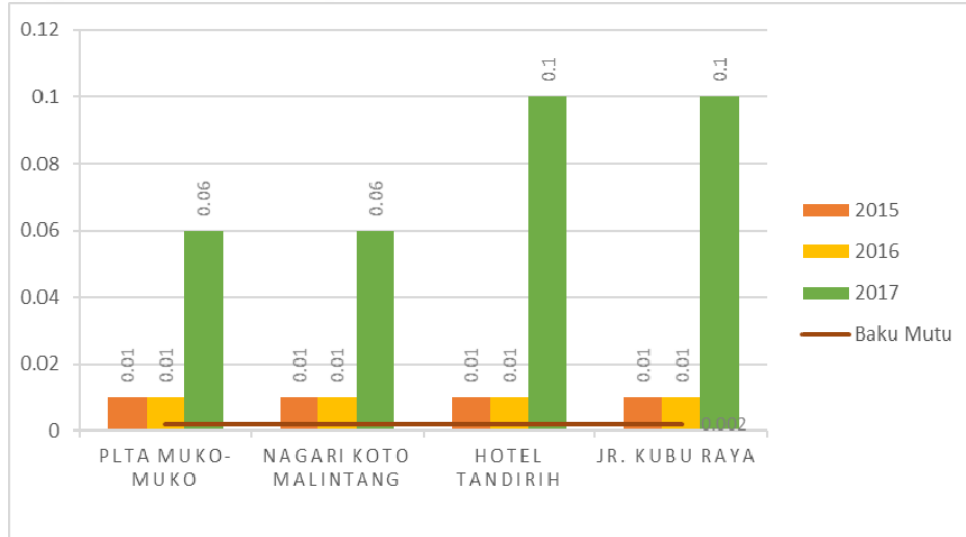
itu, terkait tingginya parameter total coliform diperkirakan juga terdapat limbah cair domestik yang masuk ke Danau Maninjau. Ditinjau dari status tropiknya Danau Maninjau juga sudah tergolong danau yang sudah Hipereutrof/tercemar berat, hal ini dapat dilihat dari konsentrasi Nitrogen Total dalam air danau yang sudah sangat tinggi yaitu 2.362,5 µg/l dan kecerahan yang kurang dari 2,5 meter.

Perbandingan antar waktu kualitas air Danau Maninjau ditinjau dari parameter yang melebihi baku mutu akan ditampilkan terhadap 3 parameter, yaitu parameter amoniak, sulfida, dan Total Coliform dengan pertimbangan bahwa 3 parameter tersebut merupakan parameter yang melebihi baku mutu di hampir semua titik pantau di Danau Maninjau. Adapun perbandingan antar waktu dan antar lokasi sampling parameter dimaksud adalah sebagai berikut.



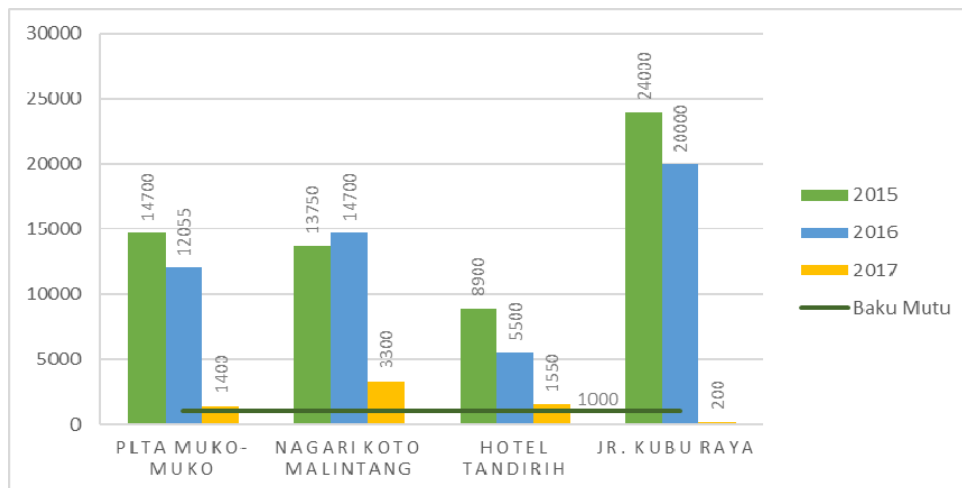
Sumber: Olahan Tabel-18 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.21. Perbandingan Antar Waktu Dan Antar Lokasi Parameter Amoniak Di Perairan Danau Maninjau



Sumber: Olahan Tabel-18 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.22. Perbandingan Antar Waktu Dan Antar Lokasi Parameter Sulfida Di Perairan Danau Maninjau



Sumber: Olahan Tabel-18 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.23. Perbandingan Antar Waktu Dan Antar Lokasi Parameter Total Coliform Di Perairan Danau Maninjau

Sedangkan untuk Danau Singkarak beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu adalah TSS, DO, COD, Amoniak, sulfida, dan Total Coliform. Kondisi kualitas

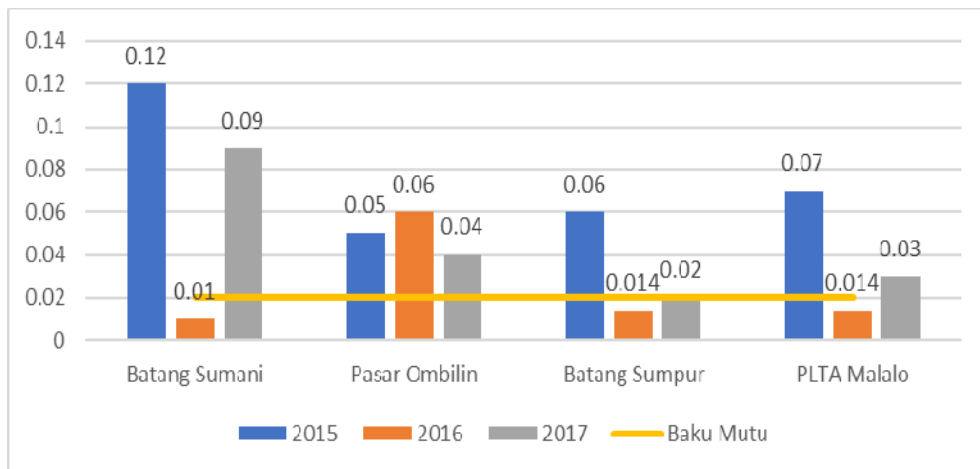
air Danau Singkarak ini dipengaruhi oleh kualitas air Sungai Batang Lembang yang bermuara ke Danau Singkarak, dimana titik sampel yang dekat dengan Muara Sungai Batang

Lembang tersebut memiliki kualitas air yang cenderung lebih rendah dari titik pantau yang lainnya.

Kualitas air Danau Singkarak akan sangat erat kaitannya dengan aktivitas pada daerah tangkapan air Sungai Batang Lembang yang merupakan wilayah pertanian yang sangat intensif, sehingga residu pupuk dan pestisa terbawa oleh aliran Sungai Batang Lembang sampai ke Danau Singkarak. Selain sumber pencemar yang bersumber dari aktivitas pertanian, sumber pencemar domestik baik dari limbah cair maupun dari sampah juga turut mempengaruhi kualitas air Danau Singkarak, dimana parameter Total

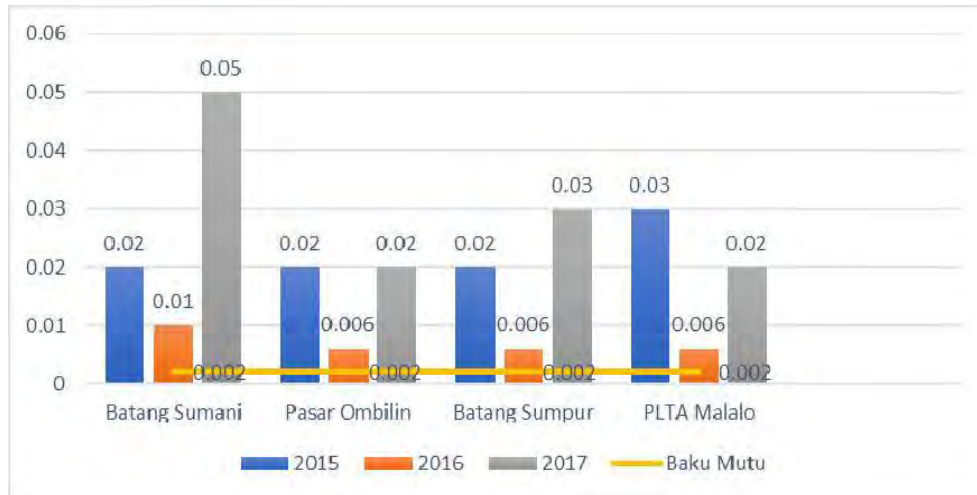
Coliform semua titik telah melebihi baku mutu. Terkait status tropik Danau Singkarak juga sudah berstatus Hipereutrof/tercemar berat, hal ini dapat dilihat dari konsentrasi Nitrogen Total dalam air danau yang sudah sangat tinggi yaitu 7.925 µg/l, khlorofil-a sebesar baku mutu 200 µg/l dan kecerahan yang kurang dari 2,5 meter.

Adapun perbandingan antar waktu kualitas air Danau Singkarak, dibawah ini ditampilkan parameter amoniak, sulfida dan total coliform sebagai parameter yang paling banyak melewati baku mutu pada titik-titik pantau yang telah dilakukan sebagai berikut.



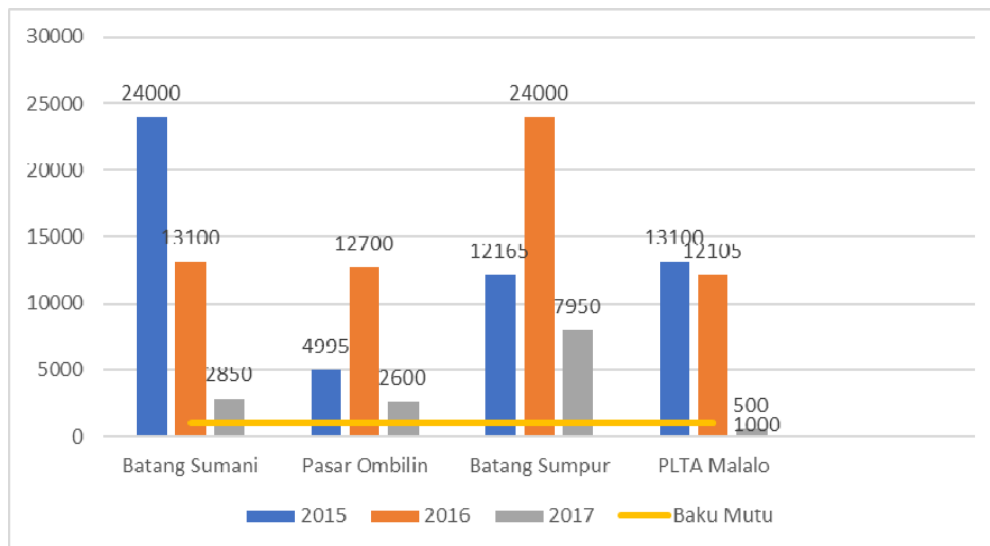
Sumber: Olahan Tabel-18 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.24. Perbandingan antar waktu dan antar lokasi Parameter Amoniak di Perairan Danau Singkarak



Sumber: Olahan Tabel-18 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.25. Perbandingan antar waktu dan antar lokasi Parameter Sulfida di Perairan Danau Singkarak



Sumber: Olahan Tabel-18 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.26. Perbandingan antar waktu dan antar lokasi Parameter Total Coliform di Perairan Danau Singkarak.

Membahas kualitas air Danau Singkarak sebagaimana tersebut di atas akan sangat erat kaitannya dengan kualitas air Danau Dibawah, karena Danau Dibawah adalah hulu

dari Sungai Batang Lembang yang bermuara ke Danau Singkarak sehingga kualitas air Danau Dibawah akan sangat mempengaruhi kualitas air Danau Singkarak. Berdasarkan

hasil pemantauan kualitas airnya, terdapat beberapa parameter uji yang telah melebihi baku mutu pada air Danau Dibawah yaitu: total coliform, sulfida, amoniak, COD, dan BOD. Dengan kondisi kualitas air tersebut mengindikasikan bahwa Danau Dibawah mengalami tekanan yang cukup besar dari aktivitas pertanian berupa hortikultura pada daerah tangkapan airnya, dan limbah cair domestik masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Dibawah sebagian masih dibuang ke badan air danau.

Sedangkan untuk Danau Diatas kualitas airnya relatif lebih baik dari kualitas air Danau Maninjau, Danau Singkarak dan danau Dibawah, namun demikian masih terdapat parameter yang melebihi baku mutu berupa total coliform dan Sulfida. Sumber pecemar di Danau Diatas ini sebagian besar adalah dari aktifitas domestik yang ditunjukkan oleh parameter total coliform, dan aktifitas pertanian yang ditunjukkan oleh parameter sulfida.

3.2.2.3. Kualitas Air Sumur

Kualitas air sumur (sumur gali) merupakan air tanah dangkal

yang secara kualitas sangat dipengaruhi oleh aktivitas disekitarnya seperti pembuangan limbah cair domestik, aplikasi air limbah pada lahan, dan aktivitas lainnya seperti pertanian, peternakan, industri, dan pertambangan. Selain faktor antropogenik tersebut, kondisi alami seperti kandungan mineral bebatuan dan tanah, juga turut andil mempengaruhi kualitas air sumur.

Data kualitas air sebagaimana Tabel 19 merupakan data kualitas air sumur yang dilakukan oleh 10 perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit yang menerapkan aplikasi air limbah pada lahan (land application). 9 (sembilan) perusahaan tersebut adalah PT. Gersindo Minang Plantation Kabupaten Pasaman Barat, PT. Binapratama Sakatojaya Kabupaten Solok Selatan, PT. Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat, PT. Perkebunan Pelalu Raya Kabupaten Agam, PT. Binapratama Sakatojaya Kabupaten Dharmasraya, PT. Sumbar Andalas Kencana Kabupaten Dharmasraya, PT. Incasi Raya Pangian Kabupaten Dharmasraya, PT. Selago Makmur Plantation

Kabupaten Dharmasraya, PT. Tidar Kerinci Agung Kabupaten Dharmasraya dan PT. AMP Plantation Kabupaten Agam Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki izin aplikasi air limbah pada lahan memiliki kewajiban melakukan pemantauan air tanah pada 3 lokasi yaitu: sumur lahan kontrol, sumur lahan aplikasi, dan sumur penduduk.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap air tanah di lokasi kegiatannya diperoleh informasi bahwa, sebagian besar kualitas air tanah yang dipantau masih memenuhi baku mutu berdasarkan Permenkes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum. Sebagian kecil parameter yang tidak memenuhi baku mutu pH merupakan kondisi alamiah air tanah di lokasi pemantauan, hal ini dibuktikan dalam dokumen kajian aplikasi air limbah pada lahan masing-masing perusahaan pH air di sumur pantauannya asam seperti PT. Bina Pratama Sakato Jaya Dharmasraya, PT. Incasi Raya Pangian, PT. Selago

Makmur Plantation, dan PT. Tidar Kerinci Agung.

3.2.2.4. Kualitas Air Laut

Provinsi Sumatera Barat berada di Pantai Barat Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai 2.420 km, dan memiliki tujuh kabupaten/kota pesisir termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Garis pantai yang cukup panjang selain dari Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan yang terpendek adalah garis pantai Kabupaten Agam.

Kualitas air laut dipengaruhi oleh aktivitas di daerah aliran sungai yang bermuara ke laut, dan aktivitas-aktivitas antropogenik lainnya di perairan laut itu sendiri seperti pelayaran, budidaya perikanan, aktivitas nelayan, wisata bahari, dan aktivitas lainnya di laut dan pantai. Kualitas air laut di Provinsi Sumatera Barat mendapat tekanan dari aktivitas pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembukaan lahan perkebunan, sampah domestik, industri, aktivitas pelayaran, dan lain-lain.

Dalam rangka menyediakan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir laut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemantauan kualitas air laut setiap tahunnya pada pantai-pantai wisata dan muara sungai di 6 kabupaten/kota pesisir. Data hasil pemantauan tersebut tercantum dalam Tabel 20 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa titik pemantauan yang kualitas airnya telah melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Selain itu, kualitas air laut di Pesisir Kota Padang relatif lebih buruk kualitasnya dibandingkan dengan air laut di kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan karena aktivitas Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat jauh lebih padat dan lebih kompleks dibandingkan dengan kabupaten/kota

lainnya. Beberapa parameter yang melebihi baku mutu di pesisir pantai Kota Padang ini adalah amoniak, fosfat, BOD, dan COD. Kondisi ini diperkirakan karena beban pencemaran berupa limbah cair dan padat dari sumber domestik, industri, pariwisata, dan pelayaran yang masuk ke pesisir Kota Padang cukup tinggi.

Kualitas air laut yang paling baik berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Sumatera Barat adalah di pesisir pantai Kabupaten Pasaman Barat. Pada wilayah ini semua parameter uni masih dibawah baku mutu.

Berdasarkan kondisi lapangan di pesisir Provinsi Sumatera Barat, sumber pencemar yang dominan pada objek pemantauan adalah limbah domestik baik dari permukiman penduduk maupun pariwisata, selain itu juga terdapat limbah cair dari aktivitas kapal nelayan.

3.2.2.5. Curah Hujan

Berdasarkan Tabel 21 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa hasil pengamatan di 20



stasiun menunjukkan curah hujan rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 3.086,85 mm/tahun. Curah hujan tertinggi berada di Kota Padang sebesar 5.057,00 mm/tahun, diikuti Kota Padang Panjang sebesar 5.014,00 mm/tahun. Sedangkan curah hujan terendah terdapat di

Kabupaten Pasaman yaitu sebesar 1.697,00 mm/tahun.

3.2.2.6. Sumber Air Minum

Provinsi Sumatera Barat telah memiliki cakupan pelayanan air minum sebesar 75,42 % yang secara rinci perkabupaten/kotanya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.7. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum
Provinsi Sumatera Barat.**

No	Kabupaten/Kota	% Pelayanan Air Minum
1	Kota Padang	91,87
2	Kota Padang Panjang	97,94
3	Kota Bukittinggi	93,43
4	Kota Payakumbuh	94,89
5	Kota Pariaman	86,29
6	Kota Sawahlunto	96,15
7	Kota Solok	99,20
8	Kabupaten Pesisir Selatan	71,35
9	Kabupaten Padang Pariaman	64,06
10	Kabupaten Agam	75,64
11	Kabupaten Pasaman Barat	58,54
12	Kabupaten Pasaman	58,65
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	69,88
14	Kabupaten Tanah Datar	84,28
15	Kabupaten Solok	62,24
16	Kabupaten Solok Selatan	59,25
17	Kabupaten Sijunjung	69,43
18	Kabupaten Dharmasraya	54,88
19	Kabupaten Kep. Mentawai	45,01
Provinsi Sumatera Barat		75,42

Sumber: Satker Randal Kementerian PUPERA Provinsi Sumatera Barat, 2017

Dengan tingkat pelayanan air minum yang sudah mencapai 75,42% tersebut, tidak berbanding lurus dengan akses masyarakat terhadap

memenuhi kebutuhan air minum, dimana berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 22 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat sebagian besar penduduk Sumatera Barat masih menggunakan air dalam kemasan sebagai air minumnya (38,69%), dan sebesar 12,72% yang menggunakan air ledeng sebagai sumber air minumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang disalurkan oleh PDAM sebagian besar belum memenuhi persyaratan air minum, oleh karena itu sebagian masyarakat memilih untuk menggunakan air minum dalam kemasan sebagai sumber air minumnya yang secara harga jauh lebih mahal.

3.2.3. Upaya Pengelolaan Isu Pencemaran Air (*Response*)

3.2.3.1. Response Kualitas Air Sungai

Sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan Sungai Batang Agam sebagai role model pengelolaan sungai yang nantinya akan direplikasi oleh sungai-sungai

lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Terkait pengelolaan Sungai Batang Agam ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk suatu perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait (Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh). Perjanjian Kerjasama ini diinisiasi mulai tahun 2016 dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur dengan Bupati/Walikota yang dilintasi oleh Sungai Batang Agam tentang Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam. MoU dimaksud sudah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam.

Implementasi dari model kerjasama ini sudah dimulai semenjak ditandatanganinya MoU oleh masing-masing pihak, dan program rincinya yang mengikat berupa hak dan kewajiban baru disusun pada tahun 2017. Dengan komitmen yang sudah terbentuk

tersebut, memberikan dampak yang secara perlahan bisa kembali memulihkan Sungai Batang Agam.

Beberapa aksi nyata yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemulihan kualitas air Sungai Batang Agam pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun konsep program dan kegiatan pemulihan Sungai Batang Agam yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Agam, Lima Puluh Kota, Bukittinggi, dan Payakumbuh) dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan program dan kegiatan penurunan beban pencemaran dan upaya pemulihan kualitas sungai dan DAS Batang Agam secara terukur sesuai dengan kewenangan masing-masing dan
 - b) Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penurunan beban pencemaran dan pemulihan kualitas Sungai Batang Agam;
 2. Membentuk klaster pengelolaan sampah dan limbah cair pada kawasan permukiman yang lokasinya dekat dengan Sungai Batang Agam di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh;
 3. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli sungai dan sanitasi;
 4. Melakukan kegiatan sosialisasi pengolahan limbah domestik dengan digester biogas di Kota Payakumbuh;
 5. Penataan Sungai Batang Agam yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V;
 6. Melakukan gotong-royong aksi bersih-bersih sampah di sempadan sungai.
- Pencemaran air sungai bukan hanya disebabkan oleh limbah domestik, namun industri/pabrik juga turut berkontribusi mencemari sungai

melalui limbah yang dibuang ke media lingkungan, baik industri yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun yang tidak memiliki IPAL. Melalui Program PROPER (Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan) dan PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat, setiap usaha dan/atau kegiatan didorong dan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan air limbah melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan. Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan (PROPER dan PROPER Daerah) ini juga turut mendorong perusahaan untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan lingkungannya.

Terhadap aktivitas yang sifatnya ilegal berupa penambangan emas tanpa izin (PETI) pada sempadan dan badan air sungai yang

terdapat di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupten Sijunjung dan Kota Sawahlunto, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan inventarisasi lahan-lahan bekas tambang yang telah ditinggalkan. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut masih dijumpai adanya aktivitas penambangan aktif baik di Sungai maupun di sempadannya. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Sumatera Barat sebagai instutusi penegak Peraturan Daerah. Tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut juga sudah dilakukan operasi terpadu dengan Tim Gabungan dibawah koordinasi SATPOL PP dengan memasang plang larangan menambang pada lokasi-lokasi yang tidak ada izinnya.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.27. Penertiban PETI Oleh Tim Penegak Perda di Kabupaten Sijunjung

3.2.3.2. Response Kualitas Air Danau

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan danau pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat, instansi vertikal di daerah, OPD terkait Provinsi, dan OPD terkait Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok dalam rangka pemulihan pencemaran danau;
2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau dan Danau Singkarak yang saat ini sudah dalam tahap finalisasi Ranperda, dan telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Kabupaten Agam sudah memiliki Peraturan Daerah Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau sebagai arahan dalam pengelolaan kawasannya

3.2.3.3. Response Kualitas Air Laut

Upaya terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Membuat surat tindak lanjut kepada Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir laut untuk melakukan pemantauan sesuai dengan Kepmen LH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut dimana Gubernur, Bupati/Walikota wajib melaksanakan kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data potensi dan kerusakan kawasan pesisir laut di Sumatera Barat serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka konservasi wilayah pesisir laut.

3.3. Kualitas Udara

Hasil penjaringan isu prioritas lingkungan hidup menunjukkan bahwa kualitas udara tidak termasuk kedalam salah satu isu prioritas. Pertumbuhan kendaraan akan seiring dengan peningkatan penggunaan bahan bakar dan laju pertumbuhan penduduk juga sejalan dengan meningkatnya timbulan sampah apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik akan memberikan dampak kepada penurunan kualitas udara.

3.3.1. Tekanan Terhadap Kualitas Udara (*Pressure*)

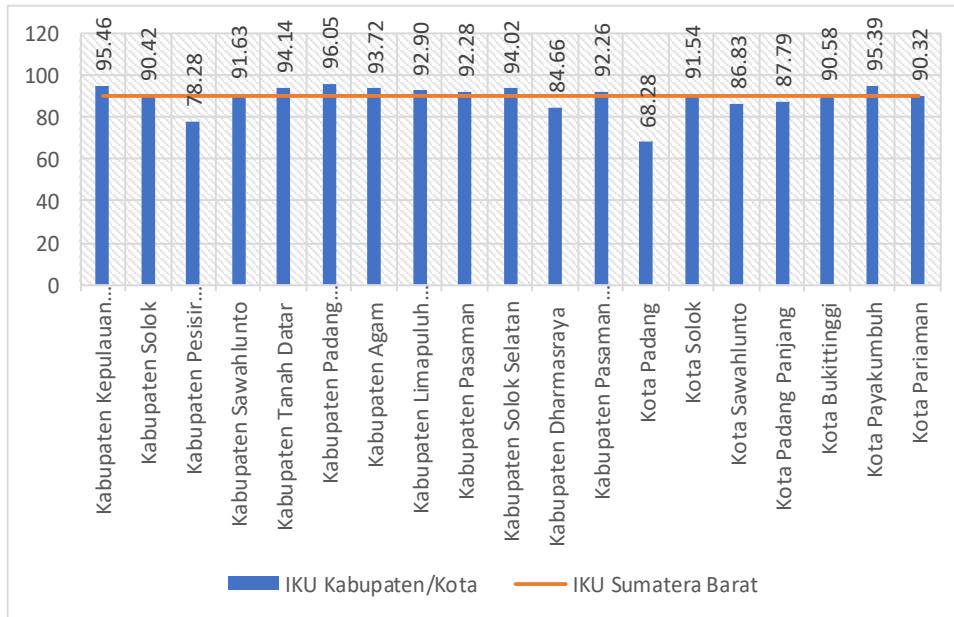
Pada Tabel 31 Lampiran DIKPLHD menunjukkan bahwa Jenis bahan bakar minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga sebesar 19.609.679 liter/tahun dan LPG sebanyak 32.407.174 kg/tahun sedangkan kayu bakar sebanyak 7.18.183 kg/tahun. Sementara penggunaan bahan bakar untuk aktifitas transportasi yang berjenis bahan bakar Bensin sebanyak 943.844 liter/tahun dan solar sebanyak 3.013.420 liter pertahun.

Disamping itu, timbulan sampah pada Tahun 2017 berdasarkan tabel 42 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa total yang dihasilkan timbulan sampah sebanyak 2.181.224,99 kg/hari atau 2.181,24 ton/hari. Kota Padang merupakan timbulan terbesar di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 494.426,27 Kg/hari dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten terendah timbulan sampahnya yaitu sebesar 1.287 kg/hari.

3.3.2. Kondisi Udara dan Statusnya (*State*)

3.3.2.1. Kualitas Udara

Parameter yang digunakan dalam pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler adalah SO₂ dan NO₂ dengan lokasi pemantauan yang mewakili transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran. Dari hasil pemantauan kualitas udara tahun 2017, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari 19 Kabupaten/Kota adalah 89,87 yang dikategori Sangat Baik.



Sumber: Olahan Tabel 30 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

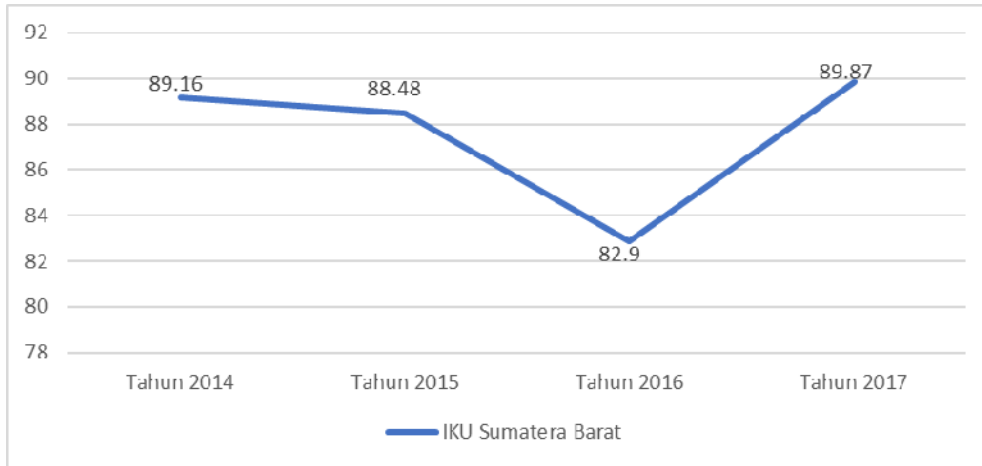
Gambar 3.28. Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Kualitas Udara Rata-rata Provinsi Sumatera Barat

Dari 4 (empat) lokasi pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler, sumber pencemar yang tertinggi berasal dari transportasi. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara yang terendah berada pada Kota Padang yaitu 68,28 dan yang tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 95,46. Rendahnya Indeks Kualitas Udara di Kota Padang disebabkan karena Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang jumlah kendaraan bermotor

cukup tinggi dan industrinya lebih banyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya begitu sebaliknya dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah kabupaten/kota yang nilai Indeks Kualitas Udara-nya dibawah Indeks Kualitas Udara rata-rata Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) sedangkan yang berada diatas rata-rata Indeks Kualitas Udara Sumatera Barat sebanyak 15 (lima belas) kabupaten /kota.

Jika dibandingkan dengan target hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Provinsi 4 (empat)

tahun terakhir diperoleh data series yang cenderung fluktuatif seperti terlihat pada Gambar.3.22. berikut



Sumber: Olahan Tabel 30 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

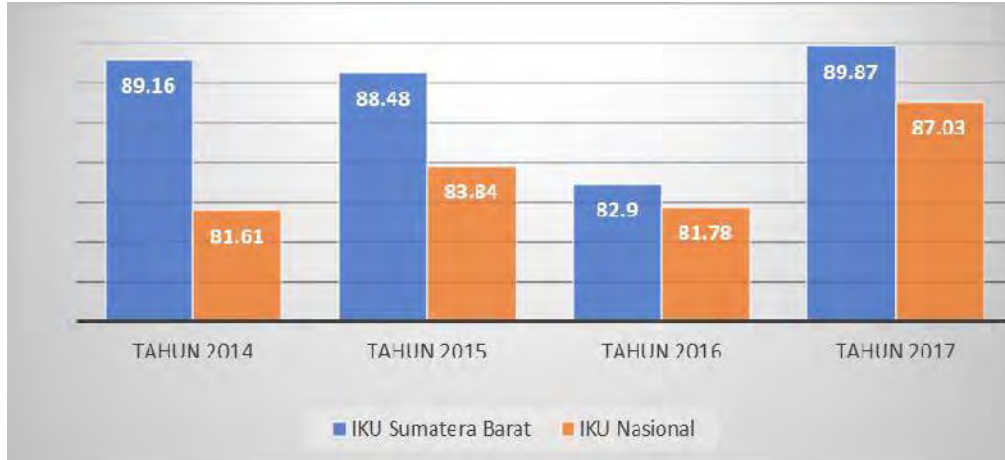
Gambar 3.29. Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Sumatera Barat 4 (empat) tahun terakhir.

Pada Tahun 2014 nilai Indeks Kualitas Udara 89,16, turun menjadi 88,48 pada Tahun 2015 dan turun drastis pada Tahun 2016 serta naik drastis pada Tahun 2017 menjadi 89,87. Fluktuasi perubahan nilai Indeks Kualitas Udara disebabkan karena :

1. Adanya penambahan jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pemantauan setiap tahunnya.

2. Jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya bertambah secara signifikan.

Kecenderungan nilai Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 4 (empat) tahun terakhir berada diatas Indeks Kualitas Udara Nasional seperti terlihat pada Gambar. 3.30.



Sumber: Olahan Tabel 30 Buku Data DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.30. Perbandingan dengan Indeks Kualitas Udara Nasional

Nilai Indeks Kualitas Udara Sumatera Barat yang dikategorikan sangat baik juga dipengaruhi kondisi hutan yang masih relatif luas sampai dengan Tahun 2017 seluas 18.635,38 Km² dan Indeks Tutupan Hutan 62.94.

3.3.2.2. Kualitas Air Hujan

Parameter tingkat keasaman (pH) merupakan parameter kunci untuk menentukan kualitas air hujan. Berdasarkan Tabel 29 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 hasil pemantauan yang dilakukan oleh Stasiun Klimatologi GAW Koto Tabang Kabupaten Agam berkisar 4,69 s/d 6,06. Pemantauan bulan Juli 2017, parameter pH menunjukkan tingkat keasaman kualitas air hujan

yaitu sebesar 4,69 namun pemantauan pada bulan Agustus 5,75.

3.3.2.3. Suhu

Berpedoman kepada tabel 28 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 berdasarkan hasil pemantauan di 6 Stasiun yang mewakili daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai. Suhu rata-rata bulanan Provinsi Sumatera Barat pada stasiun pemantauan yang mewakili wilayah pegunungan (Stasiun Geofisika Padang Panjang, Stasiun GAW Bukit Koto Tabang, Stasiun Aripan Sumani) berkisar antara 21,4 – 25,5 °C, sedangkan wilayah pesisir pantai (stasiun Klimatologi Padang Pariaman,

Stasiun Meteorologi BIM dan Stasiun Maritim Teluk Bayur) berkisar antara 25,4 – 27,7 °C.

Suhu rata-rata bulanan dari hasil pemantauan pada 6 (enam) stasiun tersebut menunjukkan suhu terendah terjadi pada Bulan Februari sebesar 20,1 °C hasil pemantauan stasiun dan tertinggi terjadi pada bulan Mei 27,7 °C

3.3.3. Upaya Pengelolaan

Kualitas Udara (*Response*)

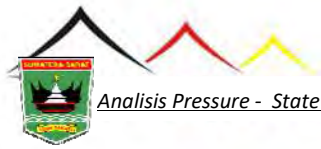
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas udara dilakukan langkah-langkah diantaranya:

1. Adanya upaya dari kabupaten /kota yang melakukan upaya pengurangan emisi kendaraan bermotor melalui program car free day.
2. Penambahan ruang terbuka hijau di kabupaten/kota;
3. Mengoptimalkan dan mengaktifkan kembali angkutan massal Kereta Api (Padang – Pariaman; Lubuk Buaya – Kayu Tanam)

3.4. Resiko Bencana

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang masuk di wilayah barat Pulau Sumatera terletak di Pantai Barat pulau Sumatera antara 0°54 Lintang Utara dan 3°30' lintang selatan serta 98°53' Bujur Timur, dan sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Alam Sumatera meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17 % dari luas keseluruhan, kawasan yang perlu dilindungi dari timbulnya bencana khususnya kebakaran hutan. Daratan Provinsi Sumatera Barat juga merupakan kawasan rawan bencana seperti tanah longsor dan letusan gunung berapi karena di semua kabupaten/kota tidak lepas dari gugusan gunung.

Bila dikaji dari sudut pandang geotektonik, Provinsi Sumatera Barat mempunyai kondisi yang terletak dekat lempeng Indo Australia dan eurasia serta dilewati oleh sesar sumatera yang memanjang sepanjang Pulau Sumatera. Selain itu Provinsi



Sumatera Barat mempunyai gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Tandikat dan Gunung kerinci. Keadaan ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.

Secara teoritis Sumatera Barat memiliki potensi ancaman bencana yang dominan, yaitu: 1) gempa bumi, 2) tsunami, 3) tanah longsor/gerakan tanah, 4) letusan gunung api, 5) banjir, dan 6) kekeringan. Untuk menghadapi ancaman bencana yang beragam dan semakin tinggi intensitasnya dalam tiga tahun terakhir ini, diperlukan penilaian dan analisis risiko bencana. Penilaian atau analisis risiko bencana bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap bencana. Hasil analisis menjadi acuan dalam perumusan tindakan prioritas pengurangan risiko bencana. Salah satu komponen analisis risiko bencana adalah kemampuan kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, daerah dalam menangani bencana. Pada

tahun 2017 bencana yang cukup menimbulkan efek kerugian yang cukup besar adalah banjir namun tidak menimbulkan korban jiwa (tabel 37).

3.4.1. Tekanan Terhadap Resiko Kebencanaan (*Pressure*)

3.4.1.1. Banjir

Banjir atau banjir bandang sering terjadi pada alur atau lembah tekung lereng antara perbukitan /pegunungan dengan dataran. Apabila pada bagian atas secara batuan tersusun oleh batuan yang lepas dengan kandungan air yang tinggi akibat curah hujan maka akan dapat mengakibatkan banjir. Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari air sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampungan banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat

phenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah dan hambatan lainnya.

3.4.1.2. Bencana Kekeringan

Secara astronomis, Indonesia dilalui oleh garis lintang nol derajat atau garis khatulistiwa, sesuai dengan pembagian iklim di dunia, daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa memiliki iklim tropis atau tropis panas. Artinya, daerah tersebut akan mendapatkan penyinaran lebih banyak daripada daerah yang tidak dilalui oleh garis khatulistiwa dan kondisi ini diperparah dengan pola hidup pemakaian air yang berlebihan pada musim hujan.

3.4.1.3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat kejadian terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan melahap apa saja dihadapannya mengikuti arah angin. Kebalikannya, penyebaran api kebakaran di lahan

gambut justru tidak mengikuti arah angin. Titik api justru berada di kedalaman lebih dari 2 meter. Pada kawasan gambut rembetan api justru berada di kedalaman lebih dari 2 meter. Pada kawasan gambut rembetan api akan meluas ke segala arah dan sulit untuk diperkirakan penyebarannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara.

3.4.1.4. Gempa bumi dan longsor

Pulau Sumatera Barat yang terletak di kawasan pantai bagian barat pulau Sumatera berhadapan langsung dengan zona subduksi (zona tumbukan) antara lempeng hindia-Australia dari arah selatan yang bergerak relatif ke arah utara, sedangkan lempeng bergerak relatif ke arah selatan. Dari kedua

pergerakan yang saling mendekat ini mengakibatkan daerah subduksi sebagai sumber gempa bumi. Berdasarkan data dan kejadian gempa bumi yang telah lalu banyak sekali gempa bumi terjadi di Provinsi Sumatera Barat mulai dari yang berkekuatan kecil sampai besar.

Tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat banyak dijumpai pada bagian tengah khusus pada morfologi perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng yang terjal. Secara geologi biasanya tanah longsor terjadi pada batu-batuan vulkanik yang bersifat lepas atau yang telah mengalami pelapukan dengan banyak adanya retakan/rekahan. Kondisi tersebut apabila terletak di atas lapisan yang kedap air (lapisan tergelincir) pada saat hujan turun dengan curah hujan yang tinggi dapat dipastikan longsor.

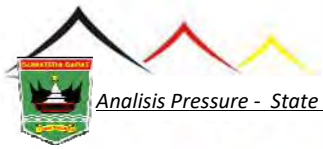
Pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat serta dunia usaha.

Seiring perubahan paradigma penanganan bencana yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen penanggulangan bencana, diperlukan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

3.4.2. Kondisi Kebencanaan dan Statusnya (State)

3.4.2.1. Bencana Banjir, Korban dan kerugian

Banjir merupakan bencana yang terjadi setiap tahun di Sumatera Barat terutama pada musim penghujan. Bencana banjir disebabkan oleh meluapnya air pada morfologi yang rendah sehingga melampaui batas daya tampung aliran sungai. Populasi yang semakin padat dengan sendirinya membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang semakin meningkat dan secara tidak langsung merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan aliran air permukaan. Penebangan hutan

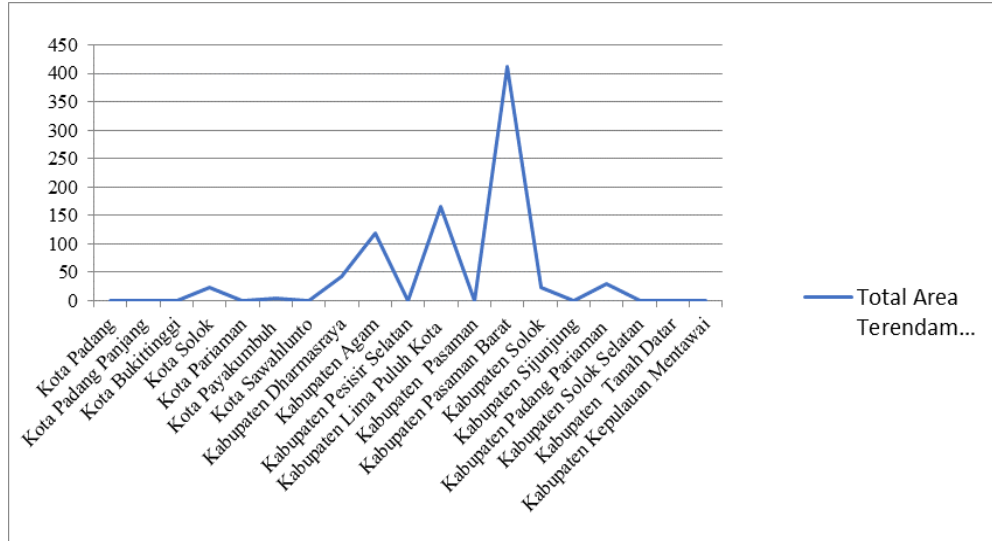


juga mengakibatkan aliran air (*run off*) yang dapat menimbulkan banjir bandang yang berpotensi memakan banyak korban jiwa dan kerugian harta.

Pada tahun 2017 terdapat 820 Ha area yang terendam banjir total penduduk yang mengungsi sebanyak 9212 orang dengan total kerugian materil Rp 5.935.515.750,0. Daerah yang mengalami areal terendam paling luas yaitu di Kabupaten Pasaman Barat dengan total areal terendam 412 Ha, jumlah pengungsi 65 orang dan total kerugian Rp 1.171.000.000,-, daerah kedua yang terluas area terendam yaitu Kabupaten Agam total area terendam 119 Ha, daerah terendam terluas ketiga adalah 166 Ha yaitu Kab. Lima Puluh Kota tepatnya di Kecamatan Pangkalan dengan total

kerugian Rp 520.000.000,- Kota Padang mengalami banjir dengan total kerugian Rp 729.000.000,-, Kabupaten Dharmasraya total area terendam 42 Ha dengan jumlah pengungsi 2.260 dan selanjutnya Kota Solok total area terendam sebanyak 24 Ha dengan jumlah penduduk yang mengungsi 1.530 orang dan total kerugian Rp 1.482.757.875,-.

Dibandingkan dengan tahun 2016 pada tahun 2017 bencana banjir di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebanyak 13,24 % hal ini diasumsikan karena frekwensi hujan yang turun secara merata sepanjang tahun. Grafik berikut merupakan olahan data dari tabel 37 perbandingan daerah terendam di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Olahan Tabel 37 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.31. Total Daerah Terendam Kabupaten/Kota tahun 2017

Salah satu daerah yang terparah terkena banjir yaitu Kabupaten Solok Selatan walaupun tidak menimbulkan korban jiwa namun dampak dari banjir ini meliputi 3(tiga) jorong yaitu Jorong Batang Lolo Bawah dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 46 KK, jorong Batang Lolo Ateh, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 42 KK dan Jorong Bancah Anak dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 62 KK.

Banjir ini di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan oleh meluapnya air sungai Batang Lolo yang berada di Nagari Pakan Rabaa dan masuk ke pemukiman penduduk. Belokan sungai berada pada

koordinat geografis $01^{\circ} 25' 31,20''$ LS $101^{\circ} 00' 05,20''$ BT.

Lokasi yang terkena dampak banjir bandang di jorong Batang Lolo Bawah berupa lahan pertanian, perladangan dan pemukiman penduduk. Lokasi tumpukan kayu yang terbawa banjir bandang dengan koordinat geografis $01^{\circ} 25' 48,72''$ LS $101^{\circ} 59' 59,28''$ BT. Lokasi yang terkena dampak banjir bandang di Jorong Batang Lolo Atas berupa pemukiman penduduk dengan koordinat geografis $01^{\circ} 25' 49,23''$ LS $101^{\circ} 00' 06,69''$ BT.

Banjir bandang ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan pada daerah hulu terdapat bukaan lahan berupa perladangan dan/atau

pembalakan liar. Pada saat terjadi pohon yang tumbang, air hujan akan masuk ke lubang bekas akar pohon yang tumbang tersebut. Semakin lama karena erosi, lubang tersebut semakin besar. Pada saat sudah jenuh

air maka akan terjadi longsor dan masuk ke sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang/galodo. Gambar. 3.32. merupakan dokumentasi rumah penduduk yang terkena dampak dari banjir bandang.

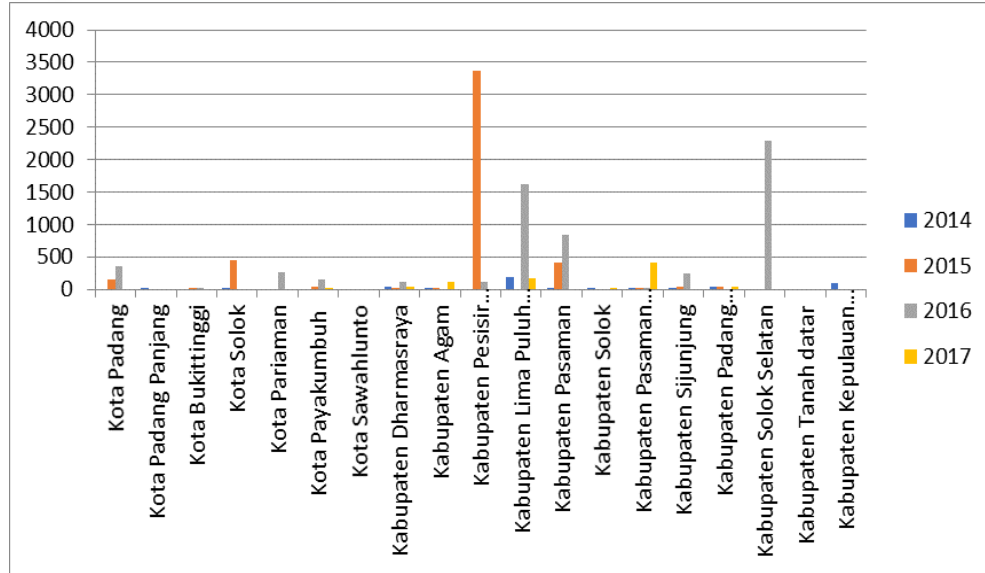


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.32. Rumah Penduduk Yang Terkena Dampak Banjir Bandang

Bila dilihat dari data series tahun 2014 sampai tahun 2017, maka kabupaten/kota yang menunjukkan daerah terendam paling luas berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2014 daerah yang paling luas daerah terendam adalah Kabupaten Lima Puluhkota dengan luas area terendam 187,5 Ha. Pada tahun 2015 yang paling luas adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas area terendam 3.369 Ha. Tahun 2016 Kabupaten

Solok Selatan dengan luas area terendam 2.295 dan pada tahun 2017 daerah banjir terluas yaitu Kabupaten Pasaman luas area terendam 412 Ha. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.33 berikut merupakan olahan data tabel 37.A yang menggambarkan perbandingan luas daerah terendam dari tahun 2014 sampai tahun 2017 untuk 19 kabupaten dan kota.



Sumber: Olahan Tabel 37.A Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.33 Perbandingan Luas Areal Terendam Banjir

3.4.2.2. Bencana Kekeringan, Korban dan Kerugian

Kekeringan merupakan suatu kondisi dimana ketersediaan air berada dibawah kebutuhan air untuk kehidupan, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan hidup. Musim kemarau yang panjang mempunyai korelasi yang sangat erat dengan bencana kekeringan. Penyebab utama terjadinya kemarau adalah sebagai berikut :

- Wilayah Indonesia yang terdiri dari samudera dan lautan luas menyebabkan perilaku aliran angin muson timur diantara bulan April hingga Oktober.

- Kondisi kualitas udara yang semakin tercemar.
- Gejala alami bumi berwujud el nino.

Dari data yang diperoleh, pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat terdapat kekeringan seluas 35 Ha di Kabupaten Dharmasraya namun tidak tercatat besar kerugian yang diakibatkan dari kekeringan tersebut (tabel 38 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017).

3.4.2.3. Bencana Kebakaran hutan dan lahan, Korban dan Kerugian

Kebakaran hutan merupakan bencana yang semakin sering terjadi diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan lahan dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia seperti pembukaan lahan. Tingkat kesejahteraan pendidikan masyarakat di sekitarnya yang masih rendah merupakan faktor yang dapat turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan diperparah lagi oleh banyaknya pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan yang melakukan penebangan kayu tanpa mengindahkan peraturan dan lingkungan.

Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif cukup besar dalam hal kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya kesehatan masyarakat dan terganggunya transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara.

Kebakaran hutan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian ekonomis dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak jarang juga mengakibatkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

Pada Tahun 2017 luas lahan terbakar hanya terdapat di Kabupaten Tanah Datar seluas 2 Ha dengan estimasi kerugian Rp 10.000.000,-. Beberapa hotspot ditemukan di beberapa daerah, namun tidak mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 14 hotspot, Kabupaten Limapuluh Kota 10 hotspot, Kabupaten Dharmasraya 9 hotspot, Kabupaten Solok Selatan 6 hotspot, Kabupaten Sijunjung 5 hotspot, Kabupaten Pasaman 3 hotspot sedangkan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Kepulauan Mentawai masing-masing 1 spot.

Pada Tahun 2017 kebakaran hutan dan lahan cenderung menurun jika dibandingkan dengan data pada tahun 2016 dan 2015 yang lalu, pada tahun 2017 hanya terjadi di

Kabupaten Tanah Datar seluas 2 Ha dengan kerugian Rp 10.000.000,- sedangkan pada tahun 2016 yang lalu terdapat 11 daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan total lahan yang terbakar seluas 845,18 Ha dan perkiraan kerugian sebesar Rp. 3.236.200.000,-. Luas hutan dan lahan yang terbakar paling luas terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu 300 Ha, Kabupaten Pasaman seluas 266 Ha dengan perkiraan kerugian materil sebesar Rp.1.400.000.000,-. Untuk daerah Kabupaten Pasaman Barat luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 154 Ha. Kabupaten Dharmasraya lahan yang terbakar seluas 39 Ha dengan total kerugian sebesar Rp.1.680.000.000,- Kabupaten Solok seluas 30 Ha, Kota Sawahlunto seluas 20 Ha, Kota Padang seluas 13 Ha dengan 1 titik hotspot dengan total kerugian materil mencapai Rp.81.200.000.000,- pada Kota Payakumbuh seluas 8 Ha dengan total kerugian Rp. 4.000.000,-, Kabupaten Sijunjung seluas 7,5 Ha, Kota Solok seluas 7 Ha dan Kota Bukittinggi seluas 0,68 Ha.

Selanjutnya pada tahun 2015 yang lalu kebakaran lahan terluas terdapat di Kab. Pesisir Selatan seluas 450 Ha dan pada tahun 2016 tidak terdapat kebakaran lahan di Kabupaten Pesisir Selatan (BPBD, 2016). Daerah yang mengalami perluasan kebakaran lahan adalah Kabupaten Pasaman dari 7 Ha yang terbakar pada tahun 2015 meluas menjadi 266 Ha, Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 tidak terjadi kebakaran lahan namun pada tahun 2016 meluas menjadi 39 Ha, Kabupaten Solok dari 15 Ha menjadi 39 Ha, Kota Payakumbuh dari 7 Ha menjadi 8 Ha dan Kabupaten Sijunjung dari 74,5 menjadi 75 Ha.

3.4.2.4. Bencana Gempa dan Tanah Longsor, Korban dan Kerugian

Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) tingkatan Bahaya gempa bumi, yaitu tingkat Bahaya rendah, sedang dan tinggi. Daerah yang memiliki tingkat bahaya rendah terhadap bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat ini mencapai luas 113.473,13 Ha yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, bahaya pada

tingkat sedang yaitu tingkat bahaya tingkat bahaya yang mendominasi dengan luas wilayah 2.769.218,48 Ha (66,30 %) yang hampir terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sedangkan pada Tingkat Bahaya Tinggi, memiliki

luas sebesar 1.281.665,17 Ha atau sekitar 30,78 % dari total luas keseluruhan. Perbandingan luas bahaya bencana Gempa bumi per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 3.34. berikut



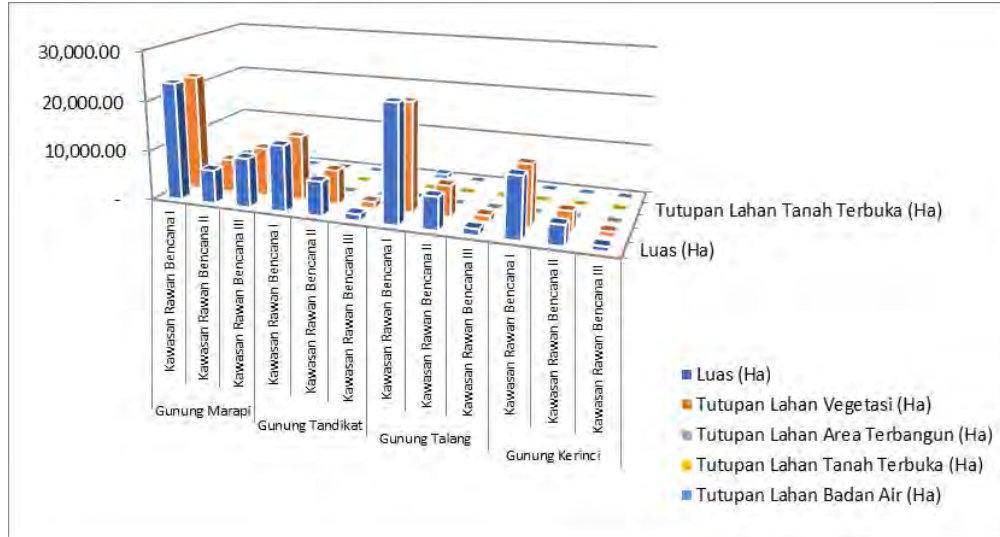
Sumber: Penyusunan peta resiko Sumatera Barat tahun 2011.

Gambar. 3.34. Diagram Tingkat Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat

Dari data pada tabel 40.A terlihat bahwa kawasan yang berada pada zona dengan tingkat kerawanan yang tinggi mempunyai luas wilayah 1.558.000 Ha, dengan tutup lahan vegetasi seluas 1.511.040 Ha dan Tutupan Lahan Badan air 27.150 Ha. Kawasan yang berada di zona Kerawanan menengah seluas 2.331.000 Ha, dengan kondisi tutupan lahan vegetasi 2.293.288,70 Ha, tutupan lahan areal terbangun 25.720 Ha, tutupan tanah terbuka

571,3 dan tutupan Lahan Badan Air 11.420 Ha. Kawasan rawan gempa bumi yang terletak pada zona kerawanan rendah pada lokasi seluas 362.300 yang mempunyai tutupan lahan vegetasi 357.242 ha, tutupan lahan area terbangun 1.906 Ha dan tutupan lahan badan air 3.152 Ha.

Sedangkan untuk perbandingan kawasan rawan letusan gunung berapi di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar berikut :

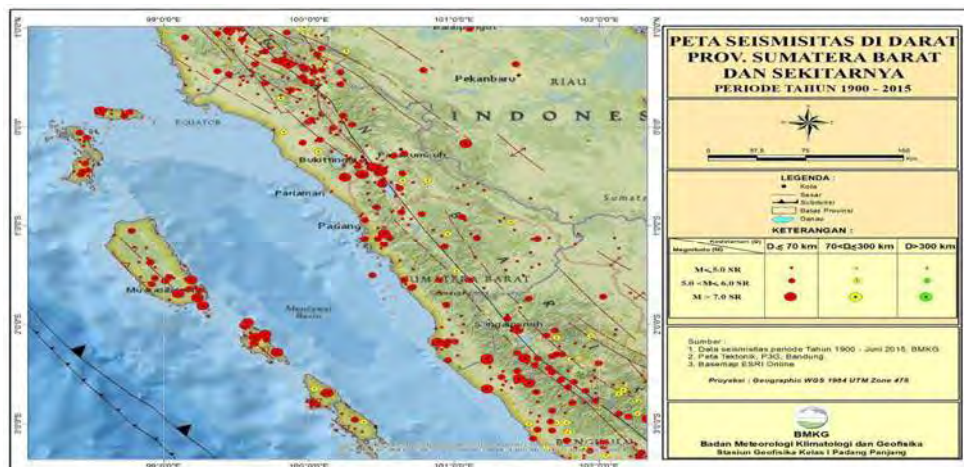


Sumber: Olahan Tabel 40A Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar. 3.35. Perbandingan Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Hal ini terjadi karena Sumbar berada di antara pertemuan dua lempeng tektonik besar yaitu eurasia dan Indo-Australia serta patahan Semangko atau sesar Sumatera sehingga intensitas gempa cukup tinggi. Gempa yang di daratan Sumatera disebabkan oleh segmen

patahan semangko yaitu segmen sumpur, segmen sianok, segmen sumani dan segmen suliti, diantara segmen ini segmen sianok lebih banyak menyebabkan gempa. Segmen sianok berada di sekitar ngarai Sianok Kota.



Sumber : BMKG Stasiun Kelas I Padang Panjang

Gambar. 3.36. Peta Kawasan Rawan Gempa Sumatera Barat

3.4.3. Upaya Pengelolaan Kebencanaan (*Response*)

Pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Seiring perubahan paradigma penanganan bencana yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen penanggulangan bencana, diperlukan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Masyarakat yang berada di desa/kelurahan/nagari adalah penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku langsung yang akan merespon bencana di sekitarnya. Banyak pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, banyak juga pihak lain yang bekerja bersama masyarakat. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua yang dimiliki, masyarakat desa/kelurahan/nagari

perlu membuat mereka tangguh terhadap dampak bencana, sehingga risiko korban jiwa, kerugian harta, dan lain lain akan bias diperkecil dan bahkan dihindari.

Masyarakat yang tangguh bencana (*disaster - resilient community*) ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan kalau terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali. Sebagai salah satu upaya untuk membangun masyarakat tangguh, BNPB memiliki Program Pengembangan Desa/Kelurahan /Nagari Tangguh Bencana.

Untuk mencegah atau meminimalisir bencana yang terjadi di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya mitigasi baik secara struktural maupun non struktural. Mitigasi bencana secara struktural dapat dilakukan dengan membangun tanggul atau bronjong di

sepanjang aliran sungai yang memang rawan dengan banjir dan dekat dengan pemukiman penduduk.

Mitigasi bencana non struktural dapat berupa perencanaan wilayah, dalam mitigasi non struktural dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, dengan kemajuan teknologi diharapkan dapat memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana. Beberapa mitigasi non struktural diantaranya adalah :

- a) Membentuk LSM peduli bencana seperti Kogami, Jemari Sakato dan organisasi-organisasi perguruan Tinggi peduli bencana.
- b) Pelatihan dan penyuluhan.
- c) Membentuk POKJA yang beranggotakan Instansi terkait dimana ditetapkan pembagian peran dan kerja dalam penanggulangan banjir.
- d) Mapping daerah rawan banjir disertai dengan petunjuk evakuasi, lokasi posko dan lokasi pos pengamat banjir.
- e) Membuat SOP bencana banjir.
- f) Mengadakan simulasi bencana banjir.

- g) Membentuk SATGAS seperti PUSDALOPS dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Program Pemerintah dalam pengurangan resiko bencana dan pemulihan pasca bencana tertuang dalam bentuk kegiatan Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan total dana Rp. 1.650.000.000,00 dan Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana dengan total dana Rp 260.000.000,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana , meliputi kegiatan :
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan output Nagari/masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, dana sebesar Rp. 500.000.000,-
 - b. Peningkatan dan Pengembangan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dengan output Petugas PUSDALOPS dengan jumlah dana Rp 550.000.000,-

- c. Peningkatan Simulasi dan pelatihan kebencanaan dengan output peserta yang mengikuti simulasi dengan dana Rp. 200.000.000,-
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan Bencana dengan output tim TRC baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terbentuk dan terbina dengan dana Rp.100.000,000-
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana dengan output forum PRB yang terbentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dana Rp 150.000,-
- f. Peningkatan Kapasitas Relawan Kesiapsiagaan Bencana dengan output relawan bencana yang terbentuk dan terbina di Provinsi Sumatera Barat dengan dana Rp 100.000.000,-
- g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan output Kerjasama antar lembaga dalam rangka Penanggulangan bencana

yang terlaksana (%) dengan dana Rp 50.000,-

2. Meningkatnya pemulihan daerah Pasca bencana

- a. Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah pasca bencana dengan output persentase koordinasi pelaksanaan dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana dengan dana Rp 80.000.000,-
- b. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Pasca bencana dengan output persentase Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Pasca bencana yang terlaksana dengan dana Rp 80.000.000,-
- c. Pengkajian dengan output persentase pengkajian kebutuhan pasca bencana yang terlaksana (%) dengan -dana Rp 100.000.000,-

Sejak dini kita perlu menyadari bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana sehingga dapat mendorong kita untuk mempersiapkan diri, keluarga dan

komunitas di daerah sekitar kita. Kesiapsiagaan diri diharapkan mampu mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka maupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan, maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana.

3.5. Perkotaan

Pengertian kota secara sosiologis didefinisikan sebagai tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen terdiri dari individu-individu yang secara sosial heterogen (De Goede, dalam Sarlito 1992: 40). Di sisi lain, Bintarto (1989:34) menyatakan bahwa dari segi geografis, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Menurut ketentuan formal seperti yang tercantum di dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota.

Permasalahan lingkungan perkotaan yang dominan saat ini adalah populasi dan kepadatan penduduk yang terus meningkat, masalah persampahan, masalah sanitasi kota, dan kualitas air. Permasalahan kepadatan kota semakin kompleks dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat tinggi, terutama penduduk yang tidak tetap. Jumlah penduduk merupakan ancaman dan *pressure* terbesar bagi masalah lingkungan hidup. Setiap penduduk memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup, di sisi lain setiap orang juga menghasilkan limbah dalam beragam bentuk. Pertambahan penduduk yang sangat tinggi di kota, diakui telah melampaui kemampuan daya dukung lingkungan, sehingga

berimbas pada kualitas hidup manusia yang makin rendah.

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai isu prioritas dan tekanan terhadap lingkungan perkotaan, kondisi lingkungan perkotaan dan statusnya serta upaya pengelolaan terhadap isu perkotaan.

3.5.1. Isu Prioritas dan Tekanan terhadap Lingkungan Perkotaan (*Pressure*)

Penanganan sampah khususnya di perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini merupakan tantangan dalam pengelolaan kota. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang pesat di perkotaan telah mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah disertai permasalahannya. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas permasalahan sampah dan kebersihan masih belum mampu memberikan pelayanan pengangkutan seluruh sampah dari sumber menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kemampuan dalam menangani persoalan sampah belum didukung oleh sumber daya manusia serta kelengkapan sarana dan

prasarana yang memadai. Sampah yang dihasilkan dari daerah urban sebagian dibawa ke TPA, sisanya ditangani oleh penghasil sampah dengan berbagai cara, seperti dibakar, ditimbun dalam tanah, dikomposkan dan beragam upaya termasuk daur ulang atau dibuang dimana saja seperti tanah kosong, drainase atau badan air lainnya.

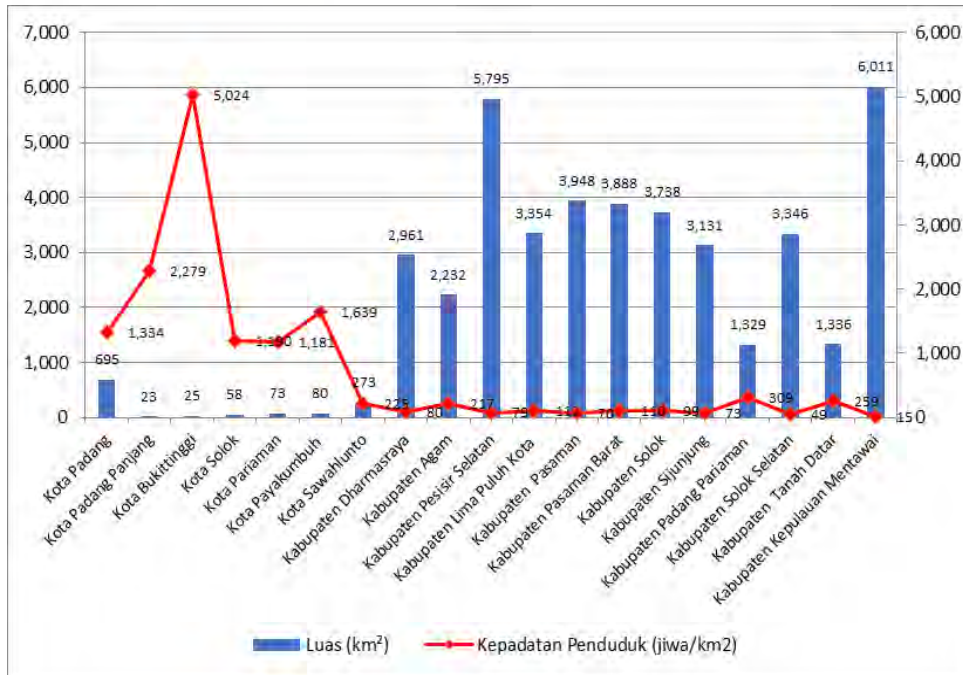
Paradigma umum yang dijumpai sampai saat ini dalam pengelolaan sampah kota masih berupa *kumpul – angkut – buang*. Seiring dengan pertambahan penduduk, tambah lama akan semakin banyak sampah yang harus ditangani. Permasalahan anggaran dalam pengelolaan sampah perkotaan merupakan hal yang lumrah terdengar, sehingga agak sulit bagi institusi pengelola sampah untuk berpikir ke depan dalam upaya pengembangan. Prasarana yang tersedia semakin lama akan bertambah tua dan kemampuan juga akan semakin terbatas. Disamping itu, sebagian besar pemerintah daerah sampai saat ini masih belum menganggap penanganan sampah menjadi prioritas yang penting,

apalagi dalam situasi anggaran pemerintah yang terbatas. Dengan demikian beban pengelolaan sampah menjadi tambah berat. Untuk itu, diperlukan terobosan dalam mengubah cara pandang terhadap permasalahan sampah yang terjadi. Perbaikan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena menyangkut pula cara pandang masyarakat penghasil sampah dan juga cara pandang pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif.

3.5.2. Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Statusnya

3.5.2.1. Luas Wilayah dan Kondisi Kependudukan

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah sebesar 42.297,30 km² dan terletak di pesisir barat Pulau Sumatera bagian tengah. Kabupaten/kota dengan luas terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan masing-masing sebesar 6.011,35 km² dan 5.794,95 km². Sedangkan kabupaten/kota dengan luas terkecil adalah Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi masing-masing dengan luas 23 km² dan 25,24 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

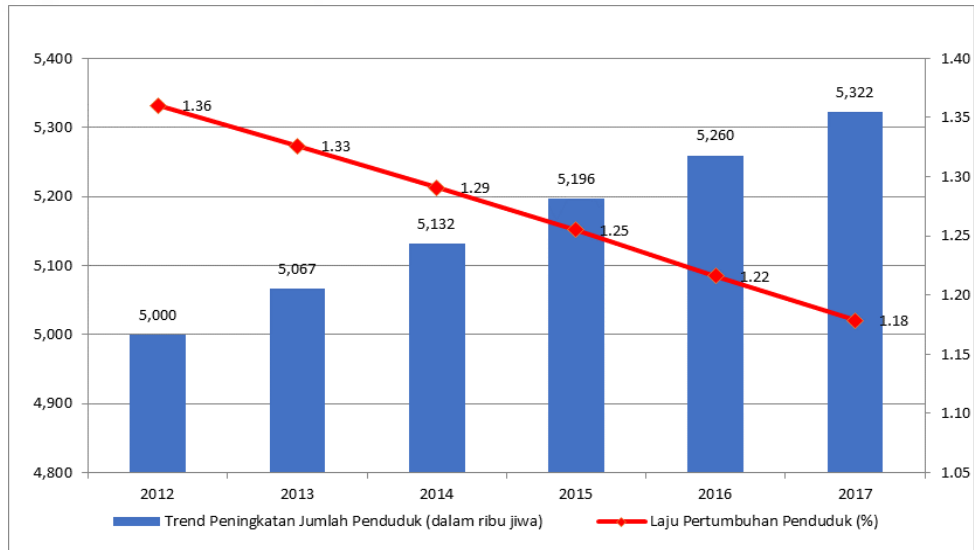


Sumber: Olahan data Tabel 41 Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017

Gambar 3.37. Luas dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Berdasarkan data jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 5.321.489 jiwa (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2017). Gambar di atas menunjukkan bahwa Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 927.011 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kota Padang Panjang dengan jumlah 52.422 jiwa.

Trend jumlah penduduk Sumatera Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari gambar terlihat peningkatan jumlah penduduk Sumatera Barat, sedangkan laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan seperti yang terlihat pada gambar bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 berada pada angka 1,18%.

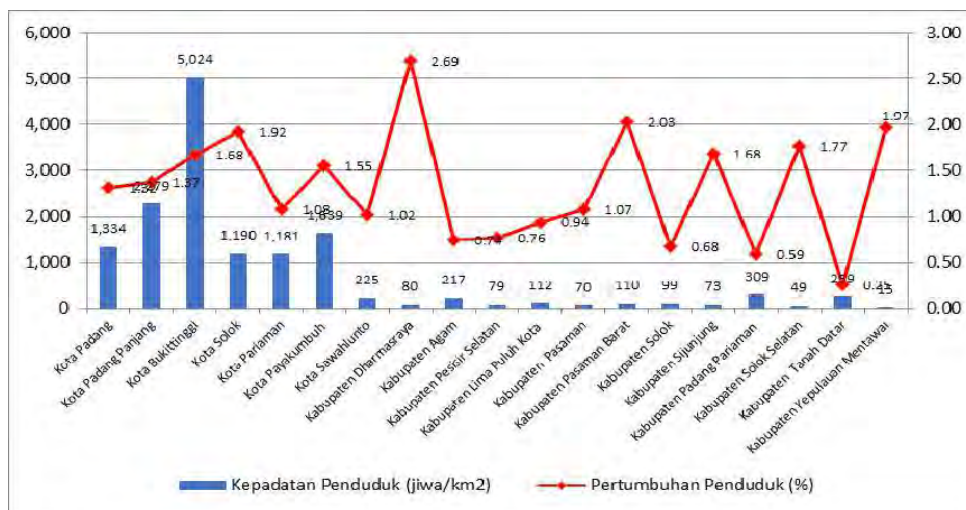


Sumber: Olahan data Tabel 41 Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017.

Gambar. 3.38. Trend Peningkatan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat

Jumlah penduduk yang besar ini bukan hanya satu-satunya faktor penentu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, namun juga distribusi serta kepadatan penduduk

yang menempati suatu wilayah. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung berada di wilayah perkotaan.



Sumber: Olahan data Tabel 41 Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017

Gambar. 3.39. Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, maka daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang masing-masing sebesar 5.024 jiwa/km² dan 2.279 jiwa/km². Jumlah ini jauh lebih tinggi dari kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 126 jiwa/km². Hal tersebut mengindikasikan bahwa tekanan terhadap lingkungan di daerah perkotaan akibat aktifitas penduduk akan semakin besar. Sedangkan wilayah dengan kepadatan terkecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan masing-masing 15 jiwa/km² dan 49 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya data tentang luas wilayah, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk disajikan pada Tabel 41.

3.5.2.2. Timbulan Sampah

Isu persampahan selalu dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pula pada tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan memiliki

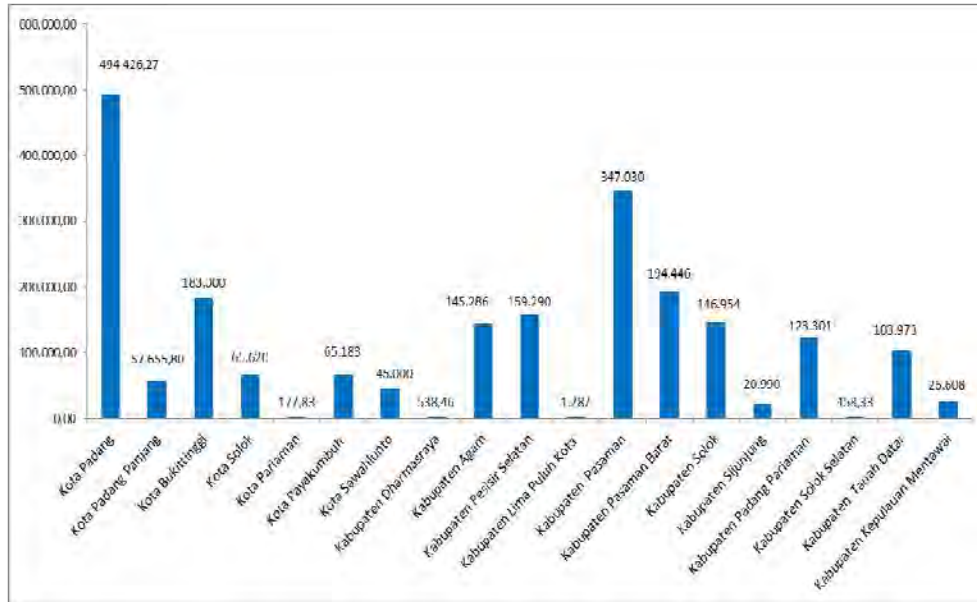
kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tinggi pula sehingga akan berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi setiap kebutuhan. Peristiwa pemenuhan kebutuhan ini berarti meningkatkan jumlah timbulan sampah. Peningkatan timbulan sampah akan memberikan tekanan terhadap lingkungan dan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan karena sampah terkait dengan hubungan nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan.

Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 2.452.213 kg/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman adalah sampah rumah

tangga yaitu sampah organik. Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di masing-masing

kabupaten/kota disajikan pada gambar berikut ini.

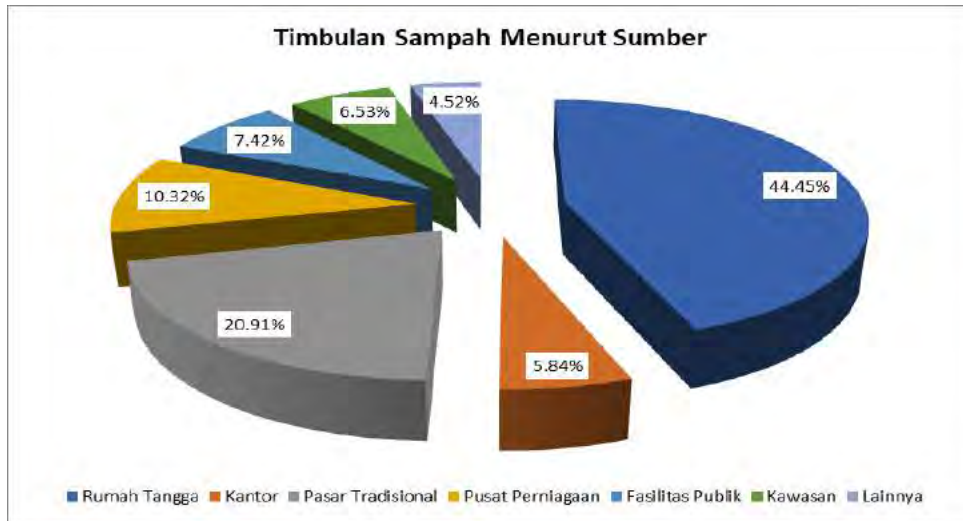


Sumber: Olahan data Tabel 42 Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017.

Gambar 3.40 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi yakni masing-masing sebesar 494.426 kg/hari dan 183.000 kg/hari. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan kota lainnya. Khusus untuk Kota

Bukittinggi yang merupakan kota wisata, jumlah sampah yang datang tidak hanya dari penduduk domestik Kota Bukittinggi saja, melainkan juga merupakan wisatawan yang datang dari daerah lain di luar Kota Bukittinggi, biasanya jumlah timbulan sampah akan meningkat dari biasanya di hari-hari libur.

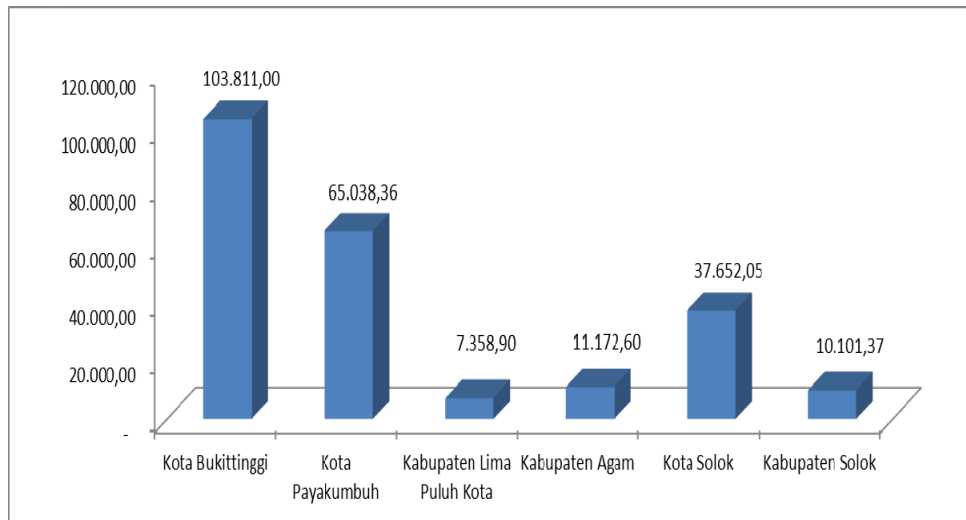


Sumber: Olahan data Tabel 42.B Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017

Gambar 3.41. Persentase Timbulan Sampah Menurut Sumber.

Produksi sampah berhubungan linier dengan produktivitas dan aktivitas manusia. Dengan demikian, peningkatan jumlah sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Penanganan yang dilakukan terhadap sampah yang ada, lazimnya adalah dengan penumpukan, pengumpulan, dan pengangkutan ke Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan yang sering timbul antara lain adalah semakin terbatasnya lokasi tempat pemrosesan akhir sampah tersebut. Untuk melihat kondisi dan status TPA yang ada di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Olahan data Tabel 42.A Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017

Gambar 3.42. Perkiraan Timbulan Sampah yang Masuk ke TPA.

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa timbulan sampah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh (melayani sampah dari Payakumbuh, Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Agam) dengan jumlah sampah yang masuk sebesar 187,380 ton/hari. Hal ini disebabkan juga karena tingginya beban timbulan sampah di masing-masing daerah tersebut.

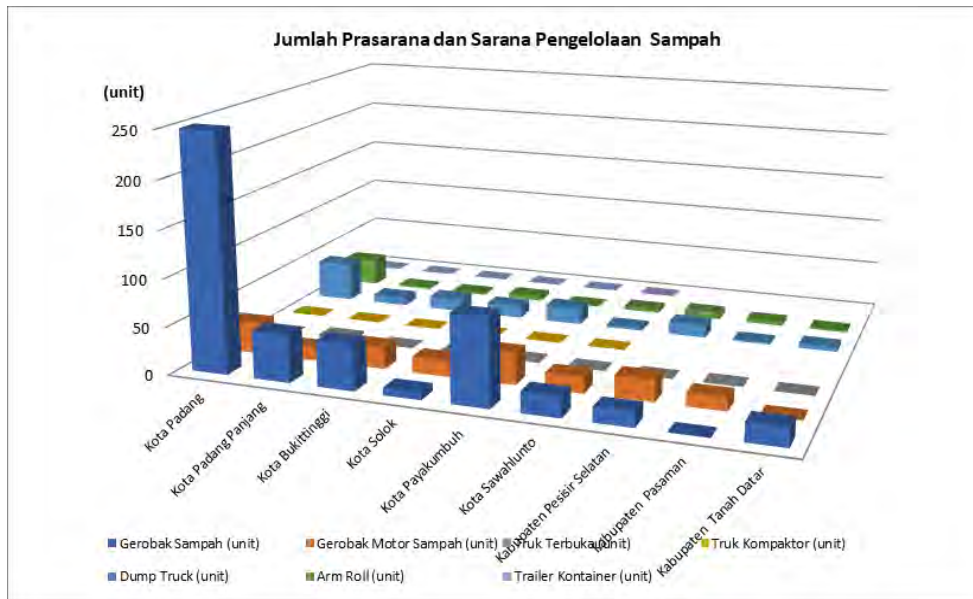
Tingginya volume sampah dan jenisnya yang beranekaragam jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang kompleks dan serius, antara lain: 1) pencemaran air oleh “lindi” (*leachate*) yang keluar

dari tumpukan sampah dan mengalir menuju badan perairan ataupun meresap ke dalam tanah; 2) pencemaran udara karena adanya gas metana (CH₄), salah satu jenis gas rumah kaca, yang keluar dari tempat penimbunan akhir sampah akibat proses penguraian bahan organik secara anaerobik; 3) sampah merupakan habitat bagi berkembangnya bakteri patogen tertentu yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia; 4) menurunkan nilai estetika lingkungan; dan 5) mengurangi kenyamanan lingkungan.

Dalam hal sarana yang digunakan untuk pengangkutan sampah secara umum yang banyak

digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA adalah *Dump Truck* dan *Arm Roll Truck*. Sedangkan untuk melakukan pengangkutan dari rumah-rumah

menuju TPS pengangkutan menggunakan gerobak sampah dan gerobak motor sampah seperti yang disajikan pada Gambar 3.43.



Sumber: Olahan data Tabel 42.D Dokumen IKPLHD Sumbar, Tahun 2017.

Gambar 3.43. Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Gambar di atas, jumlah prasarana yang dominan digunakan untuk pengangkutan sampah adalah gerobak sampah, gerobak motor

sampah, dan *dump truck*. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana pengangkutan yang digunakan disajikan pada tabel berikut

Tabel. 3.8. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Gerobak Sampah (unit)	Gerobak Motor Sampah (unit)	Truk Terbuka (unit)	Truk Kompaktor (unit)	Dump Truck (unit)	Arm Roll (unit)	Trailer Kontainer (unit)
1.	Kota Padang	249	33	0	0	42	29	0
2.	Kota Padang Panjang	50	13	3	0	9	2	0
3.	Kota Bukittinggi	48	23	0	0	14	2	0
4.	Kota Solok	8	17	0	0	13	5	0



No	Kabupaten/Kota	Gerobak Sampah (unit)	Gerobak Motor Sampah (unit)	Truk Terbuka (unit)	Truk Kompaktor (unit)	Dump Truck (unit)	Arm Roll (unit)	Trailer Kontainer (unit)
5.	Kota Payakumbuh	91	33	1	0	18	1	0
6.	Kota Sawahlunto	22	17	0	0	3	4	0
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	16	23	0	0	14	7	0
8.	Kabupaten Pasaman	0	14	1	0	2	4	0
9.	Kabupaten Tanah Datar	20	1	0	0	5	2	0

3.5.3 Upaya Pengelolaan Terhadap Isu Perkotaan (Response)

Masalah pelayanan sampah di perkotaan tersebut akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup serius dirasakan mengingat volumenya yang kian hari kian meningkat atau bertambah sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu beserta aktivitasnya menyebabkan meningkatnya sampah bukan hanya dalam jumlah sampah tetapi juga dari variasi komposisi sampah. Disamping itu, diperkuat juga dengan kecenderungan masyarakat modern untuk menghasilkan berbagai macam sampah khususnya perilaku hidup masyarakat kota-kota besar.

Untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan

sampah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Perpres tersebut, Pemerintah menetapkan target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). Target ini diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Perpres Nomor 97 Tahun 2017 juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 (satu) tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang dalam upaya merancang Peraturan Gubernur mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sebagai salah satu upaya dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat telah melakukan pembentukan 5 (lima) unit bank sampah di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah (ATTS). Ke-lima bank sampah tersebut menjadi bank sampah unit dari Bank Sampah Mutiara Indah yang telah dibentuk sebelumnya di Kel. ATTS. Bank sampah yang terbentuk tersebut antara lain 1) Bank Sampah Dahlia,

2) Bank Sampah Rose, 3) Bank Sampah Anggrek, 4) Bank Sampah Serunai, dan 5) Bank Sampah Ikhlas.

Untuk menjaga agar bank sampah yang didirikan tetap aktif dalam melakukan transaksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyediakan tenaga pendamping yang bertugas mendampingi masyarakat dalam mengoperasikan bank sampah. Tenaga pendamping ini bertugas memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, memfasilitasi penyusunan administrasi serta manajemen bank sampah, mendampingi bank sampah pada jam operasionalnya serta mendampingi penjualan sampah kepada pihak ketiga



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.44. Aktivitas Pada Saat Transaksi di Bank Sampah

Perkembangan nasabah 5 bank sampah unit yang didirikan cukup menjanjikan dengan melihat jumlah nasabah per bulannya. Pada transaksi perdana cukup banyak masyarakat yang ikut menjadi nasabah, ini disebabkan partisipasi dari pengurus bank sampah yang diwajibkan sebagai nasabah aktif. Pada bulan berikutnya adalah partisipasi pengurus dalam mensosialisasikan

program bank sampah kepada masyarakat sekitar dan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan pendekatan yang diinginkan masyarakat disekitar. Ada yang menginginkan sistem jemput, ada yang menginginkan sistem antar langsung, ada sistem per minggu dan sistem lain yang akan membuat nasabah ikut bergabung.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 3.45. Penyerahan Buku Tabungan Emas Kepada Nasabah

Saat ini bank sampah unit dan bank sampah induk Mutiara Indah yang berada di Kelurahan ATTS tersebut telah menjalin kerjasama dengan PT Pegadaian, dimana setiap Rp. 20.000,- nilai sampah yang ditabung dikonversi menjadi 0,001 gram emas dan masuk dalam buku tabungan emas di pegadaian.

3.5.3.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penilaian terhadap kebersihan lingkungan di kecamatan

untuk kabupaten dan kelurahan untuk kota. Penilaian kecamatan dan kelurahan bersih ini dilakukan setiap tahun dan setiap kecamatan dan kelurahan yang dinilai bersih akan diberikan penghargaan oleh Gubernur Sumatera Barat pada peringatan Hari Kemerdekaan RI di

Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 17 Agustus. Tahun 2017 yang lalu, ada 3 kecamatan dan 3 kelurahan yang mendapatkan penghargaan tersebut. Kecamatan dan kelurahan peraih penghargaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

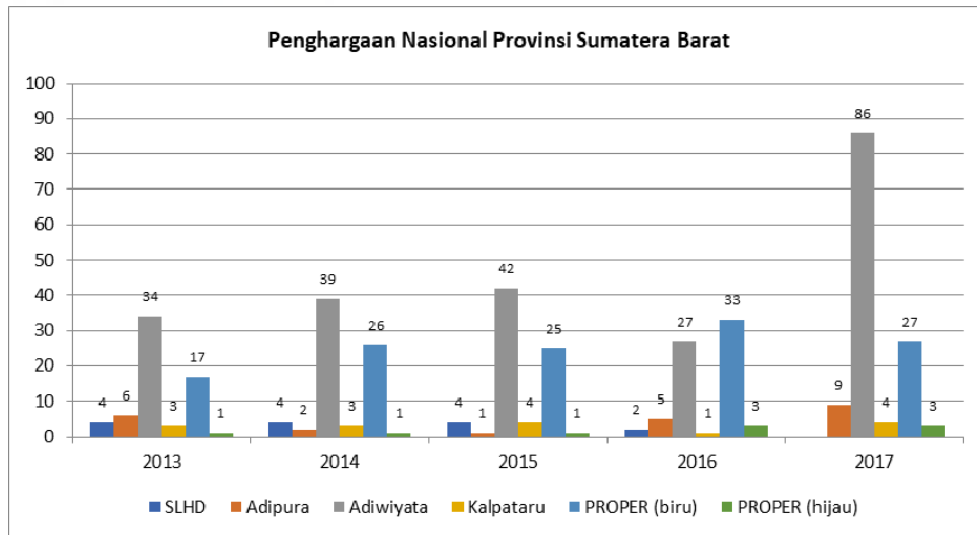
Tabel 3.9. Penghargaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Tahun 2017

No	Kecamatan/Kelurahan	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
2.	Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman	Kecamatan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
3.	Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar	Kecamatan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
4.	Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukittinggi	Kelurahan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
5.	Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang	Kelurahan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
6.	Kelurahan Koto Panjang, Kota Padang Panjang	Kelurahan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat

Sumber: Tabel 46 Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

Selain penghargaan yang diberikan provinsi kepada kabupaten/kota. Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 juga berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup di tingkat nasional. Bentuk penghargaan

tersebut seperti Penghargaan Nirwasita Tantra (DIKPLHD), Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan PROPER Hijau maupun PROPER Biru. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar berikut



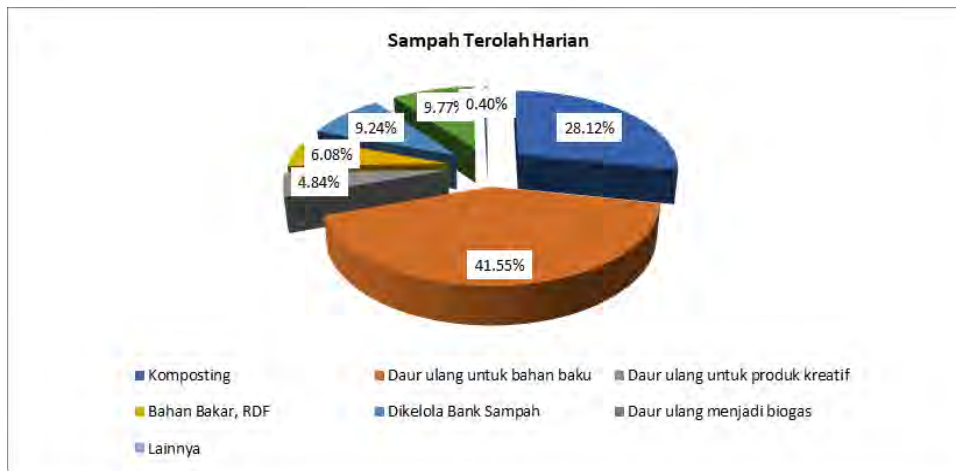
Sumber: Tabel 46 Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

Gambar 3.46. Penghargaan Nasional yang diraih Provinsi Sumatera Barat

3.5.3.2 Program Inisiasi Masyarakat

Untuk meminimasi jumlah sampah yang ditimbun ke TPA, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan agar dapat mereduksi sampah mulai dari sumbernya. Semakin banyak sampah yang berhasil direduksi di sumber akan semakin sedikit jumlah sampah yang akan dibawa dan ditimbun ke TPA.

Selain memberikan manfaat bagi penghasil sampah juga dapat memperpanjang umur TPA yang ada. Dari total perkiraan timbulan sampah yang terolah per hari paling tinggi adalah untuk daur ulang untuk bahan baku sebesar 41,55% dan komposting sebesar 28,12%. Untuk lebih jelasnya data pengolahan sampah disajikan pada Gambar 3.47.



Sumber: Olahan data Tabel 42.C Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017.

Gambar 3.47. Jumlah Sampah Terolah Harian

3.6. Upaya yang dilakukan (Response) Untuk Meminimalisasi Isu Prioritas Lingkungan

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka minimalisasi isu prioritas lingkungan berkaitan dengan penerbitan izin lingkungan yang dilakukan melalui kajian dokumen lingkungan hidup dan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah mendapatkan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.6.1. Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan sepanjang tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) dokumen AMDAL, 1 (satu) Adendum ANDAL dan RKL/RPL, 2 (dua) dokumen UKL/UPL, 2 (dua) dokumen DELH dan 1 (satu) DPLH sebagaimana tabel 3.10. berikut. Disamping itu pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) dokumen lingkungan (AMDAL dan Adendum AMDAL) yang dilakukan pembahasannya oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi walaupun usaha dan/atau kegiatan tersebut berada secara parsial di satu kabupaten/kota.



Tabel 3.10. Dokumen Izin Lingkungan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1.	Amdal	Rencana Pembangunan Jalan Sepanjang 4.790 M dan Jembatan Sepanjang 685 m Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
2.	Amdal	Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Sikuai Island Resort (Luas 38,60 Ha) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	PT. Pusako Sikuai Wisata
3.	Amdal	Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat	PT. Biomass Andalan Energi
4.	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi di Jalan Mhd. Hadjrab - Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
5.	UKL-UPL	Kegiatan Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Sumedang di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
6	Adendum Andal dan RKL-RPL	Rencana Penambahan Kegiatan Pendukung PLTU Teluk Sirih 2 x 112 MW di Jalan Lintas Sumatera Padang Painan KM 25 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkit Teluk Sirih
7	DELH	Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir Air Dingin Kota Padang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
8	DELH	Kegiatan Pembangunan Jembatan Lolong Sepanjang 252,10 M di Kelurahan Flamboyan Barat Kecamatan Padang Barat Kota Padang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
9	DPLH	Kegiatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Nanggalo Seluas 1,9 Ha di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Sumber : Olahan Tabel 34 DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2017

3.6.2. Pengawasan Izin Lingkungan

Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dilakukan terhadap 30 perusahaan sebagai objek penilaian PROPER dan 27 perusahaan diluar objek PROPER.

Berdasarkan hasil penilaian PROPER Tahun 2017 terhadap 30

Objek Penilaian berdasarkan kriteria Izin Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3 menunjukkan tingkat ketaatan secara umum perusahaan telah taat kriteria Izin Lingkungan, Pengendalian PENCEMARAN Udara dan Pengelolaan Limbah B3 sedangkan Pengendalian Pencemaran Air masih ada perusahaan yang tidak mentaatinya secara rinci dapat dilihat sebagai-mana tabel berikut

Tabel 3.11. Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Izin Lingkungan	PPA	PPU	PLB3
1	PT. Lembah Karet, Padang	Taat	Taat	Taat	Taat
2	PT. Family Raya, Padang	Taat	Tidak Taat	Taat	Taat
3	PT. Batanghari Barisan	Taat	Tidak Taat	Taat	Taat
4	PT. Kilang Lima Gunung, Padang	Taat	Taat	Taat	Taat
5	PT. Teluk Luas, Padang	Taat	Tidak Taat	Taat	Taat
6	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I DPPU Minangkabau	Taat	Taat	Taat	Taat
7	PT. Usaha Inti Padang	Taat	Taat	Taat	Taat

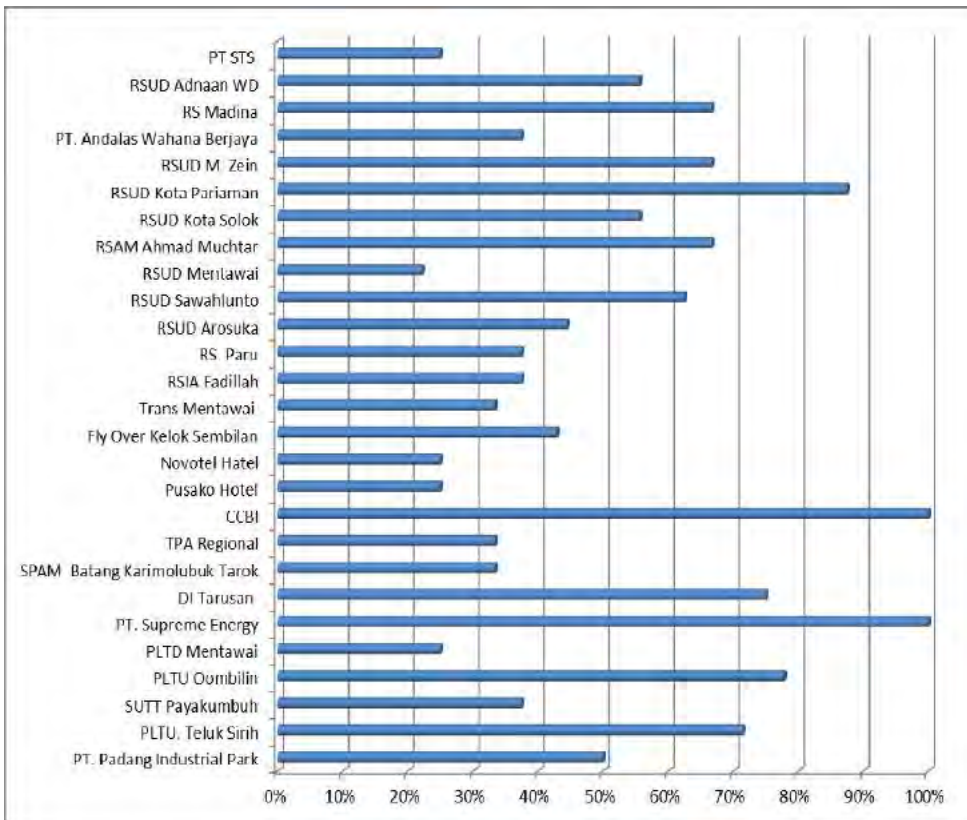


No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Izin Lingkungan	PPA	PPU	PLB3
8	PT. AMP Plantation, Agam	Taat	Tidak Taat	Taat	Taat
9	PT. Mutiara Agam, Agam	Taat	Taat	Taat	Taat
10	PT. Perkebunan Pelalu Raya	Taat	Taat	Taat	Taat
11	PT. Agrowiratama	Taat	Taat	Taat	Taat
12	PT. Gersindo Minang Plantation	Taat	Taat	Taat	Taat
13	PT. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
14	PT. Bakrie Pasaman Plantation, Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
15	PT. Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
16	PTPN VI Ophir, Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
17	PT. Tirta Investama (Aqua), Solok	Taat	Taat	Taat	Taat
18	PTPN VI Danau Kembar, Solok	Taat	Taat	Taat	Taat
19	PT. Mitra Kerinci Solok Selatan	Taat	Taat	Taat	Taat
20	PT Bina Pratama Sakato Jaya, Dharmasraya	Taat	Taat	Taat	Taat
21	PT. Kencana Sawit Indonesia, Solok Selatan	Taat	Taat	Taat	Taat
22	PTPN VI Sangir, Solok Selatan	Taat	Taat	Taat	Taat
23	PT. Tidar Kerinci Agung, Dharmasraya	Taat	Taat	Taat	Taat
24	PT. Selago Makmur Plantation	Taat	Taat	Taat	Taat
25	PT. Sumbar Andalas Kencana	Taat	Taat	Taat	Taat
26	PT. Transco Pratama	Taat	Taat	Taat	Taat
27	PT Bina Pratama Sakato Jaya, Solok Selatan	Taat	Taat	Taat	Taat
28	PT. Incasi Raya Pangian POM, Dharmasraya	Taat	Taat	Taat	Taat
29	PT. Kemilau Permata Sawit, Sijunjung	Taat	Taat	Taat	Taat
30	CV. Bara Mitra Kencana, Sawahlunto	Tidak Taat	Tidak Taat	-	Tidak Taat

Sumber : Olahan Tabel 36.A Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat,2017

Sedangkan pengawasan diluar objek PROPER yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebanyak 27 objek dengan kriteria yang sama dengan penilaian PROPER yaitu kriteria Izin Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan

Limbah B3, menunjukkan bahwa 2 (dua) perusahaan yang tingkat ketaatannya 100 %, dan 4 (empat) perusahaan yang tingkat ketaatannya > 75 % namun kurang dari 100 % dan sisinya sebanyak 21 perusahaan tingkat ketaatannya < 75 %, secara jelas dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.48. berikut



Sumber: Olahan data Tabel 36 Dokumen IKPLHD Sumbar, 2017.

Gambar 3.48. Pengawasan Izin Lingkungan

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP





BAB IV

INOVASI DAERAH

DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang hampir 60% untuk gaji pegawai, 25-30% untuk sektor pendidikan dan sisanya untuk sektor lain, termasuk bantuan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu alasan Gubernur Sumatera Barat mengintruksikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi untuk mencermati kembali program dan kegiatan masing-masing serta membuat minimal 10 (sepuluh) program inovasi. Hal ini ditempuh guna mengoptimalkan APBD untuk mendapat hasil yang optimal. Program inovasi dapat berupa perbaikan sistim secara internal, penambahan peralatan sampai dengan melahirkan program/kegiatan baru yang mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Program inovasi ditetapkan kriterianya yaitu yang sudah

berjalan, sedang berjalan dan dalam perencanaan. Inovasi yang sudah berjalan diharapkan dapat direplikasi oleh kabupaten/kota di daerah masing-masing.

Terkait dengan isu prioritas lingkungan hidup daerah maka dilakukan koordinasi dan sinergitas dengan 7 OPD terkait yang hasil perumusannya diuraikan sebagai berikut :

4.1. Inovasi Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air

4.1.1. Pemanfaatan Sumber Daya Air Embung/Telaga Multi Sektor

Salah satu strategi untuk menjaga kualitas air justru pada peningkatan daya dan peman-faatan air untuk berbagai kepentingan. Penurunan kualitas air terjadi salah satu penyebabnya adalah tidak



dimanfaatkan secara optimal untuk nilai ekonomis sehingga fungsi sosial kontrol dari masyarakat rendah.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dalam program inovasinya salah satunya meningkatkan pemanfaatan embung/telaga untuk air baku, budidaya perikanan, pariwisata dan irigasi guna menunjang Pemerintah Daerah dalam kemandirian Pangan . Terdapat 238 sumber daya embung dan telaga yang cukup besar di Sumatera Barat yang selama ini belum dioptimalkan dalam pemanfaatan dan pemanfaatannya.

4.1.2. Program Percontohan Pengelolaan Sungai Secara Terpadu

Tekanan yang besar terhadap sungai khususnya di segmen perkotaan menyebabkan penurunan

kualitas air sungai terjadi di hampir daerah. Upaya pemulihan apabila dilakukan secara parsial tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu maka diperlukan percontohan pengelolaan sungai yang terpadu dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Percontohan ini diharapkan dapat direplikasi oleh Kabupaten/Kota.

Salah satu sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah Sungai Batang Agam. Sungai ini menjadi percontohan pengelolaan sungai terpadu dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun. Sungai melintasi 4 (empat) wilayah administratif, yaitu Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Payakumbuh. Aktivitas domestik yang terdapat pada empat kabupaten/kota mendominasi perubahan kualitas air Sungai Batang Agam.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.1. Sungai Batang Agam Segmen Kota Payakumbuh

Panjang Sungai Batang Agam adalah \pm 80,57 km. Sungai ini melintasi daerah padat penduduk hingga daerah pertanian dan perbukitan. Sungai Batang Agam memiliki nilai strategis karena keberagaman pemanfaatan sungai

tersebut. Sungai Batang Agam dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik (PLTA Batang Agam).. Di Kota Payakumbuh, Sungai Batang Agam dijadikan sebagai sumber air baku air minum oleh PDAM.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.2. Peta Aliran Sungai Batang Agam

Kualitas air Sungai Batang Agam mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Periode tahun 2011–2014 rata-rata penurunan kualitas airnya adalah 18,64%. Sedangkan periode tahun 2014–2017 mengalami

perbaikan/kenaikan kualitas air dimana rata-rata kenaikan kualitas airnya adalah 14,62%. Walaupun terjadi kenaikan indeks kualitas tapi masih belum mengimbangi penurunan indeks kualitas yang terjadi.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.3. Grafik Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Batang Agam Menurut Periode Waktu (Tahun 2011–2017)

Pengelolaan sungai tidak terlepas dari pengelolaan DAS, sehingga dengan demikian dibutuhkan pengelolaan DAS secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kualitas sungai. Untuk itu, Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya dan Pemerintah Kota Bukittinggi beserta jajarannya bersama-sama dengan masyarakat melakukan gotong royong membersihkan Sungai Batang Agam dari sampah-sampah dan semak yang menghambat laju alir air sungai. Kemudian kegiatan bersih-bersih sungai ini diikuti oleh daerah lainnya yang dialiri Sungai Batang Agam.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.4. Gotong Royong Bersama yang Diikuti oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Bukittinggi, OPD Provinsi, OPD Kota dan Masyarakat Sekitar Sungai Batang Agam Segmen Kota Bukittinggi

Dalam mengelola DAS Batang Agam, integrasi antara instansi vertikal Pemerintah dengan Pemerintah Daerah menjadi faktor penentu perubahan wajah sungai. Nilai peran Sungai Batang Agam dapat ditingkatkan secara simultan dengan pengembangan kepariwisataan pada daerah sempadan sungai.

Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V

telah mengalokasikan dana sejumlah Rp. 93 milyar melalui kegiatannya di Sungai Batang Agam berupa revitalisasi dan penataan sempadan sungai yang telah dimulai dari tahun 2016 dan akan selesai tahun 2019. Kolaborasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi semenjak tahun 2016 dalam normalisasi Sungai Batang Agam merupakan bentuk nyata dalam pengelolaan sungai.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.5. Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi, Penataan dan Pemulihan Sempadan Sungai Batang Agam

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan juga berencana mengalokasikan kegiatannya berupa pembuatan kebun bibit pohon di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keterpaduan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sangat penting dilakukan. Terbangunnya komitmen antar kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menjadi dasar pijakan pelaksanaan program dan kegiatan, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD dengan

berbagai kegiatan di bidangnya masing-masing. Guna mendukung dan mengimplementasikan komitmen tersebut, pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh telah menandatangani ‘Kesepakatan Bersama’ (*Memorandum of Understanding/MoU*) tentang penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.6. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Sumatera Barat dengan Bupati Agam, Walikota Bukittinggi, Bupati Lima Puluh Kota dan Walikota Payakumbuh

Selanjutnya pada tahun 2017, kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan ‘Perjanjian Kerjasama’ antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan

Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.7. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

Program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik dalam skala kecil maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung guna mewujudkan penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam dalam konteks pengelolaan Sungai Batang Agam secara terpadu.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD Provinsi/Kabupaten/Kota

adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan. Pemantauan kualitas air dilakukan terhadap sungai utama maupun anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Agam. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas air Sungai Batang Agam. Data hasil pemantauan dan pengawasan dijadikan sebagai dasar pengambil

kebijakan yang tepat sehingga segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

4.1.3. Pengendalian Pencemaran Air Danau Maninjau dengan program “Save Maninjau”

Pencemaran Danau maninjau tidak hanya menjadi Permasalahan Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat saja tetapi sudah menjadi permasalahan nasional, mengingat Danau Maninjau adalah Strategis Nasional. Diperlukan program penanganan terpadu sekaligus inovasi yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat lokal, mengingat resistensi dari masyarakat pembudidaya ikan kerambah untuk beralih profesi ke sektor lain sangat tinggi. Daya dukung dan daya tampung danau hanya mampu untuk 6.000 keramba tetapi saat ini keramba masih dalam jumlah sekitar 17.000.

Untuk Penanganan Danau Maninjau, pemerintah daerah baik Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah maupun Kabupaten Agam mencanangkan program

penyelamatan Danau Maninjau yang disebut “Save Maninjau” dengan 10 Agenda kerja yaitu :

- a. Agenda 1. Perbaiki Catchment Area. Melalui Program Agam Menyemai (2010 s/d sekarang) dan direncanakan akan melakukan normalisasi sungai, terasering dan rehabilitasi hutan dan lahan
- b. Agenda 2. Pengaturan pintu air PLTA. Melalui koordinasi dengan pihak PLTA dan kedepan akan melakukan evaluasi elevasi air pada pintu air PLTA, kesepakatan pengaturan pembukaan pintu air secara berkala antara pemda dan PLTA dan kajian kelaikan pemanfaatan air.
- c. Agenda 3. Stop KJA baru. Melalui himbauan dan SE Bupati Agam No. 533.2/611/DKP-AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Penambahan KJA.
- d. Agenda 4. Pengurangan KJA. Pemkab Agam telah melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pengusaha pakan dan investor KJA serta



- pemberlakuan Perda No. 5 Tahun 2014.
- e. Agenda 5. Pembersihan Permukaan Danau
 - f. Agenda 6. Pengerukan dan/ penyedotan dan/ bioremediasi.
 - g. Agenda 7. Transformasi ekonomi masyarakat ke daratan melalui program inovatif “Agam Menyemai”.
 - h. Agenda 8. Penguatan Regulasi. Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Saat ini sedang menunggu regulasi tentang zonasi Danau Maninjau melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - i. Agenda 9. Penguatan Kelembagaan. Pembentukan satgas kebersihan Danau Maninjau, Tim terpadu pengendalian pencemaran dan pembentukan UPT Pengelolaan Danau Maninjau.
 - j. Agenda 10. Penyelamatan Biota Endemis.

4.1.4. Perbaikan Sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPERDA)

Sumber tekanan penurunan kualitas selain limbah domestik adalah limbah industri, rumah sakit, perhotelan serta restoran. Salah satu bentuk kegiatan untuk mendorong peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Penilaian Kinerja Pengelolaan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPERDA). Kegiatan ini sudah berlangsung beberapa tahun dan setiap tahunnya dievaluasi dan dilakukan perbaikan sistem penilaiannya. Dalam konteks perbaikan sistem ini maka pada tahun 2017 ini dilakukan penambahan komponen sampah dalam kriteria penilaian. Disamping itu juga mekanisme pengawasan juga disempurnakan sehingga keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupten dan Kota semakin meningkat.

Kegiatan ini telah berlangsung selama 10 tahun. Dari hasil evaluasi dan verifikasi lapangan didapatkan tingkat ketaatan terhadap peraturan bidang lingkungan hidup sebesar 81,58%. Tingkat ketaatan

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,07%. Diasumsikan terwujudnya penurunan beban pencemaran sekitar 5%. Indikasi lainnya atas keberhasilan kegiatan ini adalah berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap adanya pencemaran dan kerusakan di daerahnya masing-masing.

4.2. Inovasi Pengelolaan Sampah Melalui Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB)

Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) merupakan salah satu program inovasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang langsung dicetuskan oleh Gubernur Sumatera Barat sejak tahun 2014 dengan tujuan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau khususnya pada aspek pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau serta mendukung percepatan pencapaian program nasional Adipura. Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) merupakan gerakan berskala lokal di Sumatera Barat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target nasional Indonesia Bebas Sampah Tahun 2025.

Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) dilaksanakan melalui lomba **Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau dan pilot project “Zero Waste Kelurahan” dan Menabung Sampah Dapat Emas**

1. Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau Tahun 2017

Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau bertujuan untuk mendorong masyarakat di kecamatan dan kelurahan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah dan penataan ruang terbuka hijau. Peserta lomba merupakan usulan dari Bupati/ Walikota dengan ketentuan setiap kabupaten diwakili oleh satu kecamatan dan kota diwakili oleh dua kelurahan/desa. Jumlah peserta lomba kecamatan dan



kelurahan bersih dan hijau tahun 2017 adalah 12 kecamatan dan 13 kelurahan.

Penilaian Lomba Kecamatan/ Kelurahan Bersih dan Hijau dilaksanakan oleh Tim yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat. Unsur Tim Penilai terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan dan Pers. Tata cara dan kriteria penilaian lomba mengacu kepada kriteria penilaian program Adipura dengan memasukkan unsur kearifan lokal Minangkabau dan pedoman penilaian ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Unsur kearifan lokal yang dinilai disesuaikan dengan pokok-pokok ajaran Minangkabau dengan prinsip “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang mengatur keseimbangan antara manusia, lingkungan dan Tuhan. Masjid dan mushalla merupakan salah satu titik pantau sekaligus sebagai ikon dari penilaian Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau yang

sangat mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertajuk “kembali ke nagari dan kembali ke surau”. Diharapkan ke depannya mesjid dan mushalla yang ada di Sumatera Barat bernuansa bersih dan hijau dan nyaman untuk beribadah. Penetapan mesjid dan mushalla sebagai titik pantau merupakan komitmen bahwa pemerintah wajib menyediakan sarana beribadah yang bersih dan hijau untuk masyarakatnya.

Penilaian dilakukan terhadap kondisi non fisik dengan bobot 15% dan fisik 85%. Kecamatan dan kelurahan diminta mengisi dan menyerahkan data non fisik sesuai dengan form isian yang telah ditentukan. Sedangkan aspek fisik dinilai dengan melakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai. Jumlah titik pantau yang dinilai di kecamatan adalah 25 titik pantau, sedangkan di kelurahan 18 titik pantau.

Pemenang Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan diumumkan pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus 2017. Selain diberikan piagam dan insentif berupa uang pembinaan, kepada pemenang juga diberikan bantuan sarana pengelolaan sampah berupa becak motor sampah untuk pemegang pertama, gerobak sampah untuk pemenang ke dua dan kontainer sampah untuk

pemenang ke tiga yang diperoleh dari bantuan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 4.1 menyajikan data pemenang Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau tahun 2014 – 2017.

Tabel 4.1. Pemenang Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) Tahun 2014–2017

Tahun	Pemenang Lomba 2014-2017		
	No.	Kecamatan	Kelurahan
2014	1.	Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman	Parak Gadang Kota Padang
	2.	Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	Silaing Bawah Kota Padang Panjang
	3.	IV Nagari Kabupaten Sijunjung	Manggis Ganting Kota Bukittinggi
2015	1.	Sitiung Kabupaten Dharmasraya	Guguk Malintang Kota Padang Panjang
	2.	Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar	Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman
	3.	Batang Kapas Kabupaten Pesisir selatan	Tanjung Paku Kota Solok
2016	1.	Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Pakan Sinayan Kota Payakumbuh
	2.	Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	Pasar Usang Kota Padang Panjang
	3.	Bonjol Kabupaten Pasaman	Tanah Lapang Kota Sawahlunto
2017	1.	Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya	Belakang Balok, Bukittinggi
	2.	Bonjol, Kabupaten Pasaman	Koto Panjang, Padang Panjang
	3.	Pariangan, Kabupaten Tanah Datar	Bandar Buat, Padang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Evaluasi terhadap kegiatan lomba kecamatan dan kelurahan bersih dan hijau dalam tiga tahun terakhir menjadi *baseline* data dan

tolak ukur bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengelolaan sampah khususnya

untuk mencapai target pengelolaan dan pengurangan volume sampah serta pengelolaan ruang terbuka hijau dengan cara:

1. Memberikan edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kecamatan dan kelurahan.
2. Menentukan prioritas sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kecamatan dan kelurahan.
3. Mempertimbangkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di kecamatan dan kelurahan.

Hal yang menggembirakan adalah di beberapa kecamatan dan kelurahan yang ibukotanya telah

mengikuti penilaian Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau adalah telah ada kegiatan bersama masyarakat untuk menciptakan aksi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti terbentuknya bank sampah di tiap kelurahan, kegiatan pengomposan di perumahan dan kegiatan dasa wisma untuk produk daur ulang, serta taman-taman yang bukan saja dihiasi dengan tanaman tapi dilengkapi dengan ruang bermain bagi anak dan tempat berkumpul masyarakat.



(a)



(b)



(c)



(d)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.8. a) Kondisi Permukiman di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya; b) Permukiman Masyarakat dengan Tempat Sampah Terpilah; c) Penyerahan Penghargaan Kecamatan Bersih dan Hijau Tahun 2017; d) Penyerahan Penghargaan Kelurahan Bersih dan Hijau Tahun 2017

2. Pilot Project “Zero Waste Kelurahan” Dan Menabung Sampah Dapat Emas

Pada awalnya Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah (ATTS) Bukittinggi merupakan kelurahan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi, karena lokasinya diapit oleh dua drainase yang mengalir ke Batang Agam dan digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai sarana pembuangan sampah rumah tangga akibat minimnya sarana TPS di kelurahan ini. Untuk meminimalisir pencemaran sungai akibat pembuangan sampah dari pemukiman di sepanjang aliran Sungai Batang Agam segmen Kota Bukittinggi, maka pada tahun 2016 Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat melakukan pendampingan pembangunan Bank Sampah Mutiara Indah di RW III Kelurahan ATTS Bukittinggi dan pada tahun 2017 dilanjutkan dengan bantuan 40 unit *Solar Biodigester* dan pendampingan pembentukan lima unit bank sampah di RW I, II, IV, dan V. Tingginya peran masyarakat untuk keluar dari predikat “kumuh” telah menobatkan Kelurahan ATTS Bukittinggi sebagai RW *Zero Waste*, karena mulai tahun

2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi tidak lagi memberikan rute pelayanan pengangkutan sampah ke kelurahan tersebut dan tidak ditemukan satu pun unit TPS di kelurahan ini. Semua sampah yang dihasilkan berupa anorganik diserahkan ke Bank Sampah Mutiara Indah serta lima unit bank sampah yang juga dibentuk melalui jasa pendampingan dan sampah anorganik langsung dikelola masyarakat melalui *Solar Biodigester* yang ada di halaman rumah penduduk. Selain bersih dari sampah, Kelurahan ATTS Bukittinggi juga hijau karena hampir semua penduduk menghiasi rumahnya dengan tanaman hias, tanaman dapur, dan tanaman obat yang pupuknya diperoleh dari *biodigester*.

Nota Kesepahaman (MoU) antara PT. Pegadaian Bukittinggi dengan Bank Sampah Mutiara Indah serta lima bank sampah lainnya, dimana setiap menabung sampah senilai Rp.20.000,- akan dihargai oleh PT. Pegadaian seharga 0,01 gram emas, menjadikan semangat yang luar biasa bagi masyarakat untuk menabungkan sampah anorganiknya ke bank sampah.

Keuntungan ekonomi yang diperoleh penduduk Kelurahan ATTS Bukittinggi (contoh RW III) adalah:

1. Untuk tahun 2017, total jumlah sampah anorganik yang ditabung di bank sampah adalah 30 ton atau setara dengan Rp. 12.000.000,- atau setara dengan enam gram emas.
2. Untuk tahun 2017, sebanyak 20 ton sampah plastik tidak lagi mencemari Sungai Batang Agam segmen Bukittinggi yang melewati Kelurahan ATTS Bukittinggi.
3. Ibu Rumah Tangga Kelurahan ATTS Bukittinggi hemat uang belanja Rp. 15.000,-/minggu karena sebagian bumbu dapur sudah tersedia di halaman. Satu bulan dapat menghemat Rp. 60.000,- dan satu tahun menghemat uang belanja Rp. 720.000,-.
4. Bank Sampah Mutiara Indah menjadi tempat pembelajaran bagi penggiat sampah, tidak hanya dari Sumatera Barat tetapi juga dari Provinsi Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Timur, Aceh, Yogyakarta dan Kabupaten Goa Sulawesi Selatan.



(a)



(b)



(c)



(d)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.9. a) Pemanfaatan Solar Biodigester di Permukiman Masyarakat; b) Kondisi Lingkungan di Kelurahan ATTS Bukittinggi; c) Bank Sampah Induk Mutiara Indah; d) Buku Tabungan Emas dari Sampah Kerjasama dengan Pegadaian

4.3. Inovasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Minimal 5 (lima) sektor terpengaruh dan mempengaruhi alih fungsi di Sumatera Barat yaitu kehutanan, pertanian dan penataan ruang, pemukiman dan perumahan serta kebencanaan dan lingkungan hidup. Olehkarena itu kebijakan dan program inovasi dibawah ini merupakan kompilasi dari keempat OPD tersebut :

4.3.1. Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Lahan dan Daya Tampung Lahan Pertanian.

Dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup digunakan pendekatan 22 layanan jasa ekosistem. Namun untuk jasa pangan dilakukan pengkajian khusus untuk selanjutnya sebagai bahan kebijakan untuk penetapan lahan pertanian abadi

4.3.2. Integrasi Tata Ruang Untuk Pengurangan Bencana

Alih fungsi lahan tidak hanya mempengaruhi permasalahan pangan

tetapi juga kebencanaan mengingat geomorfologi dan topografi Sumatera Barat rawat terhadap bencana. Olehkarena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat mengantisipasinya dengan menyusun program inovasi yang mengintegrasikan tata ruang terhadap kebencanaan.

4.3.3. Pelayanan Informasi Spasial kawasan hutan berbasis Web-Gis

Program inovasi ini dalam tahapan sedang dibangun. Selain dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam keterbukaan informasi publik terhadap kinerja pengelolaan hutan dan juga untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap alih fungsi hutan.

4.3.4. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

Konsep pengelolaan hutan *social forestry* atau yang di Sumatera Barat lebih dikenal dengan Istilah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang baik dalam kurun waktu 5



tahun terakhir. Dalam pelaksanaannya selalu ada perbaikan-perbaikan dan inovasi.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Sumatera Barat dapat dijadikan sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan sekaligus untuk mengurangi tekanan terhadap perusakan dan perambahan hutan. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) mencakup seluruh sektor atau aspek pengelolaan hutan secara menyeluruh yang meliputi penataan dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan (kayu, non kayu dan jasa lingkungan), penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan dan konservasi alam.

Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan hutan dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) akan melibatkan partisipasi langsung masyarakat sekitar hutan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam upaya percepatan dan perluasan pengelolaan hutan melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) antara lain:

1. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Menyusun *Road Map* (Rencana Kerja) pengembangan Perhutanan Sosial dengan target 500.000 Ha.
3. Melakukan kerjasama multi pihak dalam pengembangan Perhutanan Sosial

4.4. Inovasi Pengendalian Kerusakan Akibat Pertambangan.

Setelah kewenangan perizinan pertambangan dialihkan ke Provinsi, maka beberapa persoalan muncul antara lain masalah pengawasan dan pemulihan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, maka beberapa kebijakan dan program inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara berkelanjutan adalah sebagai berikut :

4.4.1. Program Pemulihan Akses Terbuka

Dalam 2 (dua) tahun ini telah dilakukan percontohan pemulihan lahan akses terbuka akibat tambang

ilegal di Dhamasraya. Program ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan lahan yang rusak dan ditinggalkan tetapi juga mengikutsertakan masyarakat dalam pemulihan dan pengawasan aktifitas tambang ilegal di daerahnya.

Areal bekas tambang ditetapkan seluas 300 Ha, namun pemulihan dilakukan tahap I ini seluas 5 Ha untuk dijadikan “Ecoeduwisata Bambu”. Pemulihan dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dhamasraya, Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tahap selanjutnya pemulihan akan dikerjasamakan dengan Perusahaan PROPER melalui program CSR Perusahaan.

4.4.2. Penertiban Terpadu

Untuk pengawasan penambangan tanpa izin telah dibentuk Tim Penertiban Tambang Tanpa Izin dengan Keputusan Gubernur dengan anggota tim berasal dari OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa OPD lainnya. Tim ini secara berkala melakukan penertiban

pertambangan tanpa izin dan merusak lingkungan.

4.5. Inovasi Kebencanaan

Walaupun isu kebencanaan tidak menjadi isu prioritas tapi pada bab ini tetap dikaji program inovasi kebencanaan karena merupakan program prioritas pembangunan daerah yang sangat erat dengan lingkungan hidup.

Menjadi Desa/Kelurahan Tangguh adalah sebuah prioritas dalam mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah. Hal ini mengingat antara tahun 1950 dan 1990-an proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah mulai dipengaruhi oleh isu-isu kebencanaan yang mendatangkan kerugian nyata dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah. Menurut Bank Dunia, kerugian akibat bencana yang diderita negara-negara berkembang, jika dihitung sebagai persentase dari produk domestik bruto, dapat mencapai 20 kali lebih besar dari pada kerugian yang dialami oleh negara-negara industri, sementara lebih dari 95 persen kematian diakibatkan oleh bencana terjadi di



negara berkembang, termasuk Indonesia. Fakta ini telah menyadarkan bangsa-bangsa bahwa kasus kegagalan pembangunan terkadang menjadi produk yang menimbulkan risiko bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman dan kerentanan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

Untuk mengatasi isu dalam kebencanaan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat mengajukan beberapa program kegiatan, yaitu:

1. Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana

Dalam program masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka,

terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Menurut Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012, Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012). Pada Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan. Pendekatan satu sektor saja sudah banyak terbukti belum bisa membangun ketangguhan secara memadai. Untuk itu, masih dibutuhkan banyak usaha baik oleh masyarakat sendiri maupun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Peraturan ini mengamanatkan bahwa pentingnya penguatan kepada seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan program yang untuk

Sumatera Barat disebut Nagari Tangguh ini. Prioritas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 dilakukan pada empat lokasi, yaitu dua lokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan dan Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru. Dua nagari ini memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap banjir dan longsor. Dari pengalaman dalam menghadapi bencana di dua nagari tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang mana masyarakat dan aparatur di tingkat nagari masih memiliki kapasitas yang rendah. Sedangkan dua lokasi lainnya berada di Kota Payakumbuh, yaitu Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur merupakan dua kelurahan di Kota Payakumbuh yang memiliki kerentanan terhadap ancaman banjir.

Melalui pendekatan partisipatif, identifikasi terhadap kerentanan dan kapasitas yang

dimiliki oleh masyarakat akan dijadikan modal utama untuk pengurangan risiko bencana pada masa yang akan datang. Dalam mengantisipasi dampak yang muncul dari ancaman tersebut, ternyata masyarakatnya masih memiliki beberapa indikator kerentanan, yaitu kerentanan sosial, meliputi pengetahuan pengurangan risiko bencana yang masih kurang, persepsi risiko yang rendah, permukiman yang dekat dengan titik ancaman, tingkat kemiskinan yang tinggi, belum adanya analisis kerentanan dan kapasitas, serta belum adanya manajemen yang baik untuk perencanaan pembangunan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana. Kerentanan fisik meliputi bangunan fisik yang berada tidak jauh dari titik ancaman, bangunan belum ramah bencana, jalur evakuasi yang belum memadai, serta infrastruktur dan fasilitas umum yang dekat dengan sumber ancaman. Kerentanan ekonomi meliputi belum adanya perekonomian alternatif yang potensial untuk jaminan



kesiapsiagaan, dan belum adanya peningkatan pengetahuan tentang adaptasi perekonomian untuk kehidupan berkelanjutan. Kerentanan lingkungan, meliputi belum adanya sistem lingkungan yang ramah terhadap bencana, belum adanya pengelolaan sampah yang baik, belum meratanya MCK yang sesuai dengan standar, serta perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu penguatan kepada masyarakat untuk bisa menempuh indikator pengembangan Nagari Tangguh hingga menjadi Nagari Tangguh Utama, yang mampu mandiri dalam melaksanakan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

2. Jambore Pengurangan Resiko Bencana ke-IV Tingkat Provinsi
Untuk menurunkan risiko pada saat terjadi bencana, melindungi masyarakat dari kerugian yang besar, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis komunitas/masyarakat, pembentukan sistem penanggulangan

bencana di tingkat masyarakat, serta melakukan upaya pembangunan fasilitas-fasilitas yang tahan terhadap bencana yang sesuai dengan kearifan lokal setempat. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana urgen dilakukan diantaranya dengan melakukan pelatihan penanggulangan bencana atau dengan simulasi-simulasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana.

Salah satu upaya yang penting untuk menyikapi hal tersebut adalah bagaimana Pemerintah siap dan siaga ketika bencana terjadi, salah satu ujung tombak penting adalah keberadaan Kelompok Siaga Bencana (KSB). Pada saat awal kejadian bencana KSB yang langsung terjun untuk membantu dan menolong masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus memberikan laporan kronologis dan tindakan apa yang perlu dilakukan sebagai rekomendasi kepada pemangku kebijakan.

Sampai sejauh ini telah terbentuk KSB di kabupaten/kota. Melihat tumbuh berkembangnya KSB tentu sangat membantu dan mendukung program-program terkait pengurangan risiko bencana. Kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan haruslah lahir di tingkat masyarakat dan didukung penuh oleh pemerintah dalam hal ini tentunya BPBD sebagai *leading sector* utamanya. Setelah terbentuk masih perlu lagi penguatan kapasitas bagi personil KSB tersebut, karena disadari pembentukan KSB ini diinisiasi oleh banyak pihak baik itu LSM, PMI, BPBD, OPD lainnya yang tentunya berbeda beda jenis ragam maupun namanya.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya pendampingan dan penguatan potensi KSB menjadi relawan Penanggulangan Bencana yang harus memiliki pengetahuan dan keahlian baik manajemen kebencanaannya maupun praktik dan kemampuan lapangan. Diyakini peningkatan kapasitas tentang pengetahuan kebencanaan dan pengurangan

risiko bencana, membangun jaringan/kerjasama antar KSB dan para pihak dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana dengan mewujudkan “**Jambore Pengurangan Risiko Bencana bagi Kelompok Siaga Bencana**”.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk:

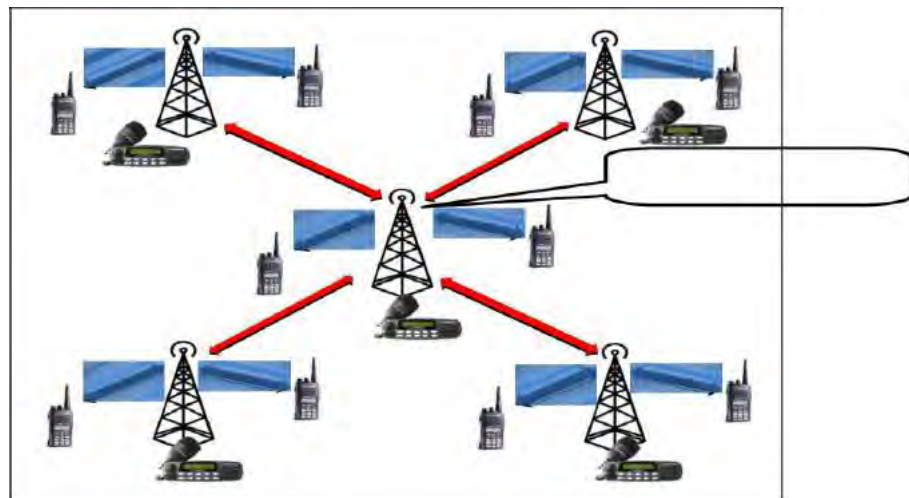
- a. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan *sharing* pengetahuan sesama KSB dibimbing oleh fasilitator.
 - b. Melakukan uji kemampuan KSB melalui berbagai perlombaan tentang manajemen penanggulangan bencana.
 - c. Membangun jaringan informasi dan kerjasama antar semua KSB se-Sumatera Barat serta para pihak lainnya (BPBD Kabupaten/Kota, BASARNAS Padang, LSM, PMI dan pihak-pihak terkait lainnya).
3. Penggunaan Teknologi IT untuk mendeteksi bencana secara dini
- Untuk mendeteksi secara dini adanya gejala dan ancaman bencana selama 24 jam secara

terus menerus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan sistem berbasis teknologi antara lain:

- a. Komunikasi Radio Kebencanaan antar Wilayah se-Sumatera Barat

Untuk memperkuat komunikasi radio kebencanaan antar Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun jaringan komunikasi radio

dengan menempatkan *repeater* (pancar ulang frekuensi) di beberapa titik, yaitu Bukit Gado-Gado Gunung Padang, Bukit Biawak di Kabupaten Pesisir Selatan, Komplek Pos Pekonina di Kabupaten Solok Selatan, dan Puncak Gunung Singgalang. Sebagai *repeater link* adalah *repeater* yang berada di puncak Gunung Singgalang. Konsep pancar ulang dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.10. Skema Jaringan Komunikasi Radio dengan Menggunakan Repeater dan Repeater Link

- b. Pemantauan cuaca dan potensi banjir
 - 1) Pemantauan cuaca pada satelit LAPAN dan

BMKG, pemantauan cuaca dilakukan dengan pengamatan visual dari jaringan internet terutama

dari cerita satelit terkini yang ditayangkan pada satelit SADEWA (*Satelite Early Warning System*) LAPAN dan BMKG. Kondisi cuaca yang diperoleh kemudian disebarluaskan melalui jaringan komunikasi, *black-berry messenger*, *whatsapp*, *facebook* dan *blog-spot*.

2) Pemasangan CCTV Batang Kuranji

Kamera yang dipasang di lokasi bertipe *network* (IP), CCTV ini bermanfaat untuk pengamatan dan interpretasi dampak terkini dari perubahan cuaca dari hulu Batang Kuranji.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.11. Pemandangan ke Lokasi CCTV Pengamatan Air Batang Kuranji, Kompleks Perguruan Adzkia, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Padang, Koordinat: 00° 55,257' LS dan 100° 23.623' BT

- 3) Pemantauan gempa dan kesiapsiagaan tsunami
Penerima informasi gempa dari jaringan *server* BMKG dan INATWES
- 4) Pemantauan Aktivitas Seismik

Pemantauan aktivitas seismik (kegempaan) di sekitar wilayah Sumatera Barat selain dengan mengaktifkan *server* di BMKG juga mengaktifkan intensitimeter dan

pemantauan aktivitas seismik pada stasiun-stasiun seismik *online* terdekat di Sumatera Barat. Gambar 4.15

merupakan alat pemantauan aktivitas seismik (seismogram dan insintimeter) secara *online*.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.12. Seismogram dan Insintimeter

5) Pengaktifan CCTV Pantai
Pemasangan CCTV bertujuan untuk mengamati perubahan permukaan air laut dan kondisi cuaca secara *real time* dan berkelanjutan dalam rangka

siaga tsunami dan cuaca ekstrim. Kamera yang dipasang di lokasi bertipe *Network (IP) Camera*, Panasonic BB-HCM581-CE, 42× *Zoom* (21× *optical* dan 2× *digital*).



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.13. Pemandangan dari Lokasi CCTV Pantai, Lantai Enaqm Hotel Pangeran Beach, Padang (Koordinat Posisi 00° 55,434' LS dan 100° 21,003' BT), Jalan Ir. H. Juanda 79, Padang Utara, Padang

- 6) Pengaktifan sirine kontrol *West Sumatera TEWS* yang siaga 24 jam
- 7) Aktivasi Sirine INA TEWS (*Indonesia Tsunami Early Warning System*) Jaringan INA TEWS-BMKG yang terpasang di beberapa kabupaten/kota (Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kota Pariaman, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Sipora, Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Selatan Kab. Mentawai) di Provinsi

Sumatera Barat juga dilengkapi dengan *Warning Receiver System (WRS)/Digital Video Broadcasting (DVB)* sebagai media pengiriman informasi singkat gempa bumi dan tsunami yang juga telah diintegrasikan dengan Peringatan Dini Cuaca Ekstrim yang di-relay BMKG Padang Panjang.

- 8) Dukungan operasi tanggap banjir di kabupaten/kota
- 9) Pemantauan aktivitas Gunung Marapi secara visual dan *real time*, CCTV.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.14. Kamera CCTV Pemantauan Gunung Marapi, Jorong Cangkiang, Nagari BatuTaba, Kecamatan Empat Angkat Candung, di Rumah Masyarakat Atas Nama Indarmawan, Koordinat Lokasi 0,314275 LS dan 100,4184. Kamera yang Dipasang di Lokasi Bertipe *Network (IP) Camera*, Panasonic BB-HCM581CE, 42x *Zoom (21× Optical & 2× Digital)* Kamera Menghadap ke Tenggara



4.6. Inovasi Daerah Kelembagaan, Penganggaran, Peningkatan SDM

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai dari penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, pemberdayaan masyarakat dan lembaga sumber daya manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan yang secara otomatis juga berdampak terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini juga mengubah pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan yang salah satunya adalah pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup yang awalnya merupakan pelayanan dasar menjadi non pelayanan dasar.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 antara lain adalah adanya pembagian 11 urusan kewenangan bidang lingkungan hidup, yaitu:

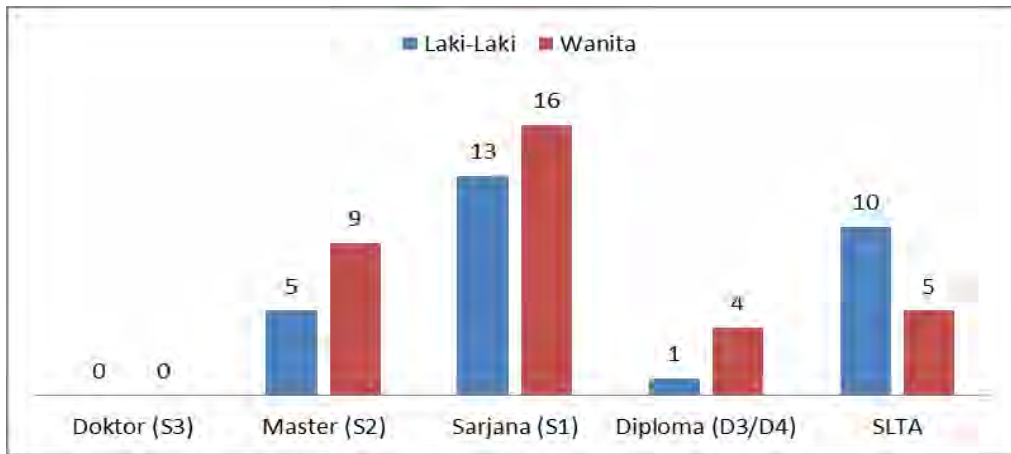
1. Perencanaan lingkungan hidup;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Keanekaragaman hayati (Ke-hati);
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3);
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH);
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
9. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
10. Pengaduan lingkungan hidup; serta
11. Persampahan.

Untuk mendukung kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung

oleh 63 orang Pegawai Aparatur Sipil Negara (29 laki-laki dan 34 perempuan) dengan latar belakang pendidikan Master (S2) berjumlah 14 orang, latar belakang pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 29 orang, latar belakang pendidikan Diploma berjumlah lima orang dan latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 15 orang.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.15. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

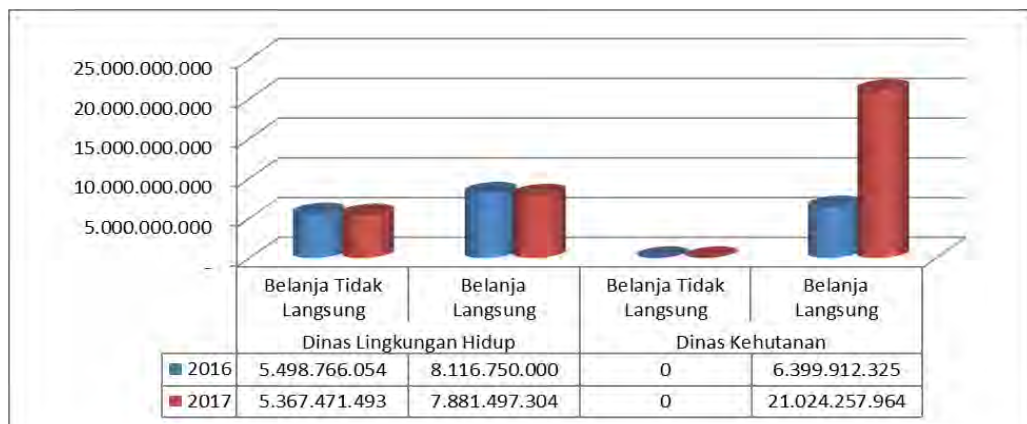
Untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 34.273.266.761,- (sekitar 0,54% dari total belanja daerah sebesar Rp. 6.356.615.627.902,-) yang secara umum naik sebesar 11,86% dibandingkan tahun 2016. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup ini

tersebar pada dua OPD Provinsi Sumatera Barat (Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan). Bila dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat khususnya di ke dua OPD tersebut dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 20.015.428,37,00 menjadi

sebesar Rp. 34.273.226.761,00 pada Tahun 2017 atau peningkatan sebesar 58,40 %. Penggunaan anggaran di tahun 2017 banyak difokuskan pada pengelolaan pengendalian pencemaran kualitas air sungai secara rinci dapat dilihat sebagaimana gambar 4.1 berikut.

Disisi lain penganggaran pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya berasal dari APBD namun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didukung juga oleh APBN. Pada Tahun 2017 anggaran yang tersedia di APBN sebesar Rp. 450.000.000,- dengan kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambient dan Kualitas Air Sungai Lintas Provinsi.

Disamping itu, penganggaran pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat bukan hanya dilakukan oleh pemerintah namun melibatkan dunia usaha untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui dana *Corporation Sosialis Reponsebility (CSR)* atau Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.16. Perbandingan APBD Provinsi Sumatera Barat Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 dan Tahun 2017

Dalam mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan penganggaran maka Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan salah satu *tool* atau alat berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Pada sistem ini dapat dilihat lima Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup;
4. Meningkatnya kapasitas dan peranserta *stakeholders*; dan
5. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, telah membentuk jejaring kerja dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota khususnya Kota Bukittinggi, Kota

Payakumbuh, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana perjanjian kerjasama ini merupakan aplikasi dari kesepakatan bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota terkait penanganan kualitas air sungai Batang Agam.

Terkait pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mempublikasi informasi terkait lingkungan hidup pada *website* Dinas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memperoleh peringkat III (tiga) dalam Keterbukaan Informasi Publik kategori Organisasi Perangkat Daerah di Sumatera Barat.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Gambar 4.17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 Sebagai Juara III Kategori Organisasi Perangkat Daerah

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

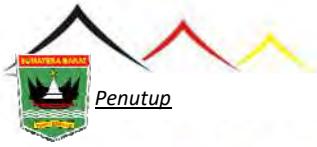
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat 2017 disusun sudah melalui tahapan yang ditentukan dari mulai penjaringan isu prioritas hingga perumusan kebijakan dan program inovasi.

Dari proses penjaringan melalui konsultasi publik, telah ditetapkan 4 (empat) Isu Prioritas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 melalui Surat Pernyataan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/ 42/SP/TL/DLH/ 2018 tanggal 2 April 2018, meliputi (1) Pencemaran Air, (2) Alih Fungsi Lahan, (3) Pengelolaan Sampah dan (4) Pengelolaan Pertambangan.

Terkait pencemaran air, limbah domestik masih merupakan sumber tekanan yang utama terhadap penurunan kualitas sungai di perkotaan. Untuk sungai-sungai di perdesaan tekanan berasal dari limbah pertanian, dan limbah

aktivitas PETI. Hal ini terjadi di Sungai Batanghari, Batang Kuantan, dan Batang Ombilin serta limbah industri. Khusus untuk Danau Maninjau, pencemaran yang terjadi secara umum masih disebabkan oleh masalah yang sama dengan beberapa tahun sebelumnya, yakni aktivitas budidaya perikanan keramba jaring apung yang melebihi daya dukung dan daya tampung danau.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengendalikan pencemaran air dan pengelolaan air meliputi peningkatan pemanfaatan air multisektor termasuk wisata, pangan dan kebutuhan air baku PDAM, meneruskan program pengendalian pencemaran sungai terpadu (Sungai Batang Agam) dengan melibatkan lebih banyak stakeholder termasuk instansi vertikal, pelaksanaan Proper/ Properda dengan menambah



kriteria sampah sebagai indikator penilaian serta program “save Maninjau”.

Di Sumatera Barat, masalah alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan penggunaan lahan lainnya yang mengalami penambahan. Penambahan lahan yang terluas adalah lahan perkebunan dengan total penambahan seluas 605.416 Ha atau meningkat 141% dari kondisi sebelumnya seluas 426935,93 Ha. Pertambahan luas perkebunan dan sektor lainnya diiringi berkurangnya luas lahan pertanian dan kehutanan. Alih fungsi lahan seringkali menjadi penyebab munculnya lahan kritis dan lahan kering. Untuk mengatasi dan mengendalikan kondisi tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu penghijauan, reboisasi, penataan izin pertambangan, penetapan Perda peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan lain-lain.

Untuk isu pengelolaan persampahan, hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama yang masih menjadi tantangan adalah penanganan sampah, khususnya di wilayah perkotaan. Pertambahan penduduk dan

peningkatan aktivitas yang pesat di perkotaan telah mengakibatkan meningkatnya timbulan sampah beserta permasalahannya (Kota Padang dan Kota Bukittinggi masih menjadi wilayah dengan timbulan sampah tertinggi di Sumatera Barat). Masalah menjadi semakin kompleks karena dalam proses penanganannya belum didukung kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, beberapa upaya telah dilakukan dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah ini, antara lain pembentukan unit-unit bank sampah (dan pendampingan untuk pengelolaannya), menyiapkan Ranpergub mengenai JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta pemberian penghargaan melalui program penilaian kecamatan dan kelurahan bersih.

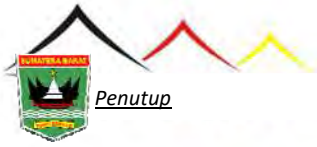
Pengelolaan pertambangan merupakan isu terakhir yang menjadi prioritas dalam penyusunan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Pemerintah Sumatera Barat sangat selektif dalam menerbitkan izin usaha pertambangan. Pada tahun 2017 izin

lebih banyak diberikan kepada pertambangan batuan yang skala tidak besar, sedangkan untuk pertambangan logam dan batubara hanya 3 (tiga) izin yang diterbitkan tahun ini. Permasalahan yang timbul justru berasal dari pertambangan tanpa izin, beberapa persoalan lingkungan dari konflik sosial hingga kerusakan lahan terjadi. Terdapat 217 titik areal bekas tambang ditinggalkan tanpa pemulihan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi selain penataan kembali izin pertambangan melalui evaluasi dan verifikasi izin usaha pertambangan, penertiban pertambangan tanpa izin oleh Tim Penertiban Terpadu, juga mengikutsertakan masyarakat dalam program pemulihan lahan akses terbuka.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap keempat isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat serta upaya yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kondisi kekinian kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat, maka perlu diambil langkah-langkah ke depannya sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan dan

mempertahankan kualitas hidup Sumatera Barat agar tetap baik atau semakin baik . Upaya tersebut meliputi :

1. Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Peraturan (DDDTLH) Gubernur sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan/ rencana/ program pembangunan daerah
2. Evaluasi Tata Ruang Provinsi berbasis DDDTLH
3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) Provinsi Sumatera Barat sebagai landasan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat pada tataran perencanaan perlu segera dituntaskan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
4. Menyusun penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup DDDTLH ekosistem perairan laut sebagai tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)



5. Mendorong kabupaten/Kota untuk penetapan lahan pertanian abadi didasarkan DDDTLH jasa pangan
6. Implementasi program/kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan lingkungan hidup, terutama terkait pencemaran air dan masalah pengelolaan persampahan, perlu diwujudkan secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan peran serta masyarakat. Monitoring oleh instansi/*stakeholder* terkait tetap perlu dilakukan guna menjamin program/kegiatan tersebut diimplementasikan secara riil sesuai dengan target yang direncanakan.
7. Diperlukan koordinasi intensif antara Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi sektor terkait dalam upaya mencari solusi dan tindak lanjut terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan untuk aktivitas/kegiatan pertambangan, perkebunan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2031.
- _____. 2016. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional.
- _____. 2017. Buku Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- _____. 2017. Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017–2037.
- _____. 2017. Laporan Akuntalitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- _____. 2017. Laporan Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- _____. 2017. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- _____. 2017. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- _____. 2017. Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi Tahun 2017.
- _____. 2017. Neraca Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- _____. 2017. Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2016.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN I TABEL DATA





DAFTAR TABEL DATA

Tabel 1	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya di Provinsi Sumatera Barat	1
Tabel 1.A	Tutupan Lahan di Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	4
Tabel 1.B	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat	6
Tabel 1.C	Pola Ruang Wilayah Darat Provinsi Sumatera Barat 2009 - 2029	7
Tabel 1.D	Pola Ruang Wilayah Pesisir Sumatera Barat Tahun 2009 - 2029	9
Tabel 1.E	Rencana Luas dan Perubahan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029	10
Tabel 2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Provinsi Sumatera Barat	11
Tabel 2.A	Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029	12
Tabel 2.B	Indeks Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 2.C	Perbandingan Indeks Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 3	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Provinsi Sumatera Barat	14
Tabel 3.A	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat	15
Tabel 3.B	Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	17
Tabel 3.C	Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 3.D	Nama dan Luas Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 3.E	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKLD) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat	19
Tabel 4	Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel 4.A	Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2015-2017 di Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 4.B	Luas Lahan Potensial Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	22
Tabel 5	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Provinsi Sumatera Barat	23
Tabel 5.A	Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2014 - 2017 di Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 6	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat	25
Tabel 6.A	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 6.B	Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016	32
Tabel 7	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 7.A	Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 8	Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat	35
Tabel 8.A	Penanaman Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015	35





Tabel 9	Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 9.A	Perbandingan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 10	Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat	37
Tabel 10.A	Transplantasi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	37
Tabel 11	Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	38
Tabel 11.A	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat	38
Tabel 12	Jenis Pemanfaatan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	39
Tabel 12.A	Jenis Pemanfaatan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	40
Tabel 13	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel 13.A	Rekapitulasi Produksi Minerba di Provinsi Sumatera Barat	43
Tabel 14	Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Provinsi Sumatera Barat	44
Tabel 14.A	Perbandingan Luas Area Penghijauan dan Reboisasi Tahun 2015 s/d 2017	45
Tabel 14.B	Perbandingan Realisasi Jumlah Pohon Untuk Penghijauan dan Realisasi Jumlah Pohon Untuk Reboisasi	46
Tabel 15	Kondisi Sungai di Provinsi Sumatera Barat	47
Tabel 15.A	Inventarisasi Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Lintas Provinsi di Provinsi Sumatera Barat	48
Tabel 16	Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat	50
Tabel 16.A	Kapasitas dan Sumber Air Danau/Situ/Telaga/Embung di Provinsi Sumatera Barat	51
Tabel 17	Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat	55
Tabel 17.A	Indeks Kualitas Air (IKA) 9 (Sembilan) Sungai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	159
Tabel 18	Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat	160
Tabel 18.A	Perbandingan Kualitas Air Danau Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat	164
Tabel 19	Kualitas Air Sumur di Provinsi Sumatera Barat	168
Tabel 19.A	Ketersediaan Air Tanah di WS Silaut Tarusan	174
Tabel 19.B	Sumber Mata Air di Pulau-Pulau Kecil	175
Tabel 20	Kualitas Air Laut di Provinsi Sumatera Barat	176
Tabel 20.A	Perbandingan Kualitas Air Laut Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat	182
Tabel 21	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat	184
Tabel 21.A	Nama dan Lokasi Stasiun di Provinsi Sumatera Barat	185
Tabel 22	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat	186
Tabel 22.A	Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat	187
Tabel 22.B	Perbandingan Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat	187
Tabel 23	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat	188
Tabel 23.A	Persentase Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat	189



Tabel 23. B	Perbandingan Persentase Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang air Besar di Provinsi Sumatera Barat	190
Tabel 24	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat	191
Tabel 24.A	Persentase Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat	192
Tabel 24.B	Persentase Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat	193
Tabel 24.C	Persentase Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat	194
Tabel 25	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat	195
Tabel 25.A	Perbandingan Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat	195
Tabel 26	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sumatera Barat	196
Tabel 26.A	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2015-2017 di Provinsi Sumatera Barat	197
Tabel 26.B	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat	198
Tabel 27	Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat	199
Tabel 27.A	Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat	202
Tabel 28	Suhu Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat	203
Tabel 28.A	Perbandingan Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2015 s/d 2017	204
Tabel 29	Kualitas Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat	204
Tabel 29.A	Kimia Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat	205
Tabel 30	Kualitas Udara Ambien di Provinsi Sumatera Barat	206
Tabel 30.A	Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 2011-2017	208
Tabel 31	Penggunaan Bahan Bakar di Provinsi Sumatera Barat	209
Tabel 31.A	Penggunaan Bahan Bakar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	210
Tabel 32	Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat	212
Tabel 32.A	Perbandingan Jumlah Angkutan Umum Berdasarkan Jenis Tahun 2014-2017	212
Tabel 33	Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Provinsi Sumatera Barat	213
Tabel 33.A	Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Barat	213
Tabel 34	Dokumen Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	214
Tabel 34.A	Izin Lingkungan Yang Diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Barat	215
Tabel 34.B	Dokumen Lingkungan (Amdal) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan (Parsial) Kabupaten/Kota Yang Telah Selesai Proses Penilaiannya Pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat	216
Tabel 34.C	Dokumen Lingkungan Dalam Proses Penilaian Pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat	216
Tabel 34.D	Dokumen Lingkungan Dalam Proses Penilaian Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	217
Tabel 35	Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat	218
Tabel 35.A	Perusahaan Pengumpul dan Pengangkut Limbah B3 Yang Melakukan Kerjasama di Sumatera Barat	222



Tabel 36	Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Provinsi Sumatera Barat	223
Tabel 36.A	Hasil Pengawasan Objek PROPER di Provinsi Sumatera Barat	224
Tabel 37	Bencana Banjir, Korban dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	225
Tabel 37.A	Perbandingan Peristiwa Banjir antara 2014 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat	226
Tabel 38	Bencana Kekeringan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	227
Tabel 39	Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	228
Tabel 39.A	Jumlah Hotspot Pada Kejadian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Barat	229
Tabel 40	Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	230
Tabel 40.A	Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	231
Tabel 40.B	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Sumatera Barat	232
Tabel 41	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Sumatera Barat	233
Tabel 41.A	Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat	234
Tabel 42	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat	235
Tabel 42.A	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah yang masuk ke TPA Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat	236
Tabel 42.B	Perkiraan Timbulan Sampah Menurut Sumber di Provinsi Sumatera Barat	237
Tabel 42.C	Perkiraan Sampah Terolah Harian di Provinsi Sumatera Barat	237
Tabel 42.D	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat	238
Tabel 43	Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi di Provinsi Sumatera Barat	239
Tabel 43.A	Kegiatan Penanaman Bibit Bambu di Beberapa Nagari di Provinsi Sumatera Barat	242
Tabel 44	Status Pengaduan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	243
Tabel 44.A	Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Penanganan Pengaduan di Provinsi Sumatera Barat	246
Tabel 44.B	Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sektor Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat	246
Tabel 45	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	247
Tabel 45.A	Lembaga yang Menjadi Anggota WALHI di Provinsi Sumatera Barat	248
Tabel 46	Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	249
Tabel 46.A	Perbandingan Perolehan Penghargaan Nasional Lingkungan Tahun 2013 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat	252
Tabel 47	Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	253
Tabel 48	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	254
Tabel 48.A	Produk Hukum Berdasarkan Sektor Lingkungan Hidup yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2015	256
Tabel 49	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	260





Tabel 49.A	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dari APBN di Provinsi Sumatera Barat	262
Tabel 49.B	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dari APBN di Provinsi Sumatera Barat	263
Tabel 50	Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat	264
Tabel 50.A	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Berpendidikan S2 Berdasarkan Jurusan	264
Tabel 51	Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang telah Mengikuti Diklat di Provinsi Sumatera Barat	265
Tabel 51.A	Jumlah Peserta Diklat Teknis yang diikuti Pegawai Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	265
Tabel 52	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Barat	266
Tabel 53	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat	269





Tabel - 1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		791.671	783.858	316	7.405	92
		2. Kawasan Bergambut		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Resapan Air		-	-	-	-	-
	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Sempadan Pantai		-	-	-	-	-
		2. Sempadan Sungai		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau		-	-	-	-	-
		4. Ruang Terbuka Hijau		-	-	-	-	-
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		769.775	768.161	288	1.320	6
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya		-	-	-	-	-
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Marga Satwa Laut		24.952	-	-	-	-
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		251.704	-	-	-	-
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		35.214,39	-	-	-	-
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		544.520	-	-	-	-
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		89.592,00	-	-	-	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		-	-	-	-	-	
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		-	-	-	-	-	
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		-	-	-	-	-	
		3. Kawasan Rawan Banjir		-	-	-	-	-	
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	-	-	-	-	-	
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	-	-	-	-	-	
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	-	-	-	-	-	
		2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi		109.108,50	107.045,87	806,01	0,00	1.256,62
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi		4.251.300,70	4.161.570,70	47.436,70	571,30	41.722,00
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah		3.601.499,70	3.532.881,47	47.609,00	582,23	20.427,00
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif		514.760,00	491.983,50	8.219,70	0,00	14.556,80
	v. Kawasan Rawan Tsunami		185.290,00	174.534,70	8.307,00	0,00	2.448,30		
	vi. Kawasan Rawan Abrasi		-	-	-	-	-		
	vii. Kawasan Rawan Gas Beracun		-	-	-	-	-		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	-	-	-	-	-
			ii. Sempadan Mata Air	-	-	-	-	-
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir		190.500	-	-	-	-
		2. Ramsar		-	-	-	-	-
		3. Taman Buru		2.354	-	-	-	-
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		-	-	-	-	-
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		-	-	-	-	-
		6. Terumbu Karang		19.112	-	-	-	-
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		-	-	-	-	-
Kawasan Budidaya				-	-	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 1.A. Tutupan Lahan di Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Kerentanan Gerakan Tanah / Segmen	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Gerakan Tanah					
1.	Sangat Rendah	832.800,00	796.485,50	26.480,00	538,50	9.296,00
2.	Rendah	1.017.000,00	996.355,10	14.070,00	37,90	6.537,00
3.	Menengah	1.291.000,00	1.282.689,69	4.933,00	4,31	3.373,00
4.	Tinggi	460.700,00	457.351,18	2.126,00	1,82	1.221,00
B	Terletak Pada Zona Patahan					
1.	Segmen Sumpur	66.570,00	66.178,90	248,70	-	142,40
2.	Segmen Sianok	102.000,00	96.646,60	4.499,00	-	854,40
3.	Segmen Sumani	117.500,00	103.921,00	2.459,00	-	11.120,00
4.	Segmen Suliki	228.700,00	225.237,00	1.013,00	-	2.450,00
C	Letusan Gunung Berapi					
I	Gunung Marapi					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.440,00	23.260,77	176,00	-	3,23
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.637,00	6.637,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	9.820,00	9.820,00	-	-	-
II	Gunung Tandikat					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	13.100,00	12.963,67	115,50	-	20,83
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.848,00	6.848,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.267,00	1.267,00	-	-	-
III	Gunung Talang					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.290,00	21.780,70	442,30	-	1.067,00
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.470,00	6.245,69	70,71	-	153,60



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.272,00	1.272,00	-	-	-
IV	Gunung Kerinci					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	12.070,00	12.056,54	1,50	-	11,96
2.	Kawasan Rawan Bencana II	3.957,00	3.957,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	937,50	937,50	-	-	-
D	Gempa Bumi					
1.	Zona Kerawanan Tinggi	1.558.000,00	1.511.040,00	19.810,00		27.150,00
2.	Zona Kerawan Menengah	2.331.000,00	2.293.288,70	25.720,00	571,3	11.420,00
3.	Zona Kerawanan Rendah	362.300,00	357.242,00	1.906,00		3.152,00
E	Tsunami					
1.	Zona Kerawanan Tinggi	53.410,00	49.416,00	2.607,00	-	1.387,00
2.	Zona Kerawan Menengah	56.530,00	53.092,20	2.895,00	-	542,80
3.	Zona Kerawanan Rendah	75.390,00	72.026,50	2.805,00	-	558,50

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 1.B. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
Provinsi Sumatera Barat**

Tahun : 2017

RZWP3K	Luas (Ha)
(1)	(2)
Kawasan Pemanfaatan Umum	
a. Zona Pariwisata	
- Zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil	2.050,798
- Zona wisata alam bawah laut	4.439,681
- Zona wisata olahraga air	502,139
b. Zona Pelabuhan	
- Zona DLKK/DCKP	7.962,714
- Zona WKOPP	625,976

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 1.C. Pola Ruang Wilayah Darat Provinsi Sumatera Barat 2009 - 2029
Tahun : 2017

No	Nama Wilayah	Kawasan Lindung		Jumlah (A)	Kawasan Budidaya									Jumlah (B)	Jumlah A + B (Ha)
		Hutan Lindung	Suaka Alam & Cagar Budaya		Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Industri	Danau / Perairan Darat	Permukiman	Perkebunan	Pertanian	Pertambangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Kota Solok	1.141	2.038	3.179	-	-	-	-	-	479	142	1.964	-	2.585	5.764
2.	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-	-	185	-	1.191	-	1.148	-	2.524	2.524
3.	Kota Padang	13.433	16.427	29.860	-	-	-	-	462	13.920	-	25.039	214	39.636	69.496
4.	Kota Padang Panjang	-	333	333	-	-	-	-	-	594	-	1.373	-	1.967	2.300
5.	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	1.493	296	5.547	-	7.336	7.336
6.	Kota Payakumbuh	295	-	295	-	-	-	16	288	1.850	2.022	3.572	-	7.748	8.043
7.	Kota Sawahlunto	294	-	294	3.262	4.752	-	-	468	810	-	17.623	136	27.051	27.345
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	23.096	293.602	316.698	5.299	25.378	40.004	-	1.845	4.906	59.150	126.215	-	262.797	579.495
9.	Kabupaten Solok Selatan	80.040	66.980	147.020	13.314	22.584	51.084	-	1.125	743	56.438	42.312	-	187.600	334.620
10.	Kabupaten Dharmasraya	8.660	12.532	21.192	10.172	42.881	26.341	-	1.461	4.905	81.674	107.487	-	274.921	296.113
11.	Kabupaten Solok	118.603	56.028	174.631	3.505	11.443	12.078	-	8.451	4.734	30.971	127.988	-	199.169	373.800
12.	Kabupaten Lima Puluh Kota	99.022	14.368	113.390	5.503	10.692	17.792	-	3.199	6.082	35.091	143.681	-	222.040	335.430
13.	Kabupaten Agam	22.451	25.180	47.631	1.320	11.038	7.049	148	9.880	3.967	43.312	98.816	-	175.529	223.160
14.	Kabupaten Padang Pariaman	13.334	28.992	42.326	-	-	-	70	141	4.291	1.515	84.588	17	90.623	132.949
15.	Kabupaten Tanah Datar	18.480	19.478	37.958	6.651	53	-	-	7.750	3.921	23.450	53.817	-	95.642	133.600



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16.	Kabupaten Pasaman	158.455	32.424	190.879	245	5.590	38.255	13	-	3.519	35.642	170.620	-	253.884	444.763
17.	Kabupaten Pasaman Barat	78.264	-	78.264	19.751	2.241	3.505	-	292	8.443	96.152	130.129	-	260.513	338.777
18.	Kabupaten Sijunjung	78.015	38.996	117.011	14.735	12.898	28.618	-	979	3.519	28.990	106.330	-	196.069	313.080
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.406	189.226	195.632	203.806	89.573	-	-	158	960	81.167	29.839	-	405.503	601.135
Jumlah (Ha)		719.989	796.604	1.516.593	287.563	239.123	224.726	432	36.499	70.327	576.012	1.278.088	367	2.713.137	4.229.730
Presentase (%)		17,02	18,83	35,86	6,8	5,65	5,31	0,01	0,86	1,66	13,62	30,22	0,01	64,14	100

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 1.D. Pola Ruang Wilayah Pesisir Sumatera Barat Tahun 2009 - 2029
Tahun : 2017

No.	Nama Wilayah	Kawasan Lindung/ Konservasi						Kawasan Budidaya								Jumlah (Ha)
		PPK (Suaka Pulau Kecil)	PPK (Suaka Pesisir)	PPK (Taman Pulau Kecil)	Konservasi Maritim	Hutan Sempadan Petani	Konservasi Perairan	Keramba Jaring Apung (KJA)	Perairan Untuk Pemanfaatan Umum dan Pelabuhan	Perikanan Tangkap Komersil (Pelagis)	Perikanan Tangkap Komersil (Lainnya)	Taman Wisata Perairan	Pariwisata Bahari	Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar	Kawasan Alur Pelataran dan Peruntukan Lainnya yang Belum Teralokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Kota Padang	-	-	-	-	-	757,08	-	629,93	42.808,58	-	-	155,4	-	-	44.350,99
2.	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	262,61	19.415,71	-	-	692,25	-	-	20.370,57
	Seluruh Wilayah Pesisir															
	Kabupaten/Kota (Perairan Laut)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.438.856,34	-	-	-	204.131,97	3.438.856,34
3.	Kabupaten Agam	450,82	-	-	-	-	-	-	-	29.195,46	-	-	-	-	-	29.646,28
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	171.183,31	5.893,25	-	3.827,33	-	-	-	613.427,59	-	2.908,51	220.190,51	1.348,85	-	1.018.779,34
5.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	50.931,63	-	23.865,30	688,9	-	-	75.485,82
6.	Kabupaten Pasaman Barat	-	6.840.650	-	-	714,17	-	-	5.50,032	70.094,37	-	-	204,43	-	-	78.403,65
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	16,29	-	1.551,23	2.368,06	183,37	371.909,70	-	-	2.188,75	-	-	378.217,40
Jumlah (Ha)		450,82	17.205.161	5.893,25	16,29	4.541,50	2.308,31	2.368,06	1.075,91	1.197.783,04	3.438.856,34	26.773,81	224.120,24	1.348,85	204.131,97	5.084.110,39

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 1.E. Rencana Luas dan Perubahan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029
Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Suaka Alam dan Wisata		Rencana Perubahan Luas		
			SK. Menhut 304	Rencana Tahun 2029	Ha	%1)	%2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	69.496	24.663	16.247	31.743,84	65,9	78,11
2.	Kota Padang Panjang	2.300	630	333	329,9	10.624,13	0,81
3.	Kota Bukittinggi	2.524	-	-	0	-	-
4.	Kota Solok	5.764	1.038	2.038	1.290,33	173	3
5.	Kota Pariaman	7.336	-	-	0	-	-
6.	Kota Payakumbuh	8.043	-	-	0	-	-
7.	Kota Sawahlunto	27.345	-	-	1	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	296.113	9.400	12.532	-41.383,41	77	102
9.	Kabupaten Agam	223.230	22.511	25.180	2.632,10	11,67	6,48
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	579.496	274.348	295.629	45.483,61	18,18	111,92
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	335.430	18.031	14.368	-2.523,11	14,94	6,21
12.	Kabupaten Pasaman	444.763	30.414,00	32.424	4.724,43	17,06	11,63
13.	Kabupaten Solok	373.800	56.573	56.028	11.826,70	26,76	29,10
14.	Kabupaten Pasaman Barat	338.777	137	-	-54,51	100,00	0,13
15.	Kabupaten Sijunjung	313.080	38.542	38.996	4.627,14	13,46	11,39
16.	Kabupaten Padang Pariaman	132.879	14.097	28.992	15.182,70	109,95	37,36
17.	Kabupaten Solok Selatan	334.620	67.068	66.980	14.803,74	28,37	36,43
18.	Kabupaten Tanah Datar	133.600	22.986	19.478	1.920,28	10,94	4,73
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	601.135	177.555	189.226	28.975,67	18,08	71,30

Keterangan : 1) Presentase perubahan terhadap luas hutan lindung per Kabupaten/Kota.
2) Presentase perubahan terhadap jumlah.
3) Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada perubahan dari Menteri Kehutanan.

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	16.081,21	4.877,71	13.949,72	1.065,07	33.394,30	128,00
2.	Kota Padang Panjang	334,00	685,55	138,20	419,00	705,00	18,25
3.	Kota Bukittinggi	1.297,59	480,43	16,14	708,30	-	21,53
4.	Kota Solok	1.594,79	876,00	859,00	1.092,00	1.128,21	214,00
5.	Kota Pariaman	793,89	2.289,09	3.191,02	978,00	-	84,00
6.	Kota Payakumbuh	634,88	1.953,21	3.788,93	1.396,00	199,43	70,55
7.	Kota Sawahlunto	4.696,42	488,82	15.209,40	4.602	2.319	29
8.	Kabupaten Dharmasraya	49.091,48	2.929,59	40.873,34	143.541,07	57.987,52	1.690,00
9.	Kabupaten Agam	18.110,50	32.324,29	87.701,50	19.633,35	55.465,68	9.994,67
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	69.506,80	38.126,10	94.854,82	61.286,37	299.126,91	16.594,00
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	32.406,12	31.116,00	150.368,05	3.504,02	114.935,81	3.100,00
12.	Kabupaten Pasaman	97.919,47	22.486,00	103.397,00	1.155,99	219.762,24	42,30
13.	Kabupaten Pasaman Barat	73.331,00	19.162,12	17.901,01	146.200,00	74.426,87	7.756,00
14.	Kabupaten Solok	39.735,00	25.524,08	123.804,73	358,82	180.676,37	3.701,00
15.	Kabupaten Sijunjung	86.987,00	8.203,47	76.706,10	15.930,98	124.884,44	368,00
16.	Kabupaten Padang Pariaman	4.253,65	21.987,74	78.276,26	2.551,14	25.810,21	0,00
17.	Kabupaten Solok Selatan	24.708,15	13.911,21	25.286,47	96.800,00	168.407,16	5.507,00
18.	Kabupaten Tanah Datar	7.527,30	18.889,39	32.424,12	8.833,00	41.214,19	24.712,00
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.096,00	740,00	55.168,00	78.836,74	463.094,26	200,00

Keterangan : (-) Tidak memiliki hutan

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 2.A. Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029
Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Suaka Alam dan Wisata		Rencana Perubahan Luas		
			SK. Menhut 304	Rencana Tahun 2029	Ha	%1)	%2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	69.496	10.915,27	13.433	2.517,73	114,29	-0,39
2.	Kota Padang Panjang	2.300	531,1	-	329,9	10.624,13	0,81
3.	Kota Bukittinggi	2.524	0	0	0	-8,81	0
4.	Kota Solok	5.764	1.819,39	1.141	-678,39	8,81	0,39
5.	Kota Pariaman	7.336	0	-	0	20,08	0
6.	Kota Payakumbuh	8.043	313,72	295	-18,72	115,8	0,03
7.	Kota Sawahlunto	27.345	127,81	294	166,19	51,56	-0,06
8.	Kabupaten Dharmasraya	296.113	72.099,38	8.660	-63.439,38	102,67	30,4
9.	Kabupaten Agam	223.230	19.973,77	22.451	2.477,23	1,85	0,15
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	579.496	21378,01.	23.096	1.717,99	6,23	0,55
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	335.430	272.578,86	99.022	-173.556,86	10,77	12,06
12.	Kabupaten Pasaman	444.763	188.656,48	158.455	-30.201,48	30,26	23,45
13.	Kabupaten Solok	373.800	56.573	56.028	11.826,70	26,76	29,10
14.	Kabupaten Pasaman Barat	338.777	120.673,06	78.264	-42.409,06	50,3	24,93
15.	Kabupaten Sijunjung	313.080	68.589,56	78.015	9.425,44	0,9	0,25
16.	Kabupaten Padang Pariaman	132.879	13.769,98	13.334	-435,98	17,42	0,99
17.	Kabupaten Solok Selatan	334.620	73.821,73	80.040	6.218,27	6.218,27	1,83
18.	Kabupaten Tanah Datar	133.600	17.095,85	18.480	1.384,15	6,16	0,43
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	601.135	6.205,10	6.406	200,9	12,83	0,33

Keterangan : 1) Presentase perubahan terhadap luas hutan lindung per Kabupaten/Kota.
2) Presentase perubahan terhadap jumlah.
3) Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada perubahan dari Menteri Kehutanan.

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 2.B. Indeks Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kab/Kota (Km ²)	Luas Hutan (Km ²)	Tutupan Hutan	Indeks Tutupan Hutan
1	Kota Padang	694,96	333,94	0,48	66,62
2	Kota Padang Panjang	23,00	7,05	0,31	50,60
3	Kota Bukittinggi	25,24	-	-	22,38
4	Kota Solok	57,64	11,28	0,20	40,40
5	Kota Pariaman	73,36	-	-	22,38
6	Kota Payakumbuh	80,43	1,99	0,02	24,66
7	Kota Sawahlunto	273,45	23,19	0,08	30,19
8	Kabupaten Dharmasraya	2.961,13	579,88	0,20	40,41
9	Kabupaten Agam	2.232,30	554,66	0,25	45,25
10	Kabupaten Pesisir Selatan	5.794,95	2.991,27	0,52	69,91
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.354,30	1.149,36	0,34	53,93
12	Kabupaten Pasaman	3.947,63	2.197,62	0,56	73,64
14	Kabupaten Pasaman Barat	3.887,77	744,27	0,19	40,00
13	Kabupaten Solok	3.738,00	1.806,76	0,48	66,88
15	Kabupaten Sijunjung	3.130,80	1.248,84	0,40	59,11
16	Kabupaten Padang Pariaman	1.328,79	258,10	0,19	40,26
17	Kabupaten Solok Selatan	3.346,20	1.684,07	0,50	68,72
18	Kabupaten Tanah Datar	1.336,00	412,14	0,31	50,78
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.011,35	4.630,94	0,77	93,31

Keterangan : (-) Tidak memiliki hutan

Sumber : Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 2.C. Perbandingan Indeks Tutupan Hutan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Tahun	Indeks Tutupan Hutan
1.	2014	65,13
2.	2015	64,78
3.	2016	64,23
4.	2017	62,92

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	360.509
2.	Hutan Lindung	783.136
3.	Taman Nasional	523.317
4.	Taman Wisata Alam	610
5.	Taman Buru	0
6.	Cagar Alam	245.608
7.	Suaka Margasatwa	
8.	Taman Hutan Raya	240
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	1.913.420
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	36.886
3.	Hutan Kota	215,70
4.	Taman Hutan Raya	240
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	38

Keterangan : Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 yang telah mengakomodasi perubahan kawasan hutan (Tata Batas Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan).

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 3.A. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat****Tahun : 2017**

No.	Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taman Siberut	190.500	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.	Taman Kerinci Seblat	353.780	Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan
3.	Taman Hutan Raya Dr. M.Hatta	240	Kota Padang
4.	Cagar Alam Rimbo Panti	2.250	Kabupaten Pasaman
5.	Cagar Alam Lembah Anai	221	Kabupaten Tanah Datar
6.	Cagar Alam Malampah	14.555	Kabupaten Pasaman
7.	Cagar Alam Alahan Panjang	17.664	Kabupaten Pasaman
8.	Cagar Alam Maninjau Utara Selatan	17.304	Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman
9.	Cagar Alam Air Putih	23.467	Kabupaten Lima Puluh Kota
10.	Cagar Alam Gunung Sago	5.486	Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota
11.	Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat	9.658	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar
12.	Cagar Alam Gunung Merapi	9.670	Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar
13.	Cagar Alam Barisan I	74.821	Kota Padang' Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
14.	Cagar Alam Batang Pagean I	12.200	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
15.	Cagar Alam Batang Pagean II	33.580	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
16.	Cagar Alam Air Tarusan	25.177	Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan
17.	Cagar Alam Arau Hilir	5.377	Kota Padang
18.	Cagar Alam Beringin Sakti	0,03	Kabupaten Tanah Datar
19.	Cagar Alam Lembah Harau	270,5	Kabupaten. Lima Puluh Kota
20.	Cagar Alam Batang Palupuh	3,4	Kabupaten Agam
21.	Taman Wisata Alam Mega Mendung	12,5	Kabupaten Tanah Datar
22.	Taman Wisata Alam Lembah Harau	27,5	Kabupaten Lima Puluh Kota
23.	Taman Wisata Alam Rimbo Panti	570	Kabupaten Pasaman



(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Taman Wisata Laut Pulau Pieh	39.900	Kabupaten Padang Pariaman
25.	Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah	500	Kabupaten Tanah Datar
26.	Taman Wisata Alam Laut Teluk Saibi Sarabua	21.200	Kabupaten Kepulauan Mentawai
27.	Kawasan Suaka Marga Satwa Pulau Pagai Selatan	24.952	Kabupaten Kepulauan Mentawai
28.	Taman Buru Sidoali	2.354	Kabupaten Tanah Datar
29.	Taman Buru Pulau Sipora	84.500	Kabupaten Kepulauan Mentawai
30.	Suaka Alam Sulasih Talang	6.150	Kabupaten Solok
31.	Suaka Marga Satwa Pulau Panjang	1.980	Kabupaten Padang Pariaman
32.	Suaka Margasatwa Pulau Penyu	450	Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan : -

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 3.B. Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi Kawasan (HA)				
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	24.247	12.174	246	0	0
2.	Kota Padang Panjang	4	608	0	0	0
3.	Kota Bukittinggi	0	0	0	0	0
4.	Kota Solok	771	346	0	0	0
5.	Kota Pariaman	0	0	0	0	0
6.	Kota Payakumbuh	0	351	0	0	0
7.	Kota Sawahlunto	0	122	139	4.427	4.405
8.	Kabupaten Dharmasraya	5.548	12.023	28.317	26.858	16.568
9.	Kabupaten Agam	26.563	20.711	7.704	2.544	8.820
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	285.764	23.571	44.891	4.514	32.327
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	20.390	121.118	19.454	3.939	11.492
12.	Kabupaten Pasaman	32.793	199.031	26.808	0	5.368
13.	Kabupaten Pasaman Barat	60	72.416	4.957	18.418	7.285
14.	Kabupaten Solok	48.070	117.673	11.222	4.674	10.235
15.	Kabupaten Sijunjung	40.123	78.488	29.749	19.865	10.014
16.	Kabupaten Padang Pariaman	16.148	12.901	0	0	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	65.779	84.346	53.739	13.181	13.920
18.	Kabupaten Tanah Datar	20.163	19.876	0	9.411	101
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	183.351	7.383	0	252.678	53.039

Keterangan : 0 = Tidak ada luasan area yang dimaksud

KSA-KPA = Kawasan Suaka Alam - Kawasan Pelestarian Alam

HL = Hutan Lindung

HPT = Hutan Produksi Terbatas

HPK = Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.35/

Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 Batas provinsi sesuai dengan

SK-35/Menhut-II/2013, Perhitungan dengan menggunakan GIS

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 3.C. Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Nama Taman Kehati	Luas (Ha)	Surat Keputusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Padang	Taman Kehati Universitas Andalas	15	
2.	Kota Solok	Taman Kehati Puti Saloati Kota Solok	3,5	No. 188.45-670 Tahun 2015 tanggal 07 Desember 2015
3.	Kabupaten Padang Pariaman	Taman Kehati Kab. Padang Pariaman	10	No. 252/KEP/BPP/2014 tanggal November 2014

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 3.D. Nama dan Luas Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Nama Taman Kehati	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Pariaman	Taman Kehati Sikapak	5
2.	Kota Sawahlunto	Taman Kehati Kandih	5
3.	Kabupaten Agam	Taman Kehati Koto Malintang	10
4.	Kabupaten Pasaman	Taman Kehati Lubuk Sikaping	10
5.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Taman Kehati Padang Mangateh	10
6.	Kota Padang	Taman Kehati Universitas Andalas	15
7.	Kota Solok	Taman Kehati Puti Saloati	3,5
8.	Kabupaten Padang Pariaman	Taman Kehati Kab. Padang Pariaman	10

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 3.E. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKLD) Kabupatem/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Jenis Yang Dilindungi	Luas Kawasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Padang	Taman Pulau Kecil	Penyu, Kima, Kuda Laut	2.274,96
2.	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu	11.525,89
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	Suaka Alam Perairan	Penyu/Terumbu Karang	174.899,30
4.	Kabupaten Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan	Penyu dan Ikan Hias	684,00
5.	Kabupaten Pasaman Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu dan Ikan tertentu	6.795,80
6.	Kabupaten Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Penyu	12.000,00
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Selat Bunga Laut	Ekosistem Terumbu Karang	129.566,00
	Jumlah			337.745,95

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 4. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kota Padang	-	1,06	-	29,54	-	-	-	-	1. Pola Penggunaan Lahan 2. Pola Tanam 3. Jenis Tanah
2.	Kota Padang Panjang	-	143,75	-	161,00	-	-	-	-	
3.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Kota Solok	-	76,92	62,68	394,30	-	30,21	17,38	376,15	
5.	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Kota Payakumbuh	-	330,77	-	247,33	-	10,77	-	1,21	
7.	Kota Sawahlunto	4.495,75	205,65	-	8.216,32	2.032,99	-	-	1.028,76	
8.	Kabupaten Dharmasraya	15.860,38	691,49	70,92	21.133,07	6.192,48	1.737,88	370,54	7.993,13	
9.	Kabupaten Agam	25,72	1.826,88	11,78	3.871,84	0,02	129,62	58,36	778,87	
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.605,59	1.180,63	55,82	4.371,79	13,49	-	43,18	-	
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	12.313,28	34.458,65	1.051,72	49.976,06	3.107,09	18.735,85	615,27	17.213,04	
12.	Kabupaten Pasaman	8.876,06	13.868,50	402,59	25.978,65	4.141,28	13.264,17	374,24	10.903,12	
13.	Kabupaten Pasaman Barat	933,30	1.178,85	-	3.244,50	218,61	215,28	-	742,55	
14.	Kabupaten Solok	18.393,84	12.697,91	4.130,73	47.057,63	3.708,02	7.612,09	995,75	11.645,72	
15.	Kabupaten Sijunjung	36.199,60	15.643,24	4.478,03	41.479,00	6.227,53	8.692,38	2.578,27	13.049,33	
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	1,77	-	114,80	-	-	9,99	-	
17.	Kabupaten Solok Selatan	7.052,71	2.930,58	7.512,47	13.775,59	1.110,66	1.044,14	1.932,77	2.491,51	
18.	Kabupaten Tanah Datar	5.836,52	4.559,80	1.256,52	17.246,78	2.400,00	1.202,30	419,49	2.486,29	
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	416,73	2,59	3,67	209,46	93,78	-	-	-	

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 4.A. Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)		
		2015	2016	2017
1.	Kota Padang	6.686,40	30,60582	30,61
2.	Kota Padang Panjang	26,00	304,77297	304,75
3.	Kota Bukittinggi	-	-	-
4.	Kota Solok	-	503,15753	533,90
5.	Kota Pariaman	-	-	-
6.	Kota Payakumbuh	200,00	578,13348	578,09
7.	Kota Sawahlunto	2.932,65	12.822,99720	12.917,73
8.	Kabupaten Dharmasraya	2.936,00	40.576,82032	37.755,86
9.	Kabupaten Agam	29.600,00	6.148,46166	5.736,22
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	318.057,00	7.070,07640	7.213,84
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	130.690,10	96.616,49026	97.799,71
12.	Kabupaten Pasaman	201.723,00	49.180,23731	49.125,80
13.	Kabupaten Solok	158.301,00	83.150,54138	82.280,11
14.	Kabupaten Pasaman Barat	2.461,55	5.360,46000	5.356,64
15.	Kabupaten Sijunjung	73.925,00	97.769,52008	97.799,87
16.	Kabupaten Padang Pariaman	8.637,20	116,58913	116,57
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	31.711,99451	31.271,35
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	29.596,29344	28.899,62
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	625,64903	632,45

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 4.B. Luas Lahan Potensial Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Potensial Kritis (Ha)				Agak Kritis (Ha)			
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kota Padang	209,82	7.542,34	24.040,18	17.437,25	35,54	4.244,63	998,33	5.226,06
2.	Kota Padang Panjang	-	454,37	4,14	1.068,05	-	-	-	301,07
3.	Kota Bukittinggi	-	-	-	2.313,93	-	-	-	70,91
4.	Kota Solok	-	153,29	22,97	2.183,68	-	91,84	841,66	2.060,94
5.	Kota Pariaman	-	-	-	5.679,14	-	-	-	-
6.	Kota Payakumbuh	-	5,75	-	6.284,08	-	-	-	646,33
7.	Kota Sawahlunto	7,57	1,24	-	580,98	2.238,67	-	-	4.925,29
8.	Kabupaten Dharmasraya	9.473,26	232,67	1,21	26.432,12	39.905,10	8.538,18	5.495,39	148.694,79
9.	Kabupaten Agam	12.175,25	13.707,61	21.735,95	100.891,35	3.155,69	3.909,42	5.020,18	23.761,89
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	50.963,03	15.724,98	272.005,37	157.211,91	14.135,08	4.415,20	13.683,05	33.299,41
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	13.756,71	59.643,09	17.521,15	44.047,93	5.496,63	3.426,55	496,45	39.648,95
12.	Kabupaten Pasaman	15.201,79	159.545,81	28.651,22	48.288,17	3.526,93	10.622,22	3.111,31	40.077,32
13.	Kabupaten Pasaman Barat	12.920,87	48.998,48	59,46	157.975,43	4.451,32	16.696,43	-	21.037,38
14.	Kabupaten Solok	849,82	32.864,25	14.877,20	33.373,31	3.197,66	91.759,90	27.294,44	37.706,22
15.	Kabupaten Sijunjung	3.552,80	46.374,65	8.253,01	32.540,54	11.727,56	7.014,86	24.761,18	43.315,21
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	10.242,17	12.988,61	89.882,06	-	2.495,82	2.586,19	8.350,37
17.	Kabupaten Solok Selatan	4.278,66	5.564,09	3.880,68	21.179,34	65.922,00	45.382,79	52.118,68	89.165,29
18.	Kabupaten Tanah Datar	172,48	12.441,56	17.214,30	22.136,91	1.008,05	1.211,95	1.418,06	34.238,39
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	196.052,05	4.688,52	153.056,62	49.589,93	16.396,95	51,53	17.379,35	10.610,10

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 5. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Kabupaten Pesisir Selatan				
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	0,3	Tidak
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	1,2	Tidak
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	5,7	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	9,3	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	10,7	Tidak
II. Kota Padang Panjang				
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	± 1,5	Melebihi
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	± 4,2	Melebihi
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	± 9,1	Melebihi
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	± 11,5	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	± 10,0	Tidak
III. Kota Pariaman				
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	0,4	Tidak
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	2,96	Tidak
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	5,81	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	10,53	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	10,89	Tidak
IV. Kota Bukittinggi				
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	-	-
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	2,08	Tidak
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	-	-
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	-	-
5.	> 150 cm	> 12	-	-
V. Kota Padang				
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	-	-
2.	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	-	-
3.	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	1,81	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	-	-
5.	> 150 cm	> 12	-	-
I. Kabupaten Pesisir Selatan				
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	0,3	Tidak
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	1,2	Tidak
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	5,7	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	9,3	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	10,7	Tidak

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017



Tabel - 5.A. Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2014 - 2017 di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2017

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)			
			2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang					
	< 20 cm	0,2 - 1,3	-	0		
	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	-	1,82		
	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	-	0	1,815	
	100 - 150 cm	9,0 - 12	-	0		
	> 150 cm	> 12	-	0		
2.	Kabupaten Dharmasraya					
	< 20 cm	0,2 - 1,3	0	7,46	1,98	
	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	1,52	0,38	4,89	
	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	4,98	19,44	4,98	
	100 - 150 cm	9,0 - 12	9,65	11,53	9,84	
	> 150 cm	> 12	10,09	9,71	12,83	

Keterangan : Ambang Kritis Erosi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Sumber : Dokumen IKPLHD Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasraya, 2017

Tabel - 6. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Kota Solok				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 54 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	26 cm	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	N/A	N/A
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	58,60	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,31	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	N/A	N/A
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	N/A	N/A
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,41 (unit)	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	50 (dS/m)	
9.	Redoks	< 200 mV	N/A	N/A
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	N/A	N/A
II. Kota Padang				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 80 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	<1%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	3,80%	Melebihi
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	41,60%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,91 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	65,84%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,37 cm/jam	Melebihi
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,87	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1,1 mS/cm	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	32,5 mV	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,6 x 10 ⁷ cfu/g	Tidak
III. Kota Bukittinggi				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	58,12 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	1,12%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	47,73%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	16,15%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,9 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	65,81%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	2,97 cm/jam	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,51	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,84	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	16,87 mV	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	3,75x10 ⁶ cfu/g	Tidak
IV. Kota Pariaman				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	70 cm	Tidak



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	0,093%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	46,60%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	22,30%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.15 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	56,52%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0 cm/jam	0.94 cm/jam	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,33	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik / DHL	> 4,0 mS/cm	0.97 mS/cm	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	31.6 mV	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	177 x 10 ² cfu/g tanah	Melebihi
V. Kabupaten Agam				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	49	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	N/A	N/A
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	37,5	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	0.96 g/cm ³	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	86,41%	Melebihi
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	315cm/jam	Melebihi
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	5,8	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	0,09	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	268 mv	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	TAD	TAD
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-
VI. Kabupaten Pesisir Selatan				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	51cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	-
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	13,19%	Melebihi
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	8,99%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,57 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	78,19%	Melebihi
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	19,19 cm/jam	Melebihi
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,93	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1,15 mS/cm	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	33,45 mV	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1256 x 10 ⁷ cfu/ g tanah	Tidak

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017



Tabel - 6.A. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Kabupaten Dharmasraya				
ASAM JUJUAN				
Lahan Kering 1 (S = 01°22'48,7" ; E = 101°41'24,2")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	1,5 cm	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	4,87%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	43	Melebihi
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	28,00%	-
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,08	Tidak
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	48,00%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	6,2	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	8,14	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	5,9	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	224,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,8 x 10 ²	Tidak
Lahan Kering 2 (S = 01°22'48,1" ; E = 101°41'14,3")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	1,15%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	39	Melebihi
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	24,00%	-
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,12	Tidak
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	46,00%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	5,8	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	8,41	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	5,4	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	231,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,6 x 10 ²	Tidak
Lahan Kering 3 (S = 01°22'57,1" ; E = 101°41'08,6")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	4,27%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid		-
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	23,00%	-
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,23	Tidak



5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	38,00%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	4,1	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	7,95	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	5,3	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	238,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	2,1 x 10 ²	Tidak
BUKIT MINDAWA				
Lahan Kering 1 (S = 01°03'34,7" ; E = 101°33'04,3")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm		
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	3,92%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	34%	Melebihi
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	17%	-
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,29	Tidak
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	42%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	3,2	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	8,33	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	6,1	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	268,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,3 x 10 ²	Tidak
Lahan Kering 2 (S = 01°03'32,4" ; E = 101°33'03,2")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	16	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	2,1%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	32%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	21%	Tidak
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,24	Tidak
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	38%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	3,5	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	8,27	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	5,4	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	263,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,5 x 10 ²	Tidak
Lahan Kering 3 (S = 01°03'32,1" ; E = 101°33'03,0")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	2,33%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	36	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	19%	Tidak



4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,33	Tidak
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	39%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	3,8	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	7,94	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	5,6	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	241,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,7 x 10 ²	Tidak
PT. BRM				
Lahan Kering 1 (S = 00°58'39,5" ; E = 101°23'08,4")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	-	-
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	18%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	17%	-
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,52	Tidak
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	33%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	3,1	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	6,16	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	4,6	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	237,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,2 x 10 ²	Tidak
Lahan Kering 2 (S = 00°58'57,1" ; E = 101°23'09,1")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	-	-
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	27%	-
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	19%	-
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,37	Tidak
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	39%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	3,8	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	7,16	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	4,4	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	229,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,4 x 10 ²	Tidak
Lahan Kering 3 (S = 00°58'38,9" ; E = 101°23'07,4")				
1.	Ketebalan Solum	> 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	< 40 %	-	-
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	24	-



3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	27%	-
4.	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,43	Melebihi
5.	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	36%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	3,5	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	7,41	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	4,8	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	216,0	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	1,3 x 10 ²	Tidak
II. Kabupaten Solok Selatan				
Sangir Jujuan				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 150 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 5 %	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	26%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	76%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,05 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0	7.4	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5.4	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1,04 mS/cm	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	312 mV	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.3 x 10 ³	Tidak
Sangir Batang Hari				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 150 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 5 %	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	46%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	54%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.14	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0	5.8	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5.6	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1,05 mS/cm	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	302	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.8 x 10 ⁴	Tidak
Sangir				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 150 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 5 %	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	17%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	83%	Melebihi



4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.06	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0	9.5	Melebihi
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6.2	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1.04	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	315	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.3 x 10 ³	Tidak
Koto Parik Gadeng Diateh				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 150 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 5 %	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	33	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	67	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.14	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0	7.4	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5.5	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1.13	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	332	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	2.7 x 10 ³	Tidak
Pauh Duo				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 150 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 5 %	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	25	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	75	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0.76	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0	11.2	Melebihi
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6.2	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.96	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	320	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	2.2 x 10 ³	Tidak
Sungai Pagu				
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 150 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 5 %	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	37	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	63	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.17	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-



6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	5.8	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6.8	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1.14	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	195	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	2.5 x 10 ³	Tidak

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017

Tabel - 6.B. Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Tahun : 2017

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan			
			2013	2014	2015	2016
Kota Padang						
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	-	111,3	0	> 80
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	<5	0	<1
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	-	59,3	20,62	3,80
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	1,23	24,82	41,60
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	-	53,71	1,56	0,91
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	3,97	41,32	65,84
6	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0 cm/jam	-	4,99	0,4	0,37
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	-	4,99	6,54	5,87
8	Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	-	5,48	0,93	1,1
9	Redoks	< 200 mV	-	81	31,1	32,5
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	32.94 x 10 ⁷	4,5	1,6 x 10 ⁷
Kabupaten Agam						
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	48	15	57	49
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	0	-	N/A
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	10,4	47	29,85	37,5
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	1,1	-	0,96
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,1	28	5	86,41
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	21,4	0,9	37,20	315
6	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0 cm/jam	34	6,17	1,23	5,8
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,05	0,77	5,9	0,09
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,01	132	0,1065	268
9	Redoks	< 200 mV	205	-	91	TAD
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016**

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Kabupaten Agam				
1.	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10 % / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	1.8 cm/tahun	Tidak
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	N/A	
3.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	12	Tidak
II. Kabupaten Pesisir Selatan				
1.	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10 % / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	38 cm	Tidak
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	20 cm	Tidak
3.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	23 cm	Tidak

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan,2016

**Tabel - 7.A. Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat****Tahun : 2017**

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan		
			2014	2015	2016
	Kabupaten Agam				
1.	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	8 cm/tahun	4,2 cm/tahun	1.8 cm/tahun
2.	Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	0	-	N/A
3.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	41,67	20	12
4.	Redoks untuk tanah berpirit	> - 100mV	2,99	45	-
5.	Redoks untuk gambut	> 200 mV	29,167	1	-
6.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0	4,42	5,6	-
7.	Daya Hantar Listrik	> 4,0 mS/cm	0,062	0,,245	-
8.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Agam, 2016

**Tabel - 8. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatan (Pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Padang	1.050,50	52,00	25
2.	Kota Pariaman	22,00	184,00	1.035
3.	Kabupaten Agam	39,50	30,00	600
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.911,26	31,34	1.110
5.	Kabupaten Pasaman Barat	6.046,50	68,12	2.010-
6.	Kabupaten Padang Pariaman	138,50	-	-
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	24.619,43	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017

Tabel - 8.A. Penanaman Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 Tahun : 2016

No.	Jenis Mangrove	Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Rhizophora sp</i>	Kota Pariaman	2011	8.000
2.	<i>Rhizophora sp</i>	Kota Pariaman	2013	3.000
3.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Pesisir Selatan	2013	10.000
4.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Pesisir Selatan	2014	13.000
5.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Pasaman Barat	2015	15.000
6.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Padang Pariaman	2015	7.000

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 9. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	21.978	38,60
2.	Kota Pariaman	-	-
3.	Kabupaten Agam	-	-
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	17	23,00
5.	Kabupaten Pasaman Barat	75	20,00
6.	Kabupaten Padang Pariaman	50	-
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	20.000	18,21

Keterangan : Kota Pariaman dan Kabupaten Agam tidak memiliki Padang Lamun
 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017

Tabel - 9.A. Perbandingan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Persentase Area Kerusakan (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Kota Padang	19	26,77	38,60	54,81
2	Kota Pariaman	NA	NA	NA	NA
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	33,22	-	18,21	18,21
4	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-
5	Kabupaten Pesisir Selatan	43	23	23,00	24,00
6	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	20,00	14,28
7	Kabupaten Agam	NA	NA	NA	NA

Keterangan : Kota Pariaman dan Kabupaten Agam tidak memiliki Padang Lamun
 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017



Tabel - 10. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	1.124,73	0	0	56,7	43,3
2.	Kota Pariaman	14,52	19	47	70	164
3.	Kabupaten Agam	26,07	0	65,7	34,3	0
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.032,14	10,67	15,33	20	54
5.	Kabupaten Pasaman Barat	1.360,00	7	29	51	12
6.	Kabupaten Padang Pariaman	343,49	75	25	0	0
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	17.589,61	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017

Tabel - 10.A. Transplantasi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017
Tahun : 2017

No.	Lokasi Penanaman	Kabupaten/Kota	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pulau Setan	Kabupaten Pesisir Selatan	2013
2.	Pulau Pagang	Kabupaten Pesisir Selatan	2014
3.	Pulau Angso	Kota Pariaman	2015
4.	Pulau Pasumpahan	Kota Padang	2015
5.	Pulau Kerabak Ketek	Kabupaten Pesisir Selatan	2017
6.	Pulau Pigago	Kabupaten Pasaman Barat	2017

Keterangan : -

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)		Sumber Perubahan
		Lama	Baru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Permukiman	484.978,09	572.202,55	Lahan Pertanian
2.	Industri	492,50	15.174,5	Lahan Pertanian
3.	Perkebunan	426.935,93	1.032.352	Semak Belukar
4.	Pertambangan	298,89	46.539,17	
5.	Sawah	423.035,86	239.851	
6.	Pertanian lahan kering	410.514,20	506.568,94	
7.	Perikanan	6.542,24	3.451,20	

Keterangan : -

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 11.A. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	87.224,55
2.	Industri	15.174,50
3.	Tanah Kering	101.901,00
4.	Perkebunan	256.359,00
5.	Semak Belukar	37.050,00
6.	Tanah Kosong	18.995,20
7.	Perairan/Kolam	3.451,20
8.	Lainnya	141.637,00

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 12. Jenis Pemanfaatan Lahan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tambang	188	Besar	45.487,20	Luas IUP
			Menengah	5.101,42	IUP Bukan Logam & Batubara (Luasan \leq 10 Ha)
			Kecil	305,63	IUP Bukan Logam & Batubara (Luasan $>$ 10 Ha)
			Rakyat	66,76	IPR
2.	Perkebunan	-	Besar	190.426	
			Menengah	9.142	
			Kecil	9.915	
			Rakyat	708.491	
3.	Pertanian	-	Besar	-	
			Menengah	-	
			Kecil	237,73	
			Rakyat	617.608	
4.	Pemanfaatan Hutan	-	Besar	234.795	IUPHHK-HA 183,330 Ha
			Menengah		IUPHHK-HTI 51,465 Ha
			Kecil	-	
			Rakyat	-	

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 12.A Jenis Pemanfaatan Lahan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Skala Usaha	Luas									
			Kota Bukittinggi	Kota Padang Panjang	Kota Pariaman	Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Solok Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tambang	Besar	-	-	-	-	5.033,14	-	-	79,00	4.390,00	-
		Menengah	-	-	-	-	1.412,00	3.436,33	-	-	253,09	-
		Kecil	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
		Rakyat	-	-	-	-	-	-	66,76	-	-	-
2.	Perkebunan	Besar	-	-	-	64.697,00	-	55.988,74	80.487,00	-	4.445,74	-
		Menengah	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-
		Kecil	-	-	293,40	-	-	-	-	-	-	-
		Rakyat	-	264,00	684,60	130.295,00	-	77.874,97	116.099,00	-	46,75	63,50
3.	Pertanian	Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kecil	-	-	237,73	-	-	-	-	-	-	-
		Rakyat	994,30	951,00	950,94	99.038,00	-	-	505.896,00	-	10.729,00	-
4.	Pemanfaatan Hutan	Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rakyat	-	213,00	-	-	-	-	-	-	175.943,00	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : DIKPLHD Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 13. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batubara	PT. Indo Mining Resources	958,2	-	Belum Produksi
		CV. X Dareh	198,00	-	Belum Produksi
		KUD Sinamar Sakato	197,33	26,7	270.145,98
		PT. Permata Bumi Makmur	67,58	-	Belum Produksi
		PT. Putramas Bumi Agung	155,00	-	Berhenti Produksi
		PT. Centra Bara Indonesia	1.000,00	-	Belum Produksi
		PT. Berkat Satria Abadi	199,00	-	Belum Produksi
		PT. Sinamarinda Lintas Nusantara	481,22	61,515	Berhenti Produksi
		PT. Arda Dynasty	185,00	-	Belum Produksi
		PT. Astrindo Gita Mandiri	128,60	-	Belum Produksi
		PT. Dasacita Pusaka Prima	184,00	-	Belum Produksi
		PT. Mutiara Bumi Manggilang	1.366,00	-	Belum Produksi
		PT. Bangun Korin Utama	126,00	-	Belum Produksi
		PT. Atoz Nusantara Mining	192,08	-	11.075
		PT. Kelola Sumberdaya Nagari	198,80	-	Belum Produksi
		PT. Sariagrindo Andalas	478,30	-	Belum Produksi
		PT. Tunggal Putra Nusantara	100,00	-	Belum Produksi
		PT. Prima Perkasa Abadi	198,88	-	Belum Produksi
		PT. Tripabara	199,00	-	Belum Produksi
		PT. Lumpo	922,7	-	Belum Produksi
		PT. Air Mata Emas	118,20	-	4.656,35
		CV. Bara Mitra Kencana	49,61	-	37.536,09
		PT. Bukit Asam	2.935,00	-	Berhenti Produksi
		PT. Guguak Tinggi Coal	40,49	-	2.033
		CV. Miyor Pratama Coal	43,88	-	46.137,99
		PT. Putri Surya Pratama Natural	38,83	-	29.067,00
		CV. Tahiti Coal	53,80	-	63.784
		PT. Cahaya Bumi Perdana	103,10	-	12.954,00
		PT. Dasrat Sarana Arang Sejati	125,40	-	8.095,82
		PT. Nusa Alam Lestari	100,00	-	39.669,15
		CV. Daksa Elang Abadi	108,50	-	Berhenti Produksi
		PT. Ferly Tirta Jaya	100,00	-	902
		PT. Trisigma Coal	198,00	-	Belum Produksi
		PT. Karbindo Abesyapradhi	344,46	-	Tidak ada data
		PT. Karya Hasil Utama	300,00	-	502
		PT. Danako Pratama	144,00	-	Belum Produksi
		CV. Dian Purnama	33,00	-	Belum Produksi
		PT. Gasindo Karya Mandiri	199,00	-	Belum Produksi
		KUD Kunangan	106,38	-	Belum Produksi
		KSU Agung Saiyo	185,00	-	Belum Produksi
		PT. Kurnia Cahaya Prima	198,00	-	Belum Produksi
		PT. Multi Mineral Prima	196,00	-	Belum Produksi
		CV. Ranah Tigo Luhak	28,50	-	1.000
		PT. Surya Prima Mining	199,00	-	Belum Produksi



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PT. Transindo Sumber Mineral	199,00	-	Belum Produksi
		PT. Marsawa Indah Mandiri	46,00	-	Belum Produksi
		PT. Gamindra Mitra Kesuma	177,80	-	Belum Produksi
		PT. Thomas Jaya Trecimplant	2.061,00	-	Belum Produksi
		PT. Allied Indo Coal Jaya	427,20	-	6.977,16
2	Pasir Besi	PT. Andalas Minang Malindo	196,00	-	Berhenti Produksi
3	Bijih Besi/Besi	PT. Tambang Sungai Suir	180,00	-	Berhenti Produksi
		PT. Pasaman Alam Lestari	731,97	-	Belum Produksi
		PT. Gamindra Mitra Kesuma	177,80	-	Belum Produksi
		PT. Trinusa Aneka Tambang	200	-	Belum Produksi
		PT. Gamindra Mitra Kesuma	177,80	-	Belum Produksi
		PT. Dian Indah Perdana	123,60	-	Belum Produksi
		PT. Arosuka Mandiri	198,00	-	Belum Produksi
		PT. Mineral Sukses Makmur	73,70	-	Belum Produksi
		PT. Karya Usaha Aneka Tambang	31,00	-	Belum Produksi
		PT. Dharma Power Bersama	190,00	-	Belum Produksi
		PT. Bukit Cahayamas Indonesia	193,70	-	Belum Produksi
		PT. Wira Patriot Sakti	1.273,00	-	Belum Produksi
		PT. Rivatama Minerals	76,10	-	Belum Produksi
4	Emas/Emas DMP	PT. Bina Bakti Pertiwi	103,40	-	Belum Produksi
		PT. Inexo Jaya Makmur	2.408	-	Belum Produksi
		PT. Dempo Maju Cemerlang	195,00	-	Belum Produksi
		PT. Intan Borneo International	9.656,00	-	Belum Produksi

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 13.A. Rekapitulasi Produksi Bahan Galian di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Bahan Galian	Kabupaten/Kota							
		Kota Sawahlunto	Kota Pariaman	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Pasaman	Kota Padang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(14)	
1	Batubara	243.933,40	-	30.000	600.000	11.075	-	-	-
	Sirtukil	-	2100	5.000	-	-	49.470,21	-	-
	Gamping	-	-	45.000	-	-	-	-	-
	Batu Kapur	-	-	-	-	-	5.098,70	-	8.672.833,33
	Batuan dan Clay	-	-	-	-	86.400	-	-	325.000,00
	Batuan	-	-	-	-	398.612	217.241,81	26.120,35	-

Keterangan : -

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 14. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	10	10	6.750	150	150	93.750
2.	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	0	0
3.	Kota Bukittinggi	0	0	0	0	0	0
4.	Kota Solok	0	0	0	0	0	0
5.	Kota Pariaman	0	0	0	0	0	0
6.	Kota Payakumbuh	0	0	0	0	0	0
7.	Kota Sawahlunto	40	40	25.000	0	0	0
8.	Kabupaten Dharmasraya	0	0	0	0	0	0
9.	Kabupaten Agam	200	200	80.150	80	80	24.000
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	290	290	120.000	0	0	0
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	0	0	0	0	0	0
12.	Kabupaten Pasaman	0	0	0	50	50	31.250
13.	Kabupaten Pasaman Barat	100	100	400.000	0	0	0
14.	Kabupaten Solok	0	0	0	100	100	62.500
15.	Kabupaten Sijunjung	0	0	0	140	140	70.000
16.	Kabupaten Padang Pariaman	15	15	8.000	0	0	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	562	562	271.800	0	0	0
18.	Kabupaten Tanah Datar	80	80	40.000	0	0	0
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	0	0	0	0	0

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 14.A. Perbandingan Luas Area Penghijauan dan Reboisasi Tahun 2015 - 2017
Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas Areal Penghijauan (Ha)			Luas Areal Reboisasi (Ha)		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	108	0	10	94	19	150
2.	Kota Padang Panjang	4,69	0		0	0	0
3.	Kota Bukittinggi	0,5	0		-	0	0
4.	Kota Solok	-	100		-	0	0
5.	Kota Pariaman	34,21	35		230	0	0
6.	Kota Payakumbuh	838	0		150	0	0
7.	Kota Sawahlunto	250	40	40	-	0	0
8.	Kabupaten Dharmasraya	8,3	0		100	0	0
9.	Kabupaten Agam	125	135	200	200	0	80
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.743	200	290	3.400	0	0
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	326,25	200		1.750	0	0
12.	Kabupaten Pasaman	149,5	50		1.736,25	0	50
13.	Kabupaten Solok	30	0	100	5	0	0
14.	Kabupaten Pasaman Barat	100	0		300	0	100
15.	Kabupaten Sijunjung	-	0		-	0	140
16.	Kabupaten Padang Pariaman	635	100	15	-	220	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	0	562	-	0	0
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	314	80	-	0	0
19.	Kabupaten Kep. Mentawai	-	0		-	0	0
	Jumlah	4.352,45	1.174,00	1.297,00	7.965,25	239,00	520,00

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 14.B. Perbandingan Realisasi Jumlah Pohon untuk Penghijauan dan Jumlah Pohon untuk Reboisasi Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Jumlah Pohon untuk Penghijauan (Batang)			Realisasi Jumlah Pohon untuk Reboisasi (Batang)		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Padang	15.835	0	6.750	42.500	11.875	93.750
2.	Kota Padang Panjang	15.954	0		0	0	
3.	Kota Bukittinggi	180	0		-	0	
4.	Kota Solok	-	8.000		-	0	
5.	Kota Pariaman	13.359	14.000		92.480	0	
6.	Kota Payakumbuh	470.090	0		131.514	0	
7.	Kota Sawahlunto	-	16.000	25.000	-	0	
8.	Kabupaten Dhamasraya	7.450	0		121.000	0	
9.	Kabupaten Agam	50.000	14.000	80.150	90.000	0	24.000
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	686.000	80.000	120.000	520.000	0	
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	130.250	80.000		700.000	0	
12.	Kabupaten Pasaman	59.800	20.000		694.500	0	31.250
13.	Kabupaten Solok	44.000	0		165.000	0	62.500
14.	Kabupaten Pasaman Barat	10.101	0	400.000	16.000	0	
15.	Kabupaten Sijunjung	-	0		-	0	70.000
16.	Kabupaten Padang Pariaman	255	40.000	8.000	-	137.500	
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	0	271.800	-	0	
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	125.600	40.000	-	0	
19.	Kabupaten Kep. Mentawai	-	0		-	0	
	Total	1.503.274	397.600	951.700	2.572.994	149.375	281.500

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel – 15. Kondisi Sungai di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Batang Kuantan	54,08	-	-	-	-	-
2.	Batang Hari	144,4	70-150	-	5-10	130,43	34,02
3.	Batang Rokan (Sumpur)	104,2	25-40	10-35	0,5-6	210,97	7,24
4.	Batang Kampar (Mahat)	83,7	40-70	25-50	0,5-5	40,58	2,25
5.	Batang Antokan	55,46	25-50	20-45	1-3	37,66	6,67
6.	Batang Tiku	59,5	5-35	5-20	1-2	-	-
7.	Batang Gasan Gadang	42,4	25-50	20-45	1-2	-	-
8.	Batang Paingan	17,91	5-35	3-20	1-2	-	-
9.	Batang Kalampian	12,36	5-15	3-20	1-2	-	-
10.	Batang Kamumuan	16,65	5-15	3-20	1-2	-	-
11.	Batang Sungai Limau	11,94	5-15	3-20	1-2	-	-
12.	Batang Sungai Sirah	18,88	5-15	3-20	1-2	14,62	2,59
13.	Batang Naras	74,55	25-50	20-45	1-3	-	-
14.	Batang Manggung	14,99	-	-	-	15,59	1,28
15.	Batang Pariaman	47,17	5-15	5-10	1-2	280,3	7,45
16.	Batang Mangau	54,84	40-80	20-30	1-8	6,86	3,93
17.	Batang Ulakan	35,32	8-25	5-20	1-2	6,13	1,62
18.	Batang Tapakis	26,08	5-20	5-10	1-2	33,32	4,82
19.	Batang Anai	69,6	40-60	20-55	1-8	-	-
20.	Batang Kandis	10,9	-	-	-	69,32	4,01
21.	Batang Air Dingin	23,4	40-60	20-30	0,5-7	112,15	1,65
22.	Batang Kuranji	21,6	25-50	20-45	1-3	144	1,12
23.	Batang Arau	21,4	40-60	20-30	1-7	-	-
24.	Batang Bungus	30,36	25-35	20-32	1-3	-	-
25.	Batang Timbulun	8,26	-	-	-	-	-
26.	Batang Indragiri	706	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 15.A. Inventarisasi Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Lintas Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Batang Nareh	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
2.	Batang Mangau	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman
3.	Batang Malalak	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
4.	Batang Kalulutan	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
5.	Sungai Cikoto Gading	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
6.	Batang Ulakan	Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman
7.	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman /Kabupaten Tanah Datar/Kota Padang
8.	Batang Singgalangkacik	Kabupaten Padang Pariaman/Kabupaten Tanah Datar
9.	Batang Hari	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Solok Selatan
10.	Batang Pangean	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Sijunjung
11.	Batang Usau	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Sijunjung
12.	Batang Kasaitalang	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Sijunjung
13.	Batang Momong	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Solok
14.	Batang Sipotar	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Solok
15.	Batang Gumanti	Kabupaten Solok/Kabupaten Solok Selatan
16.	Batang Sumpur	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
17.	Sungai K.Tais	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
18.	Aia Telagaan	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
19.	Aia Mailir	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
20.	Aia Simpangkapaton	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
21.	Aia Serilaweh	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
22.	Aia Tolang	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
23.	Sungai Tingkarang	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
24.	Batang Mahat	Kabupaten Limapuluh Kota/Provinsi Riau
25.	Batang Kampar Kanan	Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
26.	Batang Kapur Gadang	Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Pasaman
27.	Batang Ombilin	Kabupaten Tanah Datar/Kabupaten Solok/Kota Sawahlunto
28.	Batang Silampan	Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Tanah Datar/ Kabupaten Sijunjung
29.	Batang Kumamis	Kabupaten Sijunjung/Kota Sawahlunto
30.	Batang Sukam	Kabupaten Sijunjung/Kabupaten Solok
31.	Batang Palangki	Kabupaten Sijunjung/Kabupaten Solok
32.	Batang Agam	Kabupaten Agam/Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Tanah Datar/ Kota Bukittinggi/ Kota Payakumbuh
33.	Batang Lampasi	Kota Payakumbuh/Kabupaten Lima Puluh Kota
34.	Batang Lasi	Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung
35.	Aia Lunto	Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung
36.	Aia Sigalut Gadang	Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung
37.	Batang Palangki	Kota Sawahlunto/Kabupaten Solok
38.	Batang Sukam	Kota Sawahlunto/Kabupaten Solok



(1)	(2)	(3)
39.	Batang Muaraseho	Kabupaten Tanah Datar/Kabupaten Solok/Kota Sawahlunto
40.	Batang Sumpur	Kabupaten Tanah Datar/Kota Padang Panjang
41.	Batang Sumani	Kabupaten Solok/Kota Solok
42.	Batang Gawan	Kabupaten Solok/Kota Solok
43.	Sungai Buluh	Kabupaten Solok/Kota Solok
44.	Batang Pasaman	Kabupaten Pasaman/Kabupaten Pasaman Barat
45.	Batang Mangkisat	Kabupaten Pasaman/Kabupaten Pasaman Barat
46.	Batang Masang	Kabupaten Pasaman/Kabupaten Pasaman Barat
47.	Batang Sianok	Kabupaten Agam/Kota Bukittinggi
48.	Aia Kur	Kabupaten Pesisir Selatan/Kota Padang
49.	Batang Langsano	Kabupaten Pesisir Selatan/Kota Padang
50.	Sungai Pisang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kota Padang
51.	Batang Siguntur	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
52.	Aia Lolo Gadang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
53.	Batang Bayang Nyalo	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
54.	Batang Bujang Gadang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
55.	Aia Gadang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
56.	Batang Aia Kamumuan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
57.	Batang Indrapura	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
58.	Batang Indrapura Besar	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
59.	Batang Indrapura-Tapan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
60.	Sungai Sako Kanan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
61.	Sungai Sako Kiri	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
62.	Batang Betung	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
63.	Sungai Gambir	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
64.	Sungai Penadah	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
65.	Aia Sako Kecil	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
66.	Sungai Sako Kanan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
67.	Sungai Sako Kiri	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
68.	Sungai Membarang Baru	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
69.	Sungai Peraidak	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
70.	Batang Silaut	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Muko-Muko
71.	Sungai Sarik	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Muko-Muko
72.	Sungai Napar	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Muko-Muko/Kabupaten Kerinci

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 16. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Danau Singkarak	107,8	51.876.000
2.	Danau Maninjau	97,9	558.000.000
3.	Danau Diatas	12,3	37.000.000
4.	Danau Dibawah	11,2	28.000.000
5.	Danau Talang	0,09	264.000
6.	Situ Danau Karuah (Kabupaten Pasaman Barat)	18,00	30.000
7.	Situ Danau Janiah (Kabupaten Pasaman Barat)	31,85	40.000
8.	Situ Danau Panampuang (Kabupaten Pasaman Barat)	3,00	10.000
9.	Situ Danau Tanang (Kabupaten Pasaman)	2,00	14.000
10.	Waduk Kotopanjang	0,00	-
11.	Waduk Pulau (Kabupaten Lima Puluh Kota)	1,60	4.800
12.	Waduk Tabek Pauh (Kabupaten Lima Puluh Kota)	-	3.500
13.	Waduk Sarasah Talang (Kabupaten Lima Puluh Kota)	0,02	2.800
14.	Areal Waduk Sarasah (Kabupaten Lima Puluh Kota)	0,02	2.800
15.	Waduk Padang Langang (Kabupaten Lima Puluh Kota)	0,50	3.500
16.	Embung Talago Bujur (Kabupaten Tanah Datar)	10,00	110
17.	Embung Ampiang Parak (Kabupaten Pesisir Selatan)	1,50	3.000.000
18.	Embung Lubuk Mato Kucing (Kabupaten Pesisir Selatan)	1,00	50
19.	Embung Gaung (Kabupaten Solok)	0,50	30
20.	Embung Ngalau (Kabupaten Sijunjung)	1,00	30
21.	Embung Lubuk Banio (Kabupaten Dharmasraya)	2,50	25
22.	Embung Simun (Kabupaten Limapuluh Kota)	0,96	44.000
23.	Embung Air Sonsang (Kabupaten Lima Puluh Kota)	1,00	100.000
24.	Embung Sarasah Tanggo (Kabupaten Lima Puluh Kota)	3,00	195.000
25.	Embung Lubuk Pinawa (Kabupaten Lima Puluh Kota)	3,50	120.000

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 16.A. Kapasitas dan Sumber Air Danau/Situ/Telaga/Embung di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Nama Danau/Situ/Embung	Kapasitas (m ³)	Sumber Mata Air
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Pasaman Barat			
1.	Situ Danau Karuah	30.000	Mata Air
2.	Situ Danau Janiah	40.000	Mata Air
3.	Situ Danau Panampuang	10.000	Mata Air
4.	Danau Tinggal	80.000	
Kabupaten Sijunjung			
1.	Embung Tabek Dia	120.000	Mata Air
2.	Embung Batu Gadang	60.000	Tadah Hujan
3.	Embung Tabek Bilacan	20.000	Tadah Hujan
4.	Embung Tabek Pudak	20.000	Tadah Hujan
5.	Mata Air Sungai Kamang	50.000	Mata Air
6.	Mata Air Bukit Kubu	15.000	Mata Air
7.	Mata Air Sungai Ambau	22.500	Tadah Hujan
8.	Embung Bukit Bungo	10.000	Mata Air
Kabupaten Pesisir Selatan			
1.	Waduk Kayu Jao	4.000	Mata Air
2.	Embung Lubuk Agung	250.000	Mata Air
3.	Embung Gunung Malelo	150.000	Sungai & Tadah Hujan
4.	Embung Limau Manis	7.500	Sungai & Tadah Hujan
5.	Embung Sungai Tanang	25.000	Sungai & Tadah Hujan
6.	Embung Sabai Nan Aluih	105.000	Sungai & Tadah Hujan
7.	Rawang Sangku	150.000	Sungai & Tadah Hujan
8.	Amping Parak	3.000.000	Sungai & Tadah Hujan
9.	Batu Pinyawik	800	Mata Air
10.	Batu Ampar	800	Mata Air
11.	Selok Sarasah	800	Mata Air
Kabupaten Solok			
1.	Danau Singkarak	1.656.000.000	Mata Air & Sungai
2.	Danau Di Atas	37.000.000	Mata Air & Sungai
3.	Danau Di Bawah	28.000.000	Mata Air & Sungai
4.	Danau Tamban	30.000	Mata Air
5.	Danau Talang	264.000	Mata Air
6.	Danau Tuo (D.Kasik)	510.000	Mata Air & T.Hujan
7.	Telaga Kariang	3.600	Tadah Hujan
8.	Telaga Sawahbilo	12.000	Mata Air
9.	Telaga Bunduang	1.080	Tadah Hujan
10.	Telaga Gabus	12.000	Mata Air
11.	Telaga Parupuk	20.000	Tadah Hujan
12.	Telaga Kubang Badak	50.000	Tadah Hujan
13.	Telaga Puyu	5.000	Tadah Hujan
14.	Telaga Anduang	1.690	Tadah Hujan
15.	Telaga Paninggahan	15.000	Tadah Hujan
16.	Pulau Belibis	54.000	Tadah Hujan
17.	Telaga Alang Lanyek	125.000	Tadah Hujan



(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Telaga Tabek Panjang	54.000	Mata Air
19.	Telaga Dadok	6.250	Mata Air
20.	Telaga Basuang	1.690	Tadah Hujan
21.	Telaga Rawan Basuang	61.250	Mata Air
22.	Telaga Gando	1.690	Mata Air & Tadah Hujan
23.	Telaga Laweh	5.250	Mata Air & Tadah Hujan
Kabupaten Tanah Datar			
1.	Telaga Danau(T.Nan Panjang)	18.750	Mata Air /Tadah Hujan
2.	Telaga Air Sirah	20.000	Tadah Hujan
3.	Telaga Angus	7.500	Tadah Hujan
4.	Telaga Bujur	15.000	Tadah Hujan
5.	Telaga Duo	6.250	Tadah Hujan
6.	Telaga Sawah Gadang	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
7.	Telaga Patoma	30.000	Mata Air/Tadah Hujan
8.	Telaga A.Taganang	150.000	Mata Air/Tadah Hujan
9.	Telaga Kayu Tanduk	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
10.	Telaga Sibusuk	132.000	Mata Air/Tadah Hujan
11.	Telaga Atar	75.000	Mata Air/Tadah Hujan
12.	Telaga Pulai	90.000	Mata Air/Tadah Hujan
13.	Telaga Banta	5.000	Tadah Hujan
14.	Telaga Panjang	2.500	Tadah Hujan
15.	Telaga Rawang	17.000	Mata Air/Tadah Hujan
16.	Telaga Janiah	12.000	Mata Air/Tadah Hujan
17.	Telaga Darek	2.500	Tadah Hujan
18.	Telaga Ketek	12.000	Tadah Hujan
19.	Telaga Buruk	1.250	Tadah Hujan
20.	Telaga Benteng	3.750	Tadah Hujan
21.	Telaga Pakis	37.500	Mata Air/Tadah Hujan
22.	Telaga Air Taganang	90.000	Mata Air/Tadah Hujan
23.	Mata Air Bulakan	1.250	Mata Air/Tadah Hujan
24.	Mata Air Tabek Panjang	3.750	Mata Air/Tadah Hujan
25.	Mata Air Tabek Bonta	3.750	Mata Air/Tadah Hujan
26.	Telaga Lurah Batuang	25.000	Mata Air/Tadah Hujan
27.	Telaga Tanah Sirah	38.000	Mata Air/Tadah Hujan
28.	Telaga Beringin	20.000	Mata Air/Tadah Hujan
29.	Telaga Bunduang	85.000	Mata Air/Tadah Hujan
30.	Telaga Ganggam	2.000	Mata Air/Tadah Hujan
31.	Telaga Pincuran Gadang	2.500	Mata Air/Tadah Hujan
32.	Embung Rapiuh	31.500	Mata Air/Tadah Hujan
33.	Mata Air Sungai Maruok	4.000	Mata Air/Tadah Hujan
34.	Telaga Luluih	15.000	Mata Air/Tadah Hujan
35.	Telaga Tengah Sawah	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
36.	Telaga Pandan	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
37.	Telaga Mingkudu	45.000	Mata Air/Tadah Hujan
38.	Telaga Palangeh	20.000	Mata Air/Tadah Hujan
39.	Telaga Ranguang	30.000	Mata Air/Tadah Hujan
40.	Telaga Sikubung	35.000	Mata Air/Tadah Hujan
41.	Embung Talago	4.500	Tadah Hujan
42.	Embung Aia Taganang	5.000	Tadah Hujan
43.	Embung Padang Siminyak	2.000	Tadah Hujan



(1)	(2)	(3)	(4)
44.	Embung Umpun Tigo	2.200	Tadah Hujan
45.	Embung Lurah Kalek	4.750	Tadah Hujan
46.	Embung Sibusuk	3.000	Tadah Hujan
47.	Embung Glodok	4.500	Tadah Hujan
48.	Embung Talago Rungguang	3.000	Tadah Hujan
49.	Embung Lurah Sangkue	3.500	Tadah Hujan
50.	Embung Tambangan	2.300	Tadah Hujan
51.	Embung Gantiang	2.030	Tadah Hujan
52.	Embung Basuang	4.000	Tadah Hujan
53.	Embung Mangkudu	4.500	Tadah Hujan
54.	Embung Talago Bujua	11.000	Tadah Hujan
	Kabupaten Pariaman		
1.	Lubuk Betung	130	Mata Air
2.	Ampang Bakuag	0,06	Tadah Hujan
3.	Sei. Abu	0,20	Mata Air
4.	Mata Air Lubuk Bonta	600	Mata Air
	Kabupaten Agam		
1.	Genangan Tarusan	20.000	Tadah Hujan
2.	Waduk Batu Kabau	3.000	Mata Air
3.	Danau Maninjau	558.000.000	Mata Air/Tadah Hujan
4.	Embung Kampai	5.000	Tadah Hujan
5.	Embung Padang Munta	6.000	Tadah Hujan
6.	Embung Luhung	3.000	Tadah Hujan
7.	Waduk Lapangan	3.000	Mata Air
8.	Embung Sungai Berawak	17.500	Mata Air
9.	Genangan Ranggomaisi	14.000	Tadah Hujan
10.	Embung Lurah	17.000	Tadah Hujan
11.	Embung Pincuran Tinggi	800,00	Tadah Hujan
12.	Embung Batu Jaban	800,00	Tadah Hujan
13.	Embung Bancah	800,00	Tadah Hujan
14.	Embung Kayu Tandang	800,00	Tadah Hujan
	Kabupaten Lima Puluh Kota		
1.	Waduk Pulai	4.800	Mata Air
2.	Waduk Sarasah Talang	2.800	Mata Air
3.	Embung Lubuk Pinawa	120.000	Mata Air
4.	Embung Simun	44.000	Mata Air
5.	Embung Air Bonsang	100.000	Mata Air
6.	Embung Sarasah Tanggo	195.000	Mata Air
7.	Areal Waduk Sarasah	2.800	Mata Air
8.	Waduk Tabek Pauh	3.500	Mata Air
	Kabupaten Pasaman		
1.	Situ Danau Tanang	14.000	Mata Air
	Kabupaten Dharmasraya		
1.	Embung Sei. Kamang	25.000,00	Tadah Hujan
2.	Embung Sei. Pauh	40.000,00	Tadah Hujan
3.	Embung Bawah Koto	20.000,00	Tadah Hujan
4.	Embung Bukit Kubu	20.000,00	Tadah Hujan
5.	Embung Calau	25.000,00	Tadah Hujan
6.	Embung Lubuk Tunggal	25.000,00	Tadah Hujan
7.	Embung Lubuk Banio	25.000,00	Tadah Hujan



(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Embung Sungai Talang	17.000,00	Tadah Hujan
9.	Embung Sungai Ngalau	22.000,00	Tadah Hujan
10.	Embung Rw. Tkl. Tinggi	12.000,00	Tadah Hujan
11.	Embung Ranah	45.000,00	Tadah Hujan
12.	Embung Sei Kambang	25.000,00	Tadah Hujan
13.	Embung Sijawi-Jawi	50.000,00	Tadah Hujan
14.	Embung Talago Biru	20.000,00	Tadah Hujan
15.	Poktan Sungai Betung	243,00	Sungai
16.	Poktan Pakani Saiyo	243,00	Sungai
17.	Poktan Katun Jaya	243,00	Sungai
18.	Poktan Minang Saiyo	243,00	Sungai
19.	Poktan Rezeki Berkah Mulia	243,00	Sungai
20.	Poktan Tanjung Harapan	243,00	Sungai
21.	Poktan Minang Sepakat	243,00	Sungai
22.	Poktan Sinar Jaya	243,00	Sungai
23.	Poktan Sipama	380,00	Tadah Hujan
24.	Poktan Katun Jaya	253,00	Tadah Hujan
25.	Poktan Tunas Alam	249,00	Tadah Hujan
26.	Pkt. Kaum Dt.Mandaro Malin	249,00	Tadah Hujan
27.	Poktan Sungai Kadalam	249,00	Tadah Hujan
28.	Poktan Piliang	249,00	Tadah Hujan
29.	Poktan Mudiak Olek	380,00	Tadah Hujan
30.	Poktan Al Khausart	249,00	Tadah Hujan
31.	Poktan Gapoktan Sakato	506,00	Tadah Hujan
32.	Poktan Kawan Saiyo	249,00	Tadah Hujan
33.	Poktan Bukit Cinduang	253,00	Tadah Hujan
34.	Poktan Koto Lamo	368,00	Tadah Hujan
35.	Poktan Benteng	253,00	Tadah Hujan
36.	Poktan Tunas Harapan	253,00	Tadah Hujan
37.	Poktan Tripasco	380,00	Tadah Hujan
38.	Poktan Ranah Kalumbuk	249,00	Tadah Hujan

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel – 17. Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Sungai Batang Sinamar	Periode 1												
		Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	05/05/2017	25	62,23	18	7,6	119,4	62,23	18	7,6	4,05	30	0,033
		Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kec Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	05/05/2017	26	71,46	33	7,6	140	71,46	33	7,6	1,84	5,33	0,040
		Jorong Mungka, Nagari Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima puluh Kota	05/05/2017	25	62,75	27	7,75	123,5	62,75	27	5,6	1,54	19,3	0,040
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	05/05/2017	25	42,76	180	7,86	84,4	42,76	180	5,94	2,39	17,5	0,070
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	05/05/2017	26	49,87	468	7,96	95,5	49,87	468	6,56	3,17	27,0	0,061
		Jorong Koto Tinggi, Nagari Halaban, Kec. Harau, Kab Lima Puluh Kota	05/05/2017	25	44,21	332	7,97	87,21	44,21	332	8,16	5,11	20,8	0,060



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Mawar I, Nagari Lubuk Jantan, Kec Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar	05/05/2017	25	44,37	348	8,12	87,76	44,37	348	8,0	4,28	33,5	0,063
		Jorong Tanjung Raya, Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung	05/05/2017	25	47,89	350	8,07	94,75	47,89	350	8,90	4,95	24,1	0,055
		Jorong Tanjung Raya, Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung	05/05/2017	25	49,34	262	8,0	97,63	49,34	262	7,2	5,00	20,2	0,054
		Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kec Koto VII, Kab. Sijunjung	05/05/2017	25	49,95	266	8,12	98,80	49,95	266	7,2	3,48	22,9	0,054



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Sinamar	Periode 1											
		Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	0,312	0,040	0,03	0,016	0,000	0,0	0,00	4800	9800	0,000	0,007
		Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kec Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	0,833	0,047	0,05	0,021	0,04	0,0	0,00	4000	8800	0,000	0,007
		Jorong Mungka, Nagari Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima puluh Kota	2.665	0,010	0,13	0,024	0,03	0,0	0,00	1300	3700	0,006	0,023
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	3.876	0,004	0,09	0,067	0,04	0,0	0,00	3100	9800	0,000	0,024
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	2.814	0,021	0,11	0,067	0,02	0,0	0,00	1700	3900	0,000	0,122
		Jorong Koto Tinggi, Nagari Halaban, Kec. Harau, Kab Lima Puluh Kota	2.414	0,00	0,14	0,061	0,07	0,0	0,00	600	6400	0,000	0,046



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Mawar I, Nagari Lubuk Jantan, Kec Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar	2.742	0,006	0,15	0,059	0,11	0,0	0,00	1700	3000	0,003	0,037
		Jorong Tanjung Raya, Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung	2.186	0,013	0,13	0,060	0,02	0,0	0,00	1300	9900	0,000	0,015
		Jorong Tanjung Raya, Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung	2.194	0,004	0,17	0,053	0,12	0,0	0,00	900	4100	0,000	0,022
		Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kec Koto VII, Kab. Sijunjung	2.218	0,004	0,12	0,058	0,06	0,0	0,01	2600	4100	0,000	0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Sinamar	Periode 2												
		Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	27,1	49,5	3	7,59	98,3	49,5	3	6,43	1,02	27,1	0,003
		Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kec Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	27,2	84,3	15	7,93	168,0	84,3	15	6,43	1,35	26,4	0,017
		Jorong Mungka, Nagari Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima puluh Kota	18/10/2017	27,2	71,2	28	7,05	142,4	71,2	28	4,40	3,72	26,5	0,003
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	27	48,8	12	7,20	97,5	48,8	12	6,09	1,02	29,8	0,003
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	27,3	82,8	9	7,62	165,5	82,8	9	5,76	1,35	15,9	0,005
		Jorong Koto Tinggi, Nagari Halaban, Kec. Harau, Kab Lima Puluh Kota	18/10/2017	27,3	69,9	13	7,43	139,5	69,9	13	6,09	1,69	10,4	0,003



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Mawar I, Nagari Lubuk Jantan, Kec Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar	18/10/2017	27,5	67,7	44	7,64	135,2	67,7	44	6,09	1,02	26,0	0,004
		Jorong Tanjung Raya, Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung	18/10/2017	27,0	67,9	71	7,75	136,7	67,9	71	6,43	1,02	23,9	0,004



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Sinamar	Periode 2 Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	0,046	0,059	0,08	0,031	0,07	0,0	0,00	8000	14000	0,0	0,002
		Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kec Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	0,098	0,157	0,10	0,254	0,08	0,0	0,00	1000	7600	0,0	0,000
		Jorong Mungka, Nagari Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima puluh Kota	0,161	0,161	0,17	0,022	0,28	0,0	0,00	600	9200	0,001	0,003
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	0,157	0,157	0,12	0,076	0,09	0,0	0,00	2500	6200	0,001	0,002
		Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	0,111	0,150	0,13	0,053	0,09	0,0	0,00	1900	5900	0,002	0,000
		Jorong Koto Tinggi, Nagari Halaban, Kec. Harau, Kab Lima Puluh Kota	0,103	0,083	0,12	0,041	0,06	0,0	0,00	1200	8900	0,003	0,000



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	0,127	0,085	0,15	0,040	0,04	0,0	0,00	600	4900	0,001	0,000
		Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kec Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	0,354	0,053	0,25	0,032	0,11	0,0	0,00	500	8100	0,008	0,000



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Sungai Batang Mangor	Periode 1												
		Jorong Sasai, Nagari Saskan, Kec. Malalak Timur, Kab. Agam	20/04/2017	27	49,7	44	7	90,7	49,7	44	7,0	1,95	21,3	0,007
		Korong Kampuang Paneh, Nagari Tandikek Utara, Kab. Padang Pariaman	20/04/2017	26,8	52,8	36	6,2	96,8	52,8	36	7,7	1,52	21,5	0,004
		Jorong Nago Baraliah, Nagari Lima Hindu, Kec Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	20/04/2017	103	51,3	30	7,2	103	51,3	30	7,6	1,52	5,66	0,006
		Jorong Lubuk Napa, Nagari Batu Kalang, Kec. Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	20/04/2017	103	56,1	19	7,3	103	56,1	19	8,2	1,10	9,30	0,007
		Jorong Buluah Kasok, Nagari Ujung Gunung, Kec. VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	20/04/2017	29	55,7	15	7,5	104	55,7	15	8	1,74	14,5	0,004
		Jorong Toboh, Nagari Sei Sarik, Kec VII Koto Sei Sarik	20/04/2017	28,0	55,6	14	7,8	104	55,6	14	8	1,74	14,0	0,005



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Toboh Mandailing, Nagari Balah Aia, Kec VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	20/04/2017	28,0	55,3	12	12	99	55,3	12	8	2,03	4,7	0,005
		Jorong Paguh Duku, Nagari Kurao Taji, Kec. Nan Sabaris, Kota Padang Pariaman	20/04/2017	26,0	54,8	13	13	99,7	54,8	13	7,8	2,03	8,65	0,004
		Kel. Marunggi, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Kota Pariaman	20/04/2017	27,5	53,9	15	8,1	100	53,9	15	7,2	2,03	13,1	0,005
		Kelurahan Sunua, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman	20/04/2017	26	29,4	18	8,0	99,7	29,4	18	7,8	1,18	15,8	0,004



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Mangor	Periode 1											
		Jorong Sasai, Nagari Saskan, Kec. Malalak Timur, Kab. Agam	0,595	0,058	0,04	0,013	0,11	0,0	0,037	3800	2400	0,000	0,181
		Korong Kampuang Paneh, Nagari Tandikek Utara, Kab. Padang Pariaman	0,391	0,057	0,03	0,046	0,08	0,0	0,037	2700	2400	0,000	0,099
		Jorong Nago Baraliah, Nagari Lima Hindu, Kec Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	0,432	0,057	0,03	0,019	0,001	0,0	0,037	1000	560	0,002	0,012
		Jorong Lubuk Napa, Nagari Batu Kalang, Kec. Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	0,618	0,056	0,08	0,048	0,05	0,0	0,038	2100	860	0,000	0,120
		Jorong Buluah Kasok, Nagari Ujung Gunung, Kec. VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	0,405	0,014	0,06	0,045	0,000	0,0	0,038	2300	1000	0,000	0,002
		Jorong Toboh, Nagari Sei Sarik, Kec VII Koto Sei Sarik	0,737	0,014	0,03	0,001	0,06	0,0	0,035	2400	1500	0,000	0,020



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Toboh Mandailing, Nagari Balah Aia, Kec VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	0,321	0,014	0,02	0,002	0,09	0,0	0,035	2400	250	0,004	0,020
		Jorong Paguh Duku, Nagari Kurao Taji, Kec. Nan Sabaris, Kota Padang Pariaman	0,477	0,004	0,08	0,004	0,02	0,0	0,036	10	0	0,002	0,031
		Kel. Marunggi, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Kota Pariaman	0,424	0,005	0,01	0,001	0,011	0,0	0,036	20	0	0,001	0,003
		Kelurahan Sunua, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman	0,281	0,007	0,03	0,007	0,001	0,0	0,035	140	0	0,000	0,021



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Mangor	Periode 2												
		Jorong Sasai, Nagari Saskan, Kec. Malalak Timur, Kab. Agam	10/03/2017	24	30,9	7	7,49	61,0	30,9	7	7,79	1,35	17,1	0,013
		Korong Kampuang Paneh, Nagari Tandikek Utara, Kab. Padang Pariaman	10/03/2017	25	29,3	746	6,82	59,3	29,3	746	5,76	2,37	92,1	0,033
		Jorong Nago Baraliah, Nagari Lima Hindu, Kec Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	10/03/2017	27	29,4	608	6,71	59,4	29,4	608	5,76	2,03	115,0	0,036
		Jorong Lubuk Napa, Nagari Batu Kalang, Kec. Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	10/03/2017	28	57,8	27	7,62	114,3	57,8	27	7,11	1,35	17,1	0,006
		Jorong Buluah Kasok, Nagari Ujung Gunung, Kec. VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	10/03/2017	28	57,8	27	7,62	114,3	57,8	27	7,11	1,35	17,1	0,006
		Jorong Toboh, Nagari Sei Sarik, Kec VII Koto Sei Sarik	10/03/2017	29	58,2	14	7,52	155,2	58,2	14	7,45	1,02	9,69	0,013



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Toboh Mandailing, Nagari Balah Aia, Kec VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	10/03/2017	27,6	59,4	21	21	117,6	59,4	21	7,11	1,35	10,2	0,013
		Jorong Paguh Duku, Nagari Kurao Taji, Kec. Nan Sabaris, Kota Padang Pariaman	10/03/2017	27,3	59,1	16	16	116,9	59,1	16	7,45	1,02	22,5	0,008
		Kel. Marunggi, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Kota Pariaman	10/03/2017	27,6	60,9	15	6,93	120,2	60,9	15	7,11	1,02	28,5	0,011
		Kelurahan Sunua, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman	10/03/2017	27,4	60,7	22	7,06	120,2	60,7	22	7,11	1,35	9,45	0,020



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Mangor	Periode 2											
		Jorong Sasai, Nagari Saskan, Kec. Malalak Timur, Kab. Agam	<0,1	0,007	0,09	0,032	0,02	<0,1	<0,01	100	4300	<0,002	0,028
		Korong Kampuang Paneh, Nagari Tandikek Utara, Kab. Padang Pariaman	2.824	0,067	0,08	0,159	0,07	<0,1	<0,01	6000	10600	<0,002	0,000
		Jorong Nago Baraliah, Nagari Lima Hindu, Kec Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	2,84	0,059	0,26	0,159	0,07	<0,1	<0,01	5500	9000	<0,002	0,118
		Jorong Lubuk Napa, Nagari Batu Kalang, Kec. Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	<0,1	0,057	0,06	0,024	0,02	<0,1	<0,01	700	6200	<0,002	0,005
		Jorong Buluah Kasok, Nagari Ujung Gunung, Kec. VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	<0,1	0,057	0,06	0,024	0,02	<0,1	<0,01	1200	5400	<0,002	0,005
		Jorong Toboh, Nagari Sei Sarik, Kec VII Koto Sei Sarik	<0,1	0,031	0,06	0,017	0,01	<0,1	<0,01	1200	9000	<0,002	0,000



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Toboh Mandailing, Nagari Balah Aia, Kec VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	<0,1	0,021	0,06	0,020	0,11	<0,1	<0,01	1100	5100	<0,002	0,000
		Jorong Paguh Duku, Nagari Kurao Taji, Kec. Nan Sabaris, Kota Padang Pariaman	<0,1	0,021	0,07	0,024	0,04	<0,1	<0,01	1300	5700	<0,002	0,000
		Kel. Marunggi, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Kota Pariaman	<0,1	0,00	0,07	0,031	0,05	<0,1	<0,01	3500	7700	<0,002	0,000
		Kelurahan Sunua, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman	<0,1	0,033	0,07	0,027	0,04	<0,1	<0,01	2000	7000	<0,002	0,000



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	Sungai Batang Agam	Periode 1												
		Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	02/04/2017	19	34,8	2,0	7,56	61,6	34,8	2,0	6,48	3,96	13,5	<0,006
		Jorong Jambu Air, Nagari Taluak Kec. Batu Hampu, Depan Mesjid Al Falah	02/04/2017	27	151	33	7,96	300	151	33	6,21	3,13	20,4	0,101
		Lokasi Rumah Potong Hewan, Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang	02/04/2017	26,5	265	17	7,92	524	265	17	2,16	3,13	74,3	<0,006
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	02/04/2017	26,5	103	29	7,72	202	103	29	4,86	2,71	28,5	0,009
		Jorong Titih, Nagari Padang Tarok, Kec Baso	02/04/2017	26	149	24	8,45	295	149	24	6,75	2,71	12,05	0,028
		Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	02/10/2017	26,9	186	19	7,19	368	186	19	7,11	1,69	20,8	0,029



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	02/10/2017	27,1	172	12	8,1	340	172	12	6,43	1,02	<5,14	0,079
		Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	02/10/2017	27,4	175	3	8,2	346	175	3	5,76	1,02	8,14	0,014
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	02/10/2017	27,4	178	6,0	8,1	351	178	6,0	6,09	1,69	11,8	0,081
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	02/10/2017	26,9	177	36	8,0	344	177	36	7,11	2,03	5,9	0,117



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Agam	Periode 1 Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	0,497	<0,014	0,21	<0,013	<0,002	<0,1	<0,010	<100	<100	<0,001	<0,001
		Jorong Jambu Air, Nagari Taluak Kec. Batu Hampu, Depan Mesjid Al Falah	0,906	<0,014	0,20	0,050	0,53	<0,1	0,555	<100	<100	0,002	<0,001
		Lokasi Rumah Potong Hewan, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang	<0,1	0,019	0,18	1,028	1,95	<0,1	0,887	220000	270000	0,002	<0,001
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	0,211	<0,014	0,19	0,029	0,10	<0,1	0,045	10000	20000	<0,001	<0,001
		Jorong Titih, Nagari Padang Tarok, Kec Baso	0,06	<0,014	0,20	0,034	0,006	<0,1	0,046	<100	<100	<0,001	0,02
		Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	0,393	0,116	0,18	0,107	<0,002	<0,1	0,011	6000	37000	0,001	0,063



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	0,172	<0,014	0,22	0,055	0,14	<0,1	0,013	2000	25000	0,002	0,208
		Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	0,266	0,416	0,29	0,051	<0,002	<0,1	<0,11	11000	77000	0,002	0,125
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	0,337	0,421	0,24	0,051	<0,002	<0,1	<0,11	5000	37000	0,002	0,061
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	0,253	0,159	0,26	0,066	0,01	<0,1	0,187	3000	36000	0,001	0,209



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Agam	Periode 2 Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	09/07/2017	25,7	34,7	7	6,0	70,5	34,7	7	6,02	1,28	15,8	0,004
		Jorong Jambu Air, Nagari Taluak Kec. Batu Hampu, Depan Mesjid Al Falah	09/07/2017	25,8	192,6	4	6,2	379,4	192,6	4	6,72	5,54	25,3	0,066
		Lokasi Rumah Potong Hewan, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang	09/07/2017	26,4	218,6	10	10	433,0	218,6	10	6,48	6,14	39,2	0,048
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	09/07/2017	26,8	128,0	20	20	253	128,0	20	4,08	1,03	20,5	0,056
		Jorong Titih, Nagari Padang Tarok, Kec Baso	09/07/2017	27,1	164,2	15,5	6,4	325,2	164,2	15,5	6,72	1,30	11,5	0,007
		Jorong Bumbang, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	09/07/2017	25,1	136	10	6,5	269	136	10	7,5	5,81	27,8	0,016



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	09/07/2017	25,3	127	33	6,6	251	127	33	6,9	3,85	19,2	0,009
		Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	09/07/2017	26,0	126	23	6,6	249	126	23	7,2	3,65	12,7	0,009
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	09/07/2017	26,4	121	24	6,5	259	121	24	6,8	2,57	11,2	0,010
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	09/07/2017	27,1	27,1	16	6,7	245	27,1	16	6,4	2,51	17,9	0,011



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Agam	Periode 2											
		Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	0,0	0,013	0,0	0,035	0,00	0,0	0,01	700	9400	0,0	0,001
		Jorong Jambu Air, Nagari Taluak Kec. Batu Hampu, Depan Mesjid Al Falah	0,267	0,445	0,0	0,059	0,03	0,0	0,07	12800	28000	0,0	0,005
		Lokasi Rumah Potong Hewan, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang	0,498	0,532	0,0	0,143	0,14	0,0	0,11	9600	24000	0,0	0,005
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	0,276	0,142	0,0	0,048	1,24	0,0	0,06	1400	8500	0,0	0,006
		Jorong Titih, Nagari Padang Tarok, Kec Baso	<0,1	0,040	0,0	0,043	0,13	3,1	0,04	1200	8400	0,0	0,006
		Jorong Bumbang, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	0,11	0,011	0,10	0,043	0,011	0,0	0,02	5000	12900	0,0	0,023



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	0,10	0,026	0,0	0,047	0,08	0,0	0,01	1400	9900	0,0	0,010
		Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	0,11	0,094	0,0	0,048	0,028	0,0	0,06	13600	28000	0,0	0,007
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	0,11	0,057	0,0	0,046	0,08	0,0	0,04	3300	11800	0,0	0,007
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	0,11	0,056	0,0	0,046	0,015	0,0	0,02	3000	16800	0,0	0,004



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	Sungai Batang Anai	Periode 1												
		Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	22/2/2017	25,2	90,6	25	6,71	173	90,6	25	6,2	2,88	10,7	<0,006
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	22/2/2017	26,8	88,9	8	6,79	166	88,9	8	7,6	3,91	9,68	0,007
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	22/2/2017	24,7	87,8	2	6,83	175	87,8	2	7,40	4,91	26,4	<0,006
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	22/2/2017	26,5	88,2	6	6,96	166	88,2	6	7,40	3,53	13,3	<0,006
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	22/2/2017	29	84,3	4	6,76	163	84,3	4	7,60	3,36	12,5	<0,006
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	22/2/2017	24,7	85,1	4	6,59	158	85,1	4	7,2	4,07	14,7	<0,006
		Korong Lubuk Aur, Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman	22/2/2017	27,2	85,9	2	7,11	164	85,9	2	7,2	5,73	9,66	<0,006



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	22/2/2017	25,6	79,8	9	7,15	144	79,8	9	6,2	3,25	<5,14	<0,006
		Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	22/2/2017	25,7	76,0	38	7,20	150	76,0	38	6,20	3,24	7,66	0,016
		Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	22/2/2017	25,8	7,48	39	7,48	148	7,48	39	6,4	2,71	6,88	0,036



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Anai	Periode 1											
		Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	0,418	<0,014	0,24	1.322	<0,002	<0,1	0,05	18000	39000	0,002	<0,002
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	0,34	<0,014	0,23	0,054	<0,002	<0,1	0,04	5000	33000	<0,002	0,284
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	0,71	<0,014	0,24	0,068	<0,002	<0,1	0,041	2000	39000	<0,002	<0,002
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	0,347	<0,014	0,21	0,058	<0,002	<0,1	0,041	14000	27000	<0,002	0,008
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	0,334	<0,014	0,24	0,046	<0,002	<0,1	0,041	8000	36000	<0,002	<0,002
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	0,232	<0,014	0,24	0,038	<0,002	<0,1	0,04	3000	33000	<0,002	<0,002
		Korong Lubuk Aur, Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman	0,216	<0,014	0,18	0,053	<0,002	<0,1	0,04	1000	19000	<0,002	0,036



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	0,588	<0,014	0,20	0,043	<0,002	<0,1	0,035	12000	25000	<0,002	<0,002
		Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	0,358	0,043	0,29	0,047	0,01	<0,1	0,035	7000	22000	0,002	0,008
		Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	1.461	0,155	0,25	0,045	<0,002	<0,1	0,544	1000	34000	<0,002	0,018



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Anai	Periode 2 Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	13/9/2017	27	173,5	18	7,38	344,3	173,5	18	7,45	2,54	15,0	0,004
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	13/9/2017	26	144,6	10	7,42	285,2	144,6	10	7,45	1,52	17,8	0,003
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	13/9/2017	24,7	147,1	2	7,44	292,1	147,1	2	7,11	2,20	13,7	0,016
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	13/9/2017	24,3	145	6	7,11	286,1	145	6	7,11	1,86	15,2	0,002
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	13/9/2017	24	141,1	5	7,44	279,8	141,1	5	7,11	2,20	9,11	0,002
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	13/9/2017	23,3	140,9	12	7,38	279,4	140,9	12	7,11	1,86	17,0	0,003



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Korong Lubuk Aur, Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman	13/9/2017	25,7	127,7	3	7,40	254,2	127,7	3	6,94	1,69	15,6	0,003
		Jorong Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	13/9/2017	26,2	91,95	7	7,35	182,4	91,95	7	6,94	2,03	21,6	0,004
		Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	13/9/2017	26,9	54,5	161	7,20	107,3	54,5	161	6,60	1,69	24,2	0,003
		Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	13/9/2017	27,8	82,9	14	7,16	164,2	82,9	14	6,94	3,72	16,9	0,004



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Anai	Periode 2 Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	<0,1	0,001	0,05	0,022	0,03	<0,1	0,04	2500	4800	0,002	0,013
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	<0,1	0,000	0,02	0,022	0,06	<0,1	0,08	1100	5700	<0,002	0,003
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	<0,1	0,047	0,03	0,022	0,05	<0,1	0,06	2100	6600	<0,002	0,003
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	<0,1	0,044	0,07	0,022	0,05	<0,1	0,11	3400	8500	0,002	0,004
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	<0,1	0,044	0,04	0,022	0,04	<0,1	0,10	1400	5300	<0,002	0,008
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	<0,1	0,024	0,07	0,022	0,10	<0,1	<0,01	3900	8100	<0,002	0,011
		Korong Lubuk Aur, Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman	<0,1	0,004	0,02	0,024	0,56	<0,1	<0,01	2000	4300	<0,002	0,011



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	<0,1	0,020	0,04	0,018	0,30	<0,1	<0,01	1900	5200	0,002	0,009
		Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	0,237	0,017	0,05	0,022	0,34	<0,1	<0,01	2100	5700	<0,002	0,066
		Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	<0,1	0,048	0,03	0,022	0,26	<0,1	<0,01	10100	26400	<0,002	0,064



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.	Sungai Batang Lampasi	Periode 1												
		Jorong Siamang Buni, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	04/05/2017	26,2	48,8	6	7,18	98,4	48,8	6	7,10	1,15	3,80	0,001
		Jorong Suayan, Nagari Suayan Tinggi, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	04/05/2017	28,6	36,8	2	7,12	74,7	36,8	2	6,4	2,19	4,52	0,001
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	04/05/2017	29,1	64	12	7,09	126	64	12	7,10	1,15	3,76	0,004
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	04/05/2017	27,0	57	12	7,41	115	57	12	6,4	2,19	3,87	0,004
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Barangin, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	04/05/2017	26,2	71	9	8,02	142	71	9	6,6	1,01	11,04	0,004
		Jorong Koto Panjang Dalam Lampasi, Kel. Koto Panjang, Kec. Laitna, Kota Payakumbuh	04/05/2017	26,8	59	26	7,96	118	59	26	5,9	1,33	3,46	0,028



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Rentang Hilir Sei. Batang Lampasi, Kel Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	04/05/2017	27,6	68	28	7,84	138	68	28	6,3	1,73	20,8	0,045
		Kel. Padang Kampung, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	04/05/2017	27,0	69	14	7,86	139	69	14	6,0	1,77	2,41	0,053
		Dibawah Jembatan Poyolinyam, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	04/05/2017	26,6	67	13	7,69	136	67	13	6,1	1,53	3,73	0,056
		Kel. Koto Baru Payobasung, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	04/05/2017	26,3	73	10	7,81	145	73	10	5,8	1,57	4,32	0,055



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lampasi	Periode 1											
		Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	0,061	0,004	0,01	0,01	0,000	0,0	0,00	680	2500	0,001	0,047
		Jorong Suayan, Nagari Suayan Tinggi, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,039	0,009	0,01	0,00	0,000	0,0	0,00	550	3300	0,001	0,051
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,245	0,011	0,06	0,02	0,001	0,0	0,008	680	6300	0,001	0,031
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,00	0,012	0,02	0,02	0,02	0,0	0,006	680	6700	0,001	0,102
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Barangin Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,03	0,011	0,06	0,03	0,11	0,0	0,01	820	7500	0,001	0,002
		Jorong Koto Panjang Dalam Lampasi, Kel. Koto Panjang, Kec. Laitna, Kota Payakumbuh	0,04	0,164	0,18	0,04	0,001	0,0	0,01	820	8400	0,002	0,025



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Rentang Hilir Sei. Batang Lampasi, Kel Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	1.153	0,142	0,08	0,06	0,002	0,0	0,00	680	7000	0,011	0,000
		Kel. Padang Kampung, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	1.184	0,214	0,07	0,05	0,31	0,0	0,01	820	8200	0,001	0,057
		Dibawah Jembatan Poyolinyam, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	1.436	0,152	0,10	0,06	0,001	0,0	0,00	270	4700	0,001	0,001
		Kel. Koto Baru Payobasung, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	1.314	0,085	0,10	0,06	0,26	0,0	0,00	270	6800	0,005	0,098



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Lampasi	Periode 2												
		Jorong Siamang Buni, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	23,9	0,6	6	7,32	0,7	0,6	6	6,8	1,72	19,8	0,007
		Jorong Suayan, Nagari Suayan Tinggi, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	26,9	13,6	8	6,7	24,5	13,6	8	6,7	1,62	23,5	0,003
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	27,4	12,2	33	7,07	22,2	12,2	33	7,7	1,61	22,4	0,006
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	25,9	15,0	11	7,27	28,0	15,0	11	5,5	2,11	23,3	0,008
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Barangin, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	18/10/2017	25,9	14,4	18	7,27	26,5	14,4	18	5,8	1,40	22,5	0,006
		Jorong Koto Panjang Dalam Lampasi, Kel. Koto Panjang, Kec. Laitna, Kota Payakumbuh	18/10/2017	25,7	14,3	26	7,03	26,7	14,3	26	4,8	2,03	27,4	0,006



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Rentang Hilir Sei. Batang Lampasi, Kel Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	18/10/2017	26,1	14,5	29	6,95	14,5	14,5	29	4,5	2,03	41,1	0,013
		Kel. Padang Kampung, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	18/10/2017	26,2	13,4	19	6,99	26,5	13,4	19	4,5	1,35	40,6	0,073
		Dibawah Jembatan Poyolinyam, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	18/10/2017	27,7	14,9	18	7,23	14,9	14,9	18	6,2	1,12	39,2	0,036
		Kel. Koto Baru Payobasung, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	18/10/2017	27,6	15,1	46	7,11	28,5	15,1	46	5,6	1,54	30,4	0,008



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lampasi	Periode 2											
		Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	0,0	0,022	0,37	0,007	0,08	0,0	0,00	5000	10000	0,0	0,000
		Jorong Suayan, Nagari Suayan Tinggi, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,0	0,032	0,10	0,024	0,17	0,0	0,00	6300	10200	0,002	0,000
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,09	0,122	0,11	0,043	0,02	0,0	0,00	2100	7200	0,001	0,000
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,096	0,056	0,10	0,044	0,65	0,0	0,00	5200	8800	0,0	0,000
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Barangin Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,162	0,124	0,12	0,068	0,10	0,0	0,00	2600	6200	0,0	0,000
		Jorong Koto Panjang Dalam Lampasi, Kel. Koto Panjang, Kec. Laitna, Kota Payakumbuh	0,241	0,178	0,19	0,078	0,08	0,0	0,00	3500	8500	0,0	0,000



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Rentang Hilir Sei. Batang Lampasi, Kel Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	0,356	0,609	0,26	0,095	0,07	0,0	0,00	7000	11200	0,003	0,003
		Kel. Padang Kampung, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	0,348	0,056	0,18	0,078	0,20	0,0	0,00	2200	5800	0,001	0,000
		Dibawah Jembatan Poyolinyam, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	0,243	0,045	0,17	0,085	0,15	0,0	0,00	2000	8700	0,0	0,000
		Kel. Koto Baru Payobasung, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	0,343	0,243	0,24	0,076	0,18	0,0	0,00	1100	7900	0,001	0,000



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.	Sungai Batang Lembang	Periode 1												
		Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	30/1/2017	24,7	87	1	5,8	176	87	1	7,2	2,12	8,79	<0,006
		Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kab. Solok	30/1/2017	25,6	13,2	5	5,71	24,9	13,2	5	7,4	3,68	<5,14	<0,006
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	30/1/2017	27,2	21	29	7,48	39	21	29	4,6	1,21	<5,14	0,007
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	30/1/2017	28,9	19	27	6,46	39	19	27	6,2	1,46	5,38	0,007
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	30/1/2017	26,4	19	27	6,62	39	19	27	6,0	2,61	7,24	0,007
		Kel. Kampai Tabu Kaambia, Kec. Lubuk Sikarang, Kota Solok	30/1/2017	25,3	19	19	7,64	35	19	19	6,9	2,16	<5,14	0,008
		Kel. Koto Panjang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	30/1/2017	25,5	19	27	7,40	39	19	27	6,6	5,58	15,86	0,007
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	30/1/2017	25,5	27	39	7,51	35	27	39	6,3	2,91	5,23	0,012



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Koto, Nagari Sumani, Kec X Koto Singkarang, Kab. Solok	30/1/2017	27,2	21	30	7,68	39	21	30	4,7	1,31	<5,14	0,024
		Nagari Saniang Baka, Kec X Koto Singkarak, Kab. Solok	30/1/2017	27,1	22	24	7,68	42	22	24	4,6	1,55	11,55	0,032



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lembang	Periode 1											
		Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	<0,1	0,207	<0,02	<0,013	<0,001	<0,1	<0,01	100000	100000	<0,003	0,015
		Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kab. Solok	<0,1	0,197	<0,02	0,108	<0,001	<0,1	<0,01	<100	130000	<0,003	0,007
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,119	0,071	<0,02	0,079	<0,001	<0,1	<0,01	<100	<100	<0,003	<0,001
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,1	0,085	<0,02	0,050	<0,001	6,3	<0,01	30000	90000	<0,003	<0,001
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,1	0,081	<0,02	0,045	<0,001	<0,1	<0,01	10000	90000	<0,003	0,003
		Kel. Kampai Tabu Kaambia, Kec. Lubuk Sikarang, Kota Solok	0,124	0,087	<0,02	0,10	<0,001	<0,1	<0,01	<100	70000	<0,003	0,003
		Kel. Koto Panjang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	<0,1	0,153	<0,02	0,052	<0,001	<0,1	<0,01	30000	180000	<0,003	0,010
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	0,1	0,166	<0,02	0,067	<0,001	<0,1	<0,01	10000	140000	<0,003	0,002



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Koto, Nagari Sumani, Kec X Koto Singkarang, Kab. Solok	0,19	0,095	<0,02	0,152	<0,001	<0,1	<0,01	10000	140000	<0,003	0,002
		Nagari Saniang Baka, Kec X Koto Singkarak, Kab. Solok	0,318	0,070	<0,02	0,096	<0,001	<0,1	<0,01	10000	120000	<0,003	0,009



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Lembang	Periode 2												
		Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	19/10/2017	27,4	31,5	12	5,8	63,3	31,5	12	7,30	1,27	19,8	<0,006
		Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kab. Solok	19/10/2017	26,6	51,1	20,5	6,5	102	51,1	20,5	7,7	1,27	32,6	<0,006
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	19/10/2017	27,4	83,9	12	6,5	187,7	83,9	12	7,0	1,68	32,6	0,007
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	19/10/2017	27,3	80,1	22	6,2	159,9	80,1	22	7,0	2,09	37,3	0,007
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	19/10/2017	27,1	83,7	15	7,1	167,2	83,7	15	7,0	1,24	30,1	0,007
		Kel. Kampai Tabu Kaambia, Kec. Lubuk Sikarang, Kota Solok	19/10/2017	26,8	116	16	7,8	196,5	116	16	7,8	1,03	61,2	0,008
		Kel. Koto Panjang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	19/10/2017	27,1	88,9	21	6,8	177,5	88,9	21	6,20	1,02	35,3	0,012
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	19/10/2017	27,4	88,7	13	6,9	177,3	88,7	13	6,10	1,35	34,1	0,016



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Koto, Nagari Sumani, Kec X Koto Singkarang, Kab. Solok	19/10/2017	26,9	90,0	4	6,5	181,6	90,0	4	4,74	1,02	42,8	0,016
		Nagari Saniang Baka, Kec X Koto Singkarak, Kab. Solok	19/10/2017	27,8	91,1	15	6,5	181,8	91,1	15	5,90	1,02	27,6	0,015



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lembang	Periode 2											
		Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	<0,1	0,008	0,06	0,008	0,02	<0,1	<0,01	500	5300	0,00	<0,002
		Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kab. Solok	<0,1	0,00	0,07	0,005	<0,002	<0,1	<0,01	1700	5500	0,00	<0,002
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,162	0,001	0,15	0,034	0,015	<0,1	<0,01	2700	10600	0,001	0,004
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,198	0,007	0,13	0,049	0,06	<0,1	<0,01	8800	14200	0,001	0,007
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,180	0,002	0,14	0,039	0,03	<0,1	<0,01	6800	12500	0,001	0,006
		Kel. Kampai Tabu Kaambia, Kec. Lubuk Sikarang, Kota Solok	0,66	0,007	0,15	0,048	0,03	<0,1	<0,01	4900	13100	0,001	0,011
		Kel. Koto Panjang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	0,32	0,012	0,11	0,053	0,06	<0,1	<0,01	6000	13100	0,001	0,002
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	0,46	0,005	0,11	0,046	0,01	<0,1	<0,01	7800	7800	0,001	0,001



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Koto, Nagari Sumani, Kec X Koto Singkarang, Kab. Solok	0,53	0,003	0,14	0,062	0,06	<0,1	<0,01	800	6000	0,001	0,006
		Nagari Saniang Baka, Kec X Koto Singkarak, Kab. Solok	0,45	0,013	0,12	0,058	0,01	<0,1	<0,01	900	8100	0,001	0,002



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.	Sungai Batang Ombilin	Periode 1												
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	03/03/2017	25,5	85,9	2	6,24	161,9	85,9	2	1,54	8,24	14,6	<0,006
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	03/03/2017	25,5	85,1	81	7,80	161,5	85,1	81	1,91	5,60	21,1	0,022
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	03/03/2017	25,5	82,8	154	7,03	155,4	82,8	154	1,43	5,12	33,4	0,020
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	03/03/2017	25,7	84,4	150	7,67	168,4	84,4	150	1,22	5,25	27,6	0,031
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	03/03/2017	26	86,6	130	0,04 2	159,6	86,6	130	1,18	5,60	23,2	0,031
		Desa Rantih, Nagari Talawi Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	03/03/2017	26,0	87,4	96	0,04 8	164,2	87,4	96	5,92	1,50	24,8	0,027



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	03/03/2017	26,0	86,6	200	7,8	163,0	86,6	200	4,60	1,28	24,4	0,027
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	03/03/2017	28,0	109,3	224	7,92	171,7	109, 3	224	5,60	1,54	18,4	0,030
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	03/03/2017	28,0	82,1	282	7,76	151,6	82,1	282	5,60	1,18	21,6	0,022
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	03/03/2017	26,0	79,4	170	7,59	153,1	79,4	170	5,90	2,21	30,4	0,023



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Ombilin	Periode 1											
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	0,123	0,098	0,19	0,032	<0,002	<0,1	<0,01	<1000	5000	0,001	0,004
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	1.005	0,041	0,32	0,065	<0,002	<0,1	<0,01	5000	30000	0,019	0,063
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	1,42	0,042	0,63	0,096	<0,002	<0,1	<0,01	2000	30000	0,037	0,098
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	1.236	0,075	0,45	0,094	<0,002	<0,1	<0,01	4000	35000	0,033	0,096
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	1.264	0,042	0,58	0,095	<0,002	<0,1	<0,01	7000	35000	0,040	0,087
		Desa Rantih, Nagari Talawi Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	0,261	0,048	0,50	0,102	<0,002	<0,1	<0,01	6000	18000	0,034	0,090



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	0,184	0,022	0,55	0,083	<0,002	<0,1	<0,01	7000	26000	0,054	<0,002
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	0,154	0,039	0,42	0,082	<0,002	<0,1	<0,01	2000	33000	0,058	0,11
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,122	0,017	0,45	0,065	<0,002	<0,1	<0,01	1000	29000	0,056	0,063
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,129	0,017	0,33	0,067	<0,002	<0,1	<0,01	14000	25000	0,045	<0,002



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Ombilin	Periode 2												
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	08/03/2017	27,1	101,9	4	6,0	199,3	101,9	4	7,5	360	14,9	0,001
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	08/03/2017	27	104,3	2	6,0	205,5	104,3	2	7,0	1,47	23,8	0,001
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	08/03/2017	27	97,14	11	6,0	193,2	97,14	11	7,5	1,97	6,94	0,001
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	08/03/2017	27,2	101,2	15	6,0	200,8	101,2	15	7,0	1,93	3,85	0,001
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	08/03/2017	27	104,6	23	7,0	207,1	104,6	23	7,2	1,30	2,39	0,001
		Desa Rantih, Nagari Talawi Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	08/03/2017	28,3	113,9	31	6,0	223,9	113,9	31	7,0	1,47	3,97	0,006



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	08/03/2017	28,4	107,8	14	6,0	212,3	107,8	14	7,6	2,91	7,85	0,005
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	08/03/2017	28,2	108,9	32	6,0	215,8	108,9	32	7,7	1,24	3,06	0,004
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	08/03/2017	28,3	88,74	72	6,0	175,1	88,74	72	6,4	1,18	4,87	0,004
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	08/03/2017	28,4	89,31	91	6,0	176,5	89,31	91	5,6	3,18	11,8	0,004



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Ombilin	Periode 2											
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	0,134	0,041	0,18	0,000	0,11	0,0	0,0	100	400	0,0	0,007
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	0,609	0,058	0,12	0,000	0,21	0,0	0,0	500	2700	0,0	0,009
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	0,371	0,042	0,09	0,000	0,07	0,0	0,0	200	1800	0,0	0,009
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	0,331	0,055	0,23	0,007	0,65	0,0	0,0	300	3000	0,000	<0,020
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	0,603	0,062	0,13	0,000	0,08	0,0	0,001	1000	2200	0,008	0,041
		Desa Rantih, Nagari Talawi Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	0,455	0,053	0,09	0,000	0,11	0,0	0,11	2000	5300	0,000	0,045



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	0,333	0,039	0,15	0,000	0,06	0,0	0,06	1300	4600	0,000	0,002
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	1.081	0,059	0,07	0,000	0,03	0,0	0,001	700	1400	0,000	0,005
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	1.043	0,058	0,21	0,000	0,03	0,0	0,001	3500	7700	0,006	0,019
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,134	0,041	0,18	0,000	0,11	0,0	0,0	100	400	0,0	0,007



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.	Sungai Batang Pangian	Periode 1												
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	13/03/17	29,2	51,3	38	7,52	9,5	51,3	38	7,2	1,30	14,7	0,007
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarantang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/03/17	29,2	20,93	82	7,19	82	20,9 3	82	7,0	1,47	15,8	0,050
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/03/17	29,2	45,22	94	7,44	91,2	45,2 2	94	7,4	3,16	19,4	0,059
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	13/03/17	28,2	47,9	126	7,27	92,34	47,9	126	7,20	2,22	10,8	0,06
		Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	13/03/17	28,9	47,1	94	7,23	294,8	47,1	94	5,86	1,01	12,9	0,070



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	13/03/17	29,0	44,5	144	7,35	372	44,5	144	7,03	1,31	24,7	0,060
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	13/03/17	29,0	140,2	172	6,5	263,7	140,2	172	6,80	3,11	20,2	0,060
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	13/03/17	29,2	84,7	40	7,64	159,2	84,7	40	7,7	2,17	11,8	0,007
		Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/03/17	28,9	82,4	50	7,52	156,6	82,4	50	6,8	2,74	17,9	0,026
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	13/03/17	29,0	19,1	104	7,23	131,4	19,1	104	7,20	2,41	39,5	0,060



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Pangian	Periode 1											
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung	0,573	0,00	0,17	0,299	0,003	0,0	0,00	1.000	49.000	0,004	0,002
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,793	0,012	0,15	0,046	0,004	0,0	0,00	15.000	75.000	0,006	0,003
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1.155	0,015	0,11	0,051	0,007	0,0	0,00	11.000	65.000	0,007	0,004
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1.145	0,049	0,31	0,051	0,02	0,0	0,00	13.000	108.000	0,006	0,004
	Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1.315	0,086	0,13	0,043	0,003	0,0	0,00	5.000	101.000	0,008	0,002	



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	3.158	0,062	0,62	0,044	0,005	0,0	0,00	4.000	81.000	0,009	0,003
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	2.032	0,068	0,23	0,062	0,004	0,0	0,00	4.000	73.000	0,014	0,002
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	0,135	0,00	0,08	0,058	0,006	0,0	0,00	25.000	54.000	0,002	0,00
		Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,793	0,040	0,190	0,041	0,005	0,0	0,00	15.000	12.000	84000	0,004
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	3.519	1.304	0,28	0,063	0,004	0,0	0,00	10.000	122.000	0,033	0,002



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Pangian	Periode 2												
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	28/09/17	27,4	18,4	9	7,65	37,6	18,4	9	6,77	3,05	17,8	0,005
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	28/09/17	29,4	1,2	16	7,26	2,2	1,2	16	6,43	1,02	20,2	0,004
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	28/09/17	27,9	14,1	122	7,39	28,1	14,1	122	2,6	2,71	51,1	0,028
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	28/09/17	28,9	15,5	11	7,6	28,3	15,5	11	3,4	1,02	5,14	0,015
	Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	28/09/17	28	64,8	4	7,19	125	64,8	4	4,4	3,72	51,1	0,013	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	28/09/17	28,4	81,7	244	7,23	159	81,7	244	6,4	1,69	43,0	0,013
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	28/09/17	28,5	65,9	436	7,16	125	65,9	436	5,8	1,35	8,62	0,026
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	28/09/17	29	13,4	15	7,13	26,4	13,4	15	5,76	1,02	28,8	0,004
		Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	28/09/17	30,7	14,4	33	7,39	25,1	14,4	33	5,76	1,02	23,0	0,004
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	28/09/17	27	14,5	16	7,11	34,9	14,5	16	6,1	2,03	19,7	0,017



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Pangian	Periode 2											
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	0,157	0,00	0,013	0,041	0,07	<0,1	<0,01	400	4.800	0,0	0,017
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,146	0,00	0,05	0,008	0,08	<0,1	<0,01	300	3.900	0,0	0,021
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	3.211	0,148	0,0	0,026	0,09	<0,1	<0,01	3.000	11.800	0,000	0,060
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,774	0,166	0,0	0,020	0,10	<0,1	<0,01	5.000	14.600	0,000	0,021
		Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,81	0,103	0,0	0,020	0,06	0,0	<0,01	1.300	15.700	0,000	0,030



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	2.394	0,100	0,0	0,115	0,26	0,0	0,00	500	5.100	0,000	0,192
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	5.155	0,116	0,0	0,211	0,42	0,0	0,00	1.300	16.500	0,000	0,281
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	0,139	0,025	0,017	0,019	0,05	<0,1	<0,01	2.000	6.300	0,0	0,015
		Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,099	0,013	0,06	0,008	0,10	<0,1	<0,01	1.500	5.700	0,0	0,026
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1.363	0,035	0,0	0,021	2,14	0,0	0,00	400	7.200	0,000	0,048



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9.	Sungai Masang	Periode 1												
		Jorong Batagak, Nagari Batagak, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	04/12/2017		130	56	6,5	262	130	56	6,7	1,80	16,6	0,006
		Nagari Sungai Buluah, Kab. Agam	04/12/2017		152	66	6,9	305	152	66	6,4	1,6	11,6	0,006
		Nagari Durian Padang Luar, Kec Banuhampu, Kab. Agam	04/12/2017		122	68	6,7	246	122	68	6,2	1,40	13,6	0,006
		Kel. Kayu Kubuh Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	04/12/2017		157	76	7,0	316	157	76	7,8	1,95	12,6	0,006
		Jorong Lembah, Nagari Sianok, Kec. IV Koto, Kab. Agam	04/12/2017		184	68	6,81	369	184	68	7,2	1,35	9,47	0,011
		Jorong Padang Sawah, Nagari Tigo Nagari, Kec. Palembayan, Kab. Agam	15/4/2017		67	56	6,95	133	67	56	7,2	2,04	79,8	0,003
		Jorong Tapian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kec Palembayan, Kab. Agam	15/4/2017		54,6	282	7,19	109	54,6	282	7,19	1,77	25,2	0,017



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Nagari Durian Padang Luar, Kec Banuhampu, Kab. Agam	04/12/2017		48,9	140	8,10	96	48,9	140	8,1	2,94	70,5	0,007
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	04/12/2017		67,8	82	6,23	136	67,8	82	6,23	1,81	23,3	0,048
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	04/12/2017		48,6	116	8,38	98	48,6	116	8,2	3,44	35,0	0,008



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Masang	Periode 1											
		Jorong Batagak, Nagari Batagak, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	1,82	0,09	0,00	0,033	0,000	0,0	0,01	540	2.700	0,001	0,011
		Nagari Sungai Buluah, Kab. Agam	1,88	0,06	0,05	0,047	0,001	0,0	0,034	10.000	17.000	0,000	0,017
		Nagari Durian Padang Luar, Kec Banuhampu, Kab. Agam	0,982	0,112	0,00	0,043	0,000	0,0	0,02	900	4.300	0,000	0,008
		Kel. Kayu Kubuh Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	0,886	0,140	0,05	0,053	0,000	0,0	0,064	500	1.300	0,000	0,017
		Jorong Lembah, Nagari Sianok, Kec. IV Koto, Kab. Agam	1.639	1.145	0,00	0,042	0,01	0,0	0,065	300	1.200	0,000	0,047
		Jorong Padang Sawah, Nagari Tigo Nagari, Kec. Palembayan, Kab. Agam	0,08	0,01	0,05	0,033	0,03	0,0	0,120	9.400	11.400	0,001	0,000
		Jorong Tapian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kec Palembayan, Kab. Agam	0,07	0,01	0,10	0,024	0,08	0,0	0,118	1.800	3.200	0,002	0,000



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Nagari Durian Padang Luar, Kec Banuhampu, Kab. Agam	0,00	0,00	0,15	0,029	0,001	0,0	0,115	4.200	8.300	0,007	0,102
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	0,00	0,060	0,08	0,019	0,015	0,0	0,113	1.500	6.000	0,002	0,060
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	0,00	0,006	0,11	0,031	0,002	0,0	0,112	5.000	11.000	0,010	0,004



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Masang	Periode 2												
		Jorong Batagak, Nagari Batagak, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	09/07/2017		71,3	2	6,0	141	71,3	2	5,76	1,02	12,7	0,004
		Nagari Sungai Buluah, Kab. Agam	09/07/2017		218	10	6,0	435	218	10	5,76	1,02	14,1	0,014
		Nagari Durian Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	09/07/2017		158,6	12	12	313	158,6	12	5,76	1,36	22,8	0,021
		Kel. Kayu Kubuh Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	09/07/2017		143	502	6,7	287	143	502	6,69	1,27	10,4	0,020
		Jorong Lembah, Nagari Sianok, Kec. IV Koto, Kab. Agam	09/07/2017		128	175	6,2	253	128	175	6,69	1,62	14,7	0,014
		Jorong Padang Sawah, Nagari Tigo Nagari, Kec. Palembayan, Kab. Agam	09/07/2017		60,43	95,5	7,0	118,9	60,43	95,5	4,5	1,02	19,3	0,009
		Jorong Tapian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kec Palembayan, Kab. Agam	09/07/2017		54,8	70	7,43	106,7	54,8	70	4,3	3,05	19,7	0,009



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Nagari Durian Padang Luar, Kec Banuhampu, Kab. Agam	09/07/2017		53,95	94	7,48	107,0	53,95	94	3,7	2,71	19,8	0,011
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	09/07/2017		66,04	36	6,29	130,8	66,04	36	3,0	2,37	24,6	0,030
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	09/07/2017		60,9	128	7,30	120,5	60,9	128	4,7	2,37	23,7	0,031



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Masang	Periode 2											
		Jorong Batagak, Nagari Batagak, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	<0,1	0,008	0,0	0,039	0,15	0,0	0,02	500	7.500	<0,002	0,005
		Nagari Sungai Buluah, Kab. Agam	0,093	0,103	0,0	0,046	0,11	0,0	0,07	21.200	2.200	<0,002	0,001
		Nagari Durian Padang Luar, Kec Banuhampu, Kab. Agam	<0,1	0,052	0,0	0,045	0,17	0,0	0,04	6.600	12.500	<0,002	0,006
		Kel. Kayu Kubuh Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	0,091	0,044	0,0	0,052	0,25	0,0	0,02	3.200	9.400	<0,002	0,011
		Jorong Lembah, Nagari Sianok, Kec. IV Koto, Kab. Agam	<0,1	0,036	0,0	0,045	0,14	0,0	0,04	3.500	10.200	<0,002	0,011
		Jorong Padang Sawah, Nagari Tigo Nagari, Kec. Palembayan, Kab. Agam	0,144	0,033	0,0	0,044	0,07	<0,1	<0,01	500	3.400	0,0	0,033
		Jorong Tapian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kec Palembayan, Kab. Agam	0,145	0,040	0,0	0,042	0,25	<0,1	<0,01	<100	5.600	0,0	0,041



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Nagari Durian Padang Luar, Kec Banuhampu, Kab. Agam	0,172	0,263	0,0	0,040	0,14	<0,1	<0,01	2.300	7.600	0,0	0,036
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	0,156	0,276	0,21	0,040	0,08	<0,1	<0,01	500	5.800	0,0	0,015
		Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	0,207	1.326	0,29	0,041	0,12	<0,1	<0,01	800	5.400	0,020	0,034



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10.	Sungai Batanghari	Periode 1												
		Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	05/12/2017	26,2	36,6	6	7,2	72,9	36,6	6	8,8	3,72	3,50	0,00
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	05/12/2017	26,6	45,8	520	7,98	90,8	45,8	520	9,2	5,14	11,8	0,007
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	05/12/2017	27,1	43,2	460	7,92	86	43,2	460	9,5	5,10	37,5	0,040
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	05/12/2017	27,0	43,7	108	6,8	86,5	43,7	108	8,2	4,14	11,0	0,020
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	05/12/2017	27,0	37,1	114	6,8	73,11	37,1	114	7,4	3,34	25,3	0,048



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya	05/12/2017	26,7	43,5	596	6	86,3	43,5	596	7,5	1,74	3,20	0,066
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	05/12/2017	27,0	40,1	20	7,14	79,8	40,1	20	8,7	3,96	6,60	0,007
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	05/12/2017	26,8	37,6	312	6	74,3	37,6	312	6,8	2,91	28,0	0,048
	Sungai Batang Momong *	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	05/12/2017	26,5	28,6	162	7,93	57,5	28,6	162	9,40	6,01	30,6	0,020
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	05/12/2017	27,5	27,5	40	7,98	130,5	27,5	40	8,5	3,76	7,09	0,009



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batanghari	Periode 1											
		Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	0,185	0,036	0,06	0,016	0,06	0,0	0,00	5.700	19.300	0,003	0,150
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	2.904	0,035	0,62	0,110	<0,002	0,0	0,00	700	4.500	0,02	0,009
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	4.518	0,081	0,94	0,135	<0,002	0,0	0,00	1.900	6.400	0,034	0,064
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	2.255	0,034	0,46	0,094	0,03	0,0	0,00	2.400	20.000	0,015	0,182
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	4.935	0,171	1,13	0,166	0,11	0,0	0,00	2.300	6.500	0,039	0,00



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kabupaten Dharmasraya	1.358	0,056	0,24	0,046	0,10	0,0	0,00	1.700	7.200	0,054	0,088
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,999	0,035	0,18	0,034	0,04	0,0	0,00	3.500	7.200	0,008	0,006
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	4.379	0,080	0,83	0,140	0,06	0,0	0,00	3.400	9.000	0,034	0,0
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	2.338	0,060	0,34	0,092	0,03	0,0	0,00	4.000	4.800	0,017	0,050
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	1.467	0,068	0,26	0,054	0,02	0,0	0,00	500	3.700	0,009	0,054



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang hari	Periode 2 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	13/7/2017	27,2	44,8	2	6	87,9	44,8	2	8	1,0	7,25	<0,006
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	13/7/2017	28	58,1	126	6,8	114,3	58,1	126	7,4	1,50	3,39	0,008
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	13/7/2017	27,5	50,9	114	6,0	100,2	50,9	114	8,1	1,46	3,32	0,003
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	13/7/2017	28,0	53,9	100	6	106,7	53,9	100	5	1,31	12,2	0,008
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	13/7/2017	27,5	55,8	100	7	110,6	55,8	100	8,6	2,33	7,53	0,007



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya	13/7/2017	27,2	55,2	116	7	109,5	55,2	116	8,6	1,96	4,51	0,006
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	13/7/2017	27	45,9	6	6	90,8	45,9	6	5	1,31	8,88	0,009
	Sungai Batang Momong *	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	13/7/2017	27	45,2	5,8	6,8	89,3	45,2	5,8	7,7	1,43	3,02	0,003
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	13/7/2017	27	45,8	20	6,5	90,6	45,8	20	7,7	1,06	3,02	0,007
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	13/7/2017	27,5	73,2	80	6,5	144,5	73,2	80	6,7	1,17	4,96	0,002



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batanghari	Periode 2											
		Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	0,296	0,032	0,02	0,020	0,05	0,0	0,0	2.500	12.600	0,0	0,010
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	1.745	0,036	0,02	0,045	0,04	0,0	0,0	1.100	4.700	0,0	0,086
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	1,24	0,035	0,02	0,035	0,10	0,0	0,0	700	2.000	0,0	0,068
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	1.668	0,039	0,02	0,055	0,01	0,0	0,0	500	3.200	0,004	0,053
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	1.402	0,034	0,02	0,030	0,09	0,0	0,0	400	5.300	0,007	0,023



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kabupaten Dharmasraya	1.501	0,039	0,02	0,044	0,09	0,0	0,0	900	3.300	0,008	0,151
	Sungai Batang Pangian *	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	1.707	0,044	0,02	0,028	0,07	0,0	0,0	700	2.900	0,018	0,060
	Sungai Batang Momong *	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	3,55	0,095	0,02	0,030	0,06	0,0	0,0	800	3.300	0,011	0,044
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,613	0,025	0,02	0,041	0,11	0,0	0,0	800	3.400	0,008	0,016
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	1.093	0,050	0,02	0,046	0,08	0,0	0,0	1.300	4.600	0,018	0,010



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang hari	Periode 3 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	30/8/2017	20	71,4	15	7,36	141,4	71,4	15	7,4	2,32	16,5	0,006
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	30/8/2017	28,5	61,5	131	7,66	122,0	61,5	131	7,4	2,66	13,2	0,012
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	30/8/2017	28,5	60,3	212	7,81	119,3	60,3	212	7,3	1,54	9,40	0,015
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	30/8/2017	28	64,7	152	7,62	128,0	64,7	152	7,6	1,84	15,2	0,019
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	30/8/2017	29	60,7	146	7,14	120,0	60,7	146	7,8	2,89	13,7	0,013



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya	30/8/2017	27	61,3	92	7,34	121,2	61,3	92	8,0	3,43	18,6	0,015
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	30/8/2017	29	70,5	87	7,46	139,9	70,5	87	6,4	1,32	1,32	0,008
	Sungai Batang Momong *	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	30/8/2017	31	24,2	32	7,44	147,4	24,2	32	7,5	2,42	2,42	0,008
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	30/8/2017	29	56,5	10	7,20	111,8	56,5	10	8,9	2,81	18,2	<0,006
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	30/8/2017	30	76,8	94	7,57	152,0	76,8	94	6,4	1,32	12,0	5,69



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang hari	Periode 3 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	<0,1	0,054	0,17	0,039	0,03	0,6	<0,01	5.800	9.700	0,0	0,001
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	0,221	0,026	0,21	0,198	0,43	1,0	<0,01	2.000	7.600	0,0	0,058
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,314	0,026	0,14	0,049	0,26	0,8	<0,01	1.600	5.200	0,0	0,043
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	0,246	0,024	0,19	0,040	0,15	1,2	<0,01	1.400	5.100	0,0	0,051
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	0,106	0,033	0,08	0,039	<0,002	1,0	<0,01	900	3.200	0,003	0,042



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kabupaten Dharmasraya	0,324	0,018	0,37	0,045	0,27	1,4	<0,01	1.800	6.700	0,004	0,069
	Sungai Batang Pangian *	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	0,153	0,018	0,11	0,036	0,20	0,6	<0,01	100	200	0,014	0,006
	Sungai Batang Momong *	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	0,128	0,028	0,27	0,035	0,24	<0,1	<0,01	1.100	6.900	0,007	0,005
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	<0,1	<0,014	0,13	0,038	0,81	<0,1	<0,01	700	4.000	0,004	0,006
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	0,103	<0,014	0,09	0,038	0,68	0,4	<0,01	300	7.100	0,014	0,010



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang hari	Periode 4 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	15/08/2017	18,2	49,1	3	7,38	86,3	49,1	3	3,9	1,02	43,0	0,003
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	15/08/2017	31,3	17,4	316	7,64	33,2	17,4	316	2,6	1,69	47,3	0,016
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	15/08/2017	29,8	17,3	336	7,64	4,7	17,3	336	2,9	1,02	49,1	0,125
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	15/08/2017	27,5	15,6	176	7,60	28,5	15,6	176	3,3	2,37	51,0	0,044
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	15/08/2017	27,6	55,2	130	7,24	103	55,2	130	3,5	1,69	50,3	0,024



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya	15/08/2017	26,9	49,6	155	7,24	91	49,6	155	4,3	2,37	53,9	0,026
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	15/08/2017	29,8	17,1	31	7,81	5,1	17,1	31	3,3	1,02	56,4	0,006
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	15/08/2017	28,5	16,7	78	7,59	30,7	16,7	78	2,7	2,37	47,7	0,018
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	15/08/2017	30,7	16,5	80	7,72	30,8	16,5	80	2,8	1,02	63,1	0,022
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	15/08/2017	28,4	67,9	402	7,22	122	67,9	402	3,8	2,71	40,8	0,024



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batanghari	Periode 4											
		Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	<0,1	0,022	0,0	0,005	0,70	0,00	<0,01	3.200	16.600	0,000	0,009
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	<0,1	0,022	0,05	0,089	1,66	0,00	<0,01	600	600	0,000	0,183
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	1.288	0,031	0,0	0,125	1,89	0,00	<0,01	1.000	14.000	0,000	1.333
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	1.701	0,043	0,0	0,044	1,85	0,00	<0,01	2.400	10.000	0,000	0,621
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	1.886	0,038	0,0	0,059	0,90	0,00	<0,01	1.500	9.500	0,000	0,140



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya	2.672	0,070	0,0	0,076	0,02	0,00	<0,01	1.800	16.200	0,000	0,174
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,346	0,020	0,0	0,023	0,15	0,00	<0,01	3.400	21.400	0,000	0,028
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	1.234	0,046	0,0	0,037	0,03	0,00	<0,01	5.100	14.300	0,000	0,104
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	1,48	0,012	0,0	0,022	0,12	0,00	<0,01	3.700	9.700	0,000	0,086
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	4.233	0,065	0,0	0,156	0,08	0,00	<0,01	1.500	7.000	0,000	0,282



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11.	Sungai Batang Kuantan	Periode 1												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	17/05/2017	28,2	61,01	82	6,8	120,9	61,01	82	6,8	3,05	22	<0,006
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	17/05/2017											<0,006
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	17/05/2017											<0,006
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	17/05/2017	31	49,1	5	7,6	96,8	49,1	5	6,8	1,04	15,7	<0,006
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	17/05/2017	26,9	48,6	72	7,0	96	48,6	72	6,0	1,26	7,26	<0,006
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	17/05/2017	27,8	47,4	1152	6,9	93,9	47,4	1152	6,4	1,32	16,4	<0,006



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	17/05/2017	26,9	30,4	24	7,4	60,2	30,4	24	6,5	1,42	5,75	<0,006
	Sungai Batang Kulampi *	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	17/05/2017	26,8	26,7	16	7,4	52,1	26,7	16	7,0	1,24	8,35	<0,006
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	17/05/2017	26,3	91,3	34	7,6	180,2	91,3	34	7,5	1,41	5,34	<0,006
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	17/05/2017											<0,006



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 1											
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	2,25	0,048	0,30	0,023	0,17	<0,1	0,006	6.700	12.400	<0,002	0,154
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung						<0,1					
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung						<0,1					
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	4.302	0,037	0,22	0,023	0,05	<0,1	0,07	1.400	3.200	0,006	0,009
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	4.087	0,044	0,23	0,023	0,05	<0,1	0,008	1.200	12.400	0,005	0,064
	Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	4.172	0,039	0,32	0,028	0,23	<0,1	0,007	1.200	16.600	0,006	0,182	



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,964	0,039	0,06	<0,013	0,03	<0,1	0,007	3.900	20.400	0,002	0,005
	Sungai Batang Kulampi *	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	2.088	0,038	0,07	0,022	0,11	<0,1	0,004	7.900	21.200	0,003	0,054
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1.506	<0,014	0,10	<0,013	0,03	<0,1	0,04	3.200	3.700	<0,002	0,006
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung						<0,1					



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 2												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	07/07/2017	27,0	72,4	92	5,8	142,9	72,4	92	6,70	1,76	17,1	0,004
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,1	63,9	56	6,2	126,2	63,9	56	6,40	1,37	16,6	0,004
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,1	45,1	48	6,0	90,7	45,1	48	6,2	1,26	7,15	0,004
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,4	62,9	10	6,0	125,2	62,9	10	6,30	1,31	9,18	0,000
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,2	61,1	96	6,0	120,7	61,1	96	6,60	1,48	8,19	0,000
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,2	61,03	118	6,0	121,8	61,0 3	118	5,60	1,35	4,93	0,000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,3	45,3	11	6,0	89,7	45,3	11	6,10	1,05	5,49	0,000
	Sungai Batang Kulampi *	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,2	39,6	10	8,09	78,2	39,6	10	6,00	1,59	8,12	0,001
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,1	97,7	4	6,0	193,5	97,7	4	5,80	1,47	3,68	0,000
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	07/07/2017	27,2	34,2	8	6,0	68,2	34,2	8	7,00	1,27	7,30	0,004



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 2											
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	2.215	0,000	0,46	0,051	0,02	0,0	0,0	<100	<100	0,014	0,243
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	2.184	0,000	0,22	0,050	0,00	0,0	0,0	<100	100	0,015	0,202
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1.265	0,075	0,027	0,036	0,15	0,0	0,0	<100	1200	0,020	0,224
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	2.054	0,000	0,26	0,050	0,07	0,0	0,0	<100	<100	0,024	0,322
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	2.106	0,000	0,23	0,050	0,07	0,0	0,0	<100	<100	0,022	0,338
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	2.129	0,000	0,32	0,049	0,11	0,0	0,0	<100	<100	0,005	0,292



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,52	0,000	0,09	0,025	0,05	0,0	0,0	<100	<100	0,0	0,181
	Sungai Batang Kulampi *	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,796	0,000	0,15	0,041	0,07	0,0	0,0	<100	<100	0,017	0,134
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,452	0,086	0,05	0,022	0,0	0,0	0,0	<100	<100	0,015	0,136
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,251	0,000	0,05	0,022	0,07	0,0	0,0	<100	100	0,013	0,186



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 3												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	08/11/2017	26,8	82	122	7,43	142	82	122	7,3	1,40	8,66	0,020
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	08/11/2017	27	101	112	7,07	175	101	112	7,60	1,33	5,02	0,014
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	27,2	70	116	7,24	118	70	116	6,10	1,31	4,02	0,014
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	28,2	64	206	7,20	112	64	206	7,30	1,03	3,22	0,017
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	27,8	62	208	7,21	105	62	208	5,40	1,34	4,52	0,020
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	28	56	204	7,20	97,2	56	204	7,30	1,03	5,02	0,020



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	08/11/2017	27	41	16	7,23	72	41	16	6,80	1,27	4,23	0,004
	Sungai Batang Kulampi *	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	08/11/2017	26,8	35	36	7,14	59,7	35	36	5,80	1,74	5,14	0,008
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	28,3	32	224	7,24	53,9	32	224	6,10	1,31	5,10	0,009
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	27,2	110	72	7,29	188	110	72	7,80	1,90	4,70	0,009



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 3											
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	0,309	0,235	0,22	0,000	0,17	0,0	0,0	900	4.600	0,008	0,035
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,234	0,075	0,25	0,000	0,04	0,0	0,0	1.200	4.700	0,003	0,030
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,213	0,035	0,09	0,000	0,03	0,0	0,0	800	4.500	0,003	0,040
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,325	0,041	0,10	0,000	0,03	0,0	0,0	600	4.300	0,005	0,039
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,38	0,018	0,16	0,000	0,12	0,0	0,0	1.200	3.900	0,004	0,021
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,377	0,757	0,19	0,000	0,01	0,0	0,0	2.000	3.700	0,005	0,011



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Iliia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,377	1.097	0,13	0,000	0,03	0,0	0,0	2.200	6.000	0,0	0,047
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,056	1.242	0,15	0,000	0,75	0,0	0,0	600	3.300	0,0	0,046
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,414	0,050	0,21	0,000	0,65	0,0	0,0	3.900	4.200	0,006	0,012
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,172	0,037	0,27	0,000	0,36	0,0	0,0	900	3.500	0,02	0,019



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 4												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	09/12/2017	29,4	13,7	152	6,60	27,5	13,7	152	6,2	1,29	16,2	0,017
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	09/12/2017	29,6	16,6	167	6,84	29,2	16,6	167	6,20	1,29	21,7	0,014
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	09/12/2017	29,4	20,6	14	6,20	36,4	20,6	14	6,30	1,05	21,7	0,005
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	09/12/2017	28,7	15,2	154	7,78	28,4	15,2	154	6,70	1,11	20,8	0,013
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	09/12/2017	27,1	14,4	156	7,69	26,2	14,4	156	6,30	1,05	28,5	0,016
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	09/12/2017	26,1	13,6	22	7,78	24,7	13,6	22	6,40	1,15	23,0	0,014



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kulampi *	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	08/11/2017	30,2	10,8	8	7,86	19,6	10,8	8	6,20	1,29	18,4	0,004
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	28,8	13,9	3	8,42	25,3	13,9	3	7,10	1,18	12,2	0,003
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	08/11/2017	25,0	12,8	3	8,06	24,7	12,8	3	6,90	1,65	18,9	0,003
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	08/11/2017	27,9	9,0	5	6,78	16,8	9,0	5	6,90	1,31	22,5	0,003



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 4											
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	0,306	0,049	0,03	0,070	0,04	<0,1	<0,01	1.200	8.700	<0,002	0,074
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,375	0,122	0,05	0,069	0,08	<0,1	<0,01	1.000	10.800	<0,002	0,102
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	<0,1	0,020	0,02	0,020	0,03	<0,1	<0,01	900	8.400	<0,002	0,020
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,479	0,021	0,02	0,019	0,11	<0,1	<0,01	100	2.500	<0,002	0,080
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,531	0,024	0,03	0,059	0,74	<0,1	<0,01	400	3.400	<0,002	0,089
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,503	0,062	0,015	0,059	0,13	<0,1	<0,01	300	3.900	<0,002	0,081



(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	<0,1	0,041	0,02	0,053	1,08	<0,1	<0,01	600	4.400	<0,002	0,013
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	<0,1	0,065	0,07	0,018	0,13	<0,1	<0,01	1.200	3.900	<0,002	0,008
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	<0,1	0,003	0,05	0,042	0,57	<0,1	<0,01	1.800	5.200	<0,002	0,012
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	<0,1	0,003	0,02	0,016	1,18	<0,1	<0,01	200	4.500	<0,002	0,010

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 17.A. Indeks Kualitas Air (IKA) 9 (Sembilan) Sungai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA) (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Sungai Batang Agam	50
2.	Sungai Batang Anai	50
3.	Sungai Batang Lembang	44
4.	Sungai Batang Ombilin	54
5.	Sungai Batang Pangian	44
6.	Sungai Batang Lampasi	53
7.	Sungai Batang Mangor	55
8.	Sungai Batang Sinamar	51
9.	Sungai Batang Masang Gadang	52
10.	Sungai Batang Batanghari	51
11.	Sungai Batang Kuantan	56
	Rata-rata	51

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 18. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Danau Maninjau												
	a. Musim Kemarau												
	- PLTA Muko-Muko		-	-	-	7,77	-	-	8	7,0	3,61	<5,14	-
	- Koto Malintang		-	-	-	7,76	-	-	5	7,2	3,81	<5,14	-
	- Hotel Tandirih		-	-	-	7,99	-	-	8	6,0	2,61	<5,14	-
	- Kubu Baru		-	-	-	7,68	-	-	8	6,0	2,61	<5,14	-
	b. Musim Hujan												
	- PLTA Muko-Muko		-	-	-	7,42	-	-	8	6,5	2,08	31,6	-
	- Koto Malintang		-	-	-	7,96	-	-	13	8,0	1,92	31,2	-
	- Hotel Tandirih		-	-	-	7,23	-	-	7	8,0	2,65	34,0	-
	- Kubu Baru		-	-	-	7,57	-	-	2	7,9	2,71	32,0	-
2.	Danau Singkarak												
	a. Musim Kemarau												
	- Batang Sumani		-	-	-	6,0	-	-	46	5,76	2,37	27,1	-
	- Pasar Ombilin		-	-	-	6,8	-	-	7,0	6,77	2,71	21,3	-
	- Batang Sumpur		-	-	-	7,0	-	-	14	6,09	1,69	8,42	-
	- PLTA Malalo		-	-	-	7,01	-	-	2,0	7,11	1,35	9,65	-
	b. Musim Hujan												
	- Batang Sumani		-	-	-	6,0	-	-	45	4	1,18	18,5	-
	- Pasar Ombilin		-	-	-	6,0	-	-	3	3,3	1,18	8,49	-
	- Batang Sumpur		-	-	-	6,0	-	-	6	4,4	1,18	17,3	-
	- PLTA Malalo		-	-	-	6,5	-	-	34	4,2	1,52	22,2	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Danau Diatas												
	a. Musim Kemarau												
	- Dermaga		-	-	-	6,0	-	-	4	7,11	1,02	17,5	-
	- Taluak Dalam		-	-	-	6,5	-	-	4	7,99	1,35	23,4	-
	- Taluak Kinari		-	-	-	6,0	-	-	8	6,77	1,02	19	-
	- Usak		-	-	-	6,5	-	-	6	6,77	1,02	14,9	-
	b. Musim Hujan												
	- Dermaga		-	-	-	6,5	-	-	2	7,5	1,41	17,2	-
	- Taluak Dalam		-	-	-	6,5	-	-	2	8,0	2,58	5,14	-
	- Taluak Kinari		-	-	-	6,5	-	-	3	8,5	3,42	5,14	-
	- Usak		-	-	-	6,0	-	-	4	7,9	2,48	4,41	-
4.	Danau Dibawah												
	a. Musim Kemarau												
	- Kepala Danau Bawah		-	-	-	6,0	-	-	4	7,11	1,35	11,3	-
	- Air Tawar Selatan		-	-	-	6,5	-	-	2	6,60	1,86	20,5	-
	- Air Tawar Utara		-	-	-	6,5	-	-	2	6,26	1,86	78,4	-
	- Kampung Batu Dalam		-	-	-	6,5	-	-	9	6,09	1,69	12,1	-
	b. Musim Hujan												
	- Kepala Danau Bawah		-	-	-	6,5	-	-	27	5,6	3,57	5,14	-
	- Air Tawar Selatan		-	-	-	6,5	-	-	11	5,6	1,54	4,25	-
	- Air Tawar Utara		-	-	-	6,5	-	-	4	6,8	2,24	13,5	-
	- Kampung Batu Dalam		-	-	-	7,0	-	-	4	7,0	1,24	29,6	-



No.	Nama	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1.	Danau Maninjau											
	a. Musim Kemarau											
	- PLTA Muko-Muko	0,363	0,100	-	0,038	-	-	-	-	<100	-	0,095
	- Koto Malintang	0,279	0,084	-	0,031	-	-	-	-	<100	-	0,110
	- Hotel Tandirih	0,274	0,080	-	0,032	-	-	-	-	<100	-	0,176
	- Kubu Baru	0,146	<0,014	-	0,034	-	-	-	-	<100	-	0,182
	B. Musim Hujan											
	- PLTA Muko-Muko	0,135	0,071	-	0,030	-	-	-	-	2700	-	0,021
	- Koto Malintang	0,104	0,121	-	0,024	-	-	-	-	6.500	-	0,013
	- Hotel Tandirih	0,186	0,067	-	0,035	-	-	-	-	3.000	-	0,021
	- Kubu Baru	0,103	0,035	-	0,026	-	-	-	-	300	-	0,026
2.	Danau Singkarak											
	a. Musim Kemarau											
	- Batang Sumani	2.954	0,072	-	0,065	-	-	-	-	1.800	-	0,048
	- Pasar Ombilin	0,162	<0,014	-	0,018	-	-	-	-	800	-	0,020
	- Batang Sumpur	0,784	<0,014	-	0,029	-	-	-	-	8.200	-	0,043
	- PLTA Malalo	0,245	<0,014	-	<0,013	-	-	-	-	<100	-	0,03
	b. Musim Hujan											
	- Batang Sumani	0,235	0,101	-	0,058	-	-	-	-	3.900	-	0,047
	- Pasar Ombilin	<0,1	0,058	-	0,036	-	-	-	-	4.400	-	0,010
	- Batang Sumpur	<0,1	0,020	-	0,017	-	-	-	-	7.700	-	0,009
	- PLTA Malalo	<0,1	0,047	-	0,016	-	-	-	-	900	-	0,011



(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
3.	Danau Diatas											
	a. Musim Kemarau											
	- Dermaga	0,237	<0,014	-	<0,013	-	-	-	-	104.000	-	0,033
	- Taluak Dalam	0,454	<0,014	-	<0,013	-	-	-	-	23.000	-	0,045
	- Taluak Kinari	0,188	<0,014	-	<0,013	-	-	-	-	25.000	-	0,015
	- Usak	0,317	<0,014	-	<0,013	-	-	-	-	6000	-	0,030
	b. Musim Hujan											
	- Dermaga	<0,1	0,014	-	0,023	-	-	-	-	8.300	-	<0,002
	- Taluak Dalam	<0,1	0,015	-	0,016	-	-	-	-	6700	-	<0,002
	- Taluak Kinari	<0,1	<0,014	-	0,020	-	-	-	-	5600	-	<0,002
	- Usak	<0,1	<0,014	-	0,019	-	-	-	-	8000	-	<0,002
4.	Danau Dibawah											
	a. Musim Kemarau											
	- Kepala Danau Bawah	0,228	<0,014	-	0,020	-	-	-	-	75.000	-	0,013
	- Air Tawar Selatan	0,174	0,050	-	0,028	-	-	-	-	53.000	-	0,027
	- Air Tawar Utara	0,13	0,036	-	0,041	-	-	-	-	128000	-	0,021
	- Kampung Batu Dalam	0,271	0,082	-	0,029	-	-	-	-	144.000	-	0,014
	b. Musim Hujan											
	- Kepala Danau Bawah	<0,1	<0,014	-	0,023	-	-	-	-	9200	-	<0,002
	- Air Tawar Selatan	<0,1	0,033	-	0,033	-	-	-	-	7100	-	<0,002
	- Air Tawar Utara	<0,1	<0,014	-	0,022	-	-	-	-	1800	-	0,002
	- Kampung Batu Dalam	<0,1	<0,014	-	0,019	-	-	-	-	5200	-	<0,002

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 18.A. Perbandingan Kualitas Air Danau Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

A. Danau Singkarak

No	Parameter	Satuan	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017			
			1Sk	2Sk	3Sk	4Sk	1Sk	2Sk	3Sk	4Sk	1Sk	2Sk	3Sk	4Sk
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	24,5	3,5	6,5	5,5	35	5	13	6,5	45,5	5	10	18
2.	pH	-	7,46	7,35	7,83	7,66	7,15	7,6	7,45	7,3	6	6,4	6,5	6,75
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,12	0,049	0,123	0,071	0,012	0,014	0,014	0,014	0,0865	0,036	0,017	0,0305
4.	Nitrat sebagai NO ₃	mg/L	2,21	1,49	2,07	1,74	0,6	0,265	0,2	0,163	15,945	0,131	0,442	0,1725
5.	BOD ₅	mg/L	2,9	1,49	2,07	1,74	1,2	1,62	1,06	1,76	1,775	1,945	1,435	1,435
6.	COD	mg/L	19,3	13,81	12,4	11,36	9,635	14,8	6,41	12,65	22,8	14,895	12,86	15,925
7.	DO	mg/L	5,15	17,11	5,53	5,41	5	5,05	6	5,9	4,88	5,035	5,245	5,655
8.	Posfat sebagai P	mg/L	0,196	0,219	0,13	0,088	0,9865	0,845	0,6515	1,3265	0,0615	0,027	0,023	0,0145
9.	Sulfida sebagai H ₂ S	mg/L	0,02	<0,02	0,02	0,03	0,012	0,0065	0,0055	0,0055	0,0475	0,015	0,026	0,0205
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/ 100ml	>24.000	4.995	>12.165	>13.100	13.100	12.700	24.000	12.105	2.850	2.600	7.950	500

Keterangan : Lokasi Sampel

- 1Sk : Inlet Batang Sumani
- 2 Sk : Outlet Pasar Ombilin
- 3 Sk : Inlet Batang Sumpur
- 4 Sk : PLTA Malalo

**B. Danau Diatas**

No	Parameter	Satuan	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	12,5	12,5	18	18	4,5	14,5	21	9,5	3	3	5,5	5
2.	pH	-	6,35	6,5	6,5	6,05	7,25	6,7	6,75	9,5	6,25	6,5	6,25	6,25
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,053	0,071	0,058	0,098	0,055	0,015	0,01	0,02	0,014	0,0145	<0,014	<0,014
4.	Nitrat sebagai NO3	mg/L	0,75	1,3	0,95	1,25	0,1	0,94	0,445	0,38	0,169	0,277	0,144	0,209
5.	BOD5	mg/L	0,85	1,55	2,0	1,2	1,45	1,2	1,45	1,35	1.215	1.465	2,22	1,75
6.	COD	mg/L	5,79	7,45	12,96	8,7	5,92	19,37	8	9,27	17,35	14,27	12,07	9.655
7.	DO	mg/L	6,20	6,20	6,28	6,00	6,85	6,75	6,35	6,75	7.305	7.995	7.635	7.335
8.	Posfat sebagai P	mg/L	0,051	0,053	0,052	0,055	0,22	0,165	0,155	0,155	0,018	0,015	0,017	0,016
9.	Sulfida sebagai H2S	mg/L	0,001	0,001	0,002	0,003	0,011	0,006	0,011	0,016	0,018	0,024	0,009	0,016
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/ 100ml	12.165	2.865	150	2.500	12.650	635	865	430	56.150	14.850	15.300	7.000

Keterangan : Lokasi Sampel

1A : Dermaga

2A : Taluak Dalam

3A : Taluak Kinari

4A : Usak

**C. Danau Dibawah**

No	Parameter	Satuan	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017			
			1B	2B	3B	4B	1B	2B	3B	4B	1B	2B	3B	4B
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	20	8,5	5,5	10,7	7,5	8,5	3	6,6	15,5	6,5	3	6,5
2.	pH	-	6,4	6	6,3	6,3	6,65	7,15	6,65	6,6	6,25	6,5	6,5	6,75
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,099	0,27	0,082	0,078	0,055	0,037	0,021	0,014	<0,014	0,0415	0,025	0,048
4.	Nitrat sebagai NO3	mg/L	1,1	0,27	0,95	0,5	0,165	0,1	0,1	0,535	0,164	0,137	0,115	0,185
5.	BOD5	mg/L	2,1	1,05	3,2	1,9	1,435	2,15	2,6	1,25	2,46	1,7	2,05	1,465
6.	COD	mg/L	11,47	8,60	11,60	11,60	10,97	19,37	30,3	15,97	8,22	12,375	45,95	20,85
7.	DO	mg/L	6,45	5,75	6,32	5,70	6,05	7,05	6,6	6,65	6,355	6,1	6,53	6,545
8.	Posfat sebagai P	mg/L	0,064	0,600	0,054	0,051	0,257	0,205	0,205	0,255	0,0215	0,0305	0,0315	0,024
9.	Sulfida sebagai H2S	mg/L	0,001	0,007	0,005	0,001	0,011	0,006	0,0115	0,011	0,0075	0,0145	0,0115	0,008
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/100ml	1.920	165	12.010	4.845	1.440	860	255	615	42.100	30.050	64.900	74.600

Keterangan : Lokasi Sampel

- 1B : Kpl. Danau Bawah
- 2B : Air Tawar Selatan
- 3B : Air Tawar Tengah
- 4B : Kam. Batu Dalam

**D. Danau Maninjau**

No	Parameter	Satuan	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017			
			1Mj	2Mj	3Mj	4Mj	1Mj	2Mj	3Mj	4Mj	1Mj	2Mj	3Mj	4Mj
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	11	9,5	10	9	4	4	3	3	8	9	7,5	5
2.	pH	-	6,06	6,16	6,09	6,05	6,06	6,3	6	6,2	7,59	7,86	7,61	76,25
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,184	0,195	0,206	0,101	0,115	0,2	0,12	0,017	0,085	0,103	0,074	0,025
4.	Nitrat sebagai NO3	mg/L	3,07	2,65	2,85	3,4	2,075	1,53	1,55	2,3	0,249	0,192	0,23	0,125
5.	BOD5	mg/L	2,9	3,15	2,3	2,1	2,05	5	2,35	2,45	2,845	2,865	2,63	2,675
6.	COD	mg/L	30,13	19,33	14,08	13,73	11,25	16,85	14,05	14,95	18,37	18,7	19,57	18,57
7.	DO	mg/L	5,9	6,3	6,28	6,59	5,4	5,9	6,3	6,55	6,75	7,6	6	6,95
8.	Posfat sebagai P	mg/L	0,117	0,129	0,103	0,104	0,085	0,085	0,0605	0,0205	0,034	0,028	0,034	0,03
9.	Sulfida sebagai H2S	mg/L	0,01	0,01	0,011	0,011	0,011	0,011	0,006	0,006	0,058	0,062	0,099	0,104
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/100ml	14.700	13.250	1.700	>24.000	12.055	14.700	5.500	20.000	1.400	3.300	1.550	200

Keterangan : Lokasi Sampel
 1Mj : PLTA Muko-Muko
 2Mj : Koto Malintang
 3Mj : Hotel Tandirih
 4Mj : Kubu Baru

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 19. Kualitas Air Sumur di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	PT. Gersindo Minang Plantation Kab. Pasaman																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	17/6/2017				6,50	22,63		0,098		0,0015	0,0045					
	Sumur Pantau Lahan Kajian	17/6/2017				7,00	6,88		3,25		6.320	0,081					
	Sumur Pantau Masyarakat	17/6/2017				6.770	11.340		0,071		0,001	0,004					
2.	PT. Binapratama Sakatojaya Kab. Solok Selatan																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	02/01/2017				6.200	0,990		5.910		1.146	0,179	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	02/01/2017				6,41	0,34		5.990		1,14	0,036	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Pemukiman Penduduk	02/01/2017				5.480	0,470		5.800		1.178	0,106	-	-	-	-	-
3.	PT. Pasaman Marama Sejahtera Kab. Pasaman																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	02/01/2017	-	-	-	7,87	0,23		6,13		0,28	0,11	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	02/01/2017	-	-	-	6,33	0,10		6,45		0,13	0,13	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Masyarakat	02/01/2017	-	-	-	6,66	0,24		6,28		0,024	6,28	-	-	-	-	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.	PT. Perkebunan Pelalu Raya Kota Padang																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	02/01/2017	-	-	-	7	0,14		4,28		0,293	0,040	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	02/01/2017	-	-	-	7	0,16		4,45		0,382	0,183	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Masyarakat	02/01/2017	-	-	-	7	0,44		4,45		0,095	0,023	-	-	-	-	-
5.	PT. Binapratama Sakatojaya Kab. Dharmasraya																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	01/01/2017				4,64	0,76		5,56		0,877	0,242					
	Sumur Pantau Lahan Kajian	01/01/2017				6,80	4,34		6,06		7.161	0,219					
	Sumur Pantau Penduduk	01/01/2017				6,65	0,69		5,23		0,250	0,136					
6.	PT. Sumbar Andalas Kencana Kota Padang																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	04/03/2017				7,24	0,37		6,32		2.465	0,097	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	04/03/2017				7,00	0,31		6,19		0,345	0,202	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Penduduk	04/03/2017				6,65	2,08		5,63		1.238	0,117	-	-	-	-	-
7.	PT. Incasi Raya Pangian Kab. Dharmasraya																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	Semester I 2017	-	-	-	4,76	1,09		5,98		1,48	0,06	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	Semester I 2017	-	-	-	5,68	1,22		5,95		0,10	0,11	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Masyarakat	Semester I 2017	-	-	-	5,14	0,66		5,51		3,21	0,05	-	-	-	-	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.	PT. Selago Makmur Plantation Kab. Dharmasraya																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	Semester I 2017	-	-	-	4,45	0,49		6,12		4.714	0,0210	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	Semester I 2017	-	-	-	4,81	0,26		6,22		4.428	0,1830	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Masyarakat	Semester I 2017	-	-	-	4,16	0,33		6,13		4.805	0,1390	-	-	-	-	-
9.	PT. Tidar Kerinci Agung Kab. Dharmasraya																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	Semester I 2017				6,02	0,62		5,40		2.715	0,1910					
	Sumur Pantau Lahan Kajian	Semester I 2017				6,42	0,52		5,19		0,971	0,0730					
	Sumur Pantau Penduduk	Semester I 2017				6,41	1,09		5,14		0,681	0,1460					
10.	PT. AMP Plantation Kab. Pasaman Barat																
	Sumur Pantau Lahan Kajian	10 Mei 2017				7,2	142	142	3,20			7,1	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	10 Mei 2017				6,8	259	259	2,50			27,8	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Penduduk	10 Mei 2017				6,8	12,9	12,9	3,50			0,203	-	-	-	-	-



No.	Lokasi Sumur	Kadmium (mg/L)	Khrom (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Klorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sbg N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin Bebas (mg/L)	Belerang sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal Coli form (jml/100 ml)	Total Coli form (jml/100 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1.	PT. Gersindo Minang Plantation Kab. Pasaman																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	2,31		0,0027		4.203			4,36	1.052	-	-	-	0,0012				-		-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	0,0015		0,0012		0,0027			0,0045	78.280	-	-	-	3.624				-		-
	Sumur Pantau Masyarakat	0,003		0,003		0,129			6.440	0,148	-	-	-	0,008				-		-
2.	PT. Binapratama Sakatojaya Kab. Solok Selatan																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	0,015		0,001		0,003			0,005	4.460	-	-	-	21.180		-		-		-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	0,00		0,00		0,03			0,00	5,36	-	-	-	7,38		-		-		-
	Sumur Pantau Pemukiman Penduduk	0,002		0,001		0,003			0,005	1.790	-	-	-	4.409		-		-		-
3.	PT. Pasaman Marama Sejahtera Kab. Pasaman																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	13,88	-	-	-	5,28		-		-		-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	215,7	-	-	-	3,48		-		-		-
	Sumur Pantau Sumur Penduduk	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	12,96	-	-	-	1.092		-		-		-
4.	PT. Perkebunan Pelalu Raya Kota Padang																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	<0,0015		<0,0012		<0,0027			0,25	3,50	-	-	-	0,0012						
	Sumur Pantau Lahan Kajian	<0,0015		<0,0012		<0,0027			0,41	0,990	-	-	-	3.624						
	Sumur Pantau Masyarakat	<0,0015		<0,0012		<0,0027			0,16	2,24	-	-	-	0,008						



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
5.	PT. Binapratama Sakatojaya Kab. Dharmasraya																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	0,0015		0,0012		0,0027			0,0045	12,39	-	-	-	21.180		-		-		-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	0,0015		0,0012		0,0027			0,0045	103,90	-	-	-	7,38		-		-		-
	Sumur Pantau Penduduk	0,0015		0,0012		0,0027			0,0045	17,69	-	-	-	4.409		-		-		-
6.	PT. Sumbar Andalas Kencana Kota Padang																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	<0,0015		<0,0012		0,0012			<0,0045	5,66				19,66						-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	0,0015		<0,0012		<0,0008			<0,0045	203,7				95,95						-
	Sumur Pantau Penduduk	<0,0015		<0,0012		<0,008			<0,0045	6,60				14,23						-
7.	PT. Incasi Raya Pangian Kab. Dharmasraya																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	0,00		0,00		0,00			0,00	7,49				0,56						-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	0,00		0,00		0,00			0,00	4,40				9,91						-
	Sumur Pantau Masyarakat	0,00		0,00		0,00			0,00	25,11				2,53						-
8.	PT. Selago Makmur Plantation Kab. Dharmasraya																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	0,0015		0,0012		0,0027			0,0225	3,74				1.076						
	Sumur Pantau Lahan Kajian	0,0015		0,0012		0,0027			0,0045	2,80				1.456						
	Sumur Pantau Masyarakat	0,0015		0,0012		0,0027			0,0045	0,93				1.118						
9.	PT. Tidar Kerinci Agung Kab. Dharmasraya																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol													1.671						
	Sumur Pantau Lahan Kajian													1.440						
	Sumur Pantau Masyarakat													1.856						



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
10.	PT. AMP Plantation Kab. Pasaman Barat																			
	Sumur Pantau Lahan Kajian	<0,003		<0,019		<0,002			<0,010	144	-	-	-	41,1		-		-		-
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	<0,003		<0,019		<0,002			<0,010	9,8	-	-	-	32,0		-		-		-
	Sumur Pantau Penduduk	<0,003		<0,019		<0,002			<0,010	12,6	-	-	-	16,2		-		-		-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 19.A. Ketersediaan Air Tanah di WS Silaut Tarusan Tahun : 2017

No	DAS	Ketersediaan Air Tanah (m ³ /s)
1.	Kur	0,61
2.	Langsano	0,63
3.	Pisang	0,44
4.	Pinang	1,23
5.	Nyalo	0,72
6.	Mandeh	0,60
7.	Gemuruh	0,26
8.	Salak bundek	1,19
9.	Tarusan	14,06
10.	Bayang	12,66
11.	Lumpo	5,35
12.	Laban	0,66
13.	Salido	2,90
14.	Painan	1,31
15.	Jalamu	3,00
16.	Kapas	13,07
17.	Taluak	1,02
18.	Timbulu	0,73
19.	Surantih	10,20
20.	Amping	4,41
21.	Kambang	15,85
22.	Lakitan	5,03
23.	Pulakek	0,27
24.	Pudung	0,21
25.	Palangai	16,64
26.	Tunu	1,28
27.	Punggasan	4,68
28.	Air haji	13,76
29.	Bentayan	3,45
30.	Tapan	86,00
31.	Silaut	13,73

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 19.B. Sumber Mata Air di Pulau-Pulau Kecil
Tahun : 2017**

No	Lokasi Mata Air	Kapasitas Air (m3)	Koordinat Geografis	
			Bujur	Lintang
1.	Kota Padang			
	a.Pulau Bindalang	3	100°12'30 BT	00°59'04 LS
	b.Pulau Pandan	3	100°08'23 BT	00°56'58 LS
	c.Pulau Sikuai	6	100°21'10 BT	01°07'40 LS
	d.Pulau Pisang Gadang	4	100°20'10 BT	00°59'35 LS
	e.Pulau Sironjong	1	100°21'29 BT	01°08'38 LS
	f.Pulau Sinyaru	3	100°17'49 BT	01°04'32 LS
	g.Pulau Air	2	100°12'18 BT	00°52'17 LS
2.	Kota Pariaman			
	a.Pulau Angso (3 sumur)	2,4	100°06'39"	00°39'37"
3.	Kabupaten Pesisir Selatan			
	a.Pulau Cingkuak	0,4	100°56'31"	01°34'70"
	b.Pulau Penyu	0,6	100°36'52"	01°50'31"
	c.Pulau Beringin	0,4	100°65'45"	01°89'00"
	d.Pulau Marak	-	100°20'02"	01°12'05"
	e.Pulau Pagang	-	100°20'54"	01°09'40"
4.	Kabupaten Padang Pariaman			
	a.Pulau Pieh	2	100°05'7" LS	00°52'17 LS
	b.Pulau Bando	2	100°0'00" BT	00°45'36"LS
5.	Kabupaten Pasaman Barat			
	a.Pulau Panjang	0,05 L/dtk	99 17' 54"	00 11' 17"
6.	Kabupaten Kepulauan Mentawai			
	a.Labuan Korong	5000	99,15583289	-1,44507471
	b.Bose	200	98,96748711	-1,09670386
	c.Jujuat	250	99,04282545	-1,80678148
	d.Niau	100	99,08402607	-1,86043237
	e.Pulau Nyangnyang	100	99,27072381	-1,81548795
	f.Muara Sikabalu	100	98,995739	-1,11176803

Keterangan : (-)Tidak ada data

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera, 2017



**Tabel – 20. Kualitas Air Laut di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Nama Lokasi	Waktu Sampling	Lokasi Sampling	Warna (Mr)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/L)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)	pH	Salinitas (0/00)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Kota Padang												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Muaro 50 m			-	-	-	-	6	-	-	-	7	6,79
	Pantai Muaro 100 m			-	-	-	-	6	-	-	-	7	11,2
	Pantai Pasir Jambak 50 m			-	-	-	-	18	-	-	-	6,5	28,6
	Pantai Pasir Jambak 100 m			-	-	-	-	20	-	-	-	6,5	22,1
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m			-	-	-	-	6	-	-	-	7,2	32,2
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m			-	-	-	-	6	-	-	-	7	32,2
	Muaro Batang Arau			-	-	-	-	8	-	-	-	8	7,87
	b. Musim Hujan												
	Pantai Muaro 50 m			-	-	-	-	10	-	-	-	6	37
	Pantai Muaro 100 m			-	-	-	-	14	-	-	-	7	27,5
	Pantai Pasir Jambak 50 m			-	-	-	-	2	-	-	-	6	12,1
	Pantai Pasir Jambak 100 m			-	-	-	-	6	-	-	-	7	18,2
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m			-	-	-	-	42	-	-	-	7	21,8
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m			-	-	-	-	13	-	-	-	6	37,5
	Muaro Batang Arau			-	-	-	-	9	-	-	-	6	2,86
2.	Kab. Padang Pariaman												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Tiram 50 m			-	-	-	-	18	-	-	-	6,5	19,9
	Pantai Tiram 100 m			-	-	-	-	14	-	-	-	6,5	19,5
	Pantai Arta 50 m			-	-	-	-	8	-	-	-	6,5	30,9
	Pantai Arta 100 m			-	-	-	-	4	-	-	-	7	31,7
	Muaro Batang Tapakis			-	-	-	-	26	-	-	-	6	1,64
	b. Musim Hujan												
	Pantai Tiram 50 m			-	-	-	-	74	-	-	-	7	34,7
	Pantai Tiram 100 m			-	-	-	-	89	-	-	-	7	35,6
	Pantai Arta 50 m			-	-	-	-	61	-	-	-	7	34,3
	Pantai Arta 100 m			-	-	-	-	15	-	-	-	6,8	35,4
	Muaro Batang Tapakis			-	-	-	-	18	-	-	-	6	0,71



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Kota Pariaman												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Gandoriah 50 m			-	-	-	-	8	-	-	-	7	0,03
	Pantai Gandoriah 100 m			-	-	-	-	4	-	-	-	7	20,6
	Muaro Batang Pampan			-	-	-	-	6	-	-	-	6	0,03
	b. Musim Hujan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Gandoriah 50 m			-	-	-	-	22	-	-	-	6	21,4
	Pantai Gandoriah 100 m			-	-	-	-	10	-	-	-	6,5	21,4
	Muaro Batang Pampan			-	-	-	-	6	-	-	-	6	1,79
4.	Kab. Agam												
	a. Musim Kemarau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)			-	-	-	-	13	-	-	-	8,08	17,69
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)			-	-	-	-	9	-	-	-	8,08	18,13
	Muaro Pantai Tiku			-	-	-	-	31	-	-	-	6,84	12,88
	b. Musim Hujan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)			-	-	-	-	45	-	-	-	7,1	36,4
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)			-	-	-	-	26	-	-	-	7,2	37,9
	Muaro Pantai Tiku							30				7,1	17,1
5	Kab. Pesisir Selatan												
	a. Musim Kemarau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Painan (50 m)			-	-	-	-	3	-	-	-	7	31,12
	Pantai Cerocok, Painan (100 m)			-	-	-	-	2	-	-	-	7	30,05
	Pantai Cerocok, Tarusan (50 m)			-	-	-	-	7	-	-	-	7	22,36
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)			-	-	-	-	17	-	-	-	7	31,81
	Muara Batang Mandeh							4				7	12,88
	b. Musim Hujan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Painan (50 m)			-	-	-	-	15	-	-	-	7	62,9
	Pantai Cerocok, Painan (100 m)			-	-	-	-	56	-	-	-	7	30,4
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)			-	-	-	-	19	-	-	-	7	18,4
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)			-	-	-	-	14	-	-	-	7	18,2
	Muara Batang Mandeh							32				7,5	30



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Kab. Pasaman Barat												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)			-	-	-	-	2	-	-	-	7	16,92
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)			-	-	-	-	16	-	-	-	7	17,8
	Muara Sungai Pantai Sasak			-	-	-	-	10	-	-	-	6	0,43
	b. Musim Hujan												
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)			-	-	-	-	16	-	-	-	7	33,1
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)			-	-	-	-	18	-	-	-	7,2	33,4
	Muara Sungai Pantai Sasak			-	-	-	-	10	-	-	-	6	0,64



No.	Nama Lokasi	DO (mg/L)	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	Amonia Total (mg/L)	NO2-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	PO4-P (mg/L)	Sianida (CN) (mg/L)	Sulfida (H2S) (mg/L)	Klor bebas (mg/L)	Minyak Bumi (mg/L)	Fenol (µg/L)	Pestisida (mg/L)	PCB (mg/L)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.	Kota Padang														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Muaro 50 m	6,2	2,81	10,5	1.371	-	8.593	0,834	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Muaro 100 m	5,6	2,89	<5,14	1.054	-	9.815	0,702	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 50 m	6,5	5,15	86,6	0,115	-	2.047	0,071	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 100 m	5,5	1,1	2,62	0,147	-	2.531	0,089	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m	6,4	2,68	13,5	0,024	-	<0,1	0,394	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m	6,4	2	12,2	0,389	-	<0,1	0,214	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Arau	6	4,31	14,4	1.083	-	7.052	0,905	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Muaro 50 m	6	0,58	11,1	0,99	-	0,514	0,816	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Muaro 100 m	7	0,23	14,4	0,276	-	0,209	0,295	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 50 m	6,2	1,12	33	0,243	-	5.914	0,103	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 100 m	6,2	2,14	27,3	0,299	-	6.756	0,04	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m	6,5	1,08	24,1	0,027	-	<0,1	0,06	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m	6,5	1,42	10,5	0,061	-	<0,1	0,035	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Arau	6,3	0,54	17,5	1.118	-	0,411	0,838	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kab. Padang Pariaman								-	-	-	-	-	-	-
	a. Musim Kemarau								-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiram 50 m	4	1,29	6,74	0,061	-	0,545	0,097	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiram 100 m	6,5	1,76	4,29	0,061	-	0,574	0,066	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 50 m	7	2,26	17,6	<0,014	-	<0,1	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 100 m	7	1,92	4,24	<0,014	-	0,092	<0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Tapakis	6,5	5,86	80,3	0,069	-	1.217	0,09	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan								-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiram 50 m	5,4	1,34	32	Nihil	-	<0,1	0,052	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiram 100 m	6	1,94	27,3	Nihil	-	<0,1	0,042	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 50 m	7,2	2,46	21,9	Nihil	-	<0,1	0,012	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 100 m	6,8	1,38	20,7	Nihil	-	0,133	0,031	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Tapakis	6	2,28	36,8	0,032	-	0,122	0,2	-	-	-	-	-	-	-



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
3.	Kota Pariaman														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Gandorih 50 m	6,9	3,68	16,2	0,045	-	3.253	20,6	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Gandorih 100 m	6,7	2,81	11	0,479	-	0,489	24,1	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Pampan	5,3	3,27	18	0,197	-	3.253	0,371	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Gandorih 50 m	6,6	0,84	11,2	0,081	-	0,097	0,052	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Gandorih 100 m	6,5	0,74	15,4	0,092	-	<0,1	0,078	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Pampan	6,3	0,21	14,8	0,21	-	0,163	0,16	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kab. Agam														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)	7,4	3,34	25,5	<0,014	-	<0,1	0,53	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)	7,3	3,61	12,4	<0,014	-	<0,1	0,182	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Pantai Tiku	7,2	2,78	<0,14	0,015	-	0,01	0,178	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)	2,6	4,4	7	0,018	-	<0,1	0,024	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)	3,5	3,05	8,6	Nihil	-	<0,1	0,003							
	Muaro Pantai Tiku	2,5	1,35	8,77	0,258	-	0,239	0,124	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Pesisir Selatan														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Cerocok, Painan (50 m)	5,7	3,86	17,8	<0,014	-	<0,1	0,026	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Painan (100 m)	6	4,53	23,3	<0,014	-	<0,1	0,026	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Tarusan (50 m)	7,56	5,16	21,2	0,034	-	<0,1	0,031							
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)	7,2	5,54	15,2	<0,014	-	<0,1	0,016							
	Muara Batang Mandeh	5,8	3,22	18,2	0,264	-	<0,1	0,027	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Cerocok, Painan (50 m)	3	1,47	5,06	0,127	-	0,176	<0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Painan (100 m)	4,2	1,47	4,18	0,027	-	0,131	<0,013							
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)	4,9	1,47	5,05	<0,014	-	0,107	<0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)	4,5	1,47	3,14	<0,014	-	0,128	<0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Muara Batang Mandeh	4,6	1,47	5,8	0,11	-	0,201	<0,013							



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
6.	Kab. Pasaman Barat														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)	6	1,21	15,4	0,055	-	0,143	0,02	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)	6	1,58	14,7	0,013	-	<0,1	<0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Muara Sungai Pantai Sasak	5	1,31	16,6	0,161	-	0,607	0,123	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)	7,5	1,6	5,45	0,019	-	0,088	0,037	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)	7,2	1,3	17,2	0,024	-	0,165	0,055	-	-	-	-	-	-	-
	Muara Sungai Pantai Sasak	6,6	2,18	18,1	0,034	-	0,106	0,068	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 20.A. Perbandingan Kualitas Air Laut Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

A. Kabupaten Padang Pariaman

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampel Tahun 2015		Lokasi Sampel Tahun 2016		Lokasi Sampel Tahun 2017	
			2534	2535	2534	2535	2534	2535
1.	Zat Tersuspensi (TSS)	mg/L	3	2	4,5	6	46	51,5
2.	pH	-	7,2	7,0	7	7,3	6,75	6,75
3.	Amoniak (NH ₃ -N)	mg/L	0,22	<0,014	0,014	0,035	0,0305	0,0305
4.	Nitrat (NO ₃)	mg/L	1,3	0,5	3,257	2,323	0,272	0,272
5.	BOD.5	mg/L	2,1	3,4	2,71	1,46	1.315	1,85
6.	DO	mg/L	6,86	7,14	6,35	6,05	4,7	15.795
7.	Posfat (PO ₄ -P)	mg/L	0,242	0,296	0,2515	0,2415	0,0745	0,054

Keterangan : Kode Sampel

2534 : Pantai Tiram Jarak 50 m

2535 : Pantai Tiram Jarak 100 m

B. Kabupaten Pesisir Selatan

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampel Tahun 2015		Lokasi Sampel Tahun 2016		Lokasi Sampel Tahun 2017	
			3504	3505	3504	3505		
1.	Zat Tersuspensi (TSS)	mg/L	18	15	11	13.5	9	29
2.	pH	-	8,0	8,2	7,4	7,45	7	7
3.	Amoniak (NH ₃ -N)	mg/L	0,044	0,009	0,087	0,014	0,0635	0,0135
4.	Nitrat (NO ₃)	mg/L	1,4	1,2	0,9255	0,461	0,088	0,0655
5.	BOD.5	mg/L	3,8	4,2	0,96	0,76	2.665	3
6.	DO	mg/L	6,43	6,10	5,1	5,35	4,35	5,1
7.	Posfat (PO ₄ -P)	mg/L	0,262	3.610	0,123	0,0375	0,013	0,013

Keterangan : Kode Sampel

3504 : Pantai Cerocok Jarak 50 m

3505 : Pantai Cerocok Jarak 100 m



C. Kabupaten Agam

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampel Tahun 2015			Lokasi Sampel Tahun 2016			Lokasi Sampel Tahun 2017		
			3607	3608	3609	3607	3608	3609	3607	3608	3609
1.	Zat Tersuspensi (TSS)	-	10	15	12	5,5	3	31,5	29	17,5	30,5
2.	pH		7,8	8,0	8,0	7	7	7	7,59	7,64	6,91
3.	Amoniak (NH ₃ -N)	mg/L	<0,014	<0,014	<0,014	0,014	0,014	0,089	0,016	0,007	0,1365
4.	Nitrat (NO ₃)	mg/L	2,36	2,24	2,36	0,21	0,4	1,18	<0,1	<0,1	0,1245
5.	BOD 5	‰	4,5	2,0	1,5	1,59	1,805	1,825	3,87	6,66	2.065
6.	DO	mg/L	6,2	4,9	5,10	5,5	5,7	5,5	5	5,4	4,85
7.	Posfat (PO ₄ -P)	mg/L	0,033	0,041	0,058	0,2465	0,2615	0,5005	0,554	0,185	0,151

Keterangan : Kode Sampel

3607 : Pantai Tiku Jarak 50 m

3608 : Pantai Tiku Jarak 100 m

3609 : Muara Pantai Tiku

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel – 21. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Novem ber	Desem ber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Stasiun Klimatologi Padang Pariaman	452	378	334	383	457	358	205	295	440	385	718	443
2.	Stasiun Meteorologi BIM	427	264	376	394	299	137	179	366	321	302	652	X
3.	Stasiun Geofisika Padang Panjang	452	229	507	546	439	318	161	375	199	378	743	667
4.	Stasiun Maritim Teluk Bayur	450	183	231	266	644	151	385	535	544	309	954	405
5.	Sta. Gaw Bukit Kototabang	330	233	201	345	182	179	97	213	276	298	418	299
6.	Balitbu Aripan Sumani	142	97	282	237	186	139	36	186	168	21	178	230
7.	Sitiung	95	220	281	246	303	259	211	176	297	178	277	212
8.	Muara Siberut	259	204	216	310	323	250	223	326	302	264	476	300
9.	BPP Talao	239	136	189	219	223	177	77	102	207	123	212	195
10.	Payakumbuh Barat	64	124	347	230	280	78	52	179	192	64	210	211
11.	Kolok	144	266	292	154	231	189	57	139	194	88	155	111
12.	Lubuk Sikarah	232	116	275	159	242	156	31	230	152	32	247	284
13.	Pangkalan	248	398	404	217	423	85	190	234	323	147	397	459
14.	Jalan Baru	X	178	350	281	356	114	259	280	464	357	125	X
15.	Rao	118	149	210	173	186	107	40	201	158	76	161	118
16.	Sei Baremas	391	430	193	295	225	145	23	226	342	139	436	242
17.	PU Batang Kapas	373	210	216	140	424	246	205	537	275	302	562	358
18.	BPK Sijunjung	92	122	251	298	636	91	188	194	229	125	192	137
19.	Muara Labuh	149	468	526	367	467	243	218	324	486	227	544	344
20.	Rambatan	168	127	160	89	155	106	58	314	204	9	141	244

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin, 2017

**Tabel - 21.A. Nama dan Lokasi Stasiun di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Nama Stasiun Pengamatan	Lokasi Stasiun
(1)	(2)	(3)
1.	Stasiun Klimatologi Padang Pariaman	Kepalo Hilalang, 2 X 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman
2.	Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Mingangkabau (BIM)	Bandara BIM, Ketaping Kab. Padang Pariaman
3.	Stasiun Geofisika Padang Panjang	Silaing Bawah Kota Padang Panjang
4.	Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur	Teluk Bayur Kota Padang
5.	Stasiun Gaw Bukit Kototabang	Bukit Kototabang, Palupuh Kab. Agam
6.	Balai Penelitian Buah Tropika Aripan Sumani	Aripan Sumani Kab. Solok
7.	Sitiung	Sitiung Kab. Dharmasraya
8.	Muara Siberut	Muara Siberut Kab. Kep. Mentawai
9.	BPP Talao	Talao Kota Bukit Tinggi
10.	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
11.	BPP Kolok	Kolok Kota Sawahlunto
12.	Lubuk Sikarah	Lubuk Sikarah Kota Solok
13.	BPP Pangkalan	Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota
14.	Jalan Baru	Pariaman Tengah Kota Pariaman
15.	Rao	Rao Mapat Tunggul Kab. Pasaman
16.	Parit	Parit, Koto Balingka Kab. Pasaman Barat
17.	PU Batang Kapas	Tanah Kareh, Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan
18.	BPK Sijunjung	Muara Sijunjung Kab. Sijunjung
19.	Muara Labuh	Pakan Selasa, Muara Labuh Kab. Solok Selatan
20.	BPTP Rambatan	Rambatan Kab. Tanah Datar

Keterangan : -

Sumber : Stasiun Klimatologi Padang Pariaman , 2017



**Tabel – 22. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	29.234	39.026	849	0	5.310	5.183
2.	Kota Padang Panjang	3.625	26.919	0	113	9.706	189
3.	Kota Bukittinggi	4.832	26.712	0	811	0	236
4.	Kota Solok	25.214	4.503	0	0	27	0
5.	Kota Pariaman	657	93.615	0	896	0	109
6.	Kota Payakumbuh	13.765	24.793	0	0	326	446
7.	Kota Sawahlunto	2.971	17.718	1.736	1.907	29.658	4.234
8.	Kabupaten Dharmasraya	681	127.268	4.726	0	12.255	22.015
9.	Kabupaten Agam	11.805	65.758	1.233	9.394	52.135	19.548
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	6.355	59.241	8.143	1.709	35.934	70.401
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	8.584	74.526	0	2.852	41.787	13.688
12.	Kabupaten Pasaman	14.331	66.564	17.388	1.060	52.243	209
13.	Kabupaten Pasaman Barat	9.502	119.464	8.521	340	19.810	1.226
14.	Kabupaten Solok	3.170	57.905	6.446	2.902	55.738	-
15.	Kabupaten Sijunjung	4.724	50.088	24.561	3.563	32.364	9.928
16.	Kabupaten Padang Pariaman	7.234	94.849	5.683	10.079	26.582	11.623
17.	Kabupaten Solok Selatan	9.456	81.290	28.391	0	18.709	53.900
18.	Kabupaten Tanah Datar	11.163	61.568	502	363	65.649	7.644
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	30.790	11.563	51.193	86.707	1.155

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Badan Pusat Statistik (Hasil Susenas 2017) Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 22.A. Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Mata Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	13,49	18,02	0,39	0,00	65,65	2,45
2.	Kota Padang Panjang	29,59	12,43	0,00	0,05	53,45	4,48
3.	Kota Bukittinggi	15,75	12,33	0,00	0,37	71,55	0,00
4.	Kota Solok	28,93	2,08	0,00	0,00	68,98	0,01
5.	Kota Pariaman	3,54	43,21	0,00	0,41	52,83	0,00
6.	Kota Payakumbuh	43,67	11,44	0,00	0,00	44,73	0,15
7.	Kota Sawahlunto	19,60	8,18	0,80	0,88	56,85	13,69
8.	Kabupaten Dharmasraya	1,19	58,75	2,18	0,00	32,22	5,66
9.	Kabupaten Agam	10,03	30,35	0,57	4,34	30,64	24,07
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	6,03	27,35	3,76	0,79	45,49	16,59
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	9,09	34,40	0,00	1,32	35,90	19,29
12.	Kabupaten Pasaman	22,13	30,73	8,03	0,49	14,51	24,12
13.	Kabupaten Pasaman Barat	9,48	55,15	3,93	0,16	22,14	9,14
14.	Kabupaten Solok	19,67	26,73	2,98	1,34	23,56	25,73
15.	Kabupaten Sijunjung	8,66	23,12	11,34	1,64	40,30	14,94
16.	Kabupaten Padang Pariaman	7,75	43,78	2,62	4,65	28,92	12,27
17.	Kabupaten Solok Selatan	23,76	37,53	13,11	0,00	16,98	8,64
18.	Kabupaten Tanah Datar	12,75	28,42	0,23	0,17	28,13	30,31
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,00	14,21	5,34	23,63	16,79	40,03

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik (Hasil Susenas 2017) Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 22.B. Perbandingan Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2015-2017 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Sumber Air Minum	Jumlah Rumah Tangga (KK)		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Ledeng	11,72	20,82	12,72
2.	Sumur	33,41	46,41	30,16
3.	Sungai	1,70	2,90	2,66
4.	Hujan	1,71	1,81	1,55
5.	Kemasan	34,49	6,17	38,69
6.	Mata Air	16,76	20,36	14,23
7.	Lainnya	0,22	1,53	0,00

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik (Hasil Susenas 2017) Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 23. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	216.629	180.787	21.283	2.902	11.657
2.	Kota Padang Panjang	12.251	10.236	1.716	232	67
3.	Kota Bukittinggi	30.688	24.680	5.608	401	0
4.	Kota Solok	87.167	74.091	8.113	2.732	2.231
5.	Kota Pariaman	18.583	16.811	1.106	448	218
6.	Kota Payakumbuh	31.518	28.556	2.299	663	0
7.	Kota Sawahlunto	15.163	12.969	570	668	956
8.	Kabupaten Dharmasraya	56.974	44.535	2.717	887	8.835
9.	Kabupaten Agam	117.686	91.872	7.566	7.384	10.865
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	105.394	71.663	3.339	1.274	29.117
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	94.395	57.194	9.524	5.294	22.384
12.	Kabupaten Pasaman	64.769	30.466	3.165	8.992	22.146
13.	Kabupaten Pasaman Barat	100.265	55.190	2.333	2.645	40.097
14.	Kabupaten Solok	16.117	8.639	1.326	1.699	4.453
15.	Kabupaten Sijunjung	54.569	32.612	4.129	992	16.836
16.	Kabupaten Padang Pariaman	93.388	65.892	2.707	2.801	21.988
17.	Kabupaten Solok Selatan	39.805	27.261	1.003	0	11.541
18.	Kabupaten Tanah Datar	87.583	64.651	7.326	11.320	4.286
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	21.153	12.679	1.448	1.141	5.885

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik (Hasil Susenas 2017) Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 23.A. Persentase Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				
			Sendiri	Bersama	Umum	Ada, Tidak Di gunakan	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	216.629	83,45	9,82	1,34	0,00	5,38
2.	Kota Padang Panjang	12.251	83,55	14,00	1,90	0,00	0,55
3.	Kota Bukittinggi	30.688	80,42	18,27	1,31	0,00	0,00
4.	Kota Solok	87.167	85,00	9,31	3,13	0,00	2,56
5.	Kota Pariaman	18.583	90,46	5,95	2,41	0,00	1,17
6.	Kota Payakumbuh	31.518	90,60	7,29	2,10	0,00	0,00
7.	Kota Sawahlunto	15.163	85,53	3,76	4,41	0,30	6,00
8.	Kabupaten Dharmasraya	56.974	78,17	4,77	1,56	0,42	15,09
9.	Kabupaten Agam	117.686	78,07	6,43	6,27	0,45	8,78
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	105.394	68,00	3,17	1,21	0,00	27,63
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	94.395	60,59	10,09	5,61	0,06	23,65
12.	Kabupaten Pasaman	64.769	47,04	4,89	13,88	0,04	34,15
13.	Kabupaten Pasaman Barat	100.265	55,04	2,33	2,64	0,40	39,59
14.	Kabupaten Solok	16.117	53,60	8,23	10,54	0,35	27,28
15.	Kabupaten Sijunjung	54.569	59,76	7,57	1,82	0,15	30,70
16.	Kabupaten Padang Pariaman	93.388	70,56	2,90	3,00	0,41	23,13
17.	Kabupaten Solok Selatan	39.805	68,49	2,52	0,00	0,00	28,99
18.	Kabupaten Tanah Datar	87.583	73,82	8,36	12,93	0,15	4,74
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	21.153	59,94	6,84	5,39	0,00	27,82

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik (Hasil Susenas 2017) Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 23.B. Perbandingan Persentase Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2015				Tahun 2016					Tahun 2017				
		Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Sendiri	Bersama	Umum	Ada, Tidak Di gunakan	Tidak Ada	Sendiri	Bersama	Umum	Ada, Tidak Di gunakan	Tidak Ada
1.	Kota Padang	79,06	14,22	0,93	5,78	79,24	15,53	0,53	0,34	4,36	83,45	9,82	1,34	0,00	5,38
2.	Kota Padang Panjang	84,23	12,01	3,12	0,65	77,76	17,31	4,00	0,16	0,77	83,55	14,00	1,90	0,00	0,55
3.	Kota Bukittinggi	83,60	15,31	0,85	0,24	82,69	16,05	1,26	0,00	0,00	80,42	18,27	1,31	0,00	0,00
4.	Kota Solok	80,98	13,71	1,92	3,39	85,50	8,25	1,50	0,00	4,76	85,00	9,31	3,13	0,00	2,56
5.	Kota Pariaman	85,55	6,56	1,51	6,38	82,66	10,03	3,46	0,00	3,85	90,46	5,95	2,41	0,00	1,17
6.	Kota Payakumbuh	85,20	8,51	1,44	4,85	82,92	11,67	4,85	0,22	0,34	90,60	7,29	2,10	0,00	0,00
7.	Kota Sawahlunto	88,93	5,09	1,15	4,83	83,27	7,37	1,63	0,53	7,20	85,53	3,76	4,41	0,30	6,00
8.	Kabupaten Dharmasraya	75,89	7,31	0,51	16,28	76,21	5,66	0,57	0,00	17,57	78,17	4,77	1,56	0,42	15,09
9.	Kabupaten Agam	70,11	9,04	5,36	15,49	75,85	6,50	7,21	0,18	10,26	78,07	6,43	6,27	0,45	8,78
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	59,05	4,34	0,68	35,94	60,46	3,85	0,51	1,00	34,18	68,00	3,17	1,21	0,00	27,63
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	60,02	10,35	3,20	26,42	51,38	15,96	2,87	0,45	29,35	60,59	10,09	5,61	0,06	23,65
12.	Kabupaten Pasaman	32,42	5,43	9,84	52,32	36,08	2,00	8,59	0,55	52,78	47,04	4,89	13,88	0,04	34,15
13.	Kabupaten Pasaman Barat	57,30	4,51	2,25	35,94	53,38	5,19	1,41	0,49	39,53	55,04	2,33	2,64	0,40	39,59
14.	Kabupaten Solok	43,68	11,05	2,85	42,42	47,56	4,68	4,70	0,13	42,93	53,60	8,23	10,54	0,35	27,28
15.	Kabupaten Sijunjung	55,12	6,42	0,00	38,47	56,05	4,59	2,12	0,75	36,49	59,76	7,57	1,82	0,15	30,70
16.	Kabupaten Padang Pariaman	66,13	5,56	1,27	27,04	69,61	3,43	1,40	0,88	24,68	70,56	2,90	3,00	0,41	23,13
17.	Kabupaten Solok Selatan	57,23	2,19	0,75	39,83	58,67	4,55	1,32	0,99	34,48	68,49	2,52	0,00	0,00	28,99
18.	Kabupaten Tanah Datar	65,44	7,66	4,38	22,52	63,82	63,82	63,82	63,82	63,82	73,82	8,36	12,93	0,15	4,74
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	43,32	6,01	5,78	44,88	58,27	4,57	5,33	0,13	31,70	59,94	6,84	5,39	0,00	27,82

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik (Hasil Susenas 2017) Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 24. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Kota Padang	84.560	78.091	108.261	112.679	69.999	74.227	107.029	114.727	28.730	29.048	30.488	30.611	3.343	2.677	240	157
2.	Kota Padang Panjang	4.047	3.768	7.977	7.476	4.167	3.692	9.418	8.431	769	1.807	1.947	2.591	225	219	18	10
3.	Kota Bukittinggi	8.248	7.914	6.626	6.383	8.282	7.392	13.631	15.919	1.971	3.768	4.012	5.259	425	401	21	20
4.	Kota Solok	398	562	3.063	2.677	795	1.264	6.210	4.792	56	135	463	607	3	1	0	0
5.	Kota Pariaman	10.098	9.282	7.011	7.416	7.448	6.422	11.869	10.581	804	1.903	2.320	3.166	195	145	6	4
6.	Kota Payakumbuh	12.652	11.834	17849	17222	9.500	9.072	19.832	18.555	1.330	2.590	3.741	5.051	271	233	11	8
7.	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	37.889	36.353	25.353	25.757	18.563	16.542	18.819	15.896	1.154	2.552	2.617	3.384	165	102	5	2
9.	Kabupaten Agam	-	-	29.720	26.405	8.220	7.473	7.591	9.236	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	53.801	54.774	63.509	62.275	49.256	42.371	57.436	51.635	2.741	5.576	3.811	6.045	352	218	10	12
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	24.959	22.137	8.293	8.652	4.219	5.152	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kabupaten Pasaman	42.813	40.801	74.892	73.341	23.289	22.025	23.642	21.450	1.620	3.632	3.866	5.453	235	146	18	10
13.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kabupaten Solok	-	-	369.220	363.768	207.812	199.132	279.696	276.374	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kabupaten Sijunjung	87.627	87.317	15.529	15.529	5.901	5.901	4.244	4.244	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kabupaten Solok Selatan	2.723	2.771	12.241	10.797	3.533	5.110	7.103	5.698	16	30	196	289	-	-	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	36.173	34.203	44.951	44.554	30.229	28.408	32.829	33.958	1.627	2.838	5.117	7.471	367	341	30	27
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.663	4.087	3.121	3.109	2.008	1.778	2.108	1.566	194	318	335	316	0	0	0	0

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 24.A. Persentase Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Kota Padang	3,36	3,58	15,18	12,77	14,44	13,83	37,36	35,29	3,32	4,91	8,55	10,98	1,03	1,37	0,14	0,05
2.	Kota Padang Panjang	2,62	4,13	17,54	14,80	9,16	15,81	37,64	28,75	2,79	6,16	7,54	11,92	1,59	1,07	0,00	0,00
3.	Kota Bukittinggi	5,73	4,18	17,18	17,69	11,21	14,64	38,67	28,48	2,95	5,39	7,74	10,09	1,02	1,32	0,00	0,00
4.	Kota Solok	2,52	3,56	18,42	16,10	8,12	12,92	34,68	26,76	2,13	5,12	8,96	11,73	0,76	0,16	0,00	0,00
5.	Kota Pariaman	3,32	3,42	19,87	19,29	13,10	19,24	35,34	24,02	1,66	3,66	5,39	9,12	0,72	0,75	0,00	0,00
6.	Kota Payakumbuh	4,69	3,95	20,49	19,45	7,93	15,84	31,41	23,91	2,52	3,89	7,47	10,77	0,80	0,16	0,12	0,00
7.	Kota Sawahlunto	4,19	3,46	25,67	24,86	7,17	13,76	35,98	23,62	2,36	3,90	5,37	8,79	0,26	0,36	0,00	0,00
8.	Kabupaten Dharmasraya	6,45	5,10	29,25	29,63	11,81	16,00	22,88	16,01	1,21	1,31	4,55	4,93	0,16	0,17	0,00	0,00
9.	Kabupaten Agam	5,25	5,19	24,45	20,98	11,84	15,50	20,99	19,17	0,97	2,98	3,78	5,53	0,33	0,20	0,00	0,00
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	4,95	4,69	24,47	21,51	13,93	15,39	21,84	19,53	0,67	1,37	4,28	5,57	0,08	0,08	0,00	0,00
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	5,49	6,61	25,45	22,71	14,90	12,74	17,11	19,51	1,23	1,31	2,29	3,58	0,15	0,07	0,00	0,00
12.	Kabupaten Pasaman	5,33	7,72	28,96	27,28	10,28	13,17	17,98	13,10	0,82	2,15	2,54	3,25	0,19	0,10	0,00	0,00
13.	Kabupaten Pasaman Barat	6,52	5,96	28,54	23,68	12,13	14,22	20,71	19,09	0,86	1,23	2,58	3,42	0,00	0,15	0,00	0,00
14.	Kabupaten Solok	5,86	4,54	25,59	23,41	12,27	14,30	15,49	14,23	0,67	2,24	3,25	4,51	0,09	0,32	0,00	0,00
15.	Kabupaten Sijunjung	7,79	7,11	24,13	24,85	9,96	12,61	21,21	16,68	0,93	2,27	2,54	3,67	0,05	0,00	0,00	0,00
16.	Kabupaten Padang Pariaman	6,86	9,26	21,35	19,78	14,30	13,78	19,02	19,19	0,80	1,08	1,99	3,48	0,11	0,00	0,00	0,00
17.	Kabupaten Solok Selatan	4,01	4,08	24,84	21,91	11,92	17,24	22,65	18,17	0,55	1,04	3,75	5,53	0,15	0,00	0,00	0,00
18.	Kabupaten Tanah Datar	5,20	4,71	26,69	23,64	11,66	13,98	19,84	22,45	1,31	2,22	3,70	4,22	0,04	0,44	0,00	0,00
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4,36	5,20	25,09	23,04	6,92	11,34	21,36	11,57	0,47	1,37	3,08	1,72	0,24	0,19	0,00	0,00

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 24.B. Persentase Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk Kategori Pendidikan Dasar - Menengah (jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Kota Padang	66,98	61,89
2.	Kota Padang Panjang	64,34	59,37
3.	Kota Bukittinggi	67,07	60,80
4.	Kota Solok	61,22	55,79
5.	Kota Pariaman	68,31	62,55
6.	Kota Payakumbuh	59,84	59,20
7.	Kota Sawahlunto	68,82	62,24
8.	Kabupaten Dharmasraya	63,94	61,64
9.	Kabupaten Agam	57,27	55,65
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	60,24	56,43
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	57,47	54,96
12.	Kabupaten Pasaman	57,22	53,56
13.	Kabupaten Pasaman Barat	61,38	56,99
14.	Kabupaten Solok	53,36	51,94
15.	Kabupaten Sijunjung	55,30	54,14
16.	Kabupaten Padang Pariaman	54,68	52,75
17.	Kabupaten Solok Selatan	59,41	57,32
18.	Kabupaten Tanah Datar	58,18	60,07
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	53,36	45,95

Keterangan : Kategori pendidikan dasar-menengah adalah SD, SLTP dan SLTA

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 24.C. Persentase Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Kab/Kota	Persentase Jumlah Penduduk Kategori Pendidikan Tinggi (jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Kota Padang	13,04	17,31
2.	Kota Padang Panjang	11,92	19,15
3.	Kota Bukittinggi	11,71	16,80
4.	Kota Solok	11,85	17,01
5.	Kota Pariaman	7,77	13,53
6.	Kota Payakumbuh	10,91	14,82
7.	Kota Sawahlunto	7,98	13,05
8.	Kabupaten Dharmasraya	5,91	6,42
9.	Kabupaten Agam	5,08	8,70
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	5,03	7,02
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,67	4,97
12.	Kabupaten Pasaman	3,56	5,50
13.	Kabupaten Pasaman Barat	3,44	4,80
14.	Kabupaten Solok	4,00	7,07
15.	Kabupaten Sijunjung	3,52	5,94
16.	Kabupaten Padang Pariaman	2,90	4,56
17.	Kabupaten Solok Selatan	4,46	6,57
18.	Kabupaten Tanah Datar	5,04	6,88
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,79	3,28

Keterangan : Kategori pendidikan tinggi adalah Diploma, S1, S2 dan S3

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 25. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)
1.	ISPA	438.610
2.	Gastritis	204.024
3.	Rematik	127.101
4.	Hipertensi	161.545
5.	Diare	49.114
6.	Penyakit Kulit Alergi	89.597
7.	Commond Cold	70.073
8.	Penyakit Kulit Infeksi	25.975
9.	Asma	438.610

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 25.A. Perbandingan Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita (jiwa)		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	ISPA	749.985	438.610	438.610
2.	Diare	78.176	89.392	49.114
3.	Kulit	189.506	54.442	89.597
4.	Gastritis	177.286	198.731	204.024
5.	Rheumatik	164.065	151.243	127.101
6.	Hipertensi	136.204	140.930	161.545

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 26. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	212.510	90.714
2.	Kota Padang Panjang	14.985	3.438
3.	Kota Bukittinggi	30.688	3.881
4.	Kota Solok	16.117	2.256
5.	Kota Pariaman	18.583	4.514
6.	Kota Payakumbuh	94.151	26.806
7.	Kota Sawahlunto	15.163	1.582
8.	Kabupaten Dharmasraya	204.848	79.383
9.	Kabupaten Agam	117.686	37.550
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	105.394	5.393
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	94.395	26.806
12.	Kabupaten Pasaman	64.769	25.504
13.	Kabupaten Pasaman Barat	100.265	40.038
14.	Kabupaten Solok	87.167	30.046
15.	Kabupaten Sijunjung	53.461	11.561
16.	Kabupaten Padang Pariaman	93.388	28.495
17.	Kabupaten Solok Selatan	39.805	14.220
18.	Kabupaten Tanah Datar	87.583	19.982
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	9.273	4.636

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 26.A. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2015-2017 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Miskin		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Padang	27.861	43.104	90.714
2.	Kota Padang Panjang	394	2.093	3.438
3.	Kota Bukittinggi	3.052	3.881	3.881
4.	Kota Solok	2.496	2.454	2.256
5.	Kota Pariaman	1.121	3.312	4.514
6.	Kota Payakumbuh	2.167	6.431	26.806
7.	Kota Sawahlunto	1.114	1.582	1.582
8.	Kabupaten Dharmasraya	10.421	7.046	79.383
9.	Kabupaten Agam	839	21.452	37.550
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	30.625	38.010	5.393
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	12.937	32.148	26.806
12.	Kabupaten Pasaman	1.427	25.504	25.504
13.	Kabupaten Pasaman Barat	13.966	40.038	40.038
14.	Kabupaten Solok	8.709	30.046	30.046
15.	Kabupaten Sijunjung	9.106	12.015	11.561
16.	Kabupaten Padang Pariaman	6.123	28.495	28.495
17.	Kabupaten Solok Selatan	8.709	9.334	14.220
18.	Kabupaten Tanah Datar	18.634	19.982	19.982
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	10.303	8.035	4.636

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 26.B. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (000)	Jumlah Penduduk Miskin
1.	Kota Padang	927,01	43,79
2.	Kota Padang Panjang	52,42	3,22
3.	Kota Bukittinggi	126,80	6,75
4.	Kota solok	68,60	2,50
5.	Kota Pariaman	86,62	4,49
6.	Kota Payakumbuh	131,82	7,72
7.	Kota Sawahlunto	61,40	1,23
8.	Kabupaten Dharmasraya	235,48	15,63
9.	Kabupaten Agam	484,29	36,57
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	457,29	35,05
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	376,07	26,93
12.	Kabupaten Pasaman	275,73	20,38
13.	Kabupaten Pasaman Barat	427,30	31,58
14.	Kabupaten Solok	368,69	33,35
15.	Kabupaten Sijunjung	230,10	16,56
16.	Kabupaten Padang Pariaman	411,00	34,72
17.	Kabupaten Solok Selatan	165,60	11,89
18.	Kabupaten Tanah Datar	346,58	19,27
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	88,69	12,95

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 27. Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah Cair (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Cair (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Bergerak	-	-	-	-	-	-
1.	Terminal Benteng Lubuk Sikaping	Terminal tipe C	0,951	4,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Pasaman	-	0,135	4,00	0,00	0,00	0,00
3.	Terminal Sago Kab. Pesisir Selatan	Terminal Tipe B	7,50	0,09	-	-	-
4.	Terminal Piliang Kab. Tanah Datar	Type B	9.963,00	0,002	0,002	-	-
5.	Terminal Jati Kab. Tanah Datar	Type C	3.540,00	0,002	0,001	-	-
6.	Terminal Pasar Papan Kab. Tanah Datar	Type C	3.856,00	0,001	0,001	-	-
7.	Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang	Kelas B	2,1	1,5	7,5	0	0
	b. Tidak Bergerak	-	-	-	-	-	-
1.	RSUD Lubuk Sikaping	Rumah Sakit	1,15	96,50	49,70	13,00	0,50
2.	RSI Ibnu Sina Panti	Rumah Sakit	0,50	8,00	8,00	0,50	0,20
3.	Hotel Hamco Lubuk Sikaping	Hotel	0,08	0,09	8,00	0,00	0,00
4.	RSUD M. Zein Painan	Type C		0,235	30,21	0,09	0,01
5.	RS. Bersalin Permata Hati Kab. Pesisir Selatan	Type D		0,019	27,00	0,89	0,00
6.	RS. Bakti Kesehatan Masyarakat (BKM) Kab. Pesisir Selatan	Type D		0,016	23,00	0,06	0,01
7.	Rumah Sakit Achmad Mochtar Kota Bukittinggi	Type B	3,461	33.593	230.333	0,757	1.054
8.	Rumah Sakit Umum Madina Kota Bukittinggi	Type B	0,0917	0,206	3	0,070	0,005
9.	Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Bukittinggi	Type C Plus	1,1914	6	96	45	0,125
10.	Rumah Sakit Stroke Nasional Kota Bukittinggi	Type B Khusus	1,3	2.893	62,88	0,0277	0,125
11.	Rumah Makan Simpang Raya Kota Bukittinggi	Rumah Makan	0,0592	3	6,3	0	0



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	Laboratorium Kesehatan	0,0104		2	0,153	0,7259
13.	Novotel Kota Bukittinggi	Hotel Bintang 4	0,0646	0,590	295	-	-
14.	RSUD Pariaman	Rumah Sakit	-	2	78,50	0,87	6,67
15.	RSU Aisyiyah Kota Pariaman	Rumah Sakit	-	2	13,00	0,52	4,38
16.	RS TMC Kota Pariaman	Rumah Sakit	-	2	23,22	0,26	3,20
17.	Rumah Sakit Lubuk Basung	Type B		86.540	90.720	4.330	13.610
18.	RSIA Rizki Bunda	Type D		2.500	2.850	0,130	0,430
19.	Rumah Sakit Kab. Lima Puluh Kota	Type C	16.039	1	14,8	0,3	-
20.	PT. PN VI	Industri	3,256	-	27.941,83	910	300
21.	PT. PMS	Industri	8,3	12.235.360	16.087,77	157	110
22.	PT. GMP	Industri	3,6	-	-	286	304
23.	PT. AWL	Industri	20	-	70,2	-	-
24.	PT. SBS	Industri	20,1	-	230	-	300
25.	PT. BSS	Industri	40,67	-	29.957,5	-	-
26.	PT. USM	Industri	199	-	256.843,14	286,15	-
27.	PT. Agrowiratama	Industri	7,99	-	-	-	1,968
28.	PT. BPP	Industri	9,72	1.021,87	50.640,74	779	652
29.	PT. AAI	Industri	30	-	165,33	1,118	480
30.	PT. Sawita Pasaman Jaya	Industri	12	13,855	27.222	-	-
31.	PT. PAN	Industri	2.020,25	-	-	900	2,04
32.	PT. Kemilau Permata Sawit	Industri	29,5	-	59.617	-	0,218
33.	RSUD Sijunjung	Kesehatan	-	-	-	0,018	-
34.	RSUD dr. Rasidin Kota Padang	Type C		410	350	8,5	3
35.	RS. Yarsi Kota Padang	Type B		380	360	7,6	4
36.	RSU. BMC Padang	Type B		490	420	7	3,5
37.	RS. Aisyiyah-Muhammadiyah Kota Padang	Type B		90	120	1	0,6
38.	RSB. An-Nisa Kota Padang	Type C		220	310	4	2,4
39.	RS. Selaguri Kota Padang	Type C		150	200	1,3	1
40.	RS. Semen Padang	Type C		300	550	4,6	2
41.	RS Siti Hawa Kota Padang	Type B		100	180	2	0,9



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42.	RS. Tk. III Dr. Reksodiwiryo Kota Padang	Type B		680	590	11,6	11
43.	RSU. M. Djamil	Type A		1.000,00	800	20,4	20
44.	RSB. Bunda Kota Padang	Type C		280	330	3,4	2
45.	RS. Yos Sudarso Padang	Type B		450	400	6,5	3
46.	RS Ibnu Sina	Tipe D	1,05	0,06	10	0,04	tad
47.	RSUD Padang Panjang	Tipe C	6	3	133	0,4	tad
48.	Tempat Wisata Minang Fantasy Kota Padang Panjang	Water Park	10,9457	3	13	0	0
49.	Taman Wisata Alam Rimbo Panti Kab. Pasaman	Tempat Wisata Alam	570	12.132,00	0	0	0
50.	RSUD Lubuk Sikaping	Rumah Sakit	1,15	94,5	47,8	14	0,5
51.	RSI Ibnu Sina Panti Kab. Pasaman	Rumah Sakit	0,5	8	7	0,5	0,2
52.	RSUD M. Zein Painan	Rumah Sakit Tipe C	-	0,235	30,21	0,09	0,006
53.	RS. Bersalin Permata Hati Kab. Pesisir Selatan	Rumah Sakit Tipe D	-	0,019	27	0,89	0,003
54.	RS. Bakti Kesehatan Masyarakat (BKM) Kab. Pesisir Selatan	Rumah Sakit Tipe D	-	0,016	23	0,057	0,005

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota, 2016

**Tabel 27.A. Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat****Tahun : 2017**

No.	Sumber Pencemaran	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah Cair (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Cair (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Bergerak					
1.	Terminal	17.369,551	5,595	7,504	-	-
2.	Dermaga	0,55	0,56	3,00	-	-
	b. Tidak Bergerak					
1.	Industri	2.404,39	12.236.395,73	468.775,51	3.319,27	2.150,23
2.	Kesehatan	19.512,93	130.299,81	329.220,32	4.486,35	14.733,76

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota, 2017



**Tabel – 28. Suhu Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No.	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Sta. Klimatologi Padang Pariaman	25,4	25,9	25,8	25,6	26,3	25,7	25,4	25,4	25,3	26,1	24,3	25,3
2.	Sta Meteorologi BIM	26,4	26,5	26,7	26,7	27,3	26,9	26,3	26,2	26,1	26,6	26,1	26,1
3.	Sta. Geofisika Padang Panjang	21,8	20,1	22,3	22,0	22,8	22,5	21,9	22,0	22,2	22,2	21,7	21,8
4.	Sta. Maritim Teluk Bayur	26,8	27,0	27,1	27,2	27,7	27,5	26,9	26,5	26,6	27,6	27,0	27,2
5.	Sta. Gaw Bukit Kototabang	21,4	21,6	22,2	22,1	22,9	22,1	21,7	21,9	21,8	22,4	21,7	22,0
6.	Balitbu Arian Sumani	24,5	23,7	25,0	24,8	25,5	23,9	25,0	24,8	24,0	25,4	25,0	24,3

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin , 2017

**Tabel - 28.A. Perbandingan Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2015 s/d 2017 Tahun : 2017**

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-rata Bulanan		
		2015	2016	2017
1.	Sicincin	25,68	25,87	25,54
2.	Padang BIM	26,44	26,83	26,49
3.	Padang Panjang	24,47	22,32	21,94
4.	Gaw Bukit Tinggi	23,33	22,41	21,98
5.	Teluk Bayur	27,50	27,63	27,09

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin, 2017

Tabel – 29. Kualitas Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO4	NO3	Cr	NH4	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Januari	5,25	4,20	0,405	0,178	-	0,052	0,181	0,187	0,053
Februari	5,37	4,00	0,428	0,148	-	0,159	0,097	0,176	0,030
Maret	5,40	3,90	0,539	0,251	-	0,057	0,054	0,238	0,019
April	5,01	3,40	0,370	0,437	-	0,060	0,067	0,077	0,018
Mei	5,12	10,40	0,496	0,169	-	0,076	0,079	0,198	0,043
Juni	4,70	7,20	0,760	0,485	-	0,374	0,073	0,269	0,028
Juli	4,69	5,50	0,536	0,282	-	0,259	0,063	0,187	0,022
Agustus	5,75	7,30	0,467	0,255	-	0,229	0,132	0,921	0,042
September	5,81	3,70	0,385	0,211	-	0,130	0,039	0,707	0,008
Oktober	5,32	3,30	0,340	0,062	-	0,023	0,044	0,471	0,009
November	6,06	4,70	0,317	0,440	-	0,063	0,045	1,448	0,012
Desember	5,22	8,52	0,28	0,27	-	1,04	0,45	0,19	0,09

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : BMKG Stasiun Pemantauan Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, 2017



**Tabel 29.A. Kimia Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

Tahun	Bulan	K	Clorida (Cl)	Kesadahan Total (KT)	Acidity (AC)	Alkalinity (AL)
(1)	(2)	(8)	(11)	(14)	(15)	(16)
2017	Januari	0.091	0.313	0.240	25.72	0.00
2017	Pebruari	0.258	0.217	0.206	14.01	0.00
2017	Maret	0.051	0.069	0.257	21.87	0.00
2017	April	0.041	0.041	0.095	19.78	0.00
2017	Mei	0.110	1.089	0.240	47.98	0.00
2017	Juni	0.076	0.262	0.297	0.00	0.00
2017	Juli	0.101	0.273	0.208	39.88	0.00
2017	Agustus	0.097	0.848	0.963	0.00	0.00
2017	September	0.039	0.218	0.715	0.00	0.00
2017	Oktober	0.029	0.074	0.480	0.00	0.00
2017	Nopember	0.039	0.062	1.459	0.00	0.00
2017	Desember	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Keterangan : -

Sumber : BMKG Stasiun Pemantauan Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, 2017



**Tabel – 30. Kualitas Udara Ambien di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

Lokasi	Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM 10 (µg/Nm ³)	PM 2,5 (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm ³)	Fluor Index (µg/Nm ³)	Klorine dan Klorine Dioksida (µg/Nm ³)	Sulphat Index (µg/Nm ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Halaman Mesjid Al-Hikmah Bundaran Simpang III Lubuk Basung	24 jam	7,91	1.543	5,18	0,69	-	6.264	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
Lapangan Kantin Bukittinggi	24 jam	4,00	7,29	7,00	4,00	-	59,59	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
Taman Kota Solok	24 jam	3,00	777	6,39	2,00	-	74,50	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
Depan Pasar Muaro Labuah	24 jam	3,84	750	2,5	1,44	-	127,3	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
Halaman Kantor PSDA-PU Kabupaten Pesisir Selatan	24 jam	5,97	177,23	4,17	0,03	-	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Lapangan Cindua Mato Batusangkar	24 jam	4,67	670	4,17	0,62	-	121,7	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
SPBU Pitameh Lubuk Begalung	24 jam	4,33	777	5,8	2,37	-	62,16	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
Jalan Raya Ulu Gadut Depan Kantor KAN	24 jam	4,03	670	3,48	1,505	-	106,29	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
Lapangan Siteba Kota Padang	24 jam	4,38	670	9,76	1,21	-	54,61	-	-	0,008	-	-	-	-	-
Depan Kantor DLH Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	24 jam	3,71	670	0,83	1,29	-	63,89	-	-	<0,002	-	-	-	-	-
GOR Khatib Suliman Kota Padang Panjang	24 jam	3,88	729	11,6	7,13	-	78,72	-	-	<0,002	-	-	-	-	-



Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Depan Terminal Sumani Kabupaten Solok	24 jam	4,36	830	3,48	1,94	-	65,57	-	-	<0,002					
Lapangan Bola Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	24 jam	4,37	723	7,18	2,85	-	58,83	-	-	0,01					
Depan Terminal Jati Kota Pariaman	24 jam	3,93	670	3,83	1,86	-	45,58	-	-	<0,002					
Depan Kantor PT. Bukit Asam Kota Sawahlunto	24 jam	7,16	1167	8,06	2,98	-	41,38	-	-	<0,002					
Depan Rumah Sakit Sijunjung -Tanah Badantuang Kabupaten Sijunjung	24 jam	4,48	2243	9,7	1,14	-	83,61	-	-	<0,002					

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 30.A. Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 2011-2017
Tahun : 2017

No	Tahun	IKU
1.	2017	89,97
2.	2016	83,90
3.	2015	88,48
4.	2014	89,16
5.	2013	86,41
6.	2012	86,02
7.	2011	91,05

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 31. Penggunaan Bahan Bakar di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri											
1.	Kimia dasar	-	20.000	-	-	864	-	-	-	-	117.560	-
2.	Mesin dan logam dasar	-	8.000	7.000	-	-	-	-	-	-	31.000	24.162
3.	Industri kecil	-	75.235	60.000	-	-	9.984	-	-	15.060	-	-
4.	Aneka Industri	-	21.800	222.370	-	34.471	62.034	-	-	30	186.000	487.996
B	Rumah Tangga	3.441.121	-	19.609.679	-	-	32407.174	5	42.008	-	-	-
C	Kendaraan											
1.	Mobil beban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Penumpang pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penumpang umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.816	12.488
4.	Bus besar pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.036	16.632
5.	Bus besar umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.889	33.333
6.	Bus kecil pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7.	Bus kecil umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
8.	Truk besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.963	31
9.	Truk kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	902
10.	Roda tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12.866
11.	Roda dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740	16.031

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017



Tabel - 31.A. Penggunaan Bahan Bakar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Klasifikasi Industri	LPG (Kg)	Minyak Bakar (Liter)	Minyak Diesel (Liter/Hari)	Solar (Liter/Hari)	Minyak Tanah (Liter)	Gas (MMSCF)	Batubara (Ton/Hari)	Biomassa (Ton/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota Padang									
1	Industri Karet								
	a. PT. Kilang Lima Gunung	-	-	-	-	-	-	-	8
	b. PT. Teluk Luas	-	-	800	24.000	-	-	-	14
	c. PT. Lembah Karet	-	-	-	2.200	-	-	-	-
	d. PT. Family Raya	-	-	-	170	-	-	-	8
	e. PT. Batang Hari Barisan	-	-	-	1.800	-	-	-	-
2	Industri logam mesin dan elektronik				24.162				
3	Industri aneka	48.925	-	-	-	2.815	-	1	-
Kota Padang Panjang									
1.	Industri pangan	13.109	0	0	23.329	82.555	0	0	0
2.	Industri sandang	0	0	0	17.497	0	0	0	0
3.	Industri kimia dan bahan bangunan	0	0	0	0	0	0	864	0
4.	Industri logam dan elektronika	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Industri kerajinan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Bukittinggi									
1.	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan Daging Unggas	270	0	0	0	0	0	0	0
2.	Industri Tahu Kedelai	0	0	0	0	0	0	0	210
3.	Industri makaroni, mie, spageti, bihun, so'un dan sejenisnya	540	0	0	0	0	0	0	0
4.	Industri Kue Basah	6.192	0	0	0	0	0	0	0



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Industri makanan dan kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe	2430	0	0	0	0	0	0	0
6.	Industri Kerupuk dan sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	14850
7.	Industri Pengolahan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	552	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Pasaman									
1.	Industri Asphalt Mixing Plant (AMP)	-	-	-	12.000	-	-	-	-
Kab. Pasaman Barat									
1.	PT. Anam Koto	-	-	-	60.000	-	-	-	-
2.	PT. Bintara Tani Nusantara	-	-	-	100.000	-	-	-	-
3.	PT. Pasaman Marama Sejahtera	-	-	-	150.000	-	-	-	-
4.	PT. Sawita Pasaman Jaya	-	-	-	20.000	-	-	-	-
5.	PT. Sari Buah sawit	-	-	-	27.000	-	-	-	-
6.	PT. Berkat Sawit Sejahtera	-	-	-	20.000	-	-	-	-
7.	PT. Andalas Agro Industri	-	-	-	30.000	-	-	-	-
Kab. Pesisir Selatan									
A	Industri :								
1.	Kimia Dasar	-	-	20.000		-	-	-	-
2.	Mesin dan Logam Dasar	-	-	8.000		7.000	-	-	-
3.	Industri Kecil	-	-	75.235		60.000	-	-	-
4.	Aneka Industri	34.470	-	21.000		137.000	-	-	-
B	Rumah Tangga :	7.802.280	-	-		2.828.832	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2017



Tabel – 32. Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mobil Beban	0	0	0	0
2.	Penumpang Pribadi	0	0	0	0
3.	Penumpang Umum	275	17	31	26
4.	Bus Besar Pribadi	12	4	13	5
5.	Bus Besar Umum	7	6	48	12
6.	Bus Kecil Pribadi	29	24	72	48
7.	Bus Kecil Umum	43	49	56	30
8.	Truk Besar	1.729	1.191	935	1.096
9.	Truk Kecil	243	193	267	141
10.	Roda Tiga	-	-	-	-
11.	Roda Dua	7.990	8.243	2.030	

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 32.A. Perbandingan Jumlah Angkutan Umum Berdasarkan Jenis Tahun 2014-2017

Tahun : 2017

No.	Jenis Angkutan Umum	Jumlah Angkutan Umum			
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	1.875	1.781	1.693	1.717
2	Angkutan Antar Kota Luar Provinsi (AKAP)	525	525	666	525

Keterangan : -

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 33. Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)		
		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jalan Tol	-	-	-
2.	Jalan Kelas I	-	-	-
3.	Jalan Kelas II	-	-	-
4.	Jalan Kelas IIIA	-	-	-
5.	Jalan Kelas IIIB	1.230,53	1.230,53	1.230,53
6.	Jalan Kelas IIIC	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 33.A. Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)
(1)	(2)	(3)
1.	Jalan Nasional	1.448,81
2.	Jalan Provinsi	1.017,10

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 34. Dokumen Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Amdal	Rencana Pembangunan Jalan Sepanjang 4.790 M dan Jembatan Sepanjang 685 m Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
2.	Amdal	Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Sikuai Island Resort (Luas 38,60 Ha) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	PT. Pusako Sikuai Wisata
3.	Amdal	Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat	PT. Biomass Andalan Energi
4.	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi di Jalan Mhd. Hadjrab - Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
5.	UKL-UPL	Kegiatan Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Sumedang di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Adendum Andal dan RKL-RPL	Rencana Penambahan Kegiatan Pendukung PLTU Teluk Sirih 2 x 112 MW di Jalan Lintas Sumatera Padang Painan KM 25 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkit Teluk Sirih
7.	DELH	Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir Air Dingin Kota Padang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
8.	DELH	Kegiatan Pembangunan Jembatan Lolong Sepanjang 252,10 M di Kelurahan Flamboyan Barat Kecamatan Padang Barat Kota Padang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
9.	DPLH	Kegiatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Nanggalo Seluas 1,9 Ha di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 34.A. Izin Lingkungan yang Diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No.	Dokumen	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Amdal Rencana Pembangunan Jalan Sepanjang 4.790 M dan Jembatan Sepanjang 685 m Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-395-2017 tanggal 23 Maret 2017
2.	Amdal Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Sikuai Island Resort (Luas 38,60 Ha) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-1038-2017 tanggal 18 Desember 2017
3.	Amdal Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-8-2017 tanggal 26 September 2017
4.	UKL-UPL Rencana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi di Jalan Mhd. Hadjrab - Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-4-2017 tanggal 28 April 2017
5.	UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Sumedang di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660/6-Periz/DPM&PTSP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017
6.	Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Penambahan Kegiatan Pendukung PLTU Teluk Sirih 2 x 112 MW di Jalan Lintas Sumatera Padang Painan KM 25 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-1004-2017 tanggal 6 Desember 2017
7.	DELH Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir Air Dingin Kota Padang	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-1006-2017 tanggal 7 Desember 2017
8.	DELH Kegiatan Pembangunan Jembatan Lolong Sepanjang 252,10 M di Kelurahan Flamboyan Barat Kecamatan Padang Barat Kota Padang	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-1036-2017 tanggal 18 Desember 2017
9.	DPLH Kegiatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Nanggalo Seluas 1,9 Ha di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-1005-2017 tanggal 7 Desember 2017

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 34.B. Dokumen Lingkungan (Amdal) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan (Parsial) Kabupaten/Kota yang Telah Selesai Proses Penilaiannya pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Dokumen	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Amdal Rencana Pembangunan Kampus II IAIN Batusangkar Seluas 11.558 Ha di Kabupaten Tanah Datar oleh Institut Agama Islam Negeri Batusangkar	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 4 Mei 2017
2	Addendum Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Sako-1 Kapasitas 2 x 3 Mw di Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Brantas Cakrawala Energi	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 28 Agustus 2017

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 34.C. Dokumen Lingkungan Dalam Proses Penilaian pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Jenis Dokumen	Usaha dan/atau Kegiatan	Progress Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DELH	Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Palembayan, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara (Kabupaten Agam) dan Kecamatan Kinali (Kabupaten Pasaman Barat) oleh PT. AMP Plantation	Telah selesai rapat penilaian DELH (perbaikan dokumen DELH oleh konsultan)

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 34.D. Dokumen Lingkungan Dalam Proses Penilaian pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Jenis Dokumen	Usaha dan/atau Kegiatan	Progress Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amdal	Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh PT. Putra Mahakarya Sentosa	Telah selesai rapat penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL (perbaikan dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL oleh konsultan)
2	Amdal	Mesjid Terapung Kota Pariaman di Kota Pariaman oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Telah selesai rapat pemeriksaan perbaikan KA (finalisasi dokumen KA oleh konsultan)
3	Amdal	Pengembangan Bandar Udara Rokot Sipora di Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot – Sipora	Telah selesai rapat pemeriksaan perbaikan KA (finalisasi dokumen KA oleh konsultan)
4	Amdal	Mesjid Terapung di Carocok Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Telah selesai rapat penilaian Kerangka Acuan (perbaikan dokumen Kerangka Acuan oleh konsultan)
5	Amdal	Rencana Pembangunan Kawasan By Pass (Sport Centre) dengan luas lahan ± 29 Ha oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Telah selesai rapat penilaian Kerangka Acuan (perbaikan dokumen Kerangka Acuan oleh konsultan)

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 35. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RSUD Kota Pariaman	Kesehatan	Penyimpanan	SK Walikota Pariaman No. 389/660/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 RSUD Pariaman
2	RSUD Dr.Achmad Mukhtar Kota Bukittinggi	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 04/B3/KLH-BKT/I-2015
3	RSI Ibnu Sina Padang	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 77 tahun 2015 tanggal 21 September 2015
4	RSU Madina Bukittinggi	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 02/B3/KLH-BKT/V-2013
5	RS Stroke Nasional Bukittinggi	Kesehatan	Penyimpanan	SK kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 03/B3/KLH-BKT/IX-2015
6	RS Yos Sudarso	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 42 tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015
7	RST Bukittinggi	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Badan PPT & PM No. 02/83/BP2TPM-PP/2016 tanggal 15 November 2017
8	RSUD Sijunjung	Kesehatan	Penyimpanan	SK Bupati Sijunjung No. 188.45/88/XIII/PTSP/BLHPMPT-2016 tanggal 9 Februari 2016
9	Pangeran Beach Hotel	Penginapan	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 73 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015
10	Hotel Rocky Bukittinggi	Penginapan	Penyimpanan	SK Kepala Kantor LH Bukittinggi No. 01/B3/KLH-BKT/IV-2015 tanggal 9 April 2015
11	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No. 379/KEP/BPP/2015 tanggal 28 Oktober 2015
12	PT. Batang Hari Barisan (PT.BHB)	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 38 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013
13	PT. Andalas Agro Industri (PT.AAI)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No.188.45/333/BUP-PASBAR/2015
14	PT. Perkebunan Pelalu Raya	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No : 330 tahun 2015, tanggal 1 oktober 2015
15	PT. Bakrie Pasaman Plantation	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/861/BUP-PASBAR/2013



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	PT. Transco Pratama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No 198.1/230/KPTS-BUP/2013
17	PT. Family Raya	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 48 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015
18	PT. AMP Plantation	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 344 Tahun 2015 Tanggal 13 Oktober 2015
19	PT. Kilang V Gunung	Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 276 Tahun 2013
		Industri	Penyimpanan	SK Bapedalda Kota Padang No 43 Tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015
20	PT. Bina Pratama Sakato Jaya SS	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No : 660.447-2015
21	PT. Bina Pratama Sakato Jaya KJ	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/313/KPTS-BUP/2014 tanggal 12 Desember 2014
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/451/KPTS-BUP/2013 tanggal 12 Desember 2013
22	PT. PN VI (Danau Kembar)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok No. 660.113-2013 tanggal 6 Mei 2013
23	PT. Usaha Inti Padang	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 201/KEP/BPP/2013
24	PT. Gersindo Minang Plantation	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No :188.45/383/BUP-PASBAR 2013 tgl 9 April 2013
25 26	Mutiara Agam/ Minang Agro PT. Pertamina DPPU BIM	Industri	Penyimpanan	SK Bupati agam No: 380 Tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014
		Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 257/KEP/BPP/2016
27	PT. Nusantara Beta Farma	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 104/Kep/Bup/2016
28	PT. Tidar Kerinci Agung (TKA)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/316/KPTS-BUP/2014 dan No. 660-5-2014
29 30	PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) PT. Coca Cola Botling Indonesia	Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No. 660-5-2014
		Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No. 660.1/68/Wasdal/KLH-2015
31	PT. Bintara Tani Nusantara	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/1265/BUP-PASBAR/2013
32	PT. Limbah Karet	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No.65 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015
		Industri	Penyimpanan LB3 Terpentin	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No.67 tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015
33	PT. Teluk Luas	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No : 44 tahun 2015



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	PT. Sumbar Andalas Kencana (Pessel)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pessel No.660/25/KLH/BPT-PS/2014
35	PT. Pasaman Marama Sejahtera	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No.188.45/575/BUP- PASBAR/2014 tanggal 30 Juni 2014
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No.188.45/351/BUP- PASBAR/2014 tanggal 3 April 2014
36 37	PT. PN VI (Pasaman Barat) PT. Agrowiratama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/781/BUP-PASBAR/2013 tanggal 23 Juli 2013
		Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No.188.45/130/BUP-Pasbar/2014
38	PT. Kencana Sawit Indonesia	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No. 660.450-2015
39	PT. Semen Padang	Industri	Pemanfaatan LB3	SK Kemen LH No 07.22.02 Tahun 2015
		Industri	Penyimpanan LB3	SK Kepala Bapedalda Padang No. 47 Tahun 2014
		Industri	Penyimpanan LB3 berupa Copper Slag	SK Kepala Bapedalda Padang No. 44 Tahun 2014
		Industri	Penyimpanan LB3 berupa Fly Ash	SK Kepala Bapedalda Padang No. 45 Tahun 2014
		Industri	Penyimpanan LB3 berupa DCC	SK Kepala Bapedalda Padang No. 40 Tahun 2014
40 41	PT. Sinamarinda Lintas Nusantara PT. Allied Indo Coal Jaya	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/450/KPTS-BUP/2013 tanggal 12 Desember 2013
		Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Kepala Kantor PTSP Kota Sawahlunto No. 188.47/01/KPTSPM-SWL/2016 tanggal Mei 2016
42	PT. PLN (Persero) PLTG Pauh Limo	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda kota Padang No. 82 tahun 2015 tanggal 21 September 2015
43	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Walikota Sawahlunto No : 182.2/246/WAKO-SWL/2013
44	PT. Berkat Sawit Sejahtera	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No.188.45/932/BUP- PASBAR/2015
45	PT. Incasi Raya Pangian Dharmasraya	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No : 189.1/.315/KPTS-BUP/2014



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 343 Tahun 2015 tanggal 18 Oktober 2015
47	PT. Bukit Raya Mudisa (BRM)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No : 189.1/300/KPTS-BUP/2015
48	PT. Incasi Raya Pesisir Selatan	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pesisir Selatan No. 660/24/Kpts/BPT-PS/2014
49	PT. PN VI (Solok Selatan)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Kab Solok Selatan No : 660.113 2013
50	PT. Kemilau Permata Sawit	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pesisir Selatan No.188.45/490/XIII/PTSP/BLHP MT- 2015
51	PT. PLN Unit PLTA Batang Agam	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK DLH Kab. Lima Puluh Kota No 08/BLHKP/2010 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010
52	PT. PLN Unit PLTA Singkarak	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 317/KEP/BPP/2015 Tanggal 7 September 2015
53	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Bupati Agam No. 343 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015
54	PT. Karya Agung Megah Utama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 266 Tanggal 30 Mei Tahun 2013
55	PT. Incasi Raya Edible Oils	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No 52 tahun 2014
56	PT. Primatama Muliajaya	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/127/BUP-Pasbar/2013
57	PT. Abaisiat Raya	Industri	Penyimpanan	SK N0 46 tahun 2015 masa berlaku : 25 Mei 2015-25 Mei 2020
58	PT. Usaha Sawit Mandiri	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No. 188.45/365/BUP-PASBAR/2016
59	PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No 188.45/265/BUP-PASBAR/2013
60	PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi-Sumbar	Industri	Penyimpanan	SK Bupati kab Solok Selatan No : 660.113 2013
61	PT. Bumi Sarimas Indonesia	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 104/KEP/BPP/2016
62	PT. Tirta Investama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok No : 440-208-2015 tanggal 10 April 2015
63	PT. Mitra Kerinci	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No. 660.317-2017 tanggal 19 Oktober 2017
64	PT. Selago Makmur Plantation (Pabrik)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No : 189.1/304/KPTS-BUP/2016

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 35.A. Perusahaan Pengumpul dan Pengangkut Limbah B3 Yang Melakukan Kerja Sama di Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	JenisIzin	Limbah B3	Perusahaan Yang Melakukan Kerjasama di Sumatera Barat
1.	PT. Shali Riau Lestari	Payung Sekaki, Pekanbaru	Pengumpul	Minyak pelumas bekas	PT. Kencana Sawit Indonesia
			Pengangkut	Aki bekas, solvent bekas, coolant bekas, sludge minyak, sisa bahan lainnya, bahan kimia kadaluarsa, logam terkontaminasi	PT. Usaha Inti Padang
					PT. Gersindo Minang Plantation
2.	PT. Prima Jaya	Manggalegok, Tangerang	Pengumpul	Oli bekas/ pelumas bekas Minyak kotor/ slop oil sludge oil ,aki bekas	PT. Agro Wiratama
			Pengangkut	IPAL Industry, lampuTL bekas, copper slag, tanah terkontaminasi	
3.	PT. Horas Miduk	Serang Baru, Bekasi	Pengumpul	Oli bekas, minyak kotor, oil sludge, slope oil, bottom residue, grease bekas, filter oil bekas	PT. Lembahkaret
					PT. Kilang lima Gunung
					PT. Family Raya
4.	PT. BioTekhnika		Pengangkut		

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 36. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PT. Padang Industrial Park	21-22 Feb 2017	50,00%
2.	PLTU. Teluk Sirih	21-22 Feb 2017	71,43%
3.	SUTT Payakumbuh	23-34 Feb 2017	37,50%
4.	PLTU Ombilin	10-11 Agust 2017	77,78%
5.	PLTD Mentawai	23-25 Agust 2017	25,00%
6.	PT. Supreme Energy	7-8 Nov 2017	100,00%
7.	Daerah Irigasi Tarusan	27-28 Feb 2017	75,00%
8.	SPAM Batang Karimolubuk Tarok	15-16 Maret 2017	33,33%
9.	TPA Regional	15-16 Mei 2017	33,33%
10.	CCBI	24-25 Juli 2017	100,00%
11.	Pusako Hotel	31 Juli s/d 1 Agust 2017	25,00%
12.	Novotel Hotel	21-22 Juni 2017	25,00%
13.	Fly Over Kelok Sembilan	19-20 Juli 2017	42,86%
14.	Trans Mentawai	23-25 Agust 2017	33,33%
15.	RSIA Fadillah	2-3 Nov 2017	37,50%
16.	RS. Paru	15-16 Des 2017	37,50%
17.	RSUD Arosuka	26-27 Nov 2017	44,44%
18.	RSUD Sawahlunto	6-7 Nov 2017	62,50%
19.	RSUD Mentawai	13-15 Nov 2017	22,22%
20.	RSAM Ahmad Muchtar	11-12 Juli 2017	66,67%
21.	RSUD Kota Solok	9-10 Nov 2017	55,56%
22.	RSUD Kota Pariaman	13 April 2017	87,50%
23.	RSUD M. Zein	31 Okt s/d 1 Nov 2017	66,67%
24.	PT. Andalas Wahana Berjaya	26-27 April 2017	37,50%
25.	RS Madina	13-14 Juli 2017	66,67%
26.	RSUD Adnaan WD	24-25 Oktober 2017	55,56%
27.	PT. STS	24-25 Juli 2017	25,00%

Keterangan : Realisasi berdasarkan pengawasan perizinan pengelolaan limbah cair, limbah B3, sampah dan dokumen lingkungan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 36.A. Hasil Pengawasan Objek PROPER di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Izin Lingkungan	PPA	PPU	PLB3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PT. Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
2.	PT. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
3.	PT. Kemilau Permata Sawit, Sijunjung	Taat	Taat	Taat	Taat
4.	PT. Incasi Raya Pangian POM, Dharmasraya	Taat	Taat	Taat	Taat
5.	PT Bina Pratama Sakato Jaya, Dharmasraya	Taat	Taat	Taat	Taat
6.	PT . Usaha Inti Padang	Taat	Taat	Taat	Taat
7.	PT. Tirta Investama Pabrik Solok	Taat	Taat	Taat	Taat
8.	PT. Tidar Kerinci Agung, Dharmasraya	Taat	Taat	Taat	Taat
9.	PT. Bakrie Pasaman Plantation, Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
10.	PT. Family Raya, Padang	Taat	Taat	Taat	Taat
11.	PT. PLN Maninjau, Agam	Taat	Taat	Taat	Taat
12.	PT. Kencana Sawit Indonesia, Solok Selatan	Taat	Taat	Taat	Taat
15.	PTPN VI Ophir, Pasaman Barat	Taat	Taat	Taat	Taat
16.	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, Padang Pariaman	Taat	Taat	Taat	Taat
17.	PT. Teluk Luas, Padang	Taat	Taat	Taat	Taat
18.	PT. Mutiara Agam, Agam	Taat	Taat	Taat	Taat
19.	PT. Nusantara Beta Farma, Padang Pariaman	Taat	Taat	Taat	Taat
20.	PT. Lembah Karet, Padang	Taat	Taat	Taat	Taat
23.	PT. AIC Jaya, Sawahlunto	Taat	Taat	Taat	Taat
24.	PT. Batanghari Barisan	Taat	Taat	Taat	Taat
26.	PT. AMP Plantation, Agam	Taat	Taat	Taat	Taat
28.	PT. Kilang Lima Gunung, Padang	Taat	Taat	Taat	Taat
29.	PT. Mitra Kerinci Solok Selatan	Taat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat
31.	PT. PLN Pembangkit Pauh Limo	Taat	Taat	Taat	Taat
32.	PT. Bara Mitra Kencana, Sawahlunto	Taat	Taat	Taat	Taat
34.	PTPN VI Unit Usaha Solok Selatan	Taat	Taat	Taat	Taat
40.	PT. Sinamarinda Lintas Nusantara	Tidak Taat	Taat	Taat	Tidak Taat

Keterangan : PPA = Pengendalian Pencemaran Air
 PPU = Pengendalian Pencemaran Udara
 PLB3 = Pengendalian Limbah B3
 PROPER = Program Penilaian Kinerja Lingkungan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 37. Bencana Banjir, Korban dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Padang	0	0	0	729.000.000
2.	Kota Padang Panjang	0	0	0	-
3.	Kota Bukittinggi	0	0	0	-
4.	Kota Solok	24	0	1530	1.482.757.875
5.	Kota Pariaman	0	0	0	-
6.	Kota Payakumbuh	3	0	0	-
7.	Kota Sawahlunto	0	0	0	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	42	0	2260	-
9.	Kabupaten Agam	119	0	0	-
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	300.000.000
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	166	0	0	520.000.000
12.	Kabupaten Pasaman	0	0	0	-
13.	Kabupaten Pasaman Barat	412	0	65	1.171.000.000
14.	Kabupaten Solok	24	0	4908	1.482.757.875
15.	Kabupaten Sijunjung	0	0	0	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	30	0	0	250.000.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	0	0	0	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	0	0	0	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	0	449	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 37.A. Perbandingan Peristiwa Banjir antara 2014 s/d 2017 di Sumatera Barat
Tahun : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)	Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)	Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)	Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Kota Padang	0	0	156	2.110.500.000	348	45.820.449.680	0	729.000
2	Kota Padang Panjang	6	-	-	-	0	0	0	-
3	Kota Bukittinggi	0	-	5,85	65.000.000	6	21.500.000	0	-
4	Kota Solok	6	1.980.000.000	457,07	-	-	1.300.000.000	0	-
5	Kota Pariaman	-	-	0	0	270	10.000.000	0	-
6	Kota Payakumbuh	-	-	34	49.500.000	141,25	901.070.000	3	-
7	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	0	0	-
8	Kabupaten Dharmasraya	30	500.000.000	2	900.000	115	1.400.000.000	42	-
9	Kabupaten Agam	9	490.000.000	6	.733.000.000	-	180.000.000	119	-
10	Kabupaten Pesisir Selatan	-	2.081.000.000	3.369	-	118	646.500.00	0	300.000.000
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	187,5	18.025.000	-	-	1.626	79.645.000.000	166	520.000.000
12	Kabupaten Pasaman	20	-	415	415.000.000	847	32.521.234.000	0	-
13	Kabupaten Solok	16	203.350.000	-	-	0	0	24	1.482.757.875
14	Kabupaten Pasaman Barat	9,75	5.368.650.000	22	559.000	5	3.885.650.000	412	1.171.000.000
15	Kabupaten Sijunjung	10	438.700.000	40	1.062.350.000	238,5	901.000.000	0	-
16	Kabupaten Padang Pariaman	42,5	4.285.000.000	34,56	210.000.000	-	30.000.000	30	250.000.000
17	Kabupaten Solok Selatan	-	1.000.000.000	-	-	2.295	103.000.000.000	0	-
18	Kabupaten Tanah datar	-	-	-	-	-	-	0	-
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	98.947,80	-	-	-	-	-	0	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 38. Bencana Kekeringan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No	Kabupaten/Kota	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	-	-
2.	Kota Padang Panjang	-	-
3.	Kota Bukittinggi	-	-
4.	Kota Solok	-	-
5.	Kota Pariaman	-	-
6.	Kota Payakumbuh	-	-
7.	Kota Sawahlunto	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	35	-
9.	Kabupaten Agam	-	-
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-
12.	Kabupaten Pasaman	-	-
13.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-
14.	Kabupaten Solok	-	-
15.	Kabupaten Sijunjung	-	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-

Keterangan : Tidak terjadi bencana kekeringan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 39. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat****Tahun : 2017**

No	Kabupaten/Kota	Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	-	-
2.	Kota Padang Panjang	-	-
3.	Kota Bukittinggi	-	-
4.	Kota Solok	-	-
5.	Kota Pariaman	-	-
6.	Kota Payakumbuh	-	-
7.	Kota Sawahlunto	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	-	-
9.	Kabupaten Agam	-	-
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-
12.	Kabupaten Pasaman	-	-
13.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-
14.	Kabupaten Solok	-	-
15.	Kabupaten Sijunjung	-	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	2	10.000.000
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada kebakaran hutan dan kerugian

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 39.A. Jumlah Hotspot Pada Kejadian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Padang	0
2.	Kota Padang Panjang	0
3.	Kota Bukittinggi	0
4.	Kota Solok	0
5.	Kota Pariaman	0
6.	Kota Payakumbuh	0
7.	Kota Sawahlunto	0
8.	Kabupaten Dharmasraya	9
9.	Kabupaten Agam	0
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	14
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	10
12.	Kabupaten Pasaman	3
13.	Kabupaten Pasaman Barat	1
14.	Kabupaten Solok	1
15.	Kabupaten Sijunjung	5
16.	Kabupaten Padang Pariaman	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	6
18.	Kabupaten Tanah Datar	0
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1

Keterangan : -

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 40. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (Jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Padang	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
2.	Kota Padang Panjang	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
3.	Kota Bukittinggi	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	72.500.000
4.	Kota Solok	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
5.	Kota Pariaman	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
6.	Kota Payakumbuh	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
7.	Kota Sawahlunto	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
9.	Kabupaten Agam	Tanah Longsor dan gempa bumi	2	-
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
12.	Kabupaten Pasaman	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
13.	Kabupaten Pasaman Barat	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	100.000.000
14.	Kabupaten Solok	Tanah Longsor dan gempa bumi	1	120.500.000
15.	Kabupaten Sijunjung	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	250.000.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	167.000.000
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tanah Longsor dan gempa bumi	-	-

Keterangan : (-) Tidak terjadi bencana alam, tanah longsor dan gempa bumi

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel - 40.A. Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

1. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Provinsi Sumatera Barat

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Sangat Rendah	832.800,00	796.485,50	26.480,00	538,50	9.296,00
2.	Rendah	1.017.000,00	996.355,10	14.070,00	37,90	6.537,00
3.	Menengah	1.291.000,00	1.282.689,69	4.933,00	4,31	3.373,00
4.	Tinggi	460.700,00	457.351,18	2.126,00	1,82	1.221,00

2. Kawasan Yang Terletak Pada Zona Patahan

No	Segmen	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Segmen Sumpur	66.570,00	66.178,90	248,70	-	142,40
2.	Segmen Sianok	102.000,00	96.646,60	4.499,00	-	854,40
3.	Segmen Sumani	117.500,00	103.921,00	2.459,00	-	11.120,00
4.	Segmen Suliti	228.700,00	225.237,00	1.013,00	-	2.450,00

3. Kawasan Rawan Tsunami

No	Zona Kerawanan	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Zona Kerawanan Tinggi	53.410,00	49.416,00	2.607,00	-	1.387,00
2.	Zona Kerawan Menengah	56.530,00	53.092,20	2.895,00	-	542,80
3.	Zona Kerawanan Rendah	75.390,00	72.026,50	2.805,00	-	558,50

4. Kawasan Rawan Gempa Bumi

No	Zona Kerawanan	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Zona Kerawanan Tinggi	1.558.000,00	1.511.040,00	19.810,00	-	27.150,00
2.	Zona Kerawan Menengah	2.331.000,00	2.293.288,70	25.720,00	571,3	11.420,00
3.	Zona Kerawanan Rendah	362.300,00	357.242,00	1.906,00	-	3.152,00

Keterangan : -

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel - 40.B. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Kawasan	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Gunung Marapi					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.440,00	23.260,77	176,00	-	3,23
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.637,00	6.637,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	9.820,00	9.820,00	-	-	-
II.	Gunung Tandikat					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	13.100,00	12.963,67	115,50	-	20,83
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.848,00	6.848,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.267,00	1.267,00	-	-	-
III.	Gunung Talang					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.290,00	21.780,70	442,30	-	1.067,00
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.470,00	6.245,69	70,71	-	153,60
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.272,00	1.272,00	-	-	-
IV.	Gunung Kerinci					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	12.070,00	12.056,54	1,50	-	11,96
2.	Kawasan Rawan Bencana II	3.957,00	3.957,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	937,50	937,50	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 41. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Padang	694,96	927.011	1,32	1.334
2.	Kota Padang Panjang	23,00	52.422	1,37	2.279
3.	Kota Bukittinggi	25,24	126.804	1,68	5.024
4.	Kota Solok	57,64	68.602	1,92	1.190
5.	Kota Pariaman	73,36	88.502	1,23	1.247
6.	Kota Payakumbuh	80,43	131.819	1,55	1.639
7.	Kota Sawahlunto	273,45	61.398	1,02	225
8.	Kabupaten Dharmasraya	2.961,13	235.476	2,69	80
9.	Kabupaten Agam	2.232,30	484.288	0,74	217
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	5.794,95	457.285	0,76	79
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.354,30	376.072	0,94	112
12.	Kabupaten Pasaman	3.947,63	275.728	1,07	70
13.	Kabupaten Pasaman Barat	3.887,77	427.295	2,03	110
14.	Kabupaten Solok	3.738,00	368.691	0,68	99
15.	Kabupaten Sijunjung	3.130,80	230.104	1,68	73
16.	Kabupaten Padang Pariaman	1.328,79	411.003	0,59	309
17.	Kabupaten Solok Selatan	3.346,20	165.603	1,77	49
18.	Kabupaten Tanah Datar	1.336,00	346.578	0,25	259
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.011,35	88.692	1,97	15

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 41.A. Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Penduduk (%)		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Padang	1,44	1,39	1,32
2	Kota Padang Panjang	1,39	1,63	1,37
3	Kota Bukittinggi	1,74	1,71	1,68
4	Kota Solok	2,01	1,82	1,92
5	Kota Pariaman	1,32	1,16	1,23
6	Kota Payakumbuh	1,67	1,55	1,55
7	Kota Sawahlunto	1,01	0,98	1,02
8	Kabupaten Dharmasraya	2,86	2,78	2,69
9	Kabupaten Agam	0,82	0,81	0,74
10	Kabupaten Pesisir Selatan	0,83	0,81	0,76
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,99	0,97	0,94
12	Kabupaten Pasaman	1,12	1,08	1,07
13	Kabupaten Pasaman Barat	2,17	2,07	2,03
14	Kabupaten Solok	0,72	0,70	0,68
15	Kabupaten Sijunjung	1,78	1,70	1,68
16	Kabupaten Padang Pariaman	0,64	0,62	0,59
17	Kabupaten Solok Selatan	1,85	1,83	1,77
18	Kabupaten Tanah Datar	0,26	0,25	0,25
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,03	1,98	1,97

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 42. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	927.011	494.426,27
2.	Kota Padang Panjang	52.422	57.655,80
3.	Kota Bukittinggi	126.804	183.000
4.	Kota Solok	68.602	65.620
5.	Kota Pariaman	86.618	177,83
6.	Kota Payakumbuh	131.819	65.183
7.	Kota Sawahlunto	61.398	45.000
8.	Kabupaten Dharmasraya	235.476	538,460
9.	Kabupaten Agam	484.288	145.286
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	457.285	159.290
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	376.072	1.287
12.	Kabupaten Pasaman	275.728	347.030
13.	Kabupaten Pasaman Barat	427.295	194.446
14.	Kabupaten Solok	368.691	146.954
15.	Kabupaten Sijunjung	230.104	20.990
16.	Kabupaten Padang Pariaman	411.003	123.301
17.	Kabupaten Solok Selatan	165.603	458,33
18.	Kabupaten Tanah Datar	346.578	103.973
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	88.692	26.608

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 42.A. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah yang masuk ke TPA Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (kg/hari)
(1)	(2)	(4)
	TPA Reg Payakumbuh	187.380,86
1.	Kota Bukittinggi	103.811,00
2.	Kota Payakumbuh	65.038,36
3.	Kabupaten 50 Kota	7.358,90
4.	Kabupaten Agam	11.172,60
	TPA Reg Solok	47.753,42
5.	Kota Solok	37.652,05
6.	Kabupaten Solok	10.101,37

Keterangan : -

Sumber : UPTD Sampah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 42.B. Perkiraan Timbulan Sampah Menurut Sumber di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga (kg/hari)	Kantor (kg/hari)	Pasar Tradisional (kg/hari)	Pusat Perniagaan (kg/hari)	Fasilitas Publik (kg/hari)	Kawasan (kg/hari)	Lainnya (kg/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kota Padang	142.650	22.260	80.000	44.500	21.200	21.000	20.000
2.	Kota Padang Panjang	26.740	1.450	7.340	2.720	9.880	60	2.260
3.	Kota Bukittinggi	67.000	16.000	44.000	21.000	18.000	15.000	0
4.	Kota Solok	31.210	3.700	8.190	2.850	2.270	2.030	5.330
5.	Kota Payakumbuh	32.090	1.640	4.240	3.040	3.100	270	590
6.	Kota Sawahlunto	15.000	1.000	7.500	3.000	5.000	10.000	3.500
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	60	10	14.600	2.800	90	3.400	3.000
8.	Kabupaten Pasaman	13.940	320	2.070	420	200	1.200	200
9.	Kabupaten Tanah Datar	32.000	1.040	1.690	3.380	500	0	1.830

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 42.C. Perkiraan Sampah Terolah Harian di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Komposting (kg/hari)	Daur ulang untuk bahan baku (kg/hari)	Daur ulang untuk produk kreatif (kg/hari)	Bahan Bakar, RDF (kg/hari)	Dikelola Bank Sampah (kg/hari)	Daur ulang menjadi biogas (kg/hari)	Lainnya (kg/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kota Padang	350	100	10	10.000	100	160.570	0
2.	Kota Padang Panjang	6.930	400	10	0	40	0	650
3.	Kota Bukittinggi	11.000	49.000	6.000	0	7.000	0	0
4.	Kota Solok	4.110	2.500	300	0	1.520	0	0
5.	Kota Payakumbuh	15.060	3.420	620	0	3.480	0	0
6.	Kota Sawahlunto	3.000	0	1.000	0	2.000	0	0
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	5.000	2.400	2	0	1.000	0	0
8.	Kabupaten Pasaman	30	10.000	10	0	40	0	0
9.	Kabupaten Tanah Datar	760	500	0	0	10	0	0

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 42.D. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Kabupaten/Kota	Gerobak Sampah (unit)	Gerobak Motor Sampah (unit)	Truk Terbuka (unit)	Dump Truck (unit)	Arm Roll (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	249	33	0	42	29
2.	Kota Padang Panjang	50	13	3	9	2
3.	Kota Bukittinggi	48	23	0	14	2
4.	Kota Solok	8	17	0	13	5
5.	Kota Payakumbuh	91	33	1	18	1
6.	Kota Sawahlunto	22	17	0	3	4
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	16	23	0	14	7
8.	Kabupaten Pasaman	0	14	1	2	4
9.	Kabupaten Tanah Datar	20	1	0	5	2

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 43. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Agam	Kota Payakumbuh	Dinas PSDA Prov. Sumbar
2.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Naras	Kabupaten Padang Pariaman	Dinas PSDA Prov. Sumbar
3.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kalampaian	Kabupaten Padang Pariaman	Dinas PSDA Prov. Sumbar
4.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sariak Malai	Kabupaten Padang Pariaman	Dinas PSDA Prov. Sumbar
5.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lurus - Maransi	Kota Padang	Dinas PSDA Prov. Sumbar
6.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Antokan	Kabupaten Agam	Dinas PSDA Prov. Sumbar
7.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangki Nagari Koto Baru Kec. IV Nagari	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
8.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lumpo	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
9.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat	Dinas PSDA Prov. Sumbar
10.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lembang	Kabupaten Solok - Kota Solok	Dinas PSDA Prov. Sumbar
11.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas PSDA Prov. Sumbar
12.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Belimbing	Kota Padang	Dinas PSDA Prov. Sumbar
13.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tingkarang	Kabupaten Pasaman	Dinas PSDA Prov. Sumbar
14.	Normalisasi Muaro Sungai Batang Kandis Punggasan	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
15.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Painan	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
16.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Maligi	Kabupaten Pasaman Barat	Dinas PSDA Prov. Sumbar
17.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Muaro Anak Aia Pisang	Kabupaten Agam	Dinas PSDA Prov. Sumbar
18.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sumpur	Kabupaten Pasaman	Dinas PSDA Prov. Sumbar
19.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lampasi	Kota Payakumbuh	Dinas PSDA Prov. Sumbar
20.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kambang-Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
21.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Surantih	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
22.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakitan	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
23.	Normalisasi Muara Ampiang Parak	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar



(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Normalisasi Sungai Batang Tapan	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
25.	Pengamanan Tebing Batang Gawan Kel. Tanah Garam	Kota Solok	Dinas PSDA Prov. Sumbar
26.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Suliti	Kabupaten Solok Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
27.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pulakek	Kabupaten Solok Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
28.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Buluh Rotan Nagari Guguk Kec. Koto VII	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
29.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Anak Batang Piruku Nagari Padang Sibusuk Kec. Kupitan	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
30.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lasi Nagari Padang Sibusuk Kec. Kupitan	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
31.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sumpur Sisawah	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
32.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pangian Nagari Lubuk Tarantang Kec. Kamang Baru	Kabupaten Agam	Dinas PSDA Prov. Sumbar
33.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tambuo	Kabupaten Agam	Dinas PSDA Prov. Sumbar
34.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kumuih	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
35.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sukam	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
36.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
37.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Namang	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas PSDA Prov. Sumbar
38.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kapur Sembilan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas PSDA Prov. Sumbar
39.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Talang	Kota Payakumbuh	Dinas PSDA Prov. Sumbar
40.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
41.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Kec. Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
42.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
43.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Siguntur	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
44.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sangir	Kabupaten Solok Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar



(1)	(2)	(3)	(4)
45	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Liki	Kabupaten Solok Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
46	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Takung	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
47	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Limau	Kabupaten Padang Pariaman	Dinas PSDA Prov. Sumbar
48	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Siat Kec. Koto Baru	Kabupaten Dharmasraya	Dinas PSDA Prov. Sumbar
49	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Suo Nagari Koto Baru Kec. IV Nagari	Kabupaten Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
50	Pembangunan Checkdam Batang Malana	Kab. Tanah Datar	Dinas PSDA Prov. Sumbar
51	Pembangunan Checkdam Sungai Tanuik Barung-Barung Balantai	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
52	Pembangunan Checkdam Timbalun	Kota Padang	Dinas PSDA Prov. Sumbar
53	Pengamanan Abrasi Pantai Bungus	Kota Padang	Dinas PSDA Prov. Sumbar
54	Pengamanan Pantai Surantih	Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
55	Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Checkdam/Grounsill dan Pantai	Sumatera Barat	Dinas PSDA Prov. Sumbar
56	Bantuan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	Koto laweh	Distan Tanah Datar
		Paninjauan	
		Pandai sikek	
		Balimbinag	
		Tanjung Alam	
		Sungai Jambu	
57	Bantuan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	Koto Barapak	Distan Pesisir Selatan
		Amping Parak	
		Kambang Utara	
58	Bantuan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	Sungai Dua	Distan Kab. Dharmasraya
		Sungai Dua	
		Koto Tinggi	
		Koto Gadang	
		Sungai Langkok	
		Koto Baringin	
		Simalidu	
Koto Padang			
59	Bantuan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	Sungai Buluh	Distan Kab. Pd. Pariaman
60	Bantuan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	Lubuk Gadang Selatan	Distan Kab. Solok Selatan
		Koto Kaciak	
		Kampung Dalam	
		Bungus Barat	

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 43.A. Kegiatan Penanaman Bibit Bambu di Beberapa Nagari di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017

No	Nagari	Jumlah Bibit Bambu (Batang)
(1)	(2)	(3)
1.	Nagari VII KotoTalago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota	250
2.	Nagari Parik Panjang Kabupaten Agam	250
3.	Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman	500
	Jumlah	1.000

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 44. Status Pengaduan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1) Terdamparnya Limbah B3 Medis di Pantai Taluak Tan Sridano Pessel, berita harian Singgalang tgl. 29 Desember 2016	1) Tanggal 11 Januari 2017 DLH Prov. Sumbar menindak lanjuti dengan mengadakan rapat bersama Tim Penegakan Hukum Prov. Dan Instansi Teknis terkait serta Pemerintah Kab. Pesisir Selatan dengan hasil lengkap tertuang dalam Berita Acara.	1. Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.274/PHLHK-PPSA/PSA/Glem.0/7/2017 tgl. 19 Juli 2017 tentang : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri LHK.
	2) Surat DLH Kab. Pessel No. 600/316/P3LPKSDA/BLH-PS/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal : Pemberitahuan Pemantauan dan Investigasi Lapangan terdamparnya Limbah B3 Medis di Pantai Taluak. Tgl. 29 Desember 2016 dilakukan verifikasi bersama Muspika Kec. Batang Kapas.	2) Surat DLH Kab. Pessel No. 660/12/DLH-PS/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal : Tindak Lanjut Tim Investigasi – permohonan fasilitasi Tim Prov. utk ganti rugi dan menyetujui saran Kepolisian Bt. Kapas agar tdk dilanjutkan ke pengadilan.	2. Kep. MEN LHK RI No. SK.2944/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/5/2017 tgl. 17 Mei 2017 tentang : Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Rasidin Padang.
			3. Surat Direktur RSUD dr. Rasidin Padang No. 445.1312/RSUD.P/V/2017 tgl. 19 Mei 2017 tentang : Tindak Lanjut Sengketa di Luar Pengadilan. (Lamp. Berita Acara).
2.	Lanjutan Pengaduan Masyarakat Jr. Kampung Surau Nagari Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya yang ditindak-lanjuti dengan Surat Ka. BLH Kab. Dharmasraya No.660/344/TL-PHL/BLH-2016 tgl. 25 November 2016 perihal : Dugaan Pencemaran S. Pangian yang berasal dari kegiatan PT. Kemilau Permata Sawit yang berlokasi di Jr. Takung Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung.	Klarifikasi dan verifikasi lapangan secara terkoordinasi pada tgl. 10 Mei 2017 antara DLH Prov. Sumbar dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH Kab. Sijunjung serta DLH Kab. Dharmasraya ke PMKS PT. KPS (sampling perairan pada 6 titik) dengan hasil seperti tertuang dalam Berita Acara terlampir.	Follow Up hasil Klarifikasi dan Verifikasi Penanganan Pengaduan terhadap PPKS PT. Kemilau Permata Sawit yang dikirimkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH Kab. Sijunjung dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya. Monev pelaksanaan hasil Follow up
3.	Tembusan Pengaduan Masyarakat (Anak Kampung Air Haji) melalui e-mail resmi DLH Prov. Sumbar yang ditujukan ke OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumbar perihal : Kerusakan Akibat Penambangan Liar Galian C di Sungai yang berlokasi di Kp. Tanjung Mudik, Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pessel	1) Surat Wali Nagari Indrapura Timur No. 130/WN-ND.T/2017 tgl. 29 Maret 2017 tentang : Laporan Dampak Galian C CV. Mutia Anugrah dengan titik koordinat Bt. S. Indrapura yang berlokasi di Nagari Tigo Sepakat yang berbatasan langsung dengan Nagari Inderapura Timur	1) Surat Kadis ESDM Prov. Sumbar No. 540/820/MB/ESDM/2017 tgl. 12 Mei 2017 kepada Kadis. Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumbar perihal : Kajian Teknis Permohonan Revisi Koordinat IUP OP CV. Mutia Anugrah Nusantara



(1)	(2)	(3)	(4)
		2) Surat Camat Airpura No. 130/130/CA-2017 tgl. 02 Mei 2017 perihal : Tindak Lanjut Laporan Dampak Galian C CV. Mutia Anugrah di Nagari Indrapura Timur.	2) Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan secara terkoordinasi dengan DLH Kab. Pessel terhadap Kegiatan Penambangan Batuan di Daerah Air Haji tgl. 23 Mei 2017 dengan hasil sebagaimana Berita Acara terlampir.
4.	Surat Pengaduan Masyarakat Nagari Malampah tgl. 06 Juli 2017 ke Dinas Kehutanan Prov. Sumbar (tembusan) perihal : Mohon ditindak tegas oknum ninik mamak Kampung Maringgung Bukik Pila Jr. Bunga Tanjung Nagari Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman yang telah memperjual-belikan sebagian areal Hutan Lindung kepada seseorang (Ujang).	Pending untuk direkapitulasi masalah yang sama (bahan Rakor)	Telah dilaksanakan rapat di Pemerintah Kab. Pasaman Barat
5.	Surat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam ke Dinas Kehutanan Prov. Sumbar No. 660.1/591/DLH-PPL/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal : Aktivitas PT. Bakapindo memasuki kawasan hutan lindung seluas 1.327 m ² .	Pending untuk direkapitulasi masalah yang sama (bahan Rakor)	Telah dilaksanakan rapat di Pemerintah Kab. Agam ...
6.	Surat Permohonan Peninjauan Kembali Persetujuan AMDAL PLTMH Nagari Sungai Gambir Sako di Tapan (PLTM Sako-1) dari Forum Musyawarah Wali Nagari dan Masyarakat Se Kecamatan Ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai Tapan DAS Muaro Sako tertanggal 20 Juni 2017.	Berdasarkan tembusan surat yang disampaikan kepada kami yang diterima tanggal 25 September 2017, setelah dianalisa secara yuridis disimpulkan bahwa hal ini merupakan kewenangan Dinas /Instansi Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan untuk menindak lanjutinya.	Mengirimkan tanggapan dan evaluasi Surat Permohonan dilengkapi analisa yuridis ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan tgl. ... Oktober 2017.
7.	Kerusakan Mangrove & Terumbu Karang di Kawasan Mandeh Kab. Pesisir Selatan	Pembentukan Tim Pencari Fakta untuk memverifikasi data 20 spot kerusakan.	Masih dalam proses verifikasi dan klarifikasi Tim Pencari Fakta di lapangan
8.	Tumpahan PFAD PT. Wira Ino Mas Teluk Bayur	1. Investigasi lapangan kronologis kejadian, sumber pencemaran dan pihak penanggung jawab. 2. Surat Ka. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera No. S.4332/BPPHLHKS/KUM/9/2017 tgl. 27 September 2017 tentang : Pemberitahuan Pengawasan dan Verifikasi Lapangan.	1. Verifikasi dan klarifikasi Tim Wasdal terpadu di lapangan 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang No. 660/14.54/DLH-PDG/2017 tgl. 29 September 2017 perihal : Penyampaian Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.



(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang No. 141 Tahun 2017 tgl. 29 September 2017 tentang ; Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Wira Inno Mas Padang.
9.	Tumpahan Miko (Solar) di Dermaga 7 Teluk Bayur	Investigasi lapangan kronologis kejadian, sumber pencemaran dan pihak penanggung jawab.	1. Rapat Pembahasan Pengelolaan Lingkungan Pelabuhan Teluk Bayur tgl. 16 Oktober 2017. 2. Penyampaian Berita Acara Kesepakatan dan Notulensi Rapat Pengelolaan Lingkungan Pelabuhan Teluk Bayur tgl. 24 Oktober 2017.
10.	Penanganan Kasus Kematian Ikan di Danau Maninjau	Verifikasi lapangan dan pengambilan sampel air Danau Maninjau	Rapat Pembahasan Tindaklanjut secara terpadu di Pemkab. Agam
11.	Penanganan penembakan Burung Kuntul di Kab. Tanah Datar	Berdasarkan surat	Koordinasi dengan KSDA Prov. Sumbar
12.	Pengaduan Langsung Masyarakat Kab Pasaman Barat (pucuk adat anak nagari SP. Tonang) MENGADUKAN Tambang Emas PT. INEXCO	Terjadinya pencemaran sungai , lumpuhnya Perekonomian, adanya penebangan pohon	Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat dan menyampaikan pengaduan tersebut
13.	Konflik Tambang Material (Galian C) Nagari Saniangbaka Kec. Junjung Sirih Kab. Solok	Verifikasi Lapangan secara Terpadu antara Instansi Teknis Prov Sumbar dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok. Rapat secara terkoordinasi antara stakeholder	Penghentian Sementara aktifitas tambang Galian C di Kec. Junjung Sirih Kab. Solok melalui surat Gubernur
14.	WALHI Eksekutif Daerah Sumatera Barat	Pengaduan terhadap 10 kegiatan Pertambangan	Ditindaklanjuti dengan beberapa Verifikasi lapangan, baik Dinas LH dengan Dinas ESDM Prov Sumbar, Dnas Kehutanan Prov. Sumbar serta Verifikasi gabungan bersama WALHI.

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel - 44.A. Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Penanganan Pengaduan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Kewenangan Penanganan Pengaduan	Jumlah Pengaduan
(1)	(2)	(3)
1	Pemerintah Pusat (Lintas Provinsi)	1
2	Pemerintah Provinsi (Lintas Kabupaten/Kota)	4
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	9

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 44.B. Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sektor Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Sektor Kegiatan dan/atau Usaha	Jumlah Pengaduan/Kasus Lingkungan Hidup
(1)	(2)	(3)
1	Agroindustri	1
2	Pertambangan	4
3	Pelayanan Medis	1
4	Kehutanan	3
5.	Manufactur	2
6.	Energi	1
7.	Perikanan	1
8.	Hewan Dilindungi	1

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 45. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALHI Sumbar	SK Kementerian Kehakiman Indonesia No. C-364.AT.0302-TH.1998 tanggal 12 oktober 1998 dan SK Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No.886-XVII-2006 tanggal 18 Desember 2006	Jl. Beringin 3A No. 9 Lolong Ulak Karang Padang
2.	Andalas Bumi Lestari	025/Not/X-2006 tanggal 20 September 2006	Komplek Graha Andalas Asri Blok C/4 Andalas Padang
3.	Qbar	-	Jl. Bambu No. 3 Ujung Gurun Padang
4.	Forum Kota Sehat	-	Jl. SMP 21 No 30 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
5.	Wali Nusa	-	Jl Gajah no 10 Air Tawar Barat Kota Padang
6.	Sahabat Alam	-	Komplek Pegambiran Permai II Blok E No. 5 Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
7.	KOGAMI	-	Jl. Cindur Mato No. 9 Kel. Gunung Pangilun Padang
8.	Komunitas Earth Hour	-	Radio Classy Jl. Raya Indarung Kota Padang
9.	Azzam Kreatif	-	Jln. M. Yamin Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
10.	KOMPILASI (Komunitas Peduli Lingkungan Lestari)	-	Jl. Perwira III No. 13 Belakang Balok, Bukittinggi Telp. (0752) 7006264
11.	Garuda	-	Banto Trade Center, Bukittinggi
12.	Matahari	-	Jl. Melati No.12 Inkorba, Bukittinggi
13.	Forum Komunitas Hijau Assosiasi Bukittinggi Go Green (ABG)	-	Jln.Syekh M. Jamil Djambek no.40 Bukittinggi
14.	Komunitas Dahlia Saligurasi	-	Hotel Kharisma Jln.Sudirman Bukittinggi
15.	Forum Kota Bersih (Fortasih)	-	Jl. Soekarno - Hatta Kota Bukittinggi
16.	Fenomena Alam Sahabatku (FALS)	-	Jl. Dt Mangkuto Ameh Kel.Koto Selayan No.65 Bukittinggi
17.	Limbubu	-	Naras Pariaman Utara Kota Pariaman
18.	Caredek	-	Desa Rawang Pariaman Tengah Kota Pariaman



(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Forum Bahtera Serambi	-	Jl. Urip Sumoharjo No 16 Rt II Kelurahan Tanah Pak Lambik Kota Padang Panjang
20.	Pemandu Wisata Lingkungan	-	Maninjau Kabupaten Agam
21.	P3MTBPI (Persatuan Petani Pemandu Masyarakat Tangguh Bencana dan Perubahan iklim)	-	Sunur, Kecamatan Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman
22.	Peduli Lingkungan Bumi Andalas (Pelindas)	-	Jln. Ternate Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
23.	LSM Simpati Masyarakat	-	Kabupaten Lima Puluh Kota
24.	Forum Pasaman Peduli (FPP)	-	Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
25.	Satria Rimba	-	Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman
26.	Tunas Muda	-	Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
27.	Sinar Fajar	-	Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
28.	Karya Peduli Pasaman	-	Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 45.A. Lembaga yang Menjadi Anggota WALHI di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2017

No	Nama Lembaga
(1)	(2)
1.	Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)
2.	Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat Bina Kelola (LPSM BILA)
3.	Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (KOMMA FP-UA)
4.	Sekretariat Pengembangan Kawasan Mentawai (SPKM)
5.	Yayasan Taratak
6.	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)
7.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumatera Barat
8.	Perkumpulan Qbar
9.	Perkumpulan Siberut Hijau (PASIH)
10.	Mapala Alphicanameru IAIN Imam Bonjol Padang

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 46. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SDN Bustanul Ulum Padang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
2.	SMPN 25 Padang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
3.	MTsN Durian Tarung Padang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
4.	SMAN 11 Padang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
5.	SMA Adabiah 2 Padang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
6.	MAN 1 PADang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
7.	SDN 19 Kampung Baru, Kota Pariaman	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
8.	SMPN 2 Pulau Punjung Kab. Dharmasraya	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
9.	SMPN 2 Gunung Talang, Kab. Solok	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
10.	SDN 10 Pauh Kab. Pasaman	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2017
11.	SMPN 1 Sitiung, Kab. Dharmasraya	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
12.	SDN 49 Batu Hampar, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
13.	SMAN 1 Tanjung Mutiara, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
14.	SD Negeri 03 Mungo Kec. Luak, Kab. Limapuluh Kota	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
15.	SD 11 Payakumbuh, Kota Payakumbuh	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
16.	SMAN 1 Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
17.	SDN 01 Barung-barung Belantai, Kab. Pesisir Selatan	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
18.	SMPN 1 Pariaman, Kota Pariaman	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
19.	MAN Padusunan, Kota Pariaman	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
20.	SD Negeri 12 Pincuran Tujuh, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
21.	MTs. Swasta Baitul Ihza Sitapus, Kec. Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
22.	SD Negeri 19 Sijantang Koto Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
23.	SMKN 1 Bukittinggi	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
24.	SDN 31 Balai Labuh Bawah, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	SDN 07 Kampung Jawa, Kota Solok	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
26.	SMP Negeri 1 Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
27.	MAN 1 Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
28.	SMAN 1 Kampung Dalam, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
29.	SMPN 1 Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
30.	SMPN 1 Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
31.	SDN 15 Dharmacaraka Ngalau, Kota Padang Panjang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
32.	MA KM Muhammadiyah, Kota Padang Panjang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
33.	SDN 23 Tua Pejat, Kab. Kep. Mentawai	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
34.	SMA 1 Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
35.	SMA Pembangunan Labor UNP, Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
36.	SMPN 9 Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
37.	SDN 09 Nanggalo, Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
38.	SDN 10 Ganting Koto Tengah, Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan	2017
39.	MAN 2 Singkarak, Kab. Solok	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
40.	SMAN 2 Painan, Kab. Pesisir Selatan	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
41.	MAN 3 Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
42.	SMP Maria Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
43.	SMPN 1 Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
44.	MTsN Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
45.	SDN 03 Koto Kaciak, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
46.	SDN 05 Sungai Sungkai, Kab. Solok Selatan	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
47.	SDN 25 Ampaleh, Kab. Tanah Datar	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
48.	SDN 39 Mata Air, Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
49.	SMAN 5 Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
50.	SMAN 8 Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
51.	SMAN 7 Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
52.	SMAN 1 Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	SMAN 1 Kota Bukittinggi	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
54.	SMAN 1 Kec.Akabiluru, Kab. Limapuluh Kota	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
55.	SMA 1 Talamau, Kab. Pasaman Barat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
56.	SMPN 5 Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
57.	SMPN 17 Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
58.	SMPN 1 Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
59.	MTsn Pauh Kembar, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
60.	SMPN 1 VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
61.	MTsN Kota Solok	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
62.	SMPN 1 Batipuh, Kab. Tanah Datar	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
63.	SMPN 1 Tilatang Kamang, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
64.	MTsN 1 Kota Payakumbuh	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
65.	MTsN Danguang-Danguang, Kab. Limapuluh Kota	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
66.	MTsN Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
67.	SDN 27 Anak Aie, Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
68.	SD Dian Andalas, Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
69.	SDN 19 Baringin, Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
70.	SDN 28 Pasar Gompong, Kab. Pesisir Selatan	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
71.	SDN 17 Laing, Kota Solok	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
72.	SDN 08 VI Suku, Kota Solok	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
73.	SDN 02 Koto Baru, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
74.	SDN 23 Kubang Putih, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
75.	SDN 09 Sungai Cubadak, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
76.	SDN 29 Koto Hilalang, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
77.	SD PIUS Kota Payakumbuh	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	SDN 02 Percontohan Kota Bukittinggi	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
79.	SDN 04 Andaleh, Kab. Limapuluh Kota	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
80.	SDN 06 Batu payuang, Kab. Limapuluh Kota	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
81.	SDN 17 Singando Kota Padang Panjang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
82.	SDN 12 Cubadak Mantawai, Kota Pariaman	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
83.	MIN 3 Kab. Solok Selatan	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
84.	MIN 2 Kab. Pasaman	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
85.	SDN 13 Sitiung, Kab. Dharmasraya	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017
86.	SDN 20 Sitiung, Kab. Dharmasraya	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur Sumbar	2017

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 46.A. Perbandingan Perolehan Penghargaan Nasional Lingkungan Tahun 2013 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2017

No	Jenis Penghargaan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	SLHD	4	4	4	2	3
2	Adipura	6	2	1	5	9
3	Adiwiyata	34	39	42	27	86
4	Kalpataru	3	3	4	1	4
5	PROPER (biru)	17	26	25	33	27
6	PROPER (hijau)	1	1	1	3	3

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel – 47. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gerakan Sadar Wisata	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Masyarakat, tokoh masyarakat, agama, pengiat pariwisata, kelompok darwis (Pokdarwis)	April, Mei, Juli, Agustus, November, Desember 2017
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Agro	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Masyarakat, pelaku agro wisata	Juni 2017
3.	Pembekalan SDM Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Aparatur, Pelaku Pariwisata, Akademisi	Juli 2017
4.	Gerakan Aksi bersih-bersih di Kawasan Destinasi (Bukik Siriah, Pantai Kata) Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Masyarakat, Kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis, Instansi Terkait	Juli, September 2017
5.	Ranperda Pariwisata Halal	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Pelaku Pariwisata, Pengiat Pariwisata, MUI, PHRI, ASITA, ASATI, Instansi terkait	November 2017
6.	Sosialisasi Pengadaan Lahan Pariwisata di Bukik Ameh Kab. Pessel	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Masyarakat, Tokoh/Pemuka Masyarakat, Instansi terkait	November 2017
7.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	BPBD Prov. Sumbar	Masyarakat	September 2017
8.	Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan	BPBD Prov. Sumbar	Masyarakat	Juli 2017
9.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD Prov. Sumbar	Masyarakat	September 2017
10.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Puskesmas	Masyarakat BAB sembarangan	s/d 2019

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat, 2017



**Tabel – 48. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 5 Tahun 2008	Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat
2.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 10 Tahun 2008	Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Masang Gadang, Batang Lampasi dan Batang Sinamar
3.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 40 Tahun 2008	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang
4.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 28 Tahun 2009	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Ombilin dan Batang Anai
5.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 3 Tahun 2009	Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang
6.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 2 Tahun 2010	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 24 Tahun 2010	Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat
8.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 20 Tahun 2011	Irigasi
9.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 3 Tahun 2012	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
10.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 4 Tahun 2012	Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan
11.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 7 Tahun 2012	Pengelolaan Panas Bumi
12.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 13 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
13.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 14 Tahun 2012	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 4 Tahun 2014	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
15.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 8 Tahun 2014	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
16.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 7 Tahun 2015	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
17.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Nomor 11 Tahun 2015	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
18.	Peraturan Gubernur Sumatera Barat	Nomor 19 Tahun 2016	Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai



(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-127-2016	Pembentukan Tim Penilai Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan atau kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
20.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-129-2016	Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi Tahun 2016
21.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-332-2016	Pembentukan Tim Penilaian Lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
22.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-338-2016	Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Lingkungan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat
23.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-342-2016 28 Maret 2016	Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Buku SLHD
24.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-349-2016 29 Maret 2016	Pembentukan Tim Pembinaan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016
25.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-488-2016 3 Mei 2016	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Keterangan : -

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 48.A. Produk Hukum Berdasarkan Sektor Lingkungan Hidup yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2015
Tahun : 2017

No	Sektor	Bentuk peraturan atau Pedoman Teknis	No dan tanggal Pelaksanaan	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 5 Tahun 2008	Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat
2.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 10 Tahun 2008	Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Masang Gadang, Batang Lampasi dan Batang Sinamar
3.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 40 Tahun 2008	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang
4.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 28 Tahun 2009	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Ombilin dan Batang Anai
5.	Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik	Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2009	Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang
6.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Gubernur	Nomor 75 Tahun 2009	Petunjuk Pelaksana Operasional Pos Jaga Terpadu Pengamanan Bersama Kawasan Taman Nasional Kerinci Sablan (TNKS) di Kabupaten Dharmasraya dan Wilayah Operasi Kabupaten Pesisir Selatan serta Kabupaten Solok Selatan
7.	Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	Keputusan Bersama Bupati Solok, Bupati Solok Selatan, Bupati Sijunjung dan Bupati Dharmasraya	100 – 1.A – 2009 130.4.2009 188.45/685/KPT S-BPT-2009 189.1/240/KPT S-BPT-2009	Pembentukan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari
8.	Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik	Peraturan Daerah	Nomor 2 Tahun 2010	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 24 Tahun 2010	Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat
10.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-87-2010	Pembentukan Tim Studi Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Lembang Tahun 2010
11.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	610-263.1-2010	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daerah Tangkapan Air Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 9 Tahun 2011	Irigasi
13.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	522-74-2011	Pembentukan Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Multi Pihak Sumatera Barat
14.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	522-136-2011	Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat
15.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-191-2011	Pembentukan Tim Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Agam Tahun 2011
16.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	610-374-2011	Pembentukan Tim Penyusunan dan Konsultasi Publik Konsep Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air
17.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	610-380-2011	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan Terpadu di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
18.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-429-2011	Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Batang Karimo Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lubuk Tarok
19.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	050-448-2011	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tindak Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Batang Hari
20.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-286-2011	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat
21.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	660-415-2011	Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Terpadu Lembah Anai
22.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-570-2011	Pembentukan Tim Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Nagari
23.	Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik	Peraturan Daerah	Nomor 4 Tahun 2012	Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan
24.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah	Nomor 14 Tahun 2012	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
25.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Gubernur	Nomor 92 Tahun 2012	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031
26.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Gubernur	Nomor 99 Tahun 2012	Pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Lembah Anai



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-43-2012	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung Seluas lebih kurang 650 (Enam Ratus Lima Puluh Hektar) kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
28.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-44-2012	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung Seluas lebih kurang 1.088H kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
29.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-483-2012	Pembentukan Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
30.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-223-2012	Pembentukan Tim Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Pangian Tahun 2012
31.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-252-2012	Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
32.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-378-2012	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batang Karimo Ibukota Kecamatan (IKK) Lubuk Tarok Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung
33.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-486-2012	Pembentukan Tim Pemantauan Sungai Skala Nasional Tahun 2012
34.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-720-2012	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tarusan Terpadu di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
35.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-721-2012	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Gasan Gadang Terpadu Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
36.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-550-2013	Pembentukan Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 Tingkat Provinsi Sumatera Barat



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-673-2013	Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
38.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah	No.7 / tahun 2015	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
39.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Daerah	No.11/ tahun 2015	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
40.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	520-390-2014	Pembentukan Tim Penilai Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

Keterangan : -

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 49. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	APBN	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1.447.661.000	450.000.000
1.		- Kualitas udara ambient dengan metode passive sampler	69.572.000	145.350.000
2.		- Sampler air sungai	397.917.000	304.650.000
3.		- Monitoring dan evaluasi kualitas udara perkotaan	375.164.000	-
4.		- PROPER	513.191.000	-
5.		Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	91.817.000	
	APBD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		130.400.000,00
6.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		130.400.000,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidu	3.533.827.300,00	3.119.556.400,00
7.		Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan		100.000.000,00
8.		Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan		160.000.000,00
9.		Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)		220.000.000,00
10.		Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi		320.000.000,00
11.		Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai		205.000.000,00
12.		Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota		110.000.000,00
14.		Pemantauan Kualitas Udara Ambient		105.000.000,00
15.		Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)		295.980.000,00
16.		Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan		150.000.000,00
17.		Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih		130.000.000,00
18.		Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup		868.914.400,00



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah		80.000.000,00
18.		Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung)		90.000.000,00
19.		Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		45.000.000,00
18.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)		50.000.000,00
19.		Peningkatan Pengembangan Laboratorium lingkungan		82.504.000,00
18.		Pilot projek eko dan eduwisata kawasan Mandeh		4.020.000,00
19.		Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		103.138.000,00
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH	363.000.000,00	277.000.000,00
20.		Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat		85.000.000,00
21.		Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut		80.000.000,00
22.		Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup		52.000.000,00
23.		Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat		60.000.000,00
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	508.220.600,00	399.015.300,00
24.		Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)		80.000.000,00
25.		Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan Provinsi Sumatera Barat		250.000.000,00
26.		Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan		4.015.300,00
27.		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan		65.000.000,00
		Program Tata Lingkungan dan Penuaan Hukum Lingkungan	260.000.000,00	845.358.000,00



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.		Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup		95.000.000,00
29.		Pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan		90.000.000,00
30.		Pembinaan hukum lingkungan hidup dan Perizinan		75.000.000,00
31.		Penaataan hukum lingkungan		260.358.000,00
32.		Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah		325.000.000,00
33.		Pelaksanaan Sosialisasi Pelestarian Terumbu Karang serta percontohan transplantasi terumbu karang	200.000.000,0	121.260.000,00
34.		Transplantasi terumbu karang pada kawasan KKPD	142.500.000,0	61.500.000,00
35.		Kegiatan Rehabilitasi Mangrove	-	125.000.000,00
36.		Kegiatan penanaman cemara laut	95.000.000,0	110.000.000,00

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel 49.A. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dari APBN di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2017

No	Kegiatan	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER	789.320.000	-	-
2.	Pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara	762.677.000	-	-
3.	Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional	448.003.000	-	-
4.	Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	-	91.817.000	-
5.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:	-		-
6.	Monitoring dan evaluasi kualitas udara perkotaan	-	375.164.000	-
7.	Sampel air sungai	-	397.917.000	304.650.000
8.	PROPER	-	513.191.000	-
9.	Passive sampler	-	69.572.000	145.350.000

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel 49.B. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dari APBN di Provinsi Sumatera Barat****Tahun : 2017**

No	Organisasi	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(1)	(2)	(4)	(4)
1.	Dinas Lingkungan Hidup	13.615.516.054	13.248.968.797
	Belanja Tidak Langsung	5.498.766.054	5.367.471.493
	Belanja Langsung	8.116.750.000	7.881.497.304
2.	Dinas Kehutanan	6.399.912.325	21.024.257.964
	Belanja Tidak Langsung	0	0
	Belanja Langsung	6.399.912.325	21.024.257.964
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.324.000.000	-
	Belanja Tidak Langsung	0	-
	Belanja Langsung	11.324.000.000	-
	Total	31.339.428.379	34.273.226.761

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 50. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)	0	0	0
2.	Master (S2)	5	9	14
3.	Sarjana (S1)	13	16	29
4.	Diploma (D3/D4)	1	4	5
5.	SLTA	10	5	15
	Jumlah	29	34	63

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 50.A. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Berpendidikan S2 Berdasarkan Jurusan Tahun : 2017

No.	Jurusan	Jumlah Pegawai
1.	Ilmu lingkungan	6
2.	Hukum	1
3.	Manajemen	1
4.	Pembangunan	1
5.	Pembangunan Wilayah Desa	1
6.	Perencanaan Pembangunan	1
7.	Perencanaan Kota dan daerah	1
8.	Akutansi	1
9.	Teknik Lingkungan	1
2.	Hukum	1

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 51. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang telah Mengikuti Diklat di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Arsiparis	0	1	0	1
2.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	PPNS	0	0	2	1
3.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	PPLHD	0	0	3	1

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017

Tabel - 51.A. Jumlah Peserta Diklat Teknis yang diikuti Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Nama Diklat Teknis	Jumlah Peserta
1.	Amdal A (Dasar-dasar Amdal)	2
2.	Amdal C (Penilai)	1
3.	Kebijakan Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan	2
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1
5.	Pelatihan Dasar Geographic Information System (GIS)	1
6.	Pengelolaan Sampah Laut	1
7.	Diklat Fungsional Analisis Jabatan dan Beban Kerja	1
8.	Relawan Penanggulangan Bencana Prov. Sumbar	1
9.	Penyusunan Analisis Jabatan	1
10.	Optimalisasi Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah untuk Mendukung Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLHK)	1
11.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
12.	Aplikasi Information Mangement System (IMS)	1
13.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1
14.	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPAW Semester I Tahun 2017	1
15.	Operasional dan Perawatan Peralatan AQMS	1
16.	Pengisian E-Formasi	1
17.	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1
18.	Finalisasi Kaji Ulang RAD GRK dan Percepatan Pelaporan PEP RAD GRK	1
19.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1
20.	Penghitungan Pencapaian Indeks Tutupan Lahan dan Konsultasi Indeks Kualitas Udara	1
21.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan RTRW	1
22.	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Bagi Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ke Four Points By Sheraton	1
23.	Antisipasi Cyber Crime	1

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 52. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.256.490,0	41.223.979,4	44.424.680,0	47.195.038,9	50.541.605,8
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	29.357.016,0	33.156.254,2	35.275.077,2	37.275.033,6	39.946.834,0
	a. Tanaman Pangan	10.570.324,2	12.332.550,3	13.096.161,4	13.223.728,1	13.991.607,5
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1.111.363,4	1.207.014,1	1.296.768,3	1.379.051,5	1.386.495,9
	c. Perkebunan Semusim	26.176,8	30.383,9	35.128,2	36.264,4	36.325,2
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3.959.021,2	4.415.197,5	4.887.805,7	5.308.732,2	5.761.049,2
	e. Perkebunan Tahunan	10.266.044,7	11.477.970,0	11.946.300,7	13.043.571,2	14.161.809,9
	f. Peternakan	2.614.525,8	2.832.387,3	3.078.763,8	3.259.643,9	3.502.573,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	809.559,9	860.751,1	934.149,1	1.024.042,2	1.106.972,8
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.077.587,1	2.324.590,2	2.764.626,8	2.953.532,4	2.883.568,5
3	Perikanan	4.821.886,9	5.743.135,0	6.384.975,9	6.966.472,9	7.711.203,3
B	Pertambangan dan Penggalian	6.756.659,6	8.049.321,1	8.682.040,0	8.886.419,3	9.132.512,2
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	866.600,2	829.461,5	711.687,3	517.940,4	463.561,8
3	Pertambangan Bijih Logam	213,6	217,7	182,6	189,6	209,3
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	5.889.845,7	7.219.641,9	7.970.170,0	8.368.289,3	8.668.741,2
C	Industri Pengolahan	16.185.516,3	17.424.296,5	18.321.503,2	19.791.728,1	20.835.234,5
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	856,8	794,2	708,4	600,1	604,9
	a. Industri Batu Bara	856,8412741	794,2	708,4	600,1	604,9
	b. Industri Pengilangan Migas	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Industri Makanan dan Minuman	7.322.909,8	7.741.793,3	8.393.933,9	9.346.024,3	9.797.418,7





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3.421.052,6	3.695.273,6	3.612.970,0	3.844.393,4	4.171.726,6
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6.770,1	8.272,2	8.836,5	8.912,7	10.491,7
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	8.129,0	7.908,8	8.385,7	8.864,6	8.720,5
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6.995,1	6.833,2	7.350,4	7.582,1	7.585,7
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	30.636,4	31.582,7	36.204,4	34.159,8	36.361,9
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.173.934,7	2.263.190,6	2.598.655,2	2.898.920,6	3.129.387,5
10	Industri Barang Galian bukan Logam	3.048.685,0	3.497.912,0	3.461.484,7	3.439.010,4	3.463.305,7
11	Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	106.659,0	108.603,6	127.719,5	135.408,5	139.552,2
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Industri Alat Angkutan	4.821,2	5.055,1	5.515,3	5.620,9	6.081,2
15	Industri Furnitur	22.206,1	21.614,9	21.523,9	22.407,8	22.058,8
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	31.860,4	35.462,4	38.215,2	39.822,9	41.939,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	91.668,5	122.700,2	175.373,0	207.279,3	240.385,5
1	Ketenagalistrikan	90.755,6	121.731,3	174.280,3	206.088,2	239.065,6
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	912,9	968,9	1.092,7	1.191,1	1.319,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130.186,3	140.304,5	160.975,8	180.305,6	197.019,6
F	Konstruksi	12.884.434,9	14.996.623,3	16.877.049,4	18.209.710,8	20.008.574,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.696.811,6	23.714.611,1	26.284.158,9	29.202.600,0	32.290.617,7
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3.122.042,3	3.316.141,3	3.584.321,5	3.731.167,5	3.912.600,0
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	18.574.769,4	20.398.469,8	22.699.837,3	25.471.432,5	28.378.017,7





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	16.493.495,7	19.405.629,2	22.011.933,6	24.461.689,8	27.131.111,3
1	Angkutan Rel	21.127,8	23.435,7	30.680,2	35.536,1	40.671,9
2	Angkutan Darat	11.377.711,7	13.351.435,4	14.860.455,3	16.391.900,2	17.994.096,2
3	Angkutan Laut	638.515,7	755.636,2	784.761,9	716.077,8	733.163,6
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	402.311,6	478.253,3	522.775,1	562.511,9	650.752,7
5	Angkutan Udara	2.678.270,4	3.254.007,1	4.057.139,6	4.788.034,0	5.510.466,8
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.375.558,4	1.542.861,5	1.756.121,5	1.967.629,9	2.201.960,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.570.829,7	1.860.850,5	2.200.166,5	2.565.609,0	2.906.759,5
1	Penyediaan Akomodasi	414.269,1	498.946,4	584.300,3	672.553,0	747.926,8
2	Penyediaan Makan Minum	1.156.560,6	1.361.904,0	1.615.866,2	1.893.056,0	2.158.832,7
J	Informasi dan Komunikasi	7.731.431,6	8.462.241,4	8.724.861,2	9.796.498,1	11.331.134,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.633.408,7	5.119.029,7	5.577.210,3	6.217.709,4	6.627.783,0
1	Jasa Perantara Keuangan	2.998.125,9	3.290.098,4	3.512.388,9	3.992.846,6	4.222.749,7
2	Asuransi dan Dana Pensiun	141.529,3	159.169,9	179.162,8	201.604,5	222.874,2
3	Jasa Keuangan Lainnya	1.456.204,7	1.625.973,3	1.834.656,2	1.966.991,7	2.119.783,6
4	Jasa Penunjang Keuangan	37.548,9	43.788,1	51.002,3	56.266,7	62.375,4
L	Real Estate	2.836.591,7	3.244.297,3	3.602.550,7	3.935.823,8	4.219.483,0
M, N	Jasa Perusahaan	626.817,0	692.296,1	772.145,2	843.847,0	922.959,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.244.650,3	9.709.099,6	10.249.240,9	11.432.303,9	12.543.702,5
P	Jasa Pendidikan	5418348,469	5.972.000,3	6.602.478,7	7.539.722,7	8.854.791,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1969005,916	2.110.453,0	2.261.566,2	2.502.927,5	2.856.972,1
R,S, T,U	Jasa lainnya	2373483,67	2.696.523,6	3.024.046,9	3.473.722,0	3.944.583,0
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	146899829,9	164.944.256,8	179.951.980,3	196.442.935,1	214.585.229,3
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	146899829,9	164.944.256,8	179.951.980,3	196.442.935,1	214.585.229,3

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 52.A. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2017**

No	Uraian	2017
(1)	(2)	(3)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.541.605,8
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	39.946.834,0
	a. Tanaman Pangan	13.991.607,5
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1.386.495,9
	c. Perkebunan Semusim	36.325,2
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	5.761.049,2
	e. Perkebunan Tahunan	14.161.809,9
	f. Peternakan	3.502.573,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.106.972,8
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.883.568,5
3	Perikanan	7.711.203,3
B	Pertambangan dan Penggalian	9.132.512,2
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	463.561,8
3	Pertambangan Bijih Logam	209,3
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	8.668.741,2
C	Industri Pengolahan	20.835.234,5
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	604,9
	a. Industri Batu Bara	604,9
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0
2	Industri Makanan dan Minuman	9.797.418,7





(1)	(2)	(3)
3	Pengolahan Tembakau	0,0
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4.171.726,6
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	10.491,7
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	8.720,5
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	7.585,7
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	36.361,9
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.129.387,5
10	Industri Barang Galian bukan Logam	3.463.305,7
11	Industri Logam Dasar	0,0
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	139.552,2
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,0
14	Industri Alat Angkutan	6.081,2
15	Industri Furnitur	22.058,8
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	41.939,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	240.385,5
1	Ketenagalistrikan	239.065,6
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	1.319,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	197.019,6
F	Konstruksi	20.008.574,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.290.617,7
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3.912.600,0
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	28.378.017,7
H	Transportasi dan Pergudangan	27.131.111,3
1	Angkutan Rel	40.671,9
2	Angkutan Darat	17.994.096,2
3	Angkutan Laut	733.163,6



(1)	(2)	(3)
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	650.752,7
5	Angkutan Udara	5.510.466,8
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	2.201.960,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.906.759,5
1	Penyediaan Akomodasi	747.926,8
2	Penyediaan Makan Minum	2.158.832,7
J	Informasi dan Komunikasi	11.331.134,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.627.783,0
1	Jasa Perantara Keuangan	4.222.749,7
2	Asuransi dan Dana Pensiun	222.874,2
3	Jasa Keuangan Lainnya	2.119.783,6
4	Jasa Penunjang Keuangan	62.375,4
L	Real Estate	4.219.483,0
M,N	Jasa Perusahaan	922.959,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.543.702,5
P	Jasa Pendidikan	8.854.791,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.856.972,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.944.583,0
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	214.585.229,3
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	214.585.229,3

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



Tabel – 53. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.372.991,0	32.151.489,7	33.546.757,2	34.222.561,7	35.387.634,9
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	24.582.356,3	25.984.156,1	26.871.145,8	27.322.326,2	28.305.757,2
	a. Tanaman Pangan	8.598.113,3	9.143.501,8	9.482.446,2	9.468.382,7	9.791.992,8
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	945.298,1	1.020.832,4	1.091.461,0	1.097.533,5	1.155.269,0
	c. Perkebunan Semusim	21.048,5	22.476,8	23.215,9	22.200,9	22.335,6
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3.794.291,0	4.009.849,4	4.076.312,7	4.151.600,1	4.270.833,0
	e. Perkebunan Tahunan	8.543.040,6	9.042.442,3	9.366.481,4	9.699.152,7	10.055.171,2
	f. Peternakan	2.020.910,7	2.063.429,5	2.103.861,0	2.140.747,3	2.238.969,3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	659.654,2	681.623,8	727.367,5	742.709,0	771.186,3
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.804.438,7	1.841.308,1	1.969.166,5	2.020.025,7	1.949.707,1
3	Perikanan	3.986.196,0	4.326.025,6	4.706.444,9	4.880.209,8	5.132.170,6
B	Pertambangan dan Penggalian	5.722.821,3	5.923.565,2	6.144.577,5	6.267.606,8	6.338.267,2
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	801.323,9	807.014,0	790.647,9	636.548,4	548.767,9
3	Pertambangan Bijih Logam	174,5	192,0	171,6	167,3	173,0
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4.921.322,9	5.116.359,2	5.353.757,9	5.630.891,0	5.789.326,3
C	Industri Pengolahan	14.388.523,3	15.140.071,9	15.418.540,2	16.174.096,8	16.540.004,8
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	802,3	805,7	803,6	677,1	651,8
	a. Industri Batu Bara	802,3	805,7	803,6	677,1	651,8
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0			
2	Industri Makanan dan Minuman	6.594.351,4	6.947.088,0	7.032.798,7	7.612.901,8	7.644.709,3
3	Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2.976.720,5	3.170.529,9	3.139.166,8	3.215.819,5	3.364.395,7
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6.200,7	6.843,2	6.925,3	6.632,2	7.707,7
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	7.265,2	6.990,4	6.829,6	6.967,3	6.651,2
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6.278,4	5.772,7	5.946,0	5.908,1	5.692,2
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	26.675,1	26.441,8	27.167,9	25.480,1	25.567,7
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.901.206,5	1.938.634,6	2.049.321,9	2.201.058,2	2.341.470,4
10	Industri Barang Galian bukan Logam	2.719.665,7	2.885.006,6	2.991.463,1	2.936.339,8	2.981.006,9
11	Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	96.355,1	96.381,0	101.499,9	105.246,1	105.030,3
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Industri Alat Angkutan	4.477,8	4.668,3	4.803,6	4.750,5	4.994,6
15	Industri Furnitur	19.985,3	20.600,9	20.894,4	20.984,1	19.709,6
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	28.539,5	30.308,8	30.919,3	31.332,0	32.417,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	120.837,2	140.011,7	145.686,1	161.628,9	168.196,6
1	Ketenagalistrikan	120.039,3	139.172,7	144.811,5	160.711,3	167.215,0
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	797,9	839,0	874,6	917,6	981,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128.686,9	133.696,9	141.707,8	150.771,1	156.736,2
F	Konstruksi	10.825.242,4	11.523.579,9	12.315.040,2	13.126.836,9	14.075.895,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.442.017,8	20.523.147,0	21.626.609,6	22.796.932,5	24.279.260,5
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.687.977,7	2.775.297,6	2.828.861,7	2.771.802,1	2.755.793,1
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	16.754.040,1	17.747.849,5	18.797.748,0	20.025.130,4	21.523.467,3



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.877.715,0	14.929.948,9	16.259.293,4	17.506.914,9	18.749.696,1
1	Angkutan Rel	19.443,5	20.953,7	22.395,9	24.118,5	26.008,0
2	Angkutan Darat	10.090.148,0	10.973.911,8	12.066.220,9	13.105.320,4	14.031.493,5
3	Angkutan Laut	610.855,8	652.041,2	635.425,5	563.875,0	566.657,9
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	334.366,1	359.624,7	367.933,8	377.621,8	410.278,1
5	Angkutan Udara	1.646.433,6	1.669.248,9	1.863.253,5	2.030.271,8	2.203.236,8
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.176.468,0	1.254.168,5	1.304.063,7	1.405.707,3	1.512.021,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.248.916,0	1.329.396,2	1.420.410,3	1.557.102,4	1.693.494,3
1	Penyediaan Akomodasi	315.718,6	334.893,6	352.358,9	377.611,6	399.864,8
2	Penyediaan Makan Minum	933.197,5	994.502,6	1.068.051,4	1.179.490,9	1.293.629,5
J	Informasi dan Komunikasi	7.676.467,0	8.322.873,3	9.080.556,1	9.934.334,8	10.802.637,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.856.679,9	4.041.345,2	4.188.231,5	4.524.388,3	4.619.805,2
1	Jasa Perantara Keuangan	2.428.343,2	2.540.773,0	2.616.338,6	2.901.037,0	2.942.157,9
2	Asuransi dan Dana Pensiun	123.874,6	130.801,0	136.239,3	144.791,2	151.242,1
3	Jasa Keuangan Lainnya	1.271.721,7	1.334.883,4	1.398.994,0	1.440.294,2	1.486.109,3
4	Jasa Penunjang Keuangan	32.740,4	34.887,7	36.659,5	38.265,9	40.295,9
L	Real Estate	2.472.327,4	2.609.894,3	2.748.095,8	2.895.556,3	3.025.615,6
M,N	Jasa Perusahaan	547.782,0	585.985,9	620.607,1	651.284,0	685.063,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.362.767,6	7.511.115,6	7.895.347,4	8.286.949,1	8.659.075,4
P	Jasa Pendidikan	4.357.636,2	4.657.618,6	5.022.030,7	5.416.448,8	5.954.627,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.620.725,6	1.749.926,0	1.881.299,0	1.984.293,5	2.154.588,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.918.497,7	2.067.170,0	2.264.684,3	2.476.537,0	2.673.386,5
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	125.940.634,3	133.340.836,4	140.719.474,2	148.134.243,9	155.963.985,4
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	125.940.634,3	133.340.836,4	140.719.474,2	148.134.243,9	155.963.985,4

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017

**Tabel – 53.A. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2017**

No	Uraian	2017
(1)	(2)	(3)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.387.634,9
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	28.305.757,2
	a. Tanaman Pangan	9.791.992,8
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1.155.269,0
	c. Perkebunan Semusim	22.335,6
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4.270.833,0
	e. Perkebunan Tahunan	10.055.171,2
	f. Peternakan	2.238.969,3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	771.186,3
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.949.707,1
3	Perikanan	5.132.170,6
B	Pertambangan dan Penggalian	6.338.267,2
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	548.767,9
3	Pertambangan Bijih Logam	173,0
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	5.789.326,3
C	Industri Pengolahan	16.540.004,8
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	651,8
	a. Industri Batu Bara	651,8
	b. Industri Pengilangan Migas	
2	Industri Makanan dan Minuman	7.644.709,3
3	Pengolahan Tembakau	0,0





(1)	(2)	(3)
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3.364.395,7
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7.707,7
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6.651,2
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5.692,2
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	25.567,7
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.341.470,4
10	Industri Barang Galian bukan Logam	2.981.006,9
11	Industri Logam Dasar	0,0
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	105.030,3
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,0
14	Industri Alat Angkutan	4.994,6
15	Industri Furnitur	19.709,6
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	32.417,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	168.196,6
1	Ketenagalistrikan	167.215,0
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	981,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	156.736,2
F	Konstruksi	14.075.895,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.279.260,5
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.755.793,1
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	21.523.467,3
H	Transportasi dan Pergudangan	18.749.696,1
1	Angkutan Rel	26.008,0
2	Angkutan Darat	14.031.493,5
3	Angkutan Laut	566.657,9
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	410.278,1





(1)	(2)	(3)
5	Angkutan Udara	2.203.236,8
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.512.021,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.693.494,3
1	Penyediaan Akomodasi	399.864,8
2	Penyediaan Makan Minum	1.293.629,5
J	Informasi dan Komunikasi	10.802.637,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.619.805,2
1	Jasa Perantara Keuangan	2.942.157,9
2	Asuransi dan Dana Pensiun	151.242,1
3	Jasa Keuangan Lainnya	1.486.109,3
4	Jasa Penunjang Keuangan	40.295,9
L	Real Estate	3.025.615,6
M,N	Jasa Perusahaan	685.063,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.659.075,4
P	Jasa Pendidikan	5.954.627,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.154.588,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.673.386,5
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	155.963.985,4
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	155.963.985,4

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Surat Tugas Tim Penulis DIKPLHD
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Tim Penyusun DIKPLHD
3. Biodata Tim Penyusun (Akademisi dan LSM)
4. Lampiran Surat-Surat Undangan, absensi dan lain-lain terkait proses penyusunan DIKPLHD





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 2 Februari 2018

Nomor: 660/100/TL/DLH-2018
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Personil Tim
Penyusun DIKPLHD Tahun 2018

Kepada Yth,
Sdr. **Sebagaimana Daftar Terlampir**
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Sumatera Barat Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. DIKPLHD yang sebelumnya dikenal dengan istilah Status Lingkungan Hidup (SLHD) memuat informasi kondisi lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang akan dinilai oleh Pemerintah Pusat dan yang mendapatkan predikat terbaik diberikan penghargaan oleh Presiden.
2. Mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor S.118/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018, maka perlu dibentuk Tim yang akan bertanggung jawab terhadap data dan informasi tentang kebijakan/program kerja terkait isu lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada instansi Saudara.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar Saudara dapat menunjuk 1 (satu) orang personil yang membidangi dari Instansi Saudara yang akan ditetapkan nantinya sebagai anggota Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat Tahun 2018.
4. Nama personil dimaksud diharapkan dapat disampaikan pada kami paling lambat tanggal 23 Februari 2018 dan dialamatkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Cq. Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor (Fax 0751 445232 Cp. Sdri. Yanti 08127682810 dan Sdri. Roza 082169030392) dan email kws.dlhprovsumbar@gmail.com.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA,

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670928-199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang
2. Arsip.

Lampiran Surat Nomor : 660/108/TL/DLH-2018
Tanggal : 12 Februari 2018
Perihal : Permintaan Personil Tim Penyusun DIKPLHD Tahun 2018

Daftar alamat yang dituju:

Kepada Yth.:

1. Sdr. Ka. Bappeda Prov. Sumbar di Padang
2. Sdr. Ka. BPBD Prov. Sumbar di Padang
3. Sdr. Ka. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar di Padang
4. Sdr. Ka. Dinas PSDA Prov. Sumbar di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Prov. Sumbar di Padang
6. Sdr. Ka. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar di Padang
7. Sdr. Ka. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar di Padang
8. Sdr. Ka. Dinas tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar di Padang
9. Sdr. Ka. Dinas ESDM Prov. Sumbar di Padang
10. Sdr. Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar di Padang
11. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar di Padang
12. Sdr. Ka. Dinas Perhubungan Prov. Sumbar di Padang
13. Sdr. Ka. Dinas Sosial Prov. Sumbar di Padang
14. Sdr. Ka. BPS Prov. Sumbar di Padang
15. Sdr. Ka. BMKG Sicincin di Sicincin
16. Sdr. Ka. BMKG Koto Tabang di Agam



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 270 - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, TIM PENGUMPUL DATA DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN TIM PENILAI DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

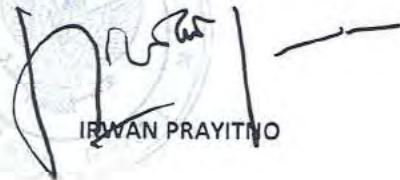
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pengumpulan Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Penilaian Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tim Pengumpul Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018 dan Tim Penilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

penilaian terhadap dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah kabupaten/kota Tahun 2017.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 11 APRIL 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Sdr. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Dinas/Instansi Terkait;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-270-2018

TANGGAL : 11 APRIL 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, TIM PENGUMPUL DATA DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN TIM PENILAI DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM ANALISIS
1.	IRWAN PRAYITNO	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2.	Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3.	Ir. SITI AISYAH, M.Si	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah
4.	YOSMIKE YUSRA, SE,M.Si	Kabid. Tata Lingkungan	Ketua
5.	DESRIZAL, ST	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Sekretaris
6.	Ir. NOVARITA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Editor
7.	PM	Plt. Kabid. Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	Editor
8.	PETRIAWATY, SE.MM	Kabid. Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas	Editor
9.	SISKA WARDENI, ST, M.Sc, M.Eng	Kasi Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
10.	DEVI HENDRA, S.Si. M.Si	Kasi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
11.	Ir. VIANTI ZAMI	Kasi Pengelolaan Sampah	Anggota
12.	AULIA RAHMADANI M.Si	Kasi LB3	Anggota
13.	ADRIAN, ST,M.Si	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
14.	TEGUH ARIEFianto, ST	Kasi Kerusakan Lingkungan	Anggota
15.	FEBRY YENTI DJAFRI, SH.MH	Kasi Pentaatan Hukum Lingkungan	Anggota
16.	M. ARIEF NOVIADY, ST, M.Si	Kasi Pencemaran Lingkungan	Anggota
17.	Drs. BUSTANUL ARIFIN, MSi	PSLH Universitas Andalas	Anggota
18.	Drs. KHAIRUL	PSLH Universitas Andalas	Anggota
19.	DR. MAHDI	PSLH Universitas Andalas	Anggota
20.	DR. DARMAWAN	PSLH Universitas Andalas	Anggota
21.	DR. MARGANOF M.Si	PSLH Universitas Muhammadiyah	Anggota
22.	SYAIFUDDIN ISLAMI, STP, MSi	LSM Andalas Bumi Lestari	Anggota
23.	ANDI IRAWAN, ST	Staf DLH	Anggota
24.	DEDI HARIAN, ST	Staf DLH	Anggota
25.	ZAKI FATRAMANSIA, ST	Staf DLH	Anggota
26.	DIKARAMA KAULA, ST	Staf DLH	Anggota
27.	RINI RAHMA PUTRI, ST	Staf DLH	Anggota
28.	SYAFRIDA YANTI, ST	Staf DLH	Sekretariat
29.	SOSLIATI	Staf DLH	Sekretariat
30.	ROZA ZULFITA, ST	Staf DLH	Sekretariat
31.	PRISILLA YUMERI, SE	Staf DLH	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-270-2018

TANGGAL : 11 APRIL 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, TIM PENGUMPUL DATA DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN TIM PENILAI DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUMPUL DATA DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM ANALISIS
1.	Ir. SITI AISYAH, M.Si	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si	Kabid. Tata Lingkungan	Ketua
3.	DESRIZAL, ST	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Sekretaris
4.	AFRIZON	Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
5.	ILHAM WAHAB, S.Sos	BPBD Prov. Sumbar	Anggota
6.	NURBAITI, ST, M.Eng	Dinas PSDA Prov. Sumbar	Anggota
7.	Ir. PALASTRI, M,Eng Drs. DANANG W JATI, DUMP.MUP EKO JUANDRI, ST,MT	Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Sumbar	Anggota
8.	PM	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar	Anggota
9.	ANDRIANI S.Sos,MM	Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	Anggota
10.	PM	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar	Anggota
11.	MAWAD DATUN, ST	Dinas ESDM Prov. Sumbar	Anggota
12.	EKA PUTRA	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar	Anggota
13.	RILA ILAHI, SKM	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Anggota
14.	ELFIS, A.Ma PKB	Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	Anggota
15.	PM	Dinas Sosial Prov. Sumbar	Anggota
16.	WELDA ROZA, S.Si	BPS Prov. Sumbar	Anggota
17.	SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP	Dinas Kehutanan	Anggota
18.	SUGENG	BMKG Sicincin	Anggota
19.	HARTANTO	BMKG Koto Tabang	Anggota
20.	SYAFRIDA YANTI, ST	DLH Prov. Sumbar	Sekretariat
21.	ROZA ZULFITA, ST	DLH Prov. Sumbar	Sekretariat
22.	SOSLIATI	DLH Prov. Sumbar	Sekretariat
23.	PRISILLA YUMERI,SE	DLH Prov. Sumbar	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 270 - 2018
 TANGGAL : 11 APRIL 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, TIM PENGUMPUL DATA DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN TIM PENILAI DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI
1.	Ir. SITI AISYAH, MSi	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	YOSMIKE YUSRA, SE, MSi	Kabid Tata Lingkungan	Ketua
3.	DESRIZAL, ST	Kasi. Kebijakan Wilayah dan Sektor	Sekretaris
4.	Ir. NOVARITA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	PETRIAWATY, SE, MM	Kabid. Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
6.	SISKA WARDENI, ST, M.Sc, M.Eng	Kasi. Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
7.	DEVI HENDRA, S.Si. M.Si	Kasi. Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
8.	ROZA ZULFITA, ST	Staf DLH	Anggota
9.	SYAFRIDA YANTI, ST	Staf DLH	Anggota
10.	SOSLIATI	Staf DLH	Anggota
11.	PRISILLA YUMERI, SE	Staf DLH	Anggota
12.	DWI ELVIA NINGSIH, ST	Staf DLH	Anggota
13.	FERI ALDI	Staf DLH	Anggota
14.	DIKARAMA KAULA, ST	Staf DLH	Anggota
15.	YON FATITI	Staf DLH	Anggota
16.	Ir. BESTARI	Staf DLH	Anggota
17.	YULYA CHARTIAN, SKM	Staf DLH	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 IRWAN PRAYITNO

CURICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	Bustanul Arifin, M.Si
2.	NIP/NIK/Idetitas lainnya	19600228 199003 1 001
3.	NIDN	0028026010
4.	Tempat/Tgl Lahir	Sicincin, 28 Februari 1960
5.	Alamat Rumah	Buah Buluah No. 34 Komplek Andalas Makmur Padang
6.	No. Telepon/Faks/HP	08126752 199
7.	Alamat Kantor	Jurusan Kimia FMIPA Unand, Jl. Kampus Unand, Limau Manis Padang 25163
8.	Nomor Telepon/Faks	0751 71681
9.	Alamat e-mail	ba_arifin@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unand Padang	Unand Padang	
Bidang Ilmu	Kimia	Kimia Organik	
Tahun Masuk/Lulus	1986	1997	
Judul Skripsi/Thesis/ Disertasi	Pencemaran logam berat di pantai barat kota Padang	Isolasi senyawa kumarin dari daun gamal (<i>Gliricidia maculata</i> HBK)	
Nama Pembimbing/ Promotor	Drs. Abu Bakar, MS	Prof. Dr. Sanusi Ibrahim, MS	

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1.	2017	Pemberdayaan Perempuan Melalui Teknologi Kokorudan Quilling Paper Sebagai Usaha Alternatif Berbasis Lingkungan Di Desa Marunggi Kota Pariaman
2.	2016	Pelatihan Teknik <i>Paper Quilling</i> Dengan Memanfaatkan Limbah Kertas Menjadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Nagari Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman
3.	2015	Pengolahan Limbah Kertas Menjadi Produk Kerajinan Tangan Dengan Nilai Jual Tinggi Sebagai Upaya Inovatif Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Nagari Alahan Panjang, Kec Lembah Gumanti, Kab Solok
4.	2014	Penyuluhan Bahaya Bahan Tambahan Makanan Dan Penerapan Teknologi Proses Pengolahan Pewarna Minuman Berbahan Dasar Ubi Ungu Pada Kelompok Pedagang Minuman Di Kawasan Wisata Pantai Tiram, Kecamatan

		Ulakan Tapakis Pariaman
5.	2013	Peningkatan nilai ekonomis bahan pangan lokal tomat berbasis teknologi dan modifikasi pembuatan nata de tomato di Alahan Panjang, Kec Lembah, Gumanti, Kab Solok
6.	2013	Penyuluhan Bahaya Penggunaan Minyak Bekas Bagi Kesehatan Dan Penerapan Teknologi Proses Pengolahan Minyak Bekas Pada Kelompok Jajanan Gorengan Di Kawasan Wisata Pantai Tiram, Pariaman
7.	2013	IbM Pondok Pesantren Gobah V Surau Dan Kapau di Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam Sumatera Barat

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

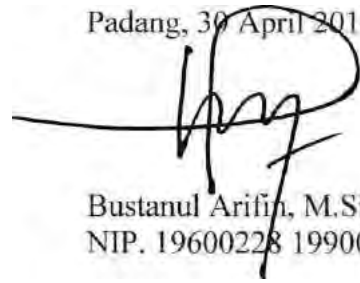
No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Norman Ferdinal, Rizki Alfajri, Bustanul Arifin, J. (2015). Isolation and Characterization of Scopoletin from the bark of <i>Feagraea ceilanica</i> Thumb and antioxidant	Vol. 5 (2015) No. 2	International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology
2.	Uji Antioksidan dan Isolasi Senyawa Metabolisme Sekunder Dari Daun Srikaya (<i>Annona squamosa</i> L)	Vol. 2 No. 1, Maret 2013	Jurnal Kimia Unand (ISSN No. 2303-3401)
3.	Analisis pH, BOD, COD, Logam (Pb, Cu, Cd, Fe dan Zn) Pada Drainase Fakultas MIPA dan Fakultas Farmasi Unand	Vol. 2 No. 1, Maret 2013	Jurnal Kimia Unand (ISSN No. 2303-3401)

E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional	Isolasi flavonoid dari biji biji kakao (<i>Theobroma cacao</i>)	2017, UMRAH Tanjung Pinang
2.	Seminar BKS-PTN Wil Barat	Isolasi dan uji antioksidan senyawa kumarin dan flavonoid dari tanaman <i>Fagraea ceilanica</i> Thunb.	22 – 24 Mei 2016, UNSRI Palembang
3.	Seminar BKS-PTN Wil Barat	Isolasi dan karakterisasi senyawa flavonoid dari daun salam (<i>Polyanthi folium</i>)	7 - 9 Mei 2015, Univ. Tanjungpura Pontianak
4.	Seminar BKS-PTN Wil Barat	Pengaruh berbagai ekstrak tanaman sidukung anak (<i>Phyllanthus nuriri</i>) dan kumis kucing (<i>Orthosiphon stamineus</i>) terhadap kelarutan kalsium oksalat.	9-10 Mei 2014, IPB Bogor

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Padang, 30 April 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bustanul Arifin', written over a faint circular stamp.

Bustanul Arifin, M.Si
NIP. 19600228 199003 1 001

Curriculum Vitae

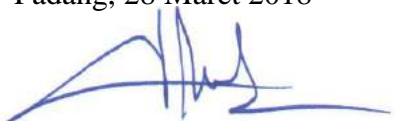
1. N a m a : Dr. Chairul, MS
2. Pangkat/GoL. : Pembina Utama Madya/ Gol. IV C
3. N I P : 195710071987031002 ; NIDN 0007105712
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Pendidikan : S1 Univ.Andalas FMIPA Biologi 1984
S2 Institut Teknologi Bandung 1987
S3 Kagoshima University 2010
6. Pekerjaan : Staf Pengajar Univ. Andalas Padang
7. Bidang Keahlian : Biologi(Ekologi Tumbuhan & Biokonservasi)
8. Alamat Kantor : FMIPA Biologi Univ. Andalas Padang
9. Alamat Rumah : Komp. Unand Blok B II 05/03 Ulu Gadut Padang
10. No.Telp.HP : (0751) 73069 / HP.081372092457
11. Email : chairul57@yahoo.com

12. Training/Kursus : 1.Kursus Dasar-Dasar AMDAL Tipe A 1993 Pusat Studi Lingkungan Hidup Univ.Andalas Padang
2.Training Course in Plant Ecology at Osaka Kyoiku University Japan 1995
3.Training Course in Rehabilitation Tropical Rain Forest at Kagoshima University Japan 2006
4.Training of Trainer (TOT) KLH – UI 2012

13. Penelitian : 1. Analisis Anak-anak Pohon di Hutan Kebun Raya Setia Mulia (TAHURA) Padang 1983.
2. Struktur Dan Komposisi Tumbuhan Habitat Rafflesia Di Sumatra Barat 1994
3. Jatuhan Serasah Hutan Tropika Di SUMBAR 1995
4. Comparison of several litter-fall of fagaceus in tropical forest in west Sumatra 1995
5. Inventarisasi dan Analisis Vegetasi Hutan Cagar Alam Lembah Anai Sumatra Barat 2000
6. Ecological Study on Growth Properties of Major trees Species at a selective Logging Forest stand in the Equatorial rain forest area west Sumatra 2002
7. Comparative study on Decomposition of leaf litter Between a Warm-temperate evergreen oak forest and Tropical rain forest 2002
8. Leaf Longevity of Tropical Shrub Species in a open Forest in Sumatra 2006
9. Phenological study on a tropical secondary forest in West Sumatera, Indonesia 2010

14. Pengalaman Kerja :
1. Tim Studi Potensi Danau-Danau Di Sumatra Barat Pusat Studi lingkungan Hidup Univ.Andalas 1984
 2. Tim Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan AMDAL PT Polyguna Nusantara, 1991
 3. Tim Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan AMDAL Usaha Penggilingan Minyak Kelapa CV Usaha Setia Pariaman 1992
 4. Tim Studi AMDAL Pembuatan Depot Minyak PERTAMINA Teluk Kabung Padang 1994
 5. Tim Studi Revisi AMDAL HPH Bukit Raya Madusa Sawah Lunto Sijunjung 2003
 6. Tim Studi Penyajian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Perkebunan Sawit PT.TIDAR KERINCI AGUNG Sawah Lunto Sijunjung 2004
 7. Tim Studi AMDAL Pemasangan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (SUTET) Maninjau-Pasaman 2005
 8. Tim Studi AMDAL Tambang Batubara di Salido Kab. Pesisir Selatan.Pt. Tapak konsultan 2008.
 9. Tim Studi AMDAL Tambang Logam Dasar PT. Wira Patriot Di Solok Selatan 2008
 10. Tim Studi AMDAL Penambangan Bijih Besi PT. Sumber Minera Bersama 2010
 11. Tim Studi UKL-UPL Tambang Bijih Besi di Aia Dingin Kab. Solok 2010
 12. Tim Studi AMDAL Kebun Sawit PT. Hastika di Kab.Solok Selatan 2011
 13. Tim Studi AMDAL Tambang Bukit Kapur 412 PT. Semen Padang 2011
 14. Tim Studi AMDAL Pelabuhan Peti Kemas PELINDO II Medan 2011
 15. Tim Studi AMDAL Pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kab. 50 Kota
 16. Tim Studi Penyusunan AMDAL Rumah Sakit Univ. Andalas Padang 2012
17. Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang Tahun 2012

Padang, 28 Maret 2018



(Dr.Chairul MS)

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : **Dr. Mahdi, SP, MSi.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Tarutung, Kerinci, 10 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
Alamat : Kampus Unand Limau Manis, Kec. Pauh Padang 25163
Telp./Faks. : 0751-72774/0751-72702
Alamat Rumah : Perumahan Cemara I Blok BB/3 Gn. Pangilun Padang
Telp./Faks. : 085272625091
Alamat e-mail : kuteihmahdi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
2008	S3	Asian Institute of Technology	Natural Resources Management
1999	S2	Universitas Andalas	Perencanaan Pembangunan
1996	S1	Universitas Andalas	Pembangunan Pedesaan

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2015	ToT Pendampingan Magang pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Pusrenbang SDM Kementerian LH dan Kehutanan RI
2013	Short Training on Dendrochronology	Kasetsart University, Bangkok Thailand
2011	Training Workshop: "Theory and Methodology on International Forestry Resources and Institutions (IFRI) - Asia"	IFRI-AIT, Bangkok Thailand
2009	Pelatihan Applied Approach (AA)	Universitas Andalas
2007	Kursus singkat "Legislation and Institutional Arrangements in IWRM"	CK-Net INA
2001	Pelatihan penggunaan teknik Sistem Informasi Geografis (GIS)	Ditjen PHKA Dephut RI dan Yayasan KEHATI
2001	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Instruksional (PEKERTI)	Universitas Andalas
2001	Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tingkat dasar	IPB Bogor

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Ketua Program Studi	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas	2015 - sekarang

Ketua Program Studi	Program Studi Integrated Natural Resources Management (INRM) Program Pascasarjana Universitas Andalas	2010 - 2015
Sekretaris Program Studi	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas	2002 - 2004
Ketua Unit Pengembangan Program (UPP)	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas	2009 - sekarang

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun ... s.d. ...
Pembangunan Pertanian	S1	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian	2000 - sekarang
Pengantar Ilmu kependudukan	S1	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian	2000 - sekarang
Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan	S1	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian	2001 – sekarang
Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi	S1	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian	2002 - sekarang
Ekonomi Mikro	S1	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian	2004 - sekarang
Ekonomi Lingkungan	S2	Program Pascasarjana Universitas Andalas	2010 - sekarang
Kependudukan dan Lingkungan Hidup	S2	Program Pascasarjana Universitas Andalas	2008 - sekarang
Integrated Natural Resources Management	S2	Program Pascasarjana Universitas Andalas	2007 - 2008

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2016-2017	Forest Social-Ecological System (SES) in implementing REDD+ projects in Indoensia, Thailand, Vietnam, and Myanmar	Anggota Peneliti	Toyota Foundation
2016	Perkembangan kebun kelapa sawit dalam kaitan dengan pengelolaan berkelanjutan DAS Batanghari	Ketua Peneliti	Universitas Andalas
2016	Perkembangan kebun kelapa sawit dalam kaitan dengan pengelolaan berkelanjutan DAS Batanghari	Ketua Peneliti	Universitas Andalas
2014-2015	Bridging Policy Practice Gap in the Effective Implementation of REDD+ Programs in SE Asia: Collaborative Learning among Indonesia, Thailand and Vietnam	Anggota Peneliti	Toyota Foundation
2014	Dampak intervensi program pengentasan kemiskinan pada variabel demografi di GALCILTAS Sumatera Barat	Ketua Peneliti	BKKBN
2013	Kajian Jasa Lingkungan KPHL Model Sijunjung	Anggota Peneliti	Pemda Sumatera Barat
2012-2015	Kajian Komoditi Pertanian Pasaman	Anggota Peneliti	Pemda Pasaman

2010-2011	Kajian Penyaluran Dan Pengelolaan Berkelanjutan Kredit Mikro Nagari (KMN) Di Sumatera Barat Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan	Ketua Peneliti	DIKTI
2009	Efisiensi Tataniaga Padi dan Beras Dalam Kaitan dengan Liberalisasi Perdagangan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional	Ketua Peneliti	DIKTI
2007-2008	Local Responses to Changing Contexts of Natural Resources Management: Case Study at Lembang Sub-Watershed of West Sumatra, Indonesia (Penelitian Disertasi)	Peneliti	Ford Foundation
2005	Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat	Anggota Peneliti	APBD Propinsi Sumatera Barat
2004	Peran Lembaga Keuangan Lokal dalam Pengembangan Usaha Kerakyatan	Ketua Peneliti	APBD Propinsi Sumatera Barat
2003	Kajian Gerakan Pengembangan Ekonomi Rakyat One Village One Product (OVOP) di Sumatera Barat	Anggota Peneliti	APBD Propinsi Sumatera Barat
2001	Produksi dan Pemasaran Jagung Sumatera Barat	Ketua Peneliti	APBD Propinsi Sumatera Barat
2000	Tekanan aktivitas ekonomi masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat	Ketua Peneliti	SRG-TNKS Yayasan KEHATI
1999	Perencanaan alokasi lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet di Sumatera Barat	Penelitian Tesis	Univ. Andalas
1999	Pemberdayaan Masyarakat Atas dampak krisis ekonomi	Anggota tim	Univ. Andalas
1996	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap perluasan kesempatan kerja di pedesaan Sumatera Barat	Penelitian skripsi	Univ. Andalas
1996	Survey studi kelayakan penyadapan Getah Pinus PT. Inhutani IV	Anggota tim	PT. Inhutani

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2017	What Is The Minimum Rubber Price To Stop Farmers Converting Old Growth Forest Into Shifting Cultivation? A Case Study From Pasaman District, West Sumatra Province, Indonesia	Malaysian Applied Biology Journal Vol 46. No. 4 Page 111-118
2017	Decentralization of Forest Management, Local Institutional Capacity and its Effect on Access of Local People to Forest Resources: the Case of West Sumatra, Indonesia	Book chapter: Waltham, MA: Elsevier Publishers (forthcoming)
2009	Livelihood Change and Livelihood Sustainability in the Uplands of Lembang Subwatershed, West Sumatra, Indonesia, in a Changing Natural Resource Management Context	Environmental Management
2004	Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Ketahanan Pangan Tahun 2000 (PKP 2000) di Kabupaten Solok Secara Partisipatif	Warta Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

2003	How to deliver a financial assistance for rural communities?: A case study of BLM projects in Sumatra Island	Jurnal Stigma: an agricultural science journal
2003	Kajian pengembangan kepariwisataan berbasis ekonomi kerakyatan	Buletin Balitbang
2002	Tekanan aktivitas ekonomi masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Jurnal Stigma: an agricultural science journal

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Institutional response to decentralization of natural resources management at local level: the case of West Sumatra, Indonesia	RECOFTC, Bangkok, Thailand
2007	Upland people's livelihood changes under changing of governance and socio biophysical of natural resource: case of Batang Lembang Watershed, West Sumatra Indonesia	Hanoi University of Agriculture, Vietnam
2001	The Pressure of Community Economical Activities on The Sustainability of Tropical Rainforest : A Case Study along the Northwestern Bufferzone of Kerinci Seblat National Park, Indonesia	Third International Seminar on Tropical Rainforest Plants and Their Utilization for Development.

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2017	Livelihood Strategy Of Shifting Cultivator Against Market Pressure: A Case From Pasaman District, West Sumatra Province, Indonesia	Paper presented in "16th Global Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC) di Utrecht, The Netherland, 2017".
2016	Expansion of palm oil plantation and sustainable management of Batanghari River Basin of Sumatra, Indonesia	Paper disampaikan dalam seminar nasional <i>Perhimpunan Ahli Ekonomi Pertanian Indonesia</i> . Wakatobi, 24 – 25 Januari 2016
2015	DAMPAK KOMERSIALISASI PERTANIAN RAKYAT BAGI EKONOMI RUMAHTANGGA PETANI: Kasus perubahan pertanian padi sawah menjadi jagung pakan ternak di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat	Paper disampaikan dalam seminar nasional <i>Pertanian Indonesia dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015</i> . Makasar, 22 – 23 Januari 2015
2014	Assessing Indonesian Commitments and Progress on Emission Reduction from Forestry Sector	Paper presented in International Conference on Forests, Soil and Rural Livelihoods in a Changing Climate. Kathmandu University in collaboration with Norwegian University of

		Life Sciences, Norway; Department of Forest Research and Survey (GoN); Nepal Agroforestry Foundation and Forest Action Nepal. 27 - 30 September 2011. Duli khel. Nepal.
2013	Developing Organizational Structure of Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lampuluh Kota Distrct, West Sumatra, Indonesia, for sustainable forest management	Paper presented in "14th Global Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC) di Kitafuji, Jepang, 2013".
2011	Decentralization of Forest Management, Local Institutional Capacity and its Effect on Access of Local People to Forest Resources: the Case of West Sumatra, Indonesia	Paper presented in "13th Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC) di Hyderabad, India, 10-14 January 2011".
2010	The dynamic of local institution in poverty reduction: case study on management of "Kredit Mikro Nagari" in West Sumatera, Indonesia	Paper presented in Regional Network on Poverty Eradication (RENPER) Seminar at Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Kota Bahru, Malaysia. 26-28 October, 2010
2009	Lokakarya pembelajaran berpusat pada mahasiswa dalam kurikulum berbasis kompetensi di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas	Program Studi Agribisnis
2005	Workshop on Gender and Natural Resources Management	PSI dan AIT
2005	Dialog Nasional Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia	POPMASEPI KORWIL I Sumatera
2005	Workshop on Institutional and Policy Analysis	PSI dan AIT
2004	Seminar Nasional Penerapan Agro Inovasi Mendukung Ketahanan Pangan dan Agribisnis	BPTP Sumbar Sukarami
2004	Seminar on Food Security: Comparing Asian Experience	Faperta Unand
2004	Workshop Menuju Swasembada Jagung dan Pengembangan Kedele di Sumatra Barat	Faperta Unand
2003	Workshop on Agricultural Policy Analysis	Faperta Unand

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
2017	Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030
2017	Ketua tim Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Propinsi Sumatera Barat

2014	Ketua tim Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Bukit Barisan Sumatera Barat
2013	Ketua tim Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Sijunjung
2012	Anggota tim Kajian Akademis Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Model Limapuluh Kota
2011	Anggota tim Kajian Akademis Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Model Sijunjung
2013	Anggota tim Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Sumatera Barat 2012
2012	Anggota tim Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Sumatera Barat 2011
2011	Anggota tim Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Sumatera Barat 2010
2010	Anggota tim Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Sumatera Barat 2009
2009	Pemetaan Potensi Komoditi Unggulan Berdasarkan Agroekologi Kabupaten Solok Selatan
2009	Evaluasi RPJM kota solok bidang ekonomi kerakyatan yang maju dan berorientasi pasar
2008	Seleksi komoditi dan usaha unggulan mendukung upaya pengembangan ekonomi masyarakat kota Solok
2007	"Dana Bergulir Bagi Usahatani", Akankah bisa berkelanjutan?: Studi Kasus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat
2004	Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Ketahanan Pangan Tahun 2000 (PKP 2000) di Kabupaten Solok Secara Partisipatif

PENGHARGAAN/PIAGAM

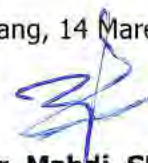
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2013	Prof. Elinor Ostrom International Fellowship on Parctice and Policy on Commons - 2013	International Association for the Study of the Commons (IASC)
2009	Peneliti Muda Berprestasi Universitas Andalas	Lembaga Penelitian Universitas Andalas
2003	Dosen teladan III Fakultas Pertanian Universitas Andalas	Dekan Fakultas Pertanian

KEGIATAN KONSULTANSI

Tahun	Kegiatan
2012	Konsultan Pembinaan Teknis Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP (Dekonsentrasi) Sumatera Barat
2011	Konsultan Pembinaan Teknis Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP (Dekonsentrasi) Sumatera Barat
2010	Konsultan Pembinaan Teknis Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP (Dekonsentrasi) Sumatera Barat

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Padang, 14 Maret 2018



Dr. Mahdi, SP, MSi.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr.Ir.Darmawan, MSc
2	Jenis Kelamin	Laki - laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	1966090119921031003
5	NIDN	0001096608
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang/ 1 September 1966
7	E-mail	darmawan708@gmail.com
8	Nomor telepon/ HP	081266790425
9	Alamat Kantor	Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Kampus Limu Manis Padang-25163.
10	Alamat Rumah	Jl. Binuang Kp. Dalam No. 1, Kecamatan Pauh, Padang
11	Nomor Telfon	0751-4782721
10	Nomor Telfon/Fax.	-
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 15 orang; S2 = 2 orang; S3 = -
12	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar-Dasar Ilmu Tanah 2. Kesuburan Tanah dan Pemupukan 3. Pengelolaan Lahan Sawah 4. Hidrologi Pertanian 5. Penilaian Kualitas Tanah dan Air 6. Dasar-Dasar Amdal

B. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama PT	Universitas Andalas	Shimane University-Japan	Tottori University, Japan
Bidang Ilmu	Kimia Tanah	Life and Environmental Sciences	Bioresources Sciences
Tahun Masuk	1986	2002	2004
Tahun Lulus	1991	2004	2007
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pengaruh penambahan	The long-term effect of green	The long- term effect of green

	kompos terhadap perubahan sifat subsoil tanah mineral masam	revolution technology on carbon and nitrogen status in sawah soil	revolution technology on sawah soil properties
Nama Pembimbing	Prof. Dr. Fachri Ahmad	Prof. Dr. Toshiyuki WAKATSUKI	Prof. Dr. Tsugiyuki MASUNAGA

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (jt)
1	2016	Peningkatan Kulaitas Lahan Melalui Pemberian Biochar Limbah Padat Kelapa Sawit	Kemenkeu	425.0
2	2016	Combating Soil Organic Matter Deterioration at Intensive Paddy Field Through Carbon Fertilizer Application in West Sumatra, Indonesia	DIKTI + Jepang	160.0
3	2015	Combating Soil Organic Matter Deterioration at Intensive Paddy Field Through Carbon Fertilizer Application in West Sumatra, Indonesia	DIKTI + Jepang	185.0
4	2014	Combating Soil Organic Matter Deterioration at Intensive Paddy Field Through Carbon Fertilizer Application in West Sumatra, Indonesia	DIKTI + Jepang	165.5
5	2013	Nutrient Status of Paddy Field Under Different Land Management System at Pasaman District West Sumatra, Indonesia	Jepang	100
6	2013	Study on decomposition pattern Organic matter at intensive sawah and its relationship with carbon sequestration	Jepang	75
7	2012	Nutrient movement characteristic on terrace sawah occupied by cascade irrigation system in West Sumatra, Indonesia	DIKTI + Jepang	143
8	2012	Usaha Peningkatan Kualitas Lahan Karet	DIKTI +	174

		Rakyat melalui Penambahan Biocharcoal di Sumatra Barat	Jepang	
9	2011	Nutrient movement characteristic on terrace sawah occupied by cascade irrigation system in West Sumatra, Indonesia	DIKTI + Jepang	148
10	2011	Usaha peningkatan produksi sawah bukaan baru melalui penambahan biocharcoal dan irigasi intermitten	Kementan	78
11	2010	Nutrient movement characteristic on terrace sawah occupied by cascade irrigation system in West Sumatra, Indonesia	DIKTI + Jepang	157
12	2010	Reducing iron toxicity on new establish sawah through irrigation system modification	Mandiri + Jepang	75
13	2009	Study on nutrient mass balance on intensive terrace sawah as the base of effective and efficient nutrient management.	DIKTI + Jepang	128
14	2009	Utilization of rice husk ash as silica source to improve growth and production of rice.	Mandiri + Jepang	75
15	2009	Characteristic of phosphorous (P) movement in sawah soils occupied by cascade irrigation system	Mandiri + Jepang	75
16	2009	Effect of temperature on the available silica content of rice husk ash and rice plant growth.	Mandiri	50
17	2008	Effect of green revolution technology from 1960s to 2007 on sawah soils properties in Thailand, special evaluation of carbon sequestration.	Jepang + Thailand	175
18	2008	Multifunctionality of sawah based intensive rice farming in Java, Indonesia, in special reference to carbon sequestration.	Jepang	275
19	2007	Near infrared analyses of the changes of lowland sawah soil in Java, Indonesia and Bangladesh during the green revolution period 1967-2003: Carbon and nitrogen.	Jepang	275
20	2007	Near infrared analyses of the changes of lowland sawah soil in Java, Indonesia and	Jepang	275

		Bangladesh during the green revolution period 1967-2003: Ph and exchangeable bases.		
21	2007	The Changes of Available Phosphorus during the Period of 1970-2003 in Sawah Soil; a Case Study in Java, Indonesia.	Jepang	100
22	2006	The Effect of Green Revolution Technology during the Period of 1970-2003 on Sawah Soil Properties in Java, Indonesia; I. Carbon and Nitrogen Distribution under Different Land Managements and Soil Types.	Jepang	200
23	2006	The Effect of Green Revolution Technology during the Period of 1970-2003 on Sawah Soil Properties in Java, Indonesia; II. Changes of Some Chemical Properties of Soils	Jepang	200
24	2006	The Effects of Long-Term Intensive Rice Cultivation on the Available Silica Content of Sawah Soils; the Case of Java Island, Indonesia	Jepang	200
25	2006	The effect of long-term intensive rice cultivation on the available silica content of sawah soil; the case of Java Island, Indonesia.	Jepang	200
26	2006	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on sawah soil properties in Java, Indonesia in relation to the land management practices.	Jepang	200
27	2005	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on sawah soil properties in Java, Indonesia; Carbon and nitrogen distribution under different land management and soil types.	Jepang	200
28	2005	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on chemical properties of sawah soil in Java, Indonesia.	Jepang	200
29	2004	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on chemical properties	Jepang	200

		of sawah soil in Java, Indonesia.		
30	2003	The effect of green revolution during the period 1970-2003 on some chemical properties of sawah soil in Java, Indonesia.	Jepang	200
31	2003	Watershed management and sustainability of sawah soil in Solok and Padang Panjang, West Sumatra, Indonesia	Jepang	100
32	2002	Indigenous Soil Fertility Evaluations in Sipisang Village of Minangkabau People, West Sumatra	Jepang	150
33	2002	Indigenous Knowledge and Techniques for Soil and Landscape Formation in Watersheds of Sipisang Village, West Sumatra.	Jepang	150

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (jt)
1.	2016	Perbaikan kualitas lahan sawah dengan menggunakan biochar sekam di Desa Bangun Rejo, Solok Selatan	Pascasarjana Univ. Andalas	10
2.	2008	Penanggulangan penyakit rebah tandan pada tanaman padi di kecamatan Selayo, Solok	Mandiri	10
3.	2008	Pengabdian Masyarakat pada pada Lahan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas	Mandiri	5
4.	2011	Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Pauh dalam rangka Lustrum Unand	Institusi	-
5.	2013	Teknik pembuatan biochacoal dari sekam padi di Kenagarian Selayo, Kabupaten Solok	DIPA-Unand	43

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah (5 tahun terakhir)

No.	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	The long-term effect of cascade irrigation system on the paddy soil properties and rice productivity in West Sumatra. Indonesia.	Journal of Agricultural Science and Technology	Article in Press/ 2013
2	Effect of long-term phosphorous fertilizer	Journal of	Article in Press/

	application on the accumulation of cadmium in sawah soil.	Agricultural Science and Technology	2013
3	Nutrient movement characteristic on terrace sawah occupied by cascade irrigation system in West Sumatra, Indonesia.	Journal of Ecology and the Environment	Vol. 3(4): 139-148/ 2011
4	The long-term changes of heavy metal content in extremely intensive sawah in Java, Indonesia.	Journal of Pedologist	Special edition page: 108-117/ 2011
5	Nitrogen and Phosphorous Movement Characteristic in Terrace Paddy Field Using Cascade Irrigation System in West Sumatra, Indonesia	Journal of Tropical Soil	VoL 16, No-2,2011: 129-138/ 2011
6	Multifunctionality of sawah based intensive rice farming in Java, Indonesia, in special reference to carbon sequestration and conservation.	J. Biospectrum	Vol. 5 (1) 2009, hal:17-24./ 2010
7	The long-term effect of blanket phosphorous fertilizer application on the available P content in sawah soil; comparative study in Java, Indonesia.	Journal of Tropical Soil	Vol. 14(1): 9-18/ 2010
8	Changes of soil properties on various ages of rubber trees in Dhamasraya, West Sumatra, Indonesia.	Journal of Tropical Soil	Vol. 15(3): 221-227/ 2009
9	Pemanfaatan Biocharcoal Sebagai Sumber Silica Untuk Memperbaiki Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Padi.	Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional	2009
10	Multifunctionality of sawah based intensive rice farming in Java, Indonesia, in special reference to carbon sequestration and conservation	J. Biospectrum. Vol. 5 (1) 2009, hal:17-24. ISSN 1858-4276	2009
11	The long term effect of fertilizer application on the available phosphorous content in sawah soil	Jurnal Tanah Tropika, Universitas Lampung. ISSN 0852-257X	2008
12	Multifunctionality of sawah based intensive rice farming in Java, Indonesia, in special reference	The 8 th Conference of	2007

	to carbon sequestration	the East and Southeast Asian Federation of Soil Science. Tsukuba, Ibaraki, Japan, October, 2007	
13	Near infrared analyses of the changes of lowland sawah soil in Java, Indonesia and Bangladesh during the green revolution period 1967-2003: Carbon and nitrogen	The 8 th Conference of the East and Southeast Asian Federation of Soil Science. Tsukuba, Ibaraki, Japan, October, 2007	2007
14	Near infrared analyses of the changes of lowland sawah soil in Java, Indonesia and Bangladesh during the green revolution period 1967-2003: pH and exchangeable bases	The 8 th Conference of the East and Southeast Asian Federation of Soil Science. Tsukuba, Ibaraki, Japan, October, 2007	2007
15	The Effect of Green Revolution Technology during the Period of 1970-2003 on Sawah Soil Properties in Java, Indonesia; I. Carbon and Nitrogen Distribution under Different Land Managements and Soil Types	Soil Science and Plant Nutrition, Vol, 52(5) pp: 634 – 644, October, 2006. doi: 10.1111/j.1747-0765.2006.00075.x. ISSN 0038-0768	2006
16	The Effect of Green Revolution Technology during the Period of 1970-2003 on Sawah Soil Properties in Java, Indonesia; II. Changes of	Soil Science and Plant Nutrition, Vol, 52(5), pp:	2006

	Some Chemical Properties of Soils	645 – 653, October, 2006. doi: 10.1111/j.1747- 0765.2006.0005 4.x. ISSN 0038- 0768	
17	The Effects of Long-Term Intensive Rice Cultivation on the Available Silica Content of Sawah Soils; the Case of Java Island, Indonesia	Soil Science and Plant Nutrition, Vol, 52(6), pp: 745 – 753, December, 2006 doi: 10.1111/j.1747-0765.2006.0008 9.x. ISSN 0038-0768	2006
18	The Changes of Available Phosphorus during the Period of 1970-2003 in Sawah Soil; a Case Study in Java, Indonesia.	Wetland Ecology and Management	2006
19	The effect of long-term intensive rice cultivation on the available silica content of sawah soil; the case of Java Island, Indonesia	Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 52, p. 195, September, 2006. ISSN 0288-5840	2006
20	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on sawah soil properties in Java, Indonesia in relation to the land management practices	18 th World Congress of Soil Science, Pennsylvania, Philadelphia, USA, p. 139, July, 2006.	2006
21	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on sawah soil properties in Java, Indonesia; Carbon and nitrogen distribution under different land management and soil types	Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 51,	2005

		p. 196. September, 2005. ISSN 0288-5840	
	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on chemical properties of sawah soil in Java, Indonesia	World Rice Conference Tsukuba, Ibaraki, Japan, p. 740, November, 2004	2004
22	The effect of green revolution technology during the period of 1970-2003 on chemical properties of sawah soil in Java, Indonesia	Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 50, p. 194, September, 2004. ISSN 0288-5840	2004
23	The effect of green revolution during the period 1970-2003 on some chemical properties of sawah soil in Java, Indonesia	Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 49, p. 181. August, 2003. ISSN 0288- 5840	2003
24	Watershed management and sustainability of sawah soil in Solok and Padang Panjang, West Sumatra, Indonesia.	Proceeding of the Annual Meeting, Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 48, p. 95. March, 2002.. ISSN 0288-5840.	2002
25	Indigenous Soil Fertility Evaluations in Sipisang Village of Minangkabau People, West Sumatra.	Japanese Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Vol. 73, 741 – 753, 2002. ISSN 0288-5840.	2002

26	Indigenous Knowledge and Techniques for Soil and Landscape Formation in Watersheds of Sipisang Village, West Sumatra.	Japanese Journal of Soil Science Plant Nutr. Vol. 73, 755 – 763, 2002. ISSN 0288-5840.	2002
----	---	--	------

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Makalah	Waktu dan Tempat
1	Asian Conference on the Life Sciences and Sustainability	Combating Soil Organic Matter Deterioration at Intensive Paddy Field Through Carbon Fertilizer Application in West Sumatra, Indonesia	Hiroshima, Japan, 2015
2	Kongres Nasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia	The Role of Intensive Sawah as Carbon Sink in the Tropical Region; Case Study of West Sumatra, Indonesia	Malang, 2015
3	Asian Conference on the Life Sciences and Sustainability	The Long-term Effect of Cascade Irrigation System on the Paddy soil Properties and Rice Productivity in West Sumatra, Indonesia	Hiroshima, Japan, 2014
4	The 13 th East and Southeast Asia Soil Science Federation Conference	The role of intensive sawah as carbon sink in the tropical region; case study West Sumatra, Indonesia	Bogor, Indonesia, 2012
5	International Workshop on „Site Specific Farmers” Personal Irrigated “Sawah” Eco-technology and Rice Farming	Long-term Effect of Green Revolution Technology on Sawah Soil Properties in Java, Indonesia (Keynote Speaker)	Accra, Ghana/ November, 2011

	<i>(SERIF) in Ghana, Nigeria and Sub-Saharan Africa"</i>		
6	Invited lecturer in Agriculture Faculty, Kinki University- Japan.	The nutrient mass balance in intensive terrace sawah occupied by cascade irrigation system in West Sumatra, Indonesia. Kinki, Nara Prefecture, Japan, November 20, 2010	Kinki University, Nara-Jepang/ October2011
7	Invited lecturer in Agriculture Faculty, Kinki University- Japan.	The nutrient movement characteristic in intensive terrace sawah occupied by cascade irrigation system in West Sumatra, Indonesia. Kinki, Nara Prefecture, Japan, December 18, 2009.	Kinki University, Nara-Jepang/ November 2010
8	The 9 th ESAFS (East and Southeast Asia Federation of Soil Science Society) Conference.	Soil as a convergent technology in tandem with human and ecosystem health.	Seoul, Korea, October 2009
9	The 8 th East and Southeast Asian Federation of Soil Science (ESAFS) conference,	The long-term effect of green revolution technology on sawah soil properties in Java Indonesia.	Tsukuba, Ibaraki-Jepang/ October, 2007
10	Regional Meeting of Agricultural Sciences.	Topic: The role of intensive sawah as carbon sinker in tropical region; case study West Sumatra.	Palembang, March 2011
11	National conference of Soil and Water Conservation Society.	Topic: The role of sawah multifunctionality in soil and water conservation perspective.	Jambi, November 2010
12	The 2 nd joint seminar Andalas University Indonesia and Prefectural University of	The role of science and biotechnology for the future research development	Padang, August 13 th , 2009

	Hiroshima, Japan		
--	------------------	--	--

G. Editor /Reveiw Journal

No.	Nama Journal	Tahun	Keterangan
1.	Jurnal Tanah Tropika/ Reveiwer	2010 - sekarang	Journal International
2.	Journal of Pedology/ Reveiwer	2010 - sekarang	Journal International
3.	Journal of Soil and Plan Nutrition/ Reveiwer	2011 - sekarang	Journal International
4.	Journal Geoderma/ Reveiwer	2014 – sekarang	Journal International
5.	Asian Journal of Soil and Plant Nutrition/ Editor	2017	Journal International

H. Perolehan HKI

No.	Judul / Tema HaKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Pubik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 tahun terakhir.

No.	Judul / Tema / Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yng diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Soil Science and Plant Nutrition Award (The best manuscript)	Blackwell Publishing	2007
2.	Pemenang penulis terbaik kedua pada Tropical Soil Journal	Universitas Lampung	2010
3.			
4.			

K. Lain – lain


No.	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1.	1994	Survey penetapan lokasi transmigrasi	Mentawai	Anggota
2.	1995	Survey penetapan lokasi transmigrasi	Lunang	Anggota
3.	1996	Survey penetapan tapal batas area Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Propinsi Bengkulu	Anggota
4.	1997	Survey penetapan lokasi kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Propinsi Sumatera Barat	Kabupaten 50 Kota	Anggota
5.	1997	Survey penetapan lokasi kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Propinsi Jambi	Sarolangun	Anggota
6.	1997	Survey penetapan lokasi kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Propinsi Riau	Bangkinang	Anggota
7.	2013	Analisa pencemaran tanah akibat penambangan galian C PT. Semen Padang	Padang	Anggota
8.	2013	Analisa pencemaran tanah akibat aplikasi limbah sawit di PT. TKA	Dharmasraya	Anggota
9.	2013	Tim Teknis Penilai ANDAL Kabupaten Pasaman Barat	Pasaman Barat	Anggota
10.	2014	Tim pemantau ANDAL pembangkit listrik tenaga panas bumi PT. Supreme Energy	Padang Aro, Solok Selatan	Anggota
11.	2014	Tim pemantau ANDAL pembangkit listrik tenaga panas bumi PT. Pertamina Geothermal Energy	Sungai Penuh	Anggota
12.	2014	Tim penyusun dokumen ANDAL kegiatan penambangan bijih tembaga PT. Intan Borneo Internasional, Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto	Sawahlunto	Anggota
13.	2014	Tim penyusun dokumen ANDAL kegiatan penambangan bijih	Kabupaten Solok	Anggota

		tembaga PT. Punakawan Sumatra Internasional, Kabupaten Solok dan Tanah Datar		
15.	2014	Tim penyusun dokumen ANDAL pembangunan rumah sakit pendidikan Univ. Andalas	Padang	Anggota
16.	2015	Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Pasaman	Kabupaten Pasaman	Anggota
17.	2016	Tim penyusun dokumen Rencana Penutupan Tambang (RPT) PT. Bukit Asam	Sawahlunto	Anggota
18.	2016	Tim Penyusun dokumen UKL/UPL peningkatan kualitas jalan negara di Sumatera Barat	Sumatera Barat	Anggota
19.	2016	Tim Penyusun dokumen UKL/UPL pembangunan jembatan Batang Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	2016	Tim Penyusun dokumen UKL/UPL pembangunan jembatan Sungai Dareh	Kabupaten Dharmasraya	Anggota
21.	2016	Tim penyusun dokumen Andal Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro-Sako	Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	2017	Tim penyusun dokumen Andal Tambang Emas alluvial PT. Inexco Jaya Makmur	Kabupaten Pasaman	Anggota
23.	2017	Tim penyusun dokumen Andal Tambang Emas PT. Cahaya Selatan Gemilang	Kabupaten Solok Selatan	Anggota
24.	2017	Tim penyusun dokumen Andal Tambang Bijih Besi PT. Sumber Minera Bersama	Kabupaten Pasaman	Anggota
25.	2017	Tim penyusun dokumen Andal pembangunan jembatan Ngarai Sianok	Bukittinggi	Anggota
26.	2017	Tim penyusun addendum dokumen Andal PLTU Teluk Sirih	Padang	Anggota

27.	2017	Tim penyusun dokumen UKL/UPL eksplorasi tenaga panas bumi, PT. Hitay Energy	Kabupaten Solok	Anggota
28.	2017	Tim penyusun dokumen UKL/UPL pembangunan Rumah Sakit Pratama	Kabupaten Pasaman	Anggota
29.	2017	Tim penyusun dokumen UKL/UPL pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi PT. PLN	Sumatera Barat	Anggota
30.	2017	Tim penyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kabupaten Pasaman	Anggota
31.	2017	Tim penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kabupaten Pasaman Barat	Anggota
32.	2017	Tim penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Padang, 26 April 2018


Dr. Ir. Darmawan, MSc

CURRICULUM VITAE

- 1 Nama : DR. H. Marganof, M.Si
 2 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 21 September 1965
 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
 4 Kebangsaan : Indonesia
 5 Alamat : Perumahan Taman Citra Berlindo II Blok DD No. 2 Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah Padang 25172
 6 Telp/HP : 081310928345/082384654329
 7 E-mail : marganofkarani@ymail.com
 8 Pendidikan : S-1: Program Studi Kimia, FPMIPA IKIP Padang (1990)
 S-2: Program Studi Kimia FMIPA, PPS-UN Malang (1999)
 S-3: Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB Bogor (2007)
 9 Bidang Keahlian : Pencemaran Lingkungan
 10 Pelatihan : 2005 Kursus Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) A, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor
 2009 Kursus Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) B, Pusat Penelitian dan Lingkungan Hidup (PPLH) IPB, Bogor
 2010 Bimbingan Teknis (Bintek) KLHS Bagi Konsultan KLHS- DANIDA KEMENDAGRI-ESP2 : Jakarta
 2010 Bimbingan Teknis (Bintek) KLHS: *National and Local Consultant: SEA Applied in Local Development Plans*, DANIDA, output 2.3. (*SEA in Bangda*)-Jakarta: Penerapan KLHS di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang
 2014 Kursus Auditor Lingkungan, PSLH UGM Yogyakarta
 2016 Kursus Kompetensi ATPA No. 564 00143 2017 Sertifikat BNSP LSK-LHI ATPA 2017

11. Pengalaman Menyusun Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL & KLHS)

- 2017 : Ketua Tim Penyusun SPPL Klinik Painan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
 2017 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Penambangan Sarana Prasarana Pariwisata Sungai Gemuruh Nagari Setara Naggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
 2017 : Ketua Tim Penyusun DPLH Puskesmas Tarusan Di Nagari Naggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
 2017 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Perumahan PT. Matra Prima Asri di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
 2017 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Perumahan CV. Royal Pasaman di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

- 2017 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Non Logam (Batuan Sungai) PT. Tigo Padusi Nusantara di Kampung Koto Rawang Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2017 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)* Provinsi Sumatera Barat 2017-2037, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat
- 2017 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Non Logam (Batuan Sungai) PT. Taruko Putra Nusantara di Jorong Mesin Gergaji Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Anggota Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Auditorium Kantor Bupati Pesisir Selatan, Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Mess GOR H. Ilyas Yacub, Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan IPAL Komunal Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Non Logam (Batuan Sungai) CV. Indo Jaya Perkasa di Jorong Embacang Limus Nagari Tigo Sepakat Indropura Kecamatan Pacung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Puskesmas Air Pura Kampung Air Mati Nagari Muara Indrapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
- 2016 : Anggota Tim Pembinaan dan Supervisi Penerapan/Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Batuan Sungai a/n Sri Wahyuni di Kampung Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Penambangan Hotel Saga Murni, Sago Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun SPPL Pembukaan Jalan Baru di Beberapa Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Surantih, Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMP Kota Padang 2015-2025
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Non Logam/Tanah Liat

- (Clay) CV. Elok dan Son di Nagari Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai CV. Merapi Anugrah Mandiri di Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Salido di Nagari Sago-Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Normalisasi Batang Salido di Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun SPPL Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. Mitra Jaya Wood Di Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun SPPL Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. Rifa Karya Mandiri Di Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan/Bahan Galian C PT. Nicko Putra Utama di Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun SPPL Klinik Dr. Vella, Pasar Baru Kambang, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun SPPL Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. AKM Di Nagari Tabek , Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya
- 2015 : Ketua Tim Penyusun SPPL Rumah Bersalin SALSA, Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun SPPL Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Tripa Bara Di Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun SPPL Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. Mutiara Hutan Di Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan AMDAL Pengamanan dan Reklamasi Pantai Carocok Painan Semester I Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang 2014-2019
- 2014 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan/Bahan Galian C di Sungai Batang Inderapura Nagari Tanah Bakali Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHKK-HTI) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan/Bahan Galian C di Sungai Batang Kumbang Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun SPPL Pengambilan Mineral Batuan (*Jetty*) CV. Kurnia di Kampung Sungai Putih Nagari Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan

- 2014 : Ketua Tim Penyusun SPPL Pengambilan Bahan Galian C (*Clay*) CV. Rida Jaya di Kampung Jirat Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun SPPL Pengambilan Mineral Batuan (*Jetty*) CV. Talago Di Bawah Gunung, di Kampung Tanjung Saba Nagari Nagari Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Inderapura, Nagari Tiga Sepakat, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. Mutia Anugrah Nusantara
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu IUIPHHK Rudi Hartono, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
- 2013 : Anggota Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Limah Puluh Kota Tahun 2012-2032
- 2013 : Anggota Team Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Tahun 2013
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan PLTM Ngalau Gadang 2 Pancung Taba PT. Taruko Hidro Energi Indonesia
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembagunan SPBU PT. Putra Ampalu Pratama Nagari Taratak Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Tim Penyusun SPPL Pengambilan Mineral Batuan CV. Mitra Nelayan di Kampung Karang Pauh Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan *Stone Crusher* dan *AMP* CV. Kurnia di Kampung Sindang, Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Lumpo, Nagari Batu Kunik Lumpo, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Air Haji Kampung Lubuk Buayo Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Tim Penyusun SPPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Lakitan CV. Cici Motor di Kampung Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan PLTM Tuik 6,294 MW di Kampung Koto Gunung Nagari Tuik IV Koto Mudik, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
- 2012 : Anggota Team Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Tahun 2012
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Tapan PT. Dekky Karya Bestari di Kampung Muaro Sirih Nagari Muaro Sako, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan CV. Teknik Sarana Mandiri di Kampung Sei Sirah Nagari Surantih, Kecamatan Sutra Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Tapan PT. Dekky Karya Bestari di Kampung Muaro Sirih Nagari Muarao Sako, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan CV. Dua Putra di Kampung Gunung Malelo Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan

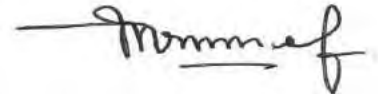
- Sutra Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan CV. Habib di Kampung Alai Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutra Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan PT. Surya Pratama Natural di Kampung Jalamu Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan CV. Putra Salido di Kampung Jalamu Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan di Kampung Mandarahan Nagari Palangai Kaciak Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Anggota Tim Penyusun Studi AMDAL Pembangunan Jalan Kereta Api *Shortcut* Padang Solok Provinsi Sumatera Barat.
- 2011 : Anggota Team Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Tahun 2011
- 2011 : Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pengerukan Kolam Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat
- 2011 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL SPBU Swastanisasi Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
- 2011 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rumah Potong Hewan (RPH) Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
- 2011 : Anggota Tim Penyusun Studi AMDAL PT Tambang Batu Bara Nagari Muaro Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
- 2011 : Anggota Tim Penyusun Studi AMDAL PT Indo Mining Resources Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
- 2011 : Anggota Tim Penyusun Studi AMDAL PT Indo Mining Resources Di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
- 2011 : Anggota Tim Penyusun Studi AMDAL Usaha Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit PT. Rajawali Anugrah Sakti, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
- 2011 : Anggota Tim Penyusun Studi AMDAL Usaha Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit PT. Swastisidhi Amagra, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
- 2011 : Ketua Tim Penyusun SPPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai, Nagari Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Organisasi Profesi

- 2014-sekarang : Anggota Tim Pembinaan dan Supervisi Penerapan/Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat
- 2013-sekarang : Anggota Tim Teknis/Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Barat
- 2012-sekarang : Wakil Ketua INKALINDO-KLHS Provinsi Sumatera Barat
- 2010-2016 : Anggota Peneliti *Dewan Riset Daerah* (DRD) Provinsi Sumatera Barat
- 2010-sekarang : *University Networking* KLHS/Pembina Anggota Jejaring Kajian

- Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perguruan Tinggi se-Indonesia
- 2010-sekarang : Ketua Bidang Pengkajian Teknologi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan pada Perhimpunan Cendekiawan
Lingkungan (PERWAKU) Provinsi Sumatera Barat
- 2009-sekarang : Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB)
- 2008-sekarang : Anggota Tim Teknis/Penilai AMDAL Kota Padang

Padang, Maret 2018



Dr. H. Marganof, M.Si

CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : **SYAIFUDDIN ISLAMI, STP, M.Si**
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Gading/ 14 Juli 1980
Status : Kawin
Jabatan : Ketua LSM Andalas Bumi Lestari
Alamat : Komplek Graha Andalas Asri Blok C/4 Padang
Hp/WA : 081266074423
E-mail : il_lam@yahoo.co.id
Web Site : www.syaifuddinislami.blogspot.com
Keahlian : Pemberdayaan masyarakat khusus Manajemen Bank Sampah, Penyusunan dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), Dokumen SLHD, Profil Kehati, Map Info, SPSS, Teknologi Tepat Guna.

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. *Sarjana (S1) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian* Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang (Tahun 1999-2004).
2. *Magister (S2) Program Studi Ilmu Lingkungan* Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang (Tahun 2004-2007).

B. PENGALAMAN KERJA

1. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SAMPAH DENGAN METODE "BANK SAMPAH".**

Tahun	Jenis Pelatihan	Peserta/ Narasumber/ Pembina/ Konsultan	Audiens	Tempat	Pelaksana
2018	Pendirian 5 Bank Sampah di Kabupaten Sijunjung	Konsultan	Warga di Kecamatan Sijunjung, Kecamatan IV Nagari dan Kec. Kupitan	Kabupaten Sijunjung	DLH Provinsi Sumatera Barat
2017	Sosialisasi Bank Sampah	Narasumber	Pengurus Bank Sampah dan pengurus Desa	DLH Kota Pariaman	DLH Kota Pariaman
2017	Penetapan Bank Sampah Mutiara Indah sebagai Bank Sampah Induk	Konsultan	RT III RW IV ATTS Kota Bukittinggi	Kantor Bank Sampah Mutiara Indah	Pengurus Bank Sampah Mutiara Indah
2017	Pendirian Bank Sampah Kamboja	Konsultan	Warga RW V Kelurahan ATTS	Gedung Serba Guna	DLH Prop. Sumbar

			Kota Bukittinggi	RT III ATTS	
2017	Pendirian Bank Sampah Serunai	Konsultan	Warga RW IV Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Kantor BAZ RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Pendirian Bank Sampah Anggrek	Konsultan	Warga RW III Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Gedung Serba Guna RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Pendirian Bank Sampah Rose	Konsultan	Warga RW II Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Kantor BAZ RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Pendirian Bank Sampah Dahlia	Konsultan	Warga RW I Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Gedung Serba Guna RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Workshop Jejaring Bank Sampah 2017	Narasumber	Bank Sampah Se Sumatera Barat	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumbar	JPSM Ranah Minang dan DLH Sumbar
2017	Sosialisasi Bank Sampah	Narasumber	Dalam Rangka KKN Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Masyarakat Nagari Kubang	FKM Unand
2016	Sosialisasi Pengelolaan sampah berbasis masyarakat; Manajemen Bank Sampah	Narasumber	Pengurus Bank sampah dan calon pengurus Bank Sampah di Kab. Solok Selatan	Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan	Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan
2016	Role Model Komunitas Peduli Lingkungan: Jejaring Bank Sampah Sumbar	Narasumber	LSM dan Jejaring Bank Sampah Sumbar	Bapdalda Propinsi Sumatera Barat	Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
2016	Pendirian Bank Sampah AFTA	Pembina	Alumni Fakultas Pertanian Unand	GOR Haji Agus Salim Padang	Yayasan AFTA
2016	Pendirian Bank Sampah Tarok Dipo Beseri	Narasumber	Warga Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi	Kantor Lurah Tarok Dipo	Asosiasi Bank Sampah Kota Bukittinggi
2016	Pendirian Bank Sampah Mitra Keluarga	Pembina	Warga Komplek Perumahan Wahana Tarok Kuranji Padang	Komplek Perumahan Wahana Tarok Kuranji Padang	Mandiri
2016	Kunjungan Prof. Toru dari Kitakyushu Unievrstity Ke Bank Sampah di Kota	Pendamping	Bank Sampah Handayani	Bank Sampah Handayani	Kerjasama Universitas Andalas dengan JPSM

	Padang				Ranah Minang
2016	Pendirian Bank Sampah Handayani	Pembina	Warga Jl. Handayani RT 01 RW 14 Siteba Kec. nanggalo Padang	Jl. Handayani RT 01 RW 14 Siteba Kec. nanggalo Padang	Mandiri
2016	Manajemen Bank Sampah	Narasumber	Ibu Ibu PKK se Kecamatan Bonjol	Kantor Camat Bonjol Pasaman	BLH Pasaman
2016	Pendirian Bank Sampah Mutiara Indah	Konsultan	Warga Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	RT 4 RW 3 Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Bapedalda Propinsi Sumbar
2016	Pendirian Bank Sampah Saayun Salangkah	Konsultan	Warga Kelurahan Puhun Tembok	RT 3 RW 5 Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi	Bapedalda Propinsi Sumbar
2016	Sosialisasi Persampahan dan Pelatihan Pengelolaan sampah dengan Metode Bank Sampah	Narasumber	Ibu-Ibu PKK Kecamatan dan Jorong SeKecamatan Panti Kab. Pasaman	Kantor Camat Panti	BLH Kab. Pasaman
2016	Sosialisasi Persampahan dan Pelatihan Pengelolaan sampah dengan Metode Bank Sampah	Narasumber	Ibu-Ibu PKK Kecamatan dan Jorong SeKecamatan Bonjol Kab. Pasaman	Kantor Camat Bonjol	BLH Kab. Pasaman
2016	Workshop Jejaring Bank Sampah Tahun 2016	Nara sumber bersama Bambang Suwerda	Pengurus Bank Sampah SeSumatera Barat yg tergabung dalam JPSM RM	Bank Sampah Kurabu Padang Panjang	Bapedalda Propinsi Sumbar
2016	Sosialisasi Bank Sampah	Nara sumber	Pengurus bank sampah se Kabupaten Pesisir Selatan	Painan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Pessel
2015	Workshop Jejaring Bank Sampah Tahun 2015	Nara sumber	Pengurus Bank Sampah SeSumatera Barat yg tergabung dalam JPSM RM	Bukittinggi	Bapedalda Propinsi Sumbar
2015	Pengelolaan persampahan	Nara sumber	Ibu-Ibu PKK dan pengurus bank	Lubuk Sikaping	BLH Kab. Pasaman

	dengan bank sampah		sampah di Kecamatan Lubuk Sikaping		
2015	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Anggota Bank sampah se Kota Padang Panjang	Bank Sampah Sei Andok, Bank Sampah Seruani, Bank sampah Teratai, Bank Sampah Kurabu	Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
2015	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Ibu Komplek	Komplek Perumahan Depan Kampus STIPER Sawahlunto Sijunjung	Kampus STIPER SWL/SJJ
2014	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Dharmawanita Kab. Tanah Datar	Ruang Dharmawanita Kabupaten Tanah Datar	KLH Tanah Datar
2014	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Ibu PKK	Kantor Camat Sipora Utara	Camat Sipora Utara
2014	Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Ibu Pengrajin dan masyarakat Cikal Bakal pengurus Bank Sampah	Kantor Lingkungan Hidup Kota Solok	KLH Solok
2014	Workshop Jejaring Bank Sampah 2014	Narasumber	Camat dan Lurah yang terlibat dalam Gerakan Sumbar Bersih	Hotel Inna Muaro	Bapedalda Propinsi
2013	Sosialisasi bank sampah di Kota Padang	Nara sumber	Cikal Bakal pengurus Bank sampah di sekolah dan masyarakat di kota Padang	Bapedalda Kota Padang	SMK 6 Padang
2013	Pelatihan pengomposan limbah rumah tangga	Nara sumber	Masyarakat setempat	Sikakap, Tua Pejat, Bosua dan siberut utara	KLH Mentawai
2012	Studi Banding Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Gemah Ripah Kab. bantul Yogyakarta	Peserta	Pendiri Bank sampah Barokah Assalam dan Bapedalda Prop. Sumbar	Kab. bantul Yogyakarta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
2010-2011	Pendampingan dan Pendirian Bank	Pendiri dan motivator	Ibu-Ibu Komplek	Perumahan Dangau	Kementeria n

	sampah "Barokah Assalam"			Teduh Lubuk Kilangan Padang	Lingkungan Hidup dan Bapedalda Prop. Sumbar
2010	TOT Pengelolaan Limbah Padat melalu Bank Sampah	Nara sumber	Dosen dan PSLH	PSLH Universitas Bung Hatta	Universitas Bung Hatta
2010	Studi Banding pengelolaan Bank sampah dan Pemanfaatannya di Kab. Bantul Prop. Yogyakarta	Peserta	LSM Andalas Bumi Lestari	Kab. Bantul Prop. Yogyakarta	Kementeria n Lingkungan hidup
2010	Tim Pendirian Bank Sampah Universitas Bung Hatta	Anggota Tim	Dosen dan PSLH	PSLH Universitas Bung Hatta	Universitas Bung Hatta

2. KEGIATAN PROFESIONAL

<i>Tahun</i>	<i>Jenis/ Nama Kegiatan</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Pelaksana</i>	<i>Tempat</i>
2018	Tim Penulis DIKPLHD Kabupaten Sijunjung	Tim Penulis	Dinas PERKIMLH Kab, Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
2017	Tim Penulis DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat	Tim Penulis	DLH Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
2011-2016	Tim Penilai Adipura Propinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	KLHK	Se Sumatera Barat
2014-2017	Tim Penilai Gerakan Sumbar Bersih Propinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	Bapedalda Prop. Sumbar	Se Sumatera Barat
2011-2017	Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Propinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	Bapedalda Prop. Sumbar	Se Sumatera Barat
2009-2015	Tim Penilai Menuju Indonesia Hijau	Anggota Tim	Kementerian Lingkungan Hidup	Se Sumatera Barat
2013	Penghijauan dan pembuatan kompos	Ketua	STIPER Swl/Sjj	Perumahan STIPER
2013	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Narasumber	KLH Kab. Mentawai	Sikakap, Tua Pejat, Bosua dan siberut utara
2012	<i>Pola Hidup Ramah Lingkungan</i>	Narasumber	KLH Kab. Mentawai	Sikakap
2012	Studi AMDAL Pembangunan PLTM di IV Nagari Palembayan Kabupaten Agam	Tim ahli pertanian dan sosial		IV Nagari Palembayan Kab. Agam

2011 dan 2012	Penyusunan Dokumen UKL/UPL diantaranya: - PT. FIF Padang - Laboratorium Sejawat Putra Pasaman di Kab. Pasaman Sumatera Barat.	Tim Penyusun/Tim Ahli	DECA Consulting	PT. FIF Padang dan Laboratoeium Sejawat Putra Pasamn
2011	Menyusun Dokumen DPLH beberapa KUD sebagai anak angkat dari PT. Wilmar Group. - Mutiara Sawit Jaya Kinali - Manggopoh I - Yayasan Tanjung Manggopoh - Bukik Sanding 3 - Tompek Tapian Kandis - Dastra Plasma 2 AMP 1 - Dastra Plasma 4 AMP 3	Tim Penyusun/Tim Ahli	DECA Consulting	PT. Wilmar Group
2011	Studi DELH Pembangunan Jalan Nipah Teluk Bayur	Tim ahli lingkungan	PT. Syntac Pratama	Nipah Teluk Bayur Padang
2011	Studi AMDAL Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang	Tim ahli lingkungan	PT. Syntac Pratama	Aie Pacah
2011	Studi AMDAL SPAM IKK Lubuok Tarok Kab. Sijunjung	Tim ahli lingkungan	PT. Syntac Pratama	Lubuok Tarok Kab. Sijunjung
2010	Penyusunan DELH Irigasi Batang Sinamar	Ketua Tim	Prop. Sumbar	Batang Sinamar Kab. Tanah Datar
2011	Penyusunan SLHD Kota Padang	Tenaga Ahli Pertanian dan Lingkungan	Bapedalda Kota Padang	Kota Padang
2010	Penyusunan SLHD Kota Pariaman	Tenaga Ahli Lingkungan	Kota Pariaman	Kota Pariaman
2010	Studi AMDAL Pembangunan Kampus II Universitas Bung Hatta oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Bung Hatta	Tim ahli lingkungan	Yayasan Bung Hatta	Aie Pacah Kota Padang
2008	Tim Penyusun Dokument Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan (DPPL), diantaranya: - Perkebunan Kelapa Sawit PT Wilmar Group di Propinsi Sumatera Barat oleh Deca Consulting, diantaranya: (PT.KAMU, PT.PANP, PT.PMJ).	Tim Penyusun	PT. Wilmar dan PTPN VI	Sumatera Barat dan Jambi

	- PTPN VI di Jambi (Unit RIMSA, Unit RIMDU dan Unit Durian Luncuk.			
2007-2014	Konsultan Lingkungan	Tenaga Ahli	CV. Gibran ATTALA	Se Sumatera Barat
2007	Studi AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Sumatera Ranah Indonesia di Sijunjung Propinsi Sumatera Barat	Tim ahli lingkungan	PT. Agro Sumatera Ranah Indonesia	Kab. Sijunjung
2007	Studi AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Lubuk Palma Sumatera di Sijunjung Propinsi Sumatera Barat	Tim ahli lingkungan	PT. Lubuk Palma Sumatera	Kab. Sijunjung
2009-2014	Dewan Sumber Daya Air	Anggota	Dinas PSDA Sumbar	Dinas PSDA Sumbar
2008-2017	Pengajaran	Dosen	STIPER SWL/SJJ	Muaro Sijunjung
2008-2009	Water Resources Management pada kegiatan Basin Water Resources Management (BWRM) Water Irigation Sector Management Program (WISMP) di Sumatera Barat. Program ini Funding dari Netherland Grant & World Bank Loan	Assisten Co Team Leader	BWRM/WISMP	Dinas PSDA Sumbar
2007 - 2011	Komisi Penilai AMDAL	Anggota	Bapedalda Propinsi Sumatera Barat	Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
2006-2016	Yayasan Andalas Bumi Lestari	Ketua	LSM ABL	Padang
2004-2006	Fasilitator Desa dan Tenaga Ahli Pertanian Program (MCRMP). Funding Asia Development Bank. Pelatihan yang dilakukan: - Teknologi Tepat Guna Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) - Pembuatan cendera mata dari limbah padat di tepi pantai.	Fasilitator dan Tenaga Ahli Pertanian	Dinas Kelautan dan Perikanan kota Padang Bekerjasama dengan Yayasan Hayati Lestari (SAHATI) dalam kegiatan Marine Coastal Resources Management	Sungai Pisang Kota Padang Sumatera Barat

3. PENGHARGAAN

PENGHARGAAN PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2010	Peringkat Terbaik Pertama Pelatihan Penyusunan AMDAL Angkatan ke-48 PSLH UGM	Ketua PSLH UGM

4. TIM PENELITIAN DAN SURVEY LINGKUNGAN 2001 – 2016

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana/Jurnal
2016	Pengendalian Hama Pada Baglog dengan Ramuan Organik Untuk Meningkatkan Produksi dan Ekonomi Petani Jamur Tiram (<i>Pleurotus ostreatus</i>) di Kabupaten Sijunjung	Anggota	Penelitian Dosen Pemula Ristekdikti
2015	Kebijakan pengelolaan lingkungan dengan metode bank sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Sumatera Barat	Ketua	Jurnal AGROTROPICAL. Vol.5 No.2 Des 2015 ISSN : 1829-8656. Hal.46-51
2014	Kajian model reklamasi pasca penutupan tambang emas rakyat menjadi lahan pertanian produktif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Sijunjung	Ketua	Jurnal Menara Ilmu LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2014	Diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat	Ketua	Jurnal Menara Ilmu LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2014	Kearifan Ekologi dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat	Ketua	Jurnal Agrotropical Vol 4 No 1 juli 2014 ISSN: 1829-8656
2013 s/d 2014	Survey Elektabilitas dan Popularitas Caleg Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung	Tenaga Ahli	Mitra Politca Indonesia
2014	Survey elektabilitas dan popularitas bakal calon Kepala Daerah pra pemilukada di Kabupaten Sijunjung	Tenaga Ahli	Mitra Politca Indonesia
2013	Hubungan kondisi lingkungan keluarga dengan gizi dan pangan balita	Ketua	Jurnal Agrotropical No 2 Vol 3 Des 2013 STIPER Sijunjung
2013	Membangun sistem agribisnis melalui pengembangan industri tahu	Ketua	Jurnal Ekotrans No2 Vol 13 Juli 2013, LPPM Universitas Ekasakti Padang
2012	Hubungan antara ketahanan pangan	Ketua	Jurnal Agrotropical No

	dengan status gizi anak di Kelurahan Teluk Kabung Selatan (Sungai Pisang) Kec. Bungus Teluk Kabung Padang		1 Vol 2 Juli 2012
2010	Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana Di Sumatera Barat	Ketua	Proceeding Konfrensi Nasional Penanggulangan Bencana dan Kerusakan Lingkungan ISSN :2087-6343
2009	kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati propinsi sumatera bara	Tim Penyusun	Kementerian Lingkungan Hidup
2009	Penyusunan status keanekaragaman hayati Propinsi sumatera barat	Tim Penyusun	Kementerian Lingkungan Hidup
2008	<i>Voter Behavior for election 2008</i> di Jambi. Penelitian ini fokus pada perspektif pemilih untuk partai dan figure nasional serta kondisi ekonomi di Kab. Kerinci.	Anggota	LSI
2007	Penelitian tentang Perumahan, drainase dan kondisi lingkungan di Pasaman Barat	Anggota	Bappeda Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Bung Hatta
2007	Penelitian tentang Indek Pembangunan Manusia (Human Development Index)	Anggota	Bappeda Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Bung Hatta
2007	Tesis : Hubungan Antara Kondisi Lingkungan Dengan Status Kesehatan Balita Di Kelurahan Teluk Kabung Selatan (Sungai Pisang) Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	Ketua	Mandiri
2006	Penelitian Pulau-Pulau Kecil di Sumatera Barat (Pessel, Padang and Mentawai).	Anggota	Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang dengan CV. Bina Citra Consultant
2006	Sudi Komunikasi yang Efektif Untuk Kampanye Penyelamatan Terumbu Karang (COREMAP) Tua Pejat, Saliguma, Katurei, dan Sikakap	Anggota	Kerjasama Dinas Kelautan Mentawai dengan Yayasan <i>Minang Bahari</i>
2006	Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat di Alahan Panjang	Anggota	Yayasan Anggari Dinamika Globa
2005	Tim Survey Petunjuk Teknis Pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit di Bakrie Pasaman Plantation di Pasaman Barat	Anggota	Bapedalda Prop. Sumbar
2004	Skripsi : Pengaruh Ukuran Partikel Arang Aktif Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Adsorben Dalam Pemurnian Gambir (<i>Uncaria gambir Roxb</i>).	Ketua	Mandiri

2001	Inventarisasi gua di Kabupaten Sijunjung (Solok Ambah, Poru dan Aie Angek)	Koordinator	Mandiri
------	--	-------------	---------

C. PELATIHAN DAN KURSUS TAMBAHAN

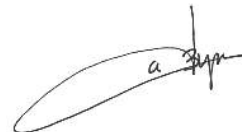
1. 14-17 Desember 2010. Studi Banding pengelolaan Bank sampah dan Pemanfaatannya di Kab. Bantul Prop. Yogyakarta. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Yayasan Andalas Bumi Lestari.
2. 17 Oktober 2010. ToT Pengelolaan Limbah Padat melalui Bank Sampah. Narasumber: Bambang Suwerda (pendiri Bank Sampah Gemah Ripah Bantul). PSLH Bung Hatta.
3. 17 Maret s/d 27 April 2010. Pelatihan **AMDAL PENYUSUN (AMDAL B)**. PSLH Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
4. 10 -11 Agustus 2009 (2 Hari). Sosialisasi dan Asistensi Program *Menuju Indonesia Hijau* Regional Sumatera 2009. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera. Pekanbaru.
5. 17 Juni 2009 (1 hari) . Peserta Pelatihan Pembuatan Web Balai Kliring Kehati dengan Menggunakan Soft Ware Joomla. Kerjasama Deputi Kehati Kementerian Lingkungan Hidup.dengan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach di Padang,
6. 28 November sampai 5 Desember 2007 (8 hari). "Achievment Motivation Training". *Dinas Perindag* Propinsi Sumatera Barat. Balai Diklat Propinsi Sumatera Barat Lubuk Lintah Padang.
7. Parai View Hotel Bukittinggi, 19 Februari sampai 2 Maret 2007 (12 hari). Peserta Pelatihan *Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)*. *Departemen Pekerjaan Umum* Sumatra Barat.
8. Hotel Ambacang Padang, 29 August sampai 31 August 2006 (3 hari). Peserta Pelatihan Consultan Finances Friends Bank (KKMB) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat.
9. Bali, 20-27 April 2006 (8 hari). Studi Banding pengelolaan Terumbu Karang dan ikan hias di Kantor Reef Check dan Nelayan Ikan Hias Binaan Reef Check Bali (Ocean Marine aquarium) di Bali. Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dengan Yayasan Hayati Lestari.
10. Sungai Pisang Padang 14 April sampai 16 April 2006 (3 hari). Instruktur Pelatihan Eko Wisata dalam Mata Pencaharian Alternatif / MPA (MCRMP). Bekerjasama dengan DKP Kota Padang dengan SAHATI.
11. Universitas Andalas. di Kampus Pasca Sarjana. 22 August sampai 29 August 2005 (8 hari). Peserta Pelatihan *Map Info*.
12. Batu Busuk Limau Manis 20-22 September 2002 (3 hari). Peserta Pelatihan Participatory Rural Apraisal (PRA) dalam rangka pengabdian masyarakat *Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam (KOMMA FP-UA)*.
13. Padang 21-25 September 2001 (5 hari). Peserta Pelatihan Kader Konservasi dan Pecinta Alam UKSDA Propinsi Sumatera Barat.
14. Cisarua Bogor, 8 January sampai 15 January 2001 (8 hari). Peserta Pelatihan Exploration Cave Technical in Carst area Kerjasama Hikespi dengan Geologi Bandung.

15. Padang 18-27 September 1999 (10 hari), Peserta Pendidikan Dasar Cinta Alam (PDCA) XVI. Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam (KOMMA FP-UA) Fakultas Pertanian Univ. Andalas.

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2013-2018. Ketua Jejaring Bank Sampah Ranah Minang Propinsi Sumatera Barat. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat.
2. 2012-2017. Sekretaris Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia DPW Sumatera Barat.
3. 2009-2014. Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku) Sumbar.
4. 2009-2014, Anggota Dewan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat Utusan Dari LSM Andalas Bumi Lestari. Lembaga ini konsern pada permasalahan Sumber Daya Air dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
5. 2006-2009 dan 2015-2018, Ketua Yayasan Andalas Bumi Lestari. Lembaga ini konsern pada Konservasi, Sumber Daya Air, AMDAL, Pengelolaan sampah dan Pelestarian Lingkungan.
6. 2003-2004, Pendiri dan Ketua Agricultural Information Club (AgITC) di Fakultas Pertanian Unand. Lembaga ini Focus pada Informasi dan Technology Untuk Pertanian Dan Aplikasi Software Untuk Pertanian.
7. 2001-2002. Dewan Legislatif Mahasiswa. Fakultas Pertanian UNAND .
8. 1999-2004, Anggota dan Pengurus *Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam* (KOMMA FP-UA) Fakultas Pertanian UNAND.

Padang, 3 April 2018



SYAIFUDDIN ISLAMI, S.TP, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005/100/TL/DLH-2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rapat Persiapan Penyusunan
DIKPLHD 2017

Padang, 25 Januari 2018

Kepada Yth.,
Sdr. Ka. Instansi Lingkungan Hidup
se-Sumatera Barat

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman kepada Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.156/Sekjen/Datin/Set.02/2017 tanggal 9 Februari 2017 Perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, bahwa proses penilaian dan pemberian penghargaan Nirwasita Tantra pada tahun 2018 sama dengan proses penilaian dan pemberian penghargaan pada tahun 2017
2. Adapun proses penilaian dan pemberian penghargaan Nirwasita Tantra berdasarkan kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengundang Saudara dan sekaligus membawa Buku Data DIKPLHD tahun 2017 sebagai bahan rapat yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Rabu/31 Januari 2018

Pukul : 09.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Acara : 1. Pembahasan Persiapan Penyusunan DIKPLHD Tahun 2017

2. *Shearing* data DIKPLHD

3. Dan lain-lain dirasa perlu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peringgal,


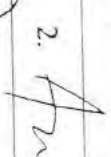


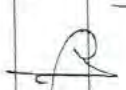





DAFTAR HADIR










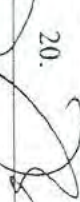






RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN DIKPLHD 2017 PROV. SUMBAR






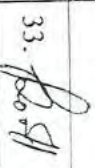





Hari : Rabu

Tanggal : 31 Januari 2018

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup, Padang

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Eka Amelia	DLH Fpk	08136642965		1. 
2	Siska Fitri	- - -	- - -		2. 
3	Lasmiyah	DLH Damarasrag	081266788220	namik_lasmiyah@yahoo.com	3. 
4	Tulia Kurnia D	DLH Korp. Pa. Rm	08126711458	lupa_email@gmail.com	4. 
5	T. Masfahri	DLH Padang	08126630323	kth_masfahri@yahoo.com	5. 
6	Yanni Anggenawati	DLH PEBAK	0812683908881	-	6. 
7	SAHRI WAHJUNI	DLH PASBAR	085263221328	sahriwahjuni@gmail.com	7. 
8	ELDARITA	Pertin. H 917	085263219909	petra	8. 
9	AURICA TRIANORI	" "	081363972800		9. 
10	Susi Herlinda	DLH 50 Kota	081266921668	Susi.Huo@gmail.com	10. 











11	FITRI ERMING SIB	DLHPP SD 1462	08121974288	nengmanawi@gmail.com	11.	
12	DEPA KUSUMAWATI Rein Afrizani	DLTK mandawati DLH 1009 Permianan	08527403793 081967592525	kusumawati.depa@gmail.com afgahute@gmail.com	12.	
13	ANORI MATHA PUTRA	LH SAWAHLUNTO	085271013158	mahaputra@yhaoo.co.id	13.	
14	Evi Savitri	Binas Belkum LH	081374807476	lavitrisprati@gmail.com	14.	
15	Bery Kitawa	DLH Kusek	081374151550	berdygntp1980@gmail.com	15.	
16	Wendangputr	DLH peruw	085274158464	wendangputr1980@gmail.com	16.	
17	Nur ulum	"		meri21n@gmail.com	17.	
18	Sri Manda	DLK. Bku	0851914444	srika_wendee@gmail.com	18.	
19	Lia Lestari	DLH Kota Pajajaran	08116604662	lilestari@yahoo.co.id	19.	
20	Herminan Hakim	DLH Lab. Solok	08126615555		20.	
21	Eino Davira	Perkim LH Pd. Panyab	081374050969	einodavira21@gmail.com	21.	
22	Berna	"	081524950304		22.	
23	Dini Mursilena Sir	DLH AGAM	082174051845	diniemur11@gmail.com	23.	
24	Feldy	DLH Kota Solok	085355440815	tholl.of.feldy@yahoo.com	24.	
25	Desmiat	DLH Kota Solok	081275424783	cici-bardiano@yahoo.com	25.	
26					26.	

27	Arman	DH Kab. Pasuruan	08136341512	Arman@starkod.com	27.		28.
28	^{dit.}				29.		
29	Ryaida Fani	DH Prov			30.		
30	Fari Aley	- - -			31.		
31	Siska Nurhani	- - -			32.		
32	Devil Handu	- - -		Seulwendra.co.id	33.		34.
33	Roma Zulhita	DH Prov			35.		
34	Rusdiana	DH			36.		
35	Ranfala	PL			37.		38.
36	Risla	KDL			39.		
37	Milke Yoris	TL			40.		
38	MUR. Nurul	Selore			41.		42.
39	Zahirman	- - -					
40	Dani Zamran	- - -					
41							
42							








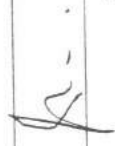





DAFTAR HADIR

RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN DIKPLHD 2017 PROV. SUMBAR

Hari : Rabu
 Tanggal : 31 Januari 2018
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup, Padang

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Eka Amelia	DLH PPK	08136842765		1. 
2	Siska Fitri	- - -	- - -		2. 
3	Lasmiyati	DLH Dharma Sengul	081266788220	lasmik_lasmiyati@yahoo.com	3. 
4	Eulia Kristina D	DLH PLOP Kab. Pa. Pem	08126711458	lupita_jporia@gmail.com	4. 
5	T. Masfetur	DLH Padang	081266630323	tahr_masfetur@yahoo.com	5. 
6	Kenni Angguni SE	DLH PASBAR	0812683908887		6. 
7	SAHRI WAHYUNI	DLH PASBAR	08526327328	sahriwahyuni@gmail.com	7. 
8	ELDA RITA	Perkim 44 S17	085263219787		8. 
9	AUTIKA TRIANTRI	"	081363472800	perkim	9. 
10	Susi Helinda	DLH 50 Kota	08126692168	Susi.6100@gmail.com	10. 

11	Titis Erning Sih	DLHPP Solok	08121974288	nengnawani@gmail.com	11.	
12	Devi Kusumanas	DLH Mardawati	08527403793	kuswanto.devi@gmail.com	12.	
13	Rein Afridani	DLH Kota Pamanan	081967592525	afidani02@yahoo.com	13.	
14	ANDI MAHA PUTRA	LH SAWAHLUNTO	085271013158	mahaputra@yahoo.co.id	14.	
15	Evi Saviti	Dinas Pektim LH	085374807476	savitifisprati@gmail.com	15.	
16	Bony Riwaw	DLH Kasek	081379151550	wendringp1980@gmail.com	16.	
17	Wendingant	DLH Pemat	085274598464	wendringp1980@gmail.com	17.	
18	Mari Rahmi	"	"	merizir@gmail.com	18.	
19	Sidi Mena	DLH Bku	085274598464	sidi.mena@gmail.com	19.	
20	Lia Lestari	DLH Kota Pamanan	08116604662	lilestari@yahoo.co.id	20.	
21	Herman Hakim	DLH Lub. Solok	08126615555	"	21.	
22	Eina Dewira	Pektim LH Pd. Pamanan	081374058969	eina.dewira@yahoo.com	22.	
23	Betria	"	081524950389	"	23.	
24	Dini Murtiati SIR	DLH AGAM	08217401545	dini_murtiati@yahoo.com	24.	
25	Feldy	DLH Kota Solok	085355440815	throll.of.feldy@yahoo.com	25.	
26	Desmiat	DLH Kota Solok	081275424783	cici-bardiano@yahoo.com	26.	

27	Arraina	DUH Kab. Pasuruan	081363415142	arrainalol@gmail.com - om	27.	
28	ibid.				28.	
29	Ryaida Janti	DUH Prov			29.	
30	Fari Alby	- - -			30.	
31	Siska Wardani	- - -			31.	
32	Devi Hendra	- - -		devihendra10@yahoo.co.id	32.	
33	Rona Zultra	DUH Prov			33.	
34	Dwi Ruvia	DUH			34.	
35	Xonfelix	PC			35.	
36	Prisilla	KDL			36.	
37	Mitke Yostic	TL			37.	
38	MAR. Juwend	sekre.			38.	
39	Zahirman	- - -			39.	
40	Poni Wawan	- - -			40.	
41					41.	
42					42.	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Padang, 6 Februari 2018

Nomor : 005 / 163 / TL / DLH - 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :
Sdr. (Daftar sebagaimana terlampir)

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah/DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat dilakukan setiap tahunnya yang sebelumnya dikenal dengan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
2. DIKPLHD merupakan dokumen yang memuat informasi terkait kondisi lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang akan dinilai oleh Pemerintah Pusat dan bagi daerah yang mendapatkan predikat terbaik dalam penyusunan DIKPLHD akan diberikan penghargaan Nirwasita Tantra oleh Presiden.
3. Mengacu kepada pedoman penyusunan DIKPLHD yang diterbitkan oleh KLHK melalui Surat Sekretaris Jendral Nomor. S.156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Pedoman Nirwasita Tantra maka dibutuhkan keterlibatan Instansi Saudara dalam *support* data dan informasi tentang kebijakan/program kerja terkait isu lingkungan yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas pada Instansi Saudara.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar Saudara dapat menunjuk 1 (satu) orang personil yang membidangi dari Instansi Saudara dan sekaligus dapat mengikuti rapat, yang dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Jum'at/09 Februari 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Acara : 1. Pembahasan Mekanisme Penyusunan DIKPLHD Tahun 2017
2. Finalisasi Draft Data DIKPLHD Tahun 2017
3. Hal-hal lain yang dirasa perlu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peninggal.

Lampiran 1 Surat Nomor : 005/163/TL/DLH-2018
Tanggal : 6 Februari 2018
Perihal : Undangan

Daftar Alamat yang dituju:











Kepada Yth.:











1. Sdr. Ka. Bappeda Prov. Sumbar di Padang
2. Sdr. Ka. BPBD Prov. Sumbar di Padang
3. Sdr. Ka. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar di Padang
4. Sdr. Ka. Dinas PSDA Prov. Sumbar di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Prov. Sumbar di Padang
6. Sdr. Ka. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar di Padang
7. Sdr. Ka. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar di Padang
8. Sdr. Ka. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar di Padang
9. Sdr. Ka. Dinas ESDM Prov. Sumbar di Padang
10. Sdr. Ka. Dinas Peternakan Prov. Sumbar di Padang
11. Sdr. Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar di Padang
12. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar di Padang
13. Sdr. Ka. Dinas Perhubungan Prov. Sumbar di Padang
14. Sdr. Ka. Dinas Sosial Prov. Sumbar di Padang
15. Sdr. Ka. BPS Prov. Sumbar di Padang
16. Sdr. Ka. BMKG Sicincin di Sicincin
17. Sdr. Ka. BMKG Koto Tabang di Agam

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN MEKANISME PENYUSUNAN DIKPLHD 2017 PROV. SUMBAR

Hari : Jumat
 Tanggal : 09 Februari 2018
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup, Padang

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	ANDRIANI	Dinas Perairisan	08116603764		1. 
2	WINDI SARTANA	PPPS			2. 
3	WELDA RONA	BPS	0822284263385	welda@bps.go.id	3. 
4	YONI YUSWA	Dinas Perkebunan	081378015822		4. 
5	FALSAH	PPKH Sumatera	081363082446		5. 
6	ARRIZON	Tempat Sumber	08186703880	arrazon968@gmail.com	6. 
7	YUNHTI	Pengges Perus SIS	081963049726	yunhti.djambir@gmail.com	7. 
8	ROSVELLY ROSTA	Bs.tanahorbanas	02527109522	rosvellyrosta69@gmail.com	8. 
9	LUHAN WATIARA	PRBD	0813794459937		9. 
10	Mauzad Adnan	Dinas ESDM	081363185384	mauzad_adnan@yahoo.com	10. 

11	Adwibad Naghi	Dinas ESDM				11.	
12	ELFITRI DEFAVIA	DINAS PERKANTAN		081363237961	elfitriofauria@gmail.com	12.	
13	Margasarizal	Dinas Sewel Ptu		081363433239		13.	
14	Gri Nurni	PSDA		08127659505	gri_nurni_psd@gmail.com	14.	
15	RILDA LAHI	Dinas Kesehatan		085375764438	rilazulfa@gmail.com	15.	
16	EKA PURA	D. Kelautan Perikanan		082590753825	epsk_dkpsumber@yahoo.co.id	16.	
17	Mhd. Nurhuda	Keber.				17.	
18	Zahriman	-				18.	
19	Dori Isawan	-				19.	
20	Syafida Yanhi	-				20.	
21						21.	
22						22.	
23						23.	
24						24.	
25						25.	
26						26.	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005 / 277 / TL / DLH - 2018
Lampiran : 1 (dua) berkas
Perihal : Undangan

Padang, 2 Maret 2018
Kepada Yth.:

(Sebagaimana terlampir)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 118/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018, proses pemberian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas penilaian kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen berupa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
2. Mengacu kepada pedoman penyusunan dokumen IKPLHD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, perlu ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup yang didasarkan pada proses penjarangan isu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/20 Maret 2018

Pukul : 09.00 Wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Acara : 1. Penjarangan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat
2. Dan lain-lain dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA
Ir. SITI AISYAH, MSI
Pembina Tk.I
Nip. 19670928 199203 2 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Bapak Bupati/Walikota se- Sumatera Barat di Tempat;
3. Pertinggal.

Lampiran Surat Nomor : 005/279/TL/DLH-2018
Tanggal : 2 Maret 2018
Perihal : Undang-undang Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Daftar Alamat Tembusan :

Kepada Yth.:

1. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di Solok;
3. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh di Payakumbuh;
4. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam di Lubuk Basung;
6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan di Painan;
9. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok di Arosuka;
10. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang di Padang;
11. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kep Mentawai di Tuapejat;
12. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar di Batusangkar;
13. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sijunjung di Muaro;
14. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
15. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
16. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Solok Selatan di Padang Aro;
17. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
18. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping;
19. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005 / 280 / TL / DLH - 2018
Lampiran : 1 (dua) lembar
Perihal : Undangan

Padang, 2 Maret 2018

Kepada Yth.:

(Sebagaimana terlampir)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 118/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018, proses pemberian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas penilaian kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen berupa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
2. Mengacu kepada pedoman penyusunan dokumen IKPLHD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, perlu ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup yang didasarkan pada proses penjaringan isu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya bantuan Saudara agar dapat menugaskan pejabat yang membidangi untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/20 Maret 2018

Pukul : 09.00 Wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Acara : 1. Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat
2. Dan lain-lain dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005 / 281 / TL/DLH-2018
Lampiran : 1 (dua) lembar
Perihal : Undangan

Padang, 2 Maret 2018

Kepada Yth.:

(Sebagaimana terlampir)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 118/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018, proses pemberian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas penilaian kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen berupa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
2. Mengacu kepada pedoman penyusunan dokumen IKPLHD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, perlu ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup yang didasarkan pada proses penjarangan isu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/20 Maret 2018

Pukul : 09.00 Wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Acara : 1. Penjarangan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat
2. Dan lain-lain dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peringgal.

Lampiran

Surat Nomor : Dds / 281/TL/DLH-2018
Tanggal : 2 Maret 2018
Perihal : Undangan

Daftar Alamat yang dituju:

Kepada Yth.:

I. Pakar LH/Pengamat LH

1. Sdr. Dr. Raichul Amar
2. Sdr. Dr. Mahdi
3. Sdr. Drs. Alfitri, MS
4. Sdr. Dr. Rembrandt
5. Sdr. Drs. Bustanul Arifin, MS

II. PSLH

1. Sdr. Ka. PSLH UNAND
2. Sdr. Ka. PSLH UNP
3. Sdr. Ka. PSLH Universitas Bung Hatta
4. Sdr. Ka. PSLH Universitas Muhammadiyah

III. LSM

1. Sdr. Ka. LSM WALHI
2. Sdr. Ka. LSM QBAR
3. Sdr. Ka. LSM Yayasan Citra Mandiri Mentawai
4. Sdr. LSM Andalas Bumi Lestari
5. Sdr. LSM Warsi

IV. Asosiasi


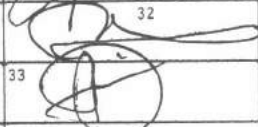
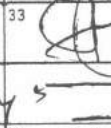
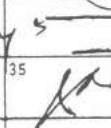
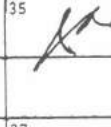
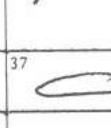
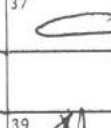
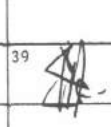
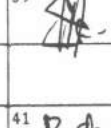
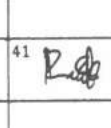
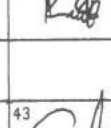
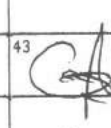
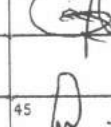
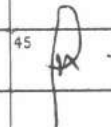
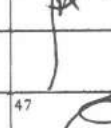
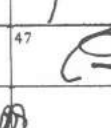
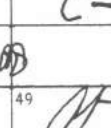
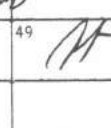
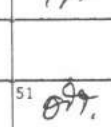
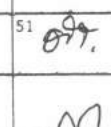
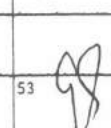
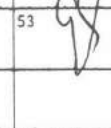
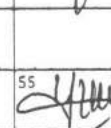
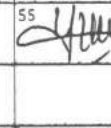
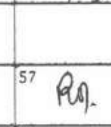
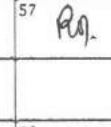
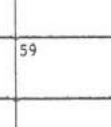
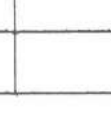
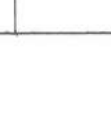

1. Sdr. Ka. Pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
2. Sdr. Ka. Pimpinan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO)
3. Sdr. Ka. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI)

V. Sekretaris dan Kabid di Lingkungan Dinas LH Prov. Sumbar

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : SELASA / 20 MARET 2018
 Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang
 Acara : Penjarangan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat.

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
1	Xulia Kristina D.	DLH PUPP Padang Pariaman	0812672458	1
2	WENI DARTI		08126156520	2
3	Musliha		08126700052	3
4	FADLI RAHMADI	WALHI	081270562979	4
5	Dopi Kuswanto	DLHK Mentawai	085274037493	5
6	R. Ivanda	DLH PPK	081328090952	6
7	Yopi Heriawan	DLH PPK	082388515101	7
8	Heantomas	DPKPLH SUL	085274985464	8
9	Emidaryati	DPEPLH Solok	081363255012	9
10	ELOARITA	Perkim LH Simpung		10
11	AUTIKA T.P.	"	081363472800	11
12	Marganof	PSLH UNSB	082384654325	12
13	Syaifuldin Icbmi	LSM Andalas Bumi Istri	081266074423	13
14	Evi Saniti	Perkim LH T. Datar	081774807476	14
15	T. Masfudin	DLH Padang	08126630020	15
16	Nozi Meilani	Perkim LH Pk. Pkr	08174128333	16
17	Nurmalasari	Din. Kes. PROV.	08126767304	17
18	Indrianti P. F. W. N.	PSLH - UNP	081766810041	18
19	Titis Erningsih	DLHPP SD Koh	08121974288	19
20	Susy Hertinda	DLHPP SD Kct	08126692168	20
21	Rizki D. S. dal	" SD Kct		21
22	Beni Lyan Purba	Oban	08117056284	22
23	YUAFITA	XCOMA	08126724502	23
24	ARLISON	PERKIM W. W. W. W.		24
25	Aprindan			25
26	Mawad Datin	Dinas ESDM	081363185384	26
27	Lia Lestari	Dinas LH Kota Pim	08116604662	27
28	Siti Uend	DLH RW		28
29	Siti			29
30	Dolmi Irvandi	Pinas LH Solok		30

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
31	Ari nesia	Kab So loka		31 
32	DARMAN	Pemdag		32 
33	Reini Afrani	DUA kota priaman		33 
34	ANDRIANI	MINAS KOSDI M BROS	08116603764	34 
35	ZARFIAN	GARKINTO SUMBAR	0811663697	35 
36	ATRIA YAHRIKA	DLHK MENTALAI	08527180889	36 
37	DINI MUDIKA	DLH Kab Dg an	08217451544	37 
38	PLON SEPRITAS	"		38 
39	DARDI ILQI	DPK PLII		39 
40	AGUS RIYANTO	"		40 
41	RIZKA PRATIKA	DPEPH SOLIG		41 
42	ADRA. S. N			42 
43	Esti PUTA	DEK. PROV.		43 
44	Thamrin	SLA prn.		44 
45	AFRIZON	W-opp dca ms		45 
46	Wandijanto	dlh pnsel.		46 
47	pani	+-		47 
48	Zanni Anggraini	DLH Prapara	08126830800	48 
49	SOSWATI	DLH PROV		49 
50	DESRIZAL	DLH PROV		50 
51	Dwi Elia	DLH PROV		51 
52	Zaki Fatramanisa	DLH PROV		52 
53	Yosmike Yusa	KABIL TL DLH BUN		53 
54	ROZA ?	DLH PROV		54 
55	Xulfa Charisya	- -		55 
56	Yan Fatihi	- -		56 
57	RINI RAHMA ATRI	DLH		57 
58	Yandi	- - -		58 
59	M. Taufik	- - -		59 
60	Rinadeswita	- - -		60 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 660 / 282 / TL / DLH-2018
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Narasumber dan
Fasilitator Penjaringan Isu

Padang, 2 Maret 2018

Kepada Yth :

1. Sdr. DR. Ardinis Arba'in
2. Sdri Veronica, ST

di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 118/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018, proses pemberian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas penilaian kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen berupa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
2. Mengacu kepada pedoman penyusunan dokumen IKPLHD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, perlu ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup yang didasarkan pada proses penjaringan isu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Proses penjaringan isu dimaksud akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Pukul 09.00 wib s.d selesai bertempat di ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan jadwal sebagaimana terlampir.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat menjadi narasumber dan memfasilitasi pelaksanaan penjaringan isu dimaksud, dapat kami informasikan bahwa panitia menyediakan honor yang standarnya sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Konfirmasi kesediaan harap disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang (e-mail : kws.dlhprovsumbar@gmail.com) atau kontak person Sdri. Roza Zulfita, ST (hp.081269030392) paling lambat tanggal 7 Maret 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.;

1. Bapak Gubernur Sumatra Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Untuk : 1. Sekretaris, Para Kabid, Kasi/Kasubag di Lingkup DLH
2. Sdr. Zaki Fatramansia, ST, MSI
3. Sdr. Dedi Harian, ST
4. Sdr. Andi Irawan, ST, MSI
5. Sdr. Dika Ramakaula, ST, MIL
6. Sdri. Rini Rahma Putri, ST
Tanggal : 26 Maret 2018
Perihal : Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Isi :

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 118/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengacu kepada pedoman penyusunan dokumen IKPLHD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, maka pada tanggal 20 Maret 2018 telah dilaksanakan penjaringan isu prioritas lingkungan hidup yang melibatkan pemangku kepentingan di Prov. Sumbar.
2. Berdasarkan proses penjaringan isu prioritas lingkungan hidup tersebut telah didapatkan isu prioritas yang akan dianalisis dalam DIKPLHD Prov. Sumbar Tahun 2017, meliputi :

Peringkat	Isu Prioritas	Total Scoring
1	Pencemaran Air	1051
2	Pengelolaan Sampah	1033
3	Alih Fungsi Lahan	1028
4	Pengelolaan Pertambangan	1028
5	Pengelolaan Hutan	990
6	Kebencanaan	989
7	Pengelolaan Wilayah Pesisir	959
8	Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati	958











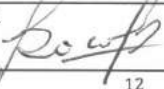

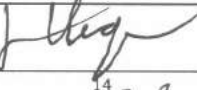

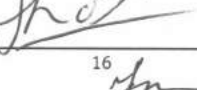

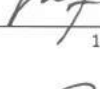
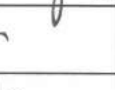


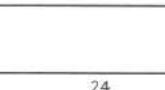
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami bermaksud mengundang Saudara untuk dapat hadir pada rapat :

Hari/tanggal : Kamis/29 Maret 2018
Pukul : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Agenda : 1. Pembahasan finalisasi isu prioritas lingkungan
2. Persiapan penyusunan DIKPLHD
3. Dan lain-lain dirasa perlu

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Hari/Tanggal : KAMIS / 29 MARET 2018
 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang
 Acara : Persiapan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
1	Ir. Siti Aisyah			1 
2	Petriawaty			2 
3	Ir. Novrita	Sekretaris		3 
4	Desrizal	TL		4 
5	Prisilla	TL		5 
6	Siska Wardeni	TL		6 
7	Dianarisma Izuda	TL		7 
8	Zaki Patransa	PGL D3PK		8 
9	M. Arief Noviady	Kasi Pencemaran		9 
10	Sosliati	TL		10 
11	Rozza L	TL		11 
12	Jermike Yuore	TL		12 
13	Tegah Arifianto			13 
14	Rini Rahma Putri	Umum		14 
15	DEZI Hertra	Koti pemeliharaan lingk		15 
16	Vianti Zami			16 
17	Thamrin	DLH prov.		17 
18	AULIA RAMADHAN	PGLBPA		18 
19	FEBI YENTI	SE PSHL		19 
20	Dedi Hanan	Pencemaran		20 
21	Dashil .sp			21 
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Untuk : 1. Sekretaris, Para Kabid, Kasi/Kasubag di Lingkup DLH
2. Sdr. Zaki Fatramansia, ST, MSi
3. Sdr. Dedi Harian, ST
4. Sdr. Andi Irawan, ST, MSi
5. Sdr. Dika Ramakaula, ST, MIL
6. Sdri. Rini Rahma Putri, ST
7. Sdri. Ardila Wirmanita Harpenasti, ST
Tanggal : 9 April 2018
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Pada Tanggal 29 Maret 2018

Isi :

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Pada Tanggal 29 Maret 2018 di Ruang Rapat Ka Dinas LH Prov. Sumbar yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lh Prov. Sumbar, **terlampir** bersama ini kami sampaikan hasil rapat dimaksud untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dalam penulisan DIKPLHD Prov. Sumbar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



**Hasil Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (DIKPLHD) Pada Tanggal 29 Maret 2018**

- 1) Penulisan dokumen IKPLHD akan melibatkan staf dan Kasi.
- 2) Koreksi penulisan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi sampai dengan Kabid yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada sekretariat DIKPLHD
- 3) Pembagian penulisan dan koreksi sebagai berikut :

Sistematika Penulian	Penulisan	Koreksi 1	Koreksi 2
Buku I Ringkasan Eksekutif	Siska		Yosmike Yusra
Buku II			
Cover	Zaki	Desrizal	Yosmike Yusra
Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan daftar Lamiran	Roza Zulfitra	Desrizal	Yosmike Yusra
BAB I Pedahuluan	Dika Ramakaula	Siska	Yosmike Yusra
BAB II Penetapan Isu Prioritas	Desrizal		Yosmike Yusra
BAB III Analisis PSR			
Sub. Bab Tata Guna Lahan	Andi Irawan		Teguh Ariefianto
Sub. Bab Kualitas Air	Dedi Harian	M. Arief Noviady	Teguh Ariefianto
Sub. Bab Kualitas Udara	Ardila Wirmanita Harpenasti		Teguh Ariefianto
Sub. Bab Resiko Bencana	Aulia Ramahdani		Petriawaty
Sub. Bab Perkotaan	Zaki Fatramansia	Vianti Zami	Petriawaty
BAB IV Inovasi Daerah			
Sub. Bab Inovasi Unggulan			
GSB	Vianti Zami		Petriawaty
Pengelolaan Sungai Secara Terpadu (Sungai Batang Agam)	M. Arief Noviady		Teguh Ariefianto
Pengelolaan Hutan Nagari	Devi Hendra		Yosmike Yusra
PROPERDA	M. Arief Noviady		Teguh Ariefianto
Kebencanaan	Aulia Ramahdani		Petriawaty
Inovasi Lainnya merupakan Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Juknis. Kita menamakan sebagai Inovasi lainnya karena sebelumnya kita juga menyajikan Inovasi Unggulan yang tidak diatur didalam juknis. Inovasi lainnya ini meliputi :	Rini Rahma Putri	Dasril	Petriawaty

Peningkatan kelembagaan seperti APBD, peningkatan kapasitas personil,	Rini Rahma Putri	Widian Nigrum	Novarita
pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik	Rini Rahma Putri	Widian Nigrum	Novarita
BAB V Penutup	Desrizal		Yosmike Yusra
Daftar pusatkan dan kelengkapan lampiran (SK Suvervisi, Surat Pernyataan Isu, Daftar riwayat penulsa (ahli dari pihak ke 3), Peta wilayah administrasi dan peta lainnya yang relevan, Metoda pengolahan data, Data Utama dan Data Tambahan dll	Sekretariat (Roza, Sosliati dan Prisilla)	Desrizal	Yosmike Yusra

- 4) Editor ; Ka. Dinas, Para. Kabid, Kasi KWS dan Staf Bidang TL
- 5) Anallisa masih memakai pendekatan PSR (*Pressure, Status* dan *Response*) dengan menggunakan perbandingan antar waktu, antar lokasi, stasistik sederhana dan perbandingan dengan baku mutu.
- 6) Penulis akan dipasok dengan data sesuai dengan subtansi yang akan dianalisis, penulis agar mengkoordinasikan terkait subtansi penulisan baik *Pressure, Status* dan *Response* maupun data yang belum tersedia ke Kasi terkait dan Kasi wajib membantu.
- 7) Ketentuan Pengetikan/analisa sesuai Juknis
 - a. Batas Kiri- Batas Kanan- Batas Bawah- Batas Atas :4 cm – 3 cm – 3 cm – 3 cm
 - b. Huruf Times New Roman 12 poin
 - c. Spasi 1,5 (line spcaing = 1,5 lines)
 - d. Penulisan kabupaten dipanjangkan tidak boleh disingkat (contoh : Kabupaten Lima Puluh Kota; Provinsi Sumatera Barat)
 - e. Di dalam analisa tidak diperbolehkan tabel sama persis dengan tabel data, harus dilakukan pengolahan terhadap tabel data tersebut. Olahan tabel data dapat dalam bentuk grafik atau tabel hasil oleh dari tabel data tersebut.
 - f. Sumber tebal olahan atau grafik harus ditulis dari tabel data berapa (contoh : *Sumber ; olahan tabel 42 data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat,2017*)
 - g. Dalam penulisan tidak perlu banyak teori (contoh : air adalah.....; udara adalah.....)
 - h. Sebelum menulis sub bahasan utama seperti Tata Guna Lahan terlebih dahulu diberikan pragraf pembuka yang membahas keterkaitanya dengan isu prioritas lingkungan.
 - i. Tulisan dalam bentuk satu columns (tidak dua columns)
 - j. Tabel olahan dalam bentuk grafik diserahkan ke sekretariat bersama file olahannya.

- k. Tulisan diserahkan ke sekretariat dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang telah diparaf oleh koreksi 1 dan Koreksi 2.
- l. Jadwal Penyusunan DIKPLHD sebagaimana tabel berikut

No	Agenda	Target Penyelesaian
1.	Pembuatan cover	2 s/d 6 April 2018
2.	Menulis Buku Utama	2 s/d 8 April 2018
3.	Konsinyer (tentative di Bukittinggi)	9 s/d 11 April 2018 atau 11 s/d 13 April 2018
4.	Buku Ringkasan Eksekutif	9 s/d 13 April 2018
5.	Koreksi Ka. Dinas	13 s/d 18 April 2018
6.	Penyempurnaan hasil koreksi Ka. Dinas	18 April s/d 20 April 2018
7.	Lampiran Data	6 s/d 20 April 2018
8.	Tandatangan Kata Pengantar dan Surat Pernyataan Isu oleh Gubernur	20 April 2018 (tanpa buku)
9.	Finalisasi DIKPLHD	20 s/d 25 April 2018
10.	Cetak dokumen untuk dikirim ke P3E dan KLHK	25 s/d 30 April 2018
11.	Pengiriman buku ke P3E dan KLHK Baik Softcopy maupun Hardcopy	1 s/d 5 Mei 2018



Ka. Bidang Kata Lingkungan
 Yosmike Yusra, SE, MSi
 Pembina NIP. 19731129 200212 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/235/SP/TL/DLH-2018

I. Dasar

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
4. Persetujuan Ka. Dinas LH Prov. Sumbar pada Nota Kepala Bidang Tata Lingkungan tertanggal 6 April 2018.

II. Menugaskan Kepada

No	Tim I	Tim II	Tim III	Tim Pengarah dan Penajaman Analisis
1	Yosmike Yusra, SE, MSI	Teguh Ariefianto, ST	Dasril, SP	Drs. Buastanul Arifin
2	Desrizal, ST	Andi Irawan, ST, MT	Devi Hendra, S.Si	DR. Marganof
3	Siska Wardeni,ST	Dedi Harian, ST	Ir. Vianti Zami, M.Si	DR. Mahdi
4	Dikarama Kaula, ST, MIL	Aulia Rahmadani, S.Si, M.Si	M. Arief Noviany	Drs. Khairul
5	Prisilla Yumeri, SE	Zaki Fatramansia, ST, MT	Rini Rahma Putri, ST	DR. Darmawan
6	Sosliati		Widian Nigrum, SPt	Syaiful Islami, SSI, MSI

III. Tujuan

1. Tim I melakukan tugas : Finalisasi Draf Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah (DIKPLHD) Prov. Sumbar (Ringkasan Eksekutif, BAB I, BAB II, BAB V, Kelengkapan Lampiran, dll)
2. Tim II melakukan tugas : Finalisasi Draf Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah (DIKPLHD) Prov. Sumbar (Bab III)
3. Tim III melakukan tugas : Draf Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah (DIKPLHD) Prov. Sumbar (Bab IV)
4. Tim Pengarah dan Penajaman Tullsan melakukan tugas : mengarahkan dan mempertajam analisis dalam rangka Finalisasi Draf Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah (DIKPLHD) Prov. Sumbar
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

IV. Lokasi/Tempat

Kota Bukittinggi

V. Jadwal

Tanggal 11 s/d 13 April 2018

VI. Pembiayaan

Pembiayaan dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Tahun 2018 Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Padang
pada tanggal 8 April 2018



Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk.I

Nip. 19670928 199203 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Untuk : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Dari : Kepala Bidang Tata Lingkungan
 Tanggal : 6 April 2018
 Perihal : Mohon Persetujuan untuk Melakukan Pertemuan Penulis dalam penulisan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) di Bukittinggi

Isi:

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Rapat Persiapan Penyusunan DIKPLHD pada tanggal 29 Maret 2018 di Ruang Rapat Ka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, bersama ini kami sampaikan kepada Ibu hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penulis telah melakukan penulisan draf awal dokumen IKPLHD Prov. Sumbar dengan tugas dari masing-masing anggota dan tenaga ahli sebagai berikut :

No	Koordinator	Bab/Sub Bab Penulisan	Penulis	Pengarah dan Pertajaman Analisis
I	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Ringkasan Eksekutif	Siska Wardeni, ST	Yosmike Yusra, SE, M.Si
		BAB I	Dikarama Kaula, ST, MIL	Syaiful Islami, SSI, MSI
		BAB II dan BAB V	Desrizal, ST	Drs. Bustanul Arifin, MSI
		Kata Pengantar/Daftar Isi/Daftar Tabel/Daftar Gambar/Lampiran dan Data-data	Prisilla Yumeri, SE dan Sosliati	
II	Teguh Ariefianto, ST	BAB III		DR. Darmawan
		Tata Guna Lahan	Andi Irawan, ST, MT	Drs. Khairul
		Kualitas Air	Dedi Harian, ST	Drs. Buastanul Arifin, MSI
		Kualitas Udara	Dikarama Kaula, ST, MIL	DR. Marganof
		Resiko Bencana	Aulia Rahmadani, S.Si, M.Si	DR. Mahdi
		Perkotaan	Zaki Fatramansia, ST, MT	
III	Dasril, SP	BAB IV		DR. Darmawan
		Pengelolaan Hutan Nagari	Devi Hendra, S.Si	Drs. Khairul Drs. Buastanul Arifin, MSI
		GSB	Ir. Vianti Zami, M.Si	DR. Marganof
		Pengelolaan Sungai Secara Terpadu (Sungai Batang Agam)	M. Arief Novandy	DR. Mahdi
		PROPERDA		
		Kembencanaan	Aulia Rahmadani, S.Si, M.Si	
		Inovasi sesuai Juknis	Rini Rahma Putri, ST	

2. Mengingat DIKPLHD ini nantinya akan dilakukan penilaian oleh KLHK dan menjadi dokumen yang akan dipublikasikan secara luas, maka dipandang perlu dilakukan penajaman analisis dan pengarahannya dari unsur perguruan tinggi sehingga DIKPLHD ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Penulisan yang diterbitkan oleh KLHK.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka akan dilakukan pembahasan terkait dengan finalisasi draf DIKPLHD yang akan dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 11 s/d 13 April 2018 di Kota Bukittinggi.
4. Adapun pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Jika Ibu berkenan, mohon kiranya persetujuan Ibu terhadap nota dinas ini dan sekaligus menandatangani Surat Perintah terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Ibu diucapkan terima kasih.



Kasid Tata Lngk :

acc dilaksanakan

6/4-18

A close-up photograph of a green fern frond with several water droplets on its surface, set against a blurred green background. The frond is fan-shaped and has a central stem with many smaller leaflets branching out.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Telp. 0751 - 7055231 Fax. 0751 70445232
<http://dlh.sumbarprov.go.id>